

BAB III

PELAKSANAAN KERJA MAGANG

3.1 Kedudukan dan Koordinasi

Pelaksanaan praktik kerja magang dilakukan di PT Ofisi Prima Konsultindo yang berlokasi di AKR Tower Lantai 17A, Jalan Panjang No. 5, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Pelaksanaan praktik kerja magang dilaksanakan selama 3 bulan yaitu dari tanggal 14 Juni 2021 hingga 14 September 2021. Selama masa magang dilaksanakan, penulis berada pada posisi *junior consultant* dibawah arahan Ibu Esther Listya Novanty selaku *partner* di PT Ofisi Prima Konsultindo. *Senior consultant* dari PT Ofisi Prima Konsultindo sangat membantu dalam pelaksanaan kerja magang antara lain memberikan penjelasan serta pemahaman mengenai tugas yang akan diberikan dan memberikan arahan jika penulis mengalami kendala selama proses pengerjaan tugas. Setelah pekerjaan yang diberikan telah selesai maka *senior consultant* akan memeriksa kembali pekerjaan tersebut untuk memastikan apakah pekerjaan yang dilakukan telah benar atau sesuai.

3.2 Tugas yang Dilakukan

Selama pelaksanaan praktik kerja magang, terdapat beberapa tugas yang diberikan terkait dengan perpajakan dan akuntansi. Berikut adalah tugas yang dikerjakan:

3.2.1 Melakukan Rekapitulasi SPT PPh Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan pada Wajib Pajak atas penghasilan yang berkaitan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Penghasilan yang dimaksud yaitu upah, gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dalam bentuk apapun. Tugas dalam melakukan rekapitulasi PPh 21 ditujukan kepada PT AC, PT DC, Gereja K, PT PAS, PT PT, PT GL, PT SRM, PT DM, PT AF, dan PT RCD. Selama periode magang yaitu kurang lebih 67 hari tugas tersebut dilakukan sebanyak 6 kali. Tujuan dari dilakukannya rekapitulasi SPT Masa PPh Pasal 21 yaitu memudahkan dalam penyajian dan meringkas transaksi yang terkait PPh 21 selama satu tahun sehingga akan memudahkan dalam mengetahui besarnya PPh Pasal 21 yang dilaporkan dan disetorkan perusahaan. Dokumen yang dibutuhkan dalam merekapitulasi PPh Pasal 21 yaitu Bukti Penerimaan Elektronik (BPE), Bukti Penerimaan Negara, dan dokumen yang berkaitan dengan SPT Masa PPh Pasal 21. Bukti Penerimaan Negara adalah dokumen yang diterbitkan oleh bank atau pos persepsi terkait dengan transaksi penerimaan negara dengan menggunakan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) sebagai sarana administrasi lain yang kedudukannya sama dengan surat setoran. Sedangkan Bukti Penerimaan Elektronik adalah informasi yang terdiri dari nama, Nomor Pokok Wajib Pajak, tanggal, waktu, Nomor Tanda Terima Elektronik, dan Nomor Transaksi Pengiriman. Berikut adalah cara melakukan rekapitulasi PPh Pasal 21:

- 1) Mendapatkan dokumen terkait SPT Masa PPh Pasal 21 klien baik normal maupun pembetulan (Formulir 1721), Bukti Penerimaan Negara, dan Bukti Penerimaan Elektronik.
- 2) Menerima *file Excel* yang didalamnya terdapat format *table* (masa, status pembetulan, jumlah penerima penghasilan, penghasilan bruto, jumlah penerima penghasilan, jumlah pajak yang dipotong, total pajak yang disetorkan, tanggal lapor, tanggal bayar, dan status SPT) yang digunakan untuk nantinya akan di *input* berdasarkan dokumen yang diberikan oleh klien.
- 3) Melakukan *input* SPT Masa PPh Pasal 21 baik status normal atau pembetulan. Pada kolom status pembetulan, masa, jumlah penerima penghasilan, penghasilan bruto, dan jumlah pajak yang dipotong angkanya berasal dari Formulir 1721 SPT Masa PPh Pasal 21. Kolom tanggal lapor dan status SPT angkanya diperoleh dari Bukti Penerimaan Elektronik. Sedangkan untuk kolom tanggal bayar diperoleh dari Bukti Penerimaan Negara.
- 4) Melakukan rekapitulasi PPh Pasal 21 status normal dan pembetulan sampai dengan banyaknya dokumen terkait dengan SPT Masa PPh Pasal 21 yang telah diberikan oleh pembimbing lapangan (setahun atau tidak sampai setahun).

3.2.2 Melakukan Rekapitulasi SPT dan *Grouping* PPh Pasal 23

Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan pajak yang dipotong dari penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak badan maupun orang pribadi

dan BUT yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau kegiatan selain yang sudah dipotong PPh Pasal 21. Penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 23 sesuai dengan Pasal 23 UU No. 36 Tahun 2008 yaitu dividend, bunga, royalti, hadiah, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan, dan jasa lain sesuai dengan PMK No. 141/PMK.03/2015. PPh Pasal 23 harus disetorkan pemotong pajak paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan terutangnya pajak dan wajib menyampaikan SPT Masa paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Tugas melakukan rekapitulasi PPh Pasal 23 dilaksanakan untuk PT AC, PT DC, PT PAS, PT PT, PT GL, PT SRM, PT DM, PT AF, dan PT RCD tujuannya untuk memudahkan dalam penyajian dan meringkas transaksi yang terkait PPh 23 selama satu tahun sehingga akan memudahkan dalam mengetahui besarnya PPh Pasal 23 yang dilaporkan dan disetorkan perusahaan. Selama periode magang yaitu kurang lebih 67 hari tugas tersebut dilakukan sebanyak 5 kali. Dokumen yang dibutuhkan dalam merekapitulasi PPh Pasal 23 yaitu Bukti Penerimaan Elektronik (BPE), Bukti Penerimaan Negara, dan dokumen yang berkaitan dengan SPT Masa PPh Pasal 23 (formular 1724). Berikut adalah cara melakukan rekapitulasi PPh Pasal 23:

- 1) Mendapatkan dokumen terkait SPT Masa PPh Pasal 23 klien baik normal maupun pembetulan (Formulir 1724), Bukti Penerimaan Negara, dan Bukti Penerimaan Elektronik.
- 2) Menerima *file Excel* yang didalamnya terdapat format *table* (massa, status pembetulan, jasa yang berkaitan dengan PPh 23, total DPP,

besarnya pajak PPh 23, tanggal bayar, NTPN, tanggal lapor dan status SPT) yang digunakan untuk nantinya akan di *input* berdasarkan dokumen yang diberikan oleh klien.

- 3) Melakukan *input* SPT Masa PPh Pasal 23 baik status normal atau pembetulan. Pada kolom status pembetulan, massa, jasa yang berkaitan dengan PPh 23, total DPP, dan besarnya pajak PPh 23 angkanya berasal dari Formulir 1724 SPT Masa PPh Pasal 23. Kolom tanggal lapor dan status SPT angkanya diperoleh dari Bukti Penerimaan Elektronik. Sedangkan untuk kolom tanggal bayar dan NTPN diperoleh dari Bukti Penerimaan Negara.
- 4) Melakukan rekapitulasi PPh Pasal 23 status normal dan pembetulan sampai dengan banyaknya dokumen terkait dengan SPT Masa PPh Pasal 23 yang telah diberikan oleh pembimbing lapangan (setahun atau tidak sampai setahun).

Proses *grouping* ditujukan untuk mengelompokkan akun – akun dengan tujuan agar dapat menunjukkan unsur – unsur aktiva, kewajiban, modal, pendapatan, beban, dan lain sebagainya, dapat menunjukan pertumbuhan serta pengurangan tiap unsur akun, dan sebagai sumber informasi terhadap unsur tiap akun dan perubahannya yang dibutuhkan nantinya dalam penyusunan laporan keuangan. Pada saat melakukan proses *grouping* data yang dibutuhkan yaitu terkait dengan masa dilakukannya *grouping*, total DPP per nama akun biaya, total PPh 23 per nama akun biaya, dan nama akun biaya berdasarkan kolom data *list* bukti potong PPh

Pasal 23 yang telah diberikan oleh pembimbing lapangan. Tugas melakukan *grouping* PPh Pasal 23 dilaksanakan untuk PT DM. Selama periode magang yaitu kurang lebih 67 hari tugas tersebut dilakukan sebanyak 1 kali. Berikut adalah proses *grouping* PPh Pasal 23:

- 1) Menerima *file Excel* yang didalamnya terdapat format *table* (massa, nomor dokumen, nama vendor, NIK, NPWP, alamat, *invoice number*, *VAT number*, tanggal FP, nomor bukti potong, tanggal bukti potong, DPP, tarif pajak, PPh 23, KAP/KJS, keterangan transaksi, nomor akun biaya, dan nama akun biaya) yang digunakan untuk nantinya akan di *input* berdasarkan dokumen yang diberikan oleh klien.
- 2) Membuat *sheet* baru dalam excel dan membuat format *tabel* baru yang didalamnya terdapat kolom massa, nama akun biaya, DPP, dan besarnya pajak PPh 23.
- 3) Melakukan *input* data yang berasal dari *file excel* asli dari pembimbing tetapi tidak memasukan semua data hanya data massa, nama akun biaya, DPP, dan besarnya pajak PPh 23 saja yang di *input*.
- 4) Melakukan *grouping* hingga semua cabang yang diberikan.

3.2.3 Melakukan *Input* Matriks Perhitungan Sehubungan dengan Sengketa Pajak PPh Pasal 23

Sengketa pajak adalah sengketa yang timbul pada bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai dampak dikeluarkannya keputusan yang bisa diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak sesuai peraturan perundang – undangan

perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan sesuai dengan undang – undang penagihan pajak menggunakan surat paksa. Tujuan dalam membuat matriks yaitu untuk melakukan perincian sehubungan dengan perhitungan yang nantinya akan digunakan pada saat ke Pengadilan Pajak. Tugas ini dilakukan untuk PT DHR. Selama periode magang yaitu kurang lebih 67 hari tugas tersebut dilakukan sebanyak 2 kali. Dokumen yang diperlukan yaitu *payment voucher*, *purchase order*, faktur pajak, surat jalan, dan *invoice*. Berikut langkah yang diperlukan untuk membuat matriks PPh Pasal 23:

- 1) Menerima data asli dari klien yang berisi *payment voucher*, *purchase order*, faktur pajak, surat jalan, dan *invoice*.
- 2) Menerima format *table Excel* dari pembimbing lapangan.
- 3) Melakukan *input* data asli ke *table excel* yang telah disediakan.
- 4) Memberikan hasil *input* matriks kepada pembimbing lapangan untuk dilakukan *review*.

3.2.4 Melakukan Rekapitulasi Bukti Penerimaan Negara SPT PPh Pasal 25

Pajak Penghasilan Pasal 25 merupakan angsuran pajak penghasilan yang harus dibayarkan sendiri oleh Wajib Pajak tiap bulannya dalam tahun pajak berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam UU No. 36 Tahun 2008 yang membahas mengenai pajak penghasilan. Angsuran yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak tersebut dijadikan kredit pajak terutang atas seluruh penghasilan Wajib Pajak pada tahun pajak yang akan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan. Tujuan melakukan

rekapitulasi SPT PPh Pasal 25 yaitu mengetahui besarnya PPh Pasal 25 yang dilaporkan dan disetorkan perusahaan serta untuk meringkas transaksi yang terkait PPh 25. Dokumen yang dibutuhkan dalam merekapitulasi PPh Pasal 25 yaitu Bukti Penerimaan Negara (BPN). Bukti Penerimaan Negara adalah dokumen yang diterbitkan oleh bank atau pos persepsi terkait dengan transaksi penerimaan negara dengan menggunakan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) sebagai sarana administrasi lain yang kedudukannya sama dengan surat setoran. Tugas dalam melakukan rekapitulasi PPh 25 ditujukan kepada PT AC, PT DM, dan PT RCD. Selama periode magang yaitu kurang lebih 67 hari tugas tersebut dilakukan sebanyak 4 kali. Berikut merupakan proses rekapitulasi Bukti Penerimaan Negara (BPN) PPh Pasal 25:

- 1) Menerima *file* Bukti Penerimaan Negara PPh Pasal 25 dari pembimbing lapangan yang berasal dari klien.
- 2) Menerima *file Excel* dari pembimbing lapangan dengan format tabel (masa, tanggal bayar, NTPN, dan PPh terutang) yang sudah tersedia.
- 3) Melakukan *input* data yang berasal dari Bukti Penerimaan Negara.
- 4) Melakukan rekapitulasi PPh Pasal 25 hingga masa yang ditentukan.

3.2.5 Melakukan Rekapitulasi SPT PPh Final

Pajak Penghasilan Final atau PPh Pasal 4 Ayat 2 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan bunga deposito, transaksi penjualan saham, diskonto obligasi, hadiah undian, persewaan, jasa konstruksi, pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, bunga simpanan, dan dividend. Tujuan

melakukan rekapitulasi PPh Final yaitu memudahkan dalam penyajian dan meringkas transaksi yang terkait PPh Final selama satu tahun sehingga akan memudahkan dalam mengetahui besarnya PPh Final yang dilaporkan dan disetorkan perusahaan.. Dokumen yang diperlukan Bukti Penerimaan Elektronik, Bukti Penerimaan Negara, dokumen yang terkait dengan SPT PPh dan Pasal 4 Ayat 2. Tugas dalam melakukan rekapitulasi PPh Final ditujukan kepada PT PAS, PT PT, PT GL, PT DM, dan PT AF. Selama periode magang yaitu kurang lebih 67 hari tugas tersebut dilakukan sebanyak 3 kali. Berikut merupakan proses melakukan rekapitulasi SPT PPh Final:

- 1) Mendapatkan dokumen dari pembimbing lapangan terkait SPT Masa PPh Final klien Bukti Penerimaan Negara, dan Bukti Penerimaan Elektronik.
- 2) Menerima *file Excel* yang didalamnya terdapat format *table* (masa, bunga deposito/tabungan, transaksi jual saham, bunga/diskonto obligasi dan surat berharga, hadiah undian, persewaan tanah dan bangunan, bunga simpanan, transaksi derivatif, dividen Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri, total DPP, PPh Final, tanggal bayar, NTPN, tanggal lapor, dan status SPT) yang digunakan untuk nantinya akan di *input* berdasarkan dokumen yang diberikan oleh klien.
- 3) Melakukan *input* SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat 2. Pada kolom status masa, bunga deposito/tabungan, transaksi jual saham, bunga/diskonto obligasi dan surat berharga, hadiah undian, persewaan tanah dan

bangunan, bunga simpanan, transaksi derivatif, dividen Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri, total DPP, PPh Final angkanya berasal dari SPT Masa PPh Final. Kolom tanggal lapor dan status SPT angkanya diperoleh dari Bukti Penerimaan Elektronik. Sedangkan untuk kolom tanggal bayar dan NTPN diperoleh dari Bukti Penerimaan Negara.

- 4) Melakukan rekapitulasi PPh Final hingga masa yang ditentukan.

3.2.6 Melakukan Rekapitulasi dan Ekualisasi PPN

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi dalam negeri oleh pribadi, badan, ataupun pemerintah. Penyetoran PPN Kurang Bayar memiliki jatuh tempo paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Pelaporan PPN dapat dilakukan secara online menggunakan aplikasi *e-SPT*. Tanggal jatuh tempo dalam pelaporan yaitu paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Tujuan dilakukannya rekapitulasi yaitu dalam mengetahui besarnya PPN yang dilaporkan dan disetorkan perusahaan. Dokumen yang diperlukan dalam melakukan rekapitulasi adalah Bukti Penerimaan Elektronik, Bukti Penerimaan Negara, dan dokumen terkait dengan SPT PPN. Tugas melakukan rekapitulasi PPN ditujukan kepada PT PT, PT GL, PT AF, PT NS, dan PT RCD. Selama periode magang yaitu kurang lebih 67 hari tugas tersebut dilakukan sebanyak 1 kali. Berikut merupakan proses rekapitulasi PPN:

1. Mendapatkan dokumen dari pembimbing lapangan terkait SPT Masa PPN klien Bukti dan Bukti Penerimaan Elektronik.
2. Menerima *file Excel* yang didalamnya terdapat format *table* (masa, pajak keluaran, pajak masukan, kompensasi masa pajak sebelumnya, jumlah kompensasi, kurang bayar/ lebih bayar, tanggal lapor, tanggal bayar, dan NTPN) yang digunakan untuk nantinya akan di *input* berdasarkan dokumen yang diberikan oleh klien.
3. Melakukan *input* SPT Masa PPN. Pada kolom masa, pajak masukan, pajak keluaran, kompensasi pajak sebelumnya, jumlah kompensasi, dan jumlah kurang bayar/ lebih bayar nominalnya berasal dari SPT Masa PPN. Sedangkan pada kolom tanggal lapor dan status SPT angkanya diperoleh dari Bukti Penerimaan Elektronik. Sedangkan untuk kolom tanggal bayar dan NTPN diperoleh dari Bukti Penerimaan Negara.
4. Melakukan rekapitulasi hingga masa yang ditentukan.

Ekualisasi dalam perpajakan adalah proses dilakukannya pengecekan kesesuaian satu jenis pajak dengan jenis pajak lain yang mempunyai hubungan. Tujuan dilakukannya ekualisasi PPN yaitu mengetahui besarnya selisih perhitungan antara yang dilaporkan dengan yang tertera pada SPT Masa PPN yang terlampir pada *general ledger* berdasarkan *file* ekualisasi yang telah diterima. Tugas untuk melakukan ekualisasi ditujukan kepada PT PT. Selama periode magang yaitu kurang

lebih 67 hari tugas tersebut dilakukan sebanyak 1 kali. Berikut adalah proses ekualisasi PPN:

- 1) Menerima *file excel* dari pembimbing lapangan yang didalamnya sudah terdapat tabel (masa, DPP, PPN, DPP+PPN, selisih, nominal, DPP SPT Masa, PPN SPT Masa, dan selisih total).
- 2) Mengisi bagian tabel DPP SPT Masa, PPN SPT Masa, dan selisih total.
- 3) Melakukan pengecekan apakah pada kolom DPP, PPN, , DPP+PPN, selisih, dan nominal terdapat perbedaan yang signifikan dengan kolom DPP SPT Masa, PPN SPT Masa, dan selisih total.
- 4) Menginput hingga bulan Desember.

3.2.7 Melakukan Pengecekan Tanda Terima Penyerahan

Tanda terima penyerahan dokumen digunakan sebagai bukti terjadinya suatu transaksi telah diterimanya dokumen, barang, uang, atau jasa dari pihak satu ke pihak lainnya. Tanda terima penyerahan dokumen atau surat peringatan 1 dan 2 dalam perpajakan adalah daftar dokumen, buku, catatan yang belum dipinjamkan oleh Wajib Pajak dalam rangka pemeriksaan. Tujuan dilakukannya pengecekan tanda terima penyerahan yaitu untuk memastikan jika daftar buku, dokumen, dan catatan yang dibutuhkan dalam pemeriksaan sudah sesuai dan tersedia. Tugas melakukan pengecekan tanda terima penyerahan atau surat peringatan 1 dan 2 dilakukan kepada PT PT. Selama periode magang yaitu kurang lebih 67 hari tugas tersebut dilakukan sebanyak 2 kali. Dokumen yang diperlukan dalam melakukan pengecekan

tanda terima penyerahan adalah dokumen surat peringatan 1 dan 2. Berikut merupakan proses pengecekan tanda terima penyerahan dokumen:

- 1) Menerima *file* surat peringatan 1 dan 2 dari pembimbing lapangan.
- 2) Membuat tabel pada *excel* yang berisi jenis buku, dokumen, dan catatan berdasarkan surat peringatan 1 dan 2.
- 3) Memberikan hasil kepada pembimbing lapangan untuk dilakukan *review*.

3.2.8 Input e-SPT PPh Pasal 21

Elektronik SPT (e-SPT) adalah sebuah aplikasi yang dibuat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam rangka untuk memudahkan Wajib Pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Salah satu aplikasi e-SPT yaitu e-SPT PPh Pasal 21. PPh Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan pada Wajib Pajak atas penghasilan yang berkaitan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Penghasilan yang dimaksud yaitu upah, gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dalam bentuk apapun. Tujuan dilakukan *penginputan* e-SPT PPh Pasal 21 yaitu sebagai surat pemberitahuan agar Wajib Pajak melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan PPh Pasal 21. Tugas melakukan *penginputan* e-SPT PPh Pasal 21 ditujukan pada Gereja K, CV A, PT GJY, PT KAT, PT GA, PT ACM, PT KIK, dan PT ES. Selama periode magang yaitu kurang lebih 67 hari tugas tersebut dilakukan sebanyak 6 kali. Dokumen yang diperlukan saat melakukan *penginputan* e-SPT PPh Pasal 21 adalah *database* perusahaan terkait dan Bukti Penerimaan Negara (BPN). Berikut merupakan proses *penginputan* e-SPT PPh Pasal 21:

- 1) *Instal* aplikasi e-SPT PPh Pasal 21/26.
- 2) Buka aplikasi e-SPT PPh Pasal 21/26.
- 3) Memilih *database* yang akan digunakan lalu klik *database* untuk membukanya dan melakukan *login database* dengan mengisi *username* dan *password*.
- 4) Jika *database* sudah terbuka pilih SPT dan buat SPT baru dengan mengisi masa pajak yang diperlukan.
- 5) Klik buat SPT.
- 6) Pilih isi SPT lalu klik daftar pemotongan pajak (1721-1) kemudian pilih Satu Masa Pajak. Jika ingin melakukan *input* data transaksi klik Tambah untuk melakukan pengisian penghasilan bagi pegawai tetap.
- 7) Isikan data nomor NPWP, nama, kode objek pajak, jumlah penghasilan bruto, dan PPh dipotong lalu klik simpan.
- 8) Pastikan semua data pegawai tetap sudah terisi sesuai dengan jumlah pegawai tetap.
- 9) Isi juga daftar pegawai tetap yang penghasilannya tidak lebih PTKP dengan isi pada kolom jumlah pegawai dan jumlah penghasilan bruto lalu klik simpan.
- 10) Setelah proses pengisian SPT selesai selanjutnya pilih menu isi SPT pilih SPT Induk (1721) maka akan menampilkan jumlah pajak terutang.

- 11) Pada tab SPT Induk pilih “D. Lampiran *Check List* yang akan dilampirkan” dan “E. Pernyataan dan TTD Pemotong” lalu isi kolom tempat sesuai daerah lalu klik simpan dan cetak.
- 12) Selanjutnya pajak yang terutang harus dibayarkan terlebih dahulu untuk memperoleh nomor NTPN yang dapat dilihat dari Bukti Penerimaan Negara. Setelah mendapatkan nomor NTPN langkah berikutnya yaitu memasukan data tersebut ke dalam daftar SSP dengan pilih menu isi SPT lalu pilih daftar SSP setelah selesai pilih simpan dan kembali ke tampilan awal.
- 13) Pilih menu cetak lalu pilih formulir SPT dan klik formulir apa saja yang akan dicetak (1721-1, 1721, dan Daftar SSP).
- 14) Setelah *file* terbuka lalu pilih menu *export report* untuk menyimpan formulir.

3.2.9 Melakukan Rekapitulasi Aset dan Liabilitas dari *General Ledger*

Aset merupakan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dalam melakukan bisnis. Bisnis menggunakan aset dalam melakukan aktivitas produksi maupun penjualan. Karakteristik dari aset yaitu memberikan manfaat di masa depan. Sedangkan Liabilitas adalah klaim terhadap aset berupa hutang dan kewajiban yang ada. Suatu bisnis biasanya meminjam uang dan membeli barang dagangan secara kredit. *General ledger* adalah kumpulan transaksi berisi catatan semua transaksi keuangan. Tujuan dilakukannya rekapitulasi *general ledger* yaitu *mereview* untuk memastikan bahwa data yang tersajikan benar dan mudah disajikan. Tugas melakukan

rekapitulasi *general ledger* ditujukan kepada Rumah Sakit RS. Selama periode magang yaitu kurang lebih 67 hari tugas tersebut dilakukan sebanyak 2 kali. Dokumen yang diperlukan dalam melakukan rekapitulasi *general ledger* adalah *file excel* yang diberikan oleh pembimbing lapangan yang berisikan nama akun aset dan liabilitas. Berikut merupakan langkah dalam melakukan rekapitulasi aset dan liabilitas dari *general ledger*:

- 1) Menerima *file excel* dari pembimbing lapangan.
- 2) Membuat *file excel* baru yang berisikan tabel (bulan, kode akun, deskripsi akun, kategori akun, dan jumlah).
- 3) Melakukan rekapitulasi dari *file* pembimbing lapangan dengan tabel yang telah dibuat berdasarkan urutan kode akun.
- 4) Melakukan rekapitulasi hingga kode akun habis.

3.2.10 Melaporkan Surat Pemberitahuan dengan *e-Filing*

Setiap Wajib Pajak orang pribadi maupun badan memiliki kewajiban untuk melakukan pelaporan SPT sesuai yang telah diatur oleh undang – undang. Pelaporan SPT dapat dilakukan secara manual maupun elektronik, jika dilakukan secara manual maka Wajib Pajak datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) lalu akan mengisi formulir yang dibutuhkan. Opsi selanjutnya yaitu secara elektronik dengan melakukan pelaporan secara *online* melalui *e-Filing*. Aplikasi *e-Filing* merupakan cara penyampaian Surat Pemberitahuan secara elektronik yang dilakukan secara *online* yang dapat diakses melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak yaitu www.djponline.pajak.go.id. Pada saat menggunakan *e-Filing* yang

dibutuhkan adalah dokumen SPT yang memiliki format CSV dan SPT PPh Pasal 21 dalam format *pdf*. Tujuan dilakukannya pelaporan adalah melaksanakan kewajiban Wajib Pajak dalam hal pelaporan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan perpajakan yang berlaku. Tugas melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan ditujukan kepada PT DC. Selama periode magang yaitu kurang lebih 67 hari tugas tersebut dilakukan sebanyak 1 kali. Berikut adalah langkah dalam pelaporan Surat Pemberitahuan secara elektronik:

- 1) Menerima *file CSV* dan *pdf* dari pembimbing lapangan.
- 2) Buka situs DJP yaitu www.djponline.pajak.go.id lalu masukan NPWP, *password*, dan kode keamanan.lalu klik *login*.
- 3) Klik menu Lapor.
- 4) Pilih menu *e-Filing* dan Buat SPT.
- 5) Lalu klik pada menu *file CSV* dan masukan *file CSV* yang sudah diberikan pembimbing lapangan.
- 6) Pada menu lampiran terdapat menu pilih *file* lalu di klik dan *upload file pdf* yang sudah diberikan pembimbing lapangan.
- 7) Jika sudah lalu klik *start upload* lalu klik Ya.
- 8) Lalu untuk mengambil kode verifikasi klik [disini].
- 9) Pilih pengiriman kode verifikasi melalui *email* atau SMS, pilih melalui *email*.
- 10) Masukan kode verifikasi yang sudah diterima melalui *email* dan klik Kirim SPT.

- 11) Setelah mengirim SPT maka Wajib Pajak akan menerima Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) melalui *email*.

3.2.11 Impor PPh Pasal 23 dengan e-Bupot

Bukti Potong merupakan dokumen atau formulir yang dibuat dan digunakan oleh pemotong pajak sebagai bukti telah dilakukannya pemotongan. Sesuai dengan Ketentuan Dirjen Pajak No. KEP-368/PJ/2020 mengatakan bahwa dalam melakukan pemotongan DJP mewajibkan seluruh Wajib Pajak menggunakan aplikasi e-Bupot. Aplikasi e-Bupot adalah aplikasi yang dikelola oleh DJP untuk membuat bukti pemotongan dan pelaporan SPT PPh Pasal 23/26. Tujuan dilakukannya *penginputan* Bukti Potong PPh Pasal 23 yaitu membuat dan memberikan bukti potong PPh Pasal 23 yang ditujukan kepada penerima penghasilan yang dipotong pajak pada tiap transaksi sebagai kewajiban sebagai pemotong PPh Pasal 23/26.

Dokumen yang diperlukan dalam melakukan *penginputan* Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 yaitu NPWP perusahaan, *password* E-FIN, *file excel* yang di dalamnya memuat masa pajak, tahun pajak, kode objek pajak, penghasilan bruto, dan status fasilitas perusahaan. Proses melakukan *penginputan* PPh Pasal 23 dengan e-bupot ditujukan kepada PT AC dan PT DC. Selama periode magang yaitu kurang lebih 67 hari tugas tersebut dilakukan sebanyak 2 kali. Berikut proses melakukan *penginputan* PPh Pasal 23 menggunakan e-bupot:

- 1) Menerima *file excel* dari pembimbing lapangan yang isinya berupa tabel yang harus direkapitulasi terlebih dahulu terkait masa pajak,

tahun pajak, NPWP, kode objek pajak, penghasilan bruto, dan status fasilitas perusahaan.

- 2) Setelah dilakukan rekapitulasi terhadap *file excel* maka langkah selanjutnya yaitu *rename file* tersebut dengan nama NPWP perusahaan.
- 3) Buka situs www.djponline.pajak.go.id.
- 4) Melakukan *login* dengan memasukan NPWP, *password*, dan mengisi kode keamanan.
- 5) Klik menu Laporan dan pilih Pra Pelaporan.
- 6) Klik menu e-bupot PPh Pasal 23/26.
- 7) Saat akan melakukan impor maka pilih menu Bukti Pemotongan lalu klik Impor *Excel*.
- 8) Pada bagian File terdapat kotak Choose File maka yang dilakukan adalah *upload file excel* yang bernama nomor NPWP lalu klik Simpan.
- 9) Lakukan *refresh* hingga keluar status keterangan Validasi Selesai.

3.2.12 Membuat *ID Billing* PPh Pasal 23

ID Billing merupakan komponen penting yang dibutuhkan oleh Wajib Pajak dalam melakukan sistem pembayaran pajak secara elektronik. *ID Billing* digunakan sebagai tanda pengenal yang digunakan Wajib Pajak saat melakukan pembayaran pajak secara *online*. Menurut Peraturan Dirjen Pajak No. PER-205/PJ/2017 mengenai Pembayaran Pajak Secara Elektronik, *ID Billing* adalah kode identifikasi yang diterbitkan dengan sistem *e-Billing* atas suatu jenis

pembayaran atau setoran yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Kode *ID Billing* memiliki masa aktif tertentu tergantung dengan masa kadaluarsa kode tersebut. Tujuan dibuatnya *ID Billing* yaitu sebagai tanda pengenal yang akan digunakan Wajib Pajak saat melakukan pembayaran pajak secara *online*. Membuat kode *billing* ditujukan kepada PT AC. Selama periode magang yaitu kurang lebih 67 hari tugas tersebut dilakukan sebanyak 1 kali. Dokumen yang diperlukan yaitu NPWP perusahaan. Berikut proses membuat *ID Billing* PPh Pasal 23:

- 1) Buka situs www.djponline.pajak.go.id.
- 2) Melakukan *login* dengan memasukan NPWP, *password*, dan mengisi kode keamanan.
- 3) Klik menu Laporan dan pilih Pra Pelaporan.
- 4) Klik menu e-bupot PPh Pasal 23/26.
- 5) Pilih SPT Masa PPh dan klik Perekaman Bukti Penyetoran.
- 6) Isi Tahun Pajak dan Masa Pajak.
- 7) Klik Buat Kode *Billing* lalu klik OK.
- 8) Klik Cetak Kode *Billing*.
- 9) *Download file* kode *billing* dengan format *pdf*.

3.2.13 Melakukan Komparasi Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan catatan atas informasi keuangan suatu perusahaan pada periode tertentu yang digunakan perusahaan dalam menggambarkan kinerja perusahaan dalam periode tertentu. Tujuan dilakukan komparasi laporan keuangan yaitu untuk mengetahui perbandingan antara kenaikan dan penurunan dalam semua aspek laporan

keuangan. Tugas dalam melakukan komparasi laporan keuangan dilakukan untuk PT DM dan PT AF . Selama periode magang yaitu kurang lebih 67 hari tugas tersebut dilakukan sebanyak 1 kali. Dokumen yang dibutuhkan dalam melakukan komparasi laporan keuangan adalah laporan keuangan perusahaan tahun 2020 dan 2019. Berikut proses melakukan komparasi laporan keuangan:

- 1) Mencari laporan keuangan yang dibutuhkan pada *website* perusahaan.
- 2) Menerima *file excel* dari pembimbing lapangan yang berisikan format dalam melakukan komparasi.
- 3) Mengidentifikasi bagian aset, liabilitas, dan *profit loss* dalam laporan keuangan.
- 4) Menginput bagian aset, liabilitas, dan dan *profit loss* yang terdapat pada laporan keuangan ke dalam *excel*.

3.2.14 Melakukan Rekapitulasi Bukti Potong PPh Pasal 15

PPh Pasal 15 adalah pajak penghasilan yang dikenakan dari wajib pajak yang usahanya bergerak dalam industri pelayaran, penerbangan internasional, dan perusahaan asuransi asing. Tujuan dilakukan rekapitulasi bukti potong PPh Pasal 15 yaitu memudahkan dalam penyajian dan untuk melaporkan seluruh penghasilan yang diterima dalam suatu tahun buku ke dalam SPT Tahunan PPh, dan melampirkan daftar pemotongan PPh Pasal 15 yang telah dipotong final. Tugas dalam rekapitulasi bukti potong PPh Pasal 15 dilakukan untuk PT NS dan PT RCD. Selama periode magang

yaitu kurang lebih 67 hari tugas tersebut dilakukan sebanyak 2 kali. Dokumen yang diperlukan dalam melakukan rekapitulasi bukti potong PPh Pasal 15 yaitu dokumen terkait bukti potong PPh Pasal 15 dan format *excel* untuk melakukan rekapitulasi. Berikut adalah proses melakukan rekapitulasi bukti potong PPh Pasal 15:

- 1) Menerima format *excel* dari pembimbing lapangan.
- 2) Menerima dokumen terkait bukti potong PPh Pasal 15.
- 3) Menginput NPWP, nama pemotong pajak, masa pajak, nomor surat bukti potong, tanggal bukti potong, nilai objek pajak, dan PPh yang dipotong.
- 4) Menginput hingga satu periode.

3.2.15 Membuat Kertas Kerja Pemeriksaan

Pemeriksaan Pajak merupakan proses pengumpulan dan evaluasi atas bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat korespondensi antara informasi dan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya yang dilakukan oleh orang yang kompeten dan independent. Kertas kerja pemeriksaan merupakan catatan terperinci dan jelas yang dibuat oleh pemeriksa pajak tentang prosedur pemeriksaan yang telah dilakukan berisikan data, keterangan, dan/atau bukti yang dikumpulkan, pengujian dilakukan dan disimpulkan sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan. Tujuan membuat kertas kerja pemeriksaan yaitu meringkas data pada SPT Masa dari berbagai cabang menjadi 1 kertas kerja yang nantinya kertas kerja tersebut akan digunakan pada pemeriksaan pajak yang

akan dibandingkan ke laporan keuangan. Tugas membuat kertas kerja dilakukan untuk PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, dan PPN. Dokumen yang dibutuhkan dalam membuat kertas kerja yaitu dokumen yang terkait dengan SPT Masa perusahaan dan *file excel* yang berisikan format dari pembimbing lapangan. Tugas ini ditujukan untuk PT AF. Selama periode magang yaitu kurang lebih 67 hari tugas tersebut dilakukan sebanyak 3 kali. Berikut proses membuat kertas kerja:

- 1) Menerima beberapa *file pdf* SPT Masa dari pembimbing lapangan.
- 2) Melakukan rekapitulasi terhadap SPT Masa tersebut di *file excel* yang di dalamnya sudah terdapat format.
- 3) Jika sudah dilakukan rekapitulasi maka terdapat *file excel* yang didalamnya sudah terdapat format kertas kerja maka yang dapat dilakukan yaitu membuat rumus agar antara rekapitulasi dan *file* kertas kerja dapat saling *mlink*.
- 4) Melakukan tugas hingga satu tahun pajak tiap cabangnya.

3.3 Uraian Pelaksanaan Kerja Magang

3.3.1 Proses Pelaksanaan

Proses pelaksanaan kerja magang dilakukan dari tanggal 14 Juni 2021 hingga 14 September 2021. Pekerjaan yang dilakukan adalah pekerjaan yang berhubungan dengan *tax service* dan *accounting service*. Berikut adalah rincian proses tugas yang dilakukan untuk perusahaan klien:

3.3.1.1 PT AC

3.3.1.1 Melakukan Rekapitulasi SPT PPh Pasal 21

Dokumen yang dibutuhkan dalam merekapitulasi PPh Pasal 21 yaitu Bukti Penerimaan Elektronik (BPE), Bukti Penerimaan Negara, dan dokumen yang berkaitan dengan SPT Masa PPh Pasal 21. Rekapitulasi PPh Pasal 21 dilakukan untuk transaksi bulan Januari hingga April 2021. Berikut adalah cara melakukan rekapitulasi PPh Pasal 21:

1. Menerima dokumen terkait SPT Masa PPh Pasal 21 klien baik normal maupun pembetulan (Formulir 1721) dari pembimbing lapangan seperti gambar 3.1.

Gambar 3. 1 Dokumen SPT Masa PPh Pasal 21 PT AC

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26
 Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26

FORMULIR 1721

area barcode

MASA PAJAK : 01 - 2021

Bacalah petunjuk pengisian sebelum mengisi formulir ini

SPT NORMAL SPT PEMBEHALAN KE-...-...

JUMLAH LEMBAR SPT TERMASUK LAMPIRAN : (SISI OLAH KIRI) : ... (SISI OLAH KANAN) : ...

A. IDENTITAS PEMOTONG

1. NPWP : 01.123.456.7-890-000

2. NAMA : PT AC

3. ALAMAT : ...

4. NO. TELEPON : ... 5. EMAIL : ...

B. OBJEK PAJAK

NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIFOTONG (Rp)
1.	PEGAWAI TETAP	21-100-01	22	273.689.316	15.993.263
2.	PENERIMA PENSUN BERKALA	21-100-02	0	0	0
3.	PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU TENAGA KERJA LEPAS	21-100-03	44	17.400.000	0
4.	BUKAN PEGAWAI:				
4a.	DISTRIBUTOR MULTILEVEL MARKETING (MLM)	21-100-04	0	0	0
4b.	PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI	21-100-05	0	0	0
4c.	PENJAJA BARANG DAGANGAN	21-100-06	0	0	0
4d.	TENAGA AHLI	21-100-07	0	0	0
4e.	BUKAN PEGAWAI YANG MEMERHA-MEALAY YANG BERGAYAT BERSERANMUNGKAM	21-100-08	34	318.957.897	1.945.480
4f.	BUKAN PEGAWAI YANG MEMERHA-MEALAY YANG TIDAK BERGAYAT BERSERANMUNGKAM	21-100-09	0	0	0
	INSIATU BERNYAWA YANG TIDAK BERSERANMUNGKAM	21-100-10	0	0	0
6.	MANTAN PEGAWAI YANG MEMERHA-MEALAY JASA PRODUKSI/TANJEM BONE ATAU BILANGAN LAIN	21-100-11	0	0	0
7.	PEGAWAI YANG MELAKUKAN PENARIKAN DANA PENSUN	21-100-12	0	0	0
8.	PESERTA KEGIATAN	21-100-13	0	0	0
9.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIFOTONG PPh PASAL 21 TIDAK PAJAL LAINNYA	21-100-99	0	0	0
10.	PEGAWAI/PEMBERI JALAN/PESERTA KEGIATAN/PENERIMA PENSUN BERKALA SEBAGAI WAJIB PAJAK LUAR NEGERI	27-100-99	0	0	0
11.	JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 10)		100	610.047.213	17.938.743
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR					JUMLAH (Rp)
12.	STP PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 (HANYA POKOK PAJAK)			0,00	0
13.	KELEBIHAN PENYETORAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 DARI MASA PAJAK : ...			0,00	0
14.	JUMLAH (ANGKA 12 + ANGKA 13)			0,00	0
15.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR (ANGKA 11 KOLONG - ANGKA 14)			0,00	17.938.743
LANS/TKAN PENGISIAN PADA ANGKA 16 & 17 APABILA SPT PEMBEHALAN DIBAYAR PADA ANGKA 18 APABILA PPh (LEBIH) DISETOR					
16.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR PADA SPT YANG DIBETULKAN (PENGHASILAN DARI BUKAN 9 ANGKA 15 DARI SPT YANG DIBETULKAN)			0,00	0
17.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR KARENA PEMBEHALAN (ANGKA 15 - ANGKA 16)			0,00	0
18.	KELEBIHAN SETOR PADA ANGKA 15 ATAU ANGKA 17 AKAN DIKOMPENSASIKAN KE MASA PAJAK (mm - yyyy)			0,00	-

HALAMAN 1

Sumber: Dokumentasi Perusahaan

2. Menerima Bukti Penerimaan Negara dari pembimbing lapangan seperti gambar 3.2.

Gambar 3. 2 Dokumen Bukti Penerimaan Negara PT AC

2/10/2021 <https://mib.bankmandiri.co.id/corp/front/billpayment.do?action=doPrintBillPayment>

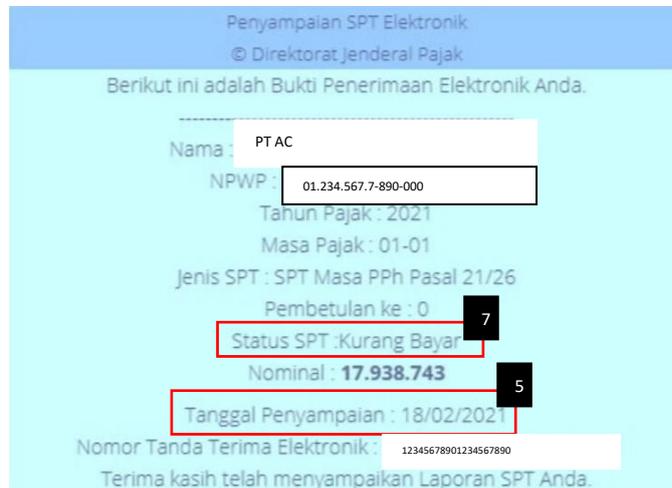
Nomor Referensi Transaksi	:	
No. Ref Perkumpulan	:	
Dari Rekening	:	
Customer Reference Number	:	
To Institution	:	50012 Pajak/PNBP/Cukai
BUKTI PENERIMAAN NEGARA	:	Penerimaan Pajak
Data Pembayaran	:	
Tanggal dan Jam Bayar	:	10/02/2021 15:17:07
Tanggal Buku	:	11/02/21
Kode Cabang Bank	:	00003456789
NTB	:	
NTPN	:	34AB5CDEFGHIJ
STAN	:	918877
Data Setoran	:	
Kode Billing	:	PT AC
Nama Wajib Pajak	:	
Alamat	:	
Nomor Objek Pajak	:	
Mata Anggaran	:	411121
Jenis Setoran	:	100
Masa Pajak	:	01012021
Nomor Ketetapan	:	00000000000000
Jumlah Setoran	:	Rp. 10,904,205.00
Mata Uang	:	IDR
Terbilang	:	
Keterangan	:	
NPWP	:	
Daftar Pembayaran	:	00 TOTAL : 10,904,205.00
Admin Bank	:	IDR 0.00
Total Bayar	:	IDR 10,904,205.00
Beneficiary Notification	:	
Notification Flag	:	Don't Send
Mode Instruksi	:	
Langsung	:	10-Feb-2021

Print Simpan Sebagai Tutup

Sumber: Dokumentasi Perusahaan

3. Menerima Bukti Penerimaan Eletronik dari pembimbing lapangan seperti gambar 3.3.

Gambar 3. 3 Dokumen Bukti Penerimaan Elektronik PT AC



Sumber: Dokumentasi Perusahaan

4. Menerima *file Excel* yang didalamnya terdapat format *table* (masa, status pembetulan, jumlah penerima penghasilan, penghasilan bruto, jumlah penerima penghasilan, jumlah pajak yang dipotong, total pajak yang disetorkan, tanggal lapor, tanggal bayar, dan status SPT) dan melakukan *input* SPT Masa PPh Pasal 21 baik status normal atau pembetulan. Pada kolom status pembetulan, massa, jumlah penerima penghasilan, penghasilan bruto, dan jumlah pajak yang dipotong angkanya berasal dari Formulir 1721 SPT Masa PPh Pasal 21. Kolom tanggal lapor dan status SPT angkanya diperoleh dari Bukti Penerimaan Elektronik. Sedangkan untuk kolom tanggal bayar diperoleh dari Bukti Penerimaan Negara. Langkah dalam melakukan rekapitulasi SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Pajak Januari 2021 SPT Normal sebagai berikut:

- 1) Jumlah tiap penerima penghasilan sebesar 22 diperoleh dari SPT Masa PPh Pasal 21 seperti nomor 1.
- 2) Jumlah penghasilan bruto sebesar Rp 273.689.316 diperoleh dari SPT Masa PPh Pasal 21 seperti nomor 2.
- 3) Jumlah pajak yang dipotong sebesar Rp 15.993.263 diperoleh dari SPT Masa PPh Pasal 21 seperti nomor 3.
- 4) Total pajak yang disetor sebesar Rp 17.938.743 diperoleh dari SPT Masa PPh Pasal 21 seperti nomor 4.
- 5) Tanggal lapor yaitu 18 Februari 2021 diperoleh dari Bukti Penerimaan Elektronik seperti nomor 5.
- 6) Tanggal bayar yaitu 10 Februari 2021 diperoleh dari Bukti Penerimaan Negara seperti nomor 6.
- 7) Status SPT Kurang Bayar diperoleh dari Bukti Penerimaan Elektronik seperti nomor 7.

Gambar 3. 4 Format Tabel dalam Pengisian

Rekapitulasi PPh Pasal 21 PT AC

MASA	STATUS PEMBEHALAN	Penerima Pengh.		Pegawai Tetap		Penerima Pengh.		Pegawai Tidak Tetap		Penerima Pengh.		Tenaga Ahli		Penerima Pengh.		Bukan Pegawai Berkecukupan		Penerima Pengh.		Bukan Pegawai Tidak Berkecukupan		TOTAL
		Jumlah	Penghasilan Bruto	Jumlah	Penghasilan Bruto	Jumlah	Penghasilan Bruto	Jumlah	Penghasilan Bruto	Jumlah	Penghasilan Bruto	Jumlah	Penghasilan Bruto	Jumlah	Penghasilan Bruto	Jumlah	Penghasilan Bruto	Jumlah	Penghasilan Bruto	Jumlah	Penghasilan Bruto	
JANUARI	NORMAL	22	275.689.316	44	17.400.000					34												610.047.213
FEBRUARI	NORMAL	22	295.552.345	44	19.726.348					30												546.374.121
MARET	NORMAL	23	362.553.544	9	5.752.288					41												698.455.870
APRIL	NORMAL	23	294.396.056	12	10.175.521					40												608.897.094
MEL	NORMAL																					
JUNI	NORMAL																					
JULI	NORMAL	1		2																		
AGUSTUS	NORMAL																					
SEPTEMBER	NORMAL																					
OCTOBER	NORMAL																					
NOVEMBER	NORMAL																					
DESEMBER	NORMAL																					
TOTAL		90	1.200.191.261	109	53.054.137					145												1.463.774.304

Jml Pajak Dipotong					TOTAL	Jumlah Penghasilan Bruto		Jml Pajak Dipotong		TOTAL	Total yang disetor	SPT MASA PPh21		STATUS SPT
Pegawai Tetap	Pegawai Tidak Tetap	Tenaga Ahli	Bukan Pegawai Berkecukupan	Bukan Pegawai Tidak Berkecukupan		PESANGON	PENUNJANG	PESANGON	PENUNJANG			TGL LABUR	TGL BAYAR	
15.993.263			1.945.480		17.938.743						17.938.743	18 Februari 2021	10 Februari 2021	KH
15.319.213	48.218		349.678		15.716.909						15.716.909	10 Maret 2021	09 Maret 2021	KH
25.632.497			1.307.321		26.939.818						26.939.818	16 April 2021	08 April 2021	KH
16.727.234			780.162		17.507.396						17.507.396	10 Mei 2021	06 Mei 2021	KH
73.670.206	48.718		4.970.941		78.689.865						78.689.865			

Sumber: Dokumentasi Perusahaan

- Melakukan rekapitulasi PPh Pasal 21 status normal dan pembehalan sampai dengan banyaknya dokumen terkait dengan SPT Masa PPh Pasal 21 yang telah diberikan oleh pembimbing lapangan (setahun atau tidak sampai setahun).

3.3.1.2 Melakukan Rekapitulasi SPT PPh Pasal 23

Dokumen yang dibutuhkan dalam merekapitulasi PPh Pasal 23 yaitu Bukti Penerimaan Elektronik (BPE), Bukti Penerimaan Negara, dan dokumen yang berkaitan dengan SPT Masa PPh Pasal 23 (formulir 1724). Rekapitulasi PPh Pasal 23 dilakukan untuk 2 transaksi sehubungan jasa konsultasi dan jasa lain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Rekapitulasi ini

dilakukan untuk periode Januari hingga Mei 2021. Berikut adalah cara melakukan rekapitulasi PPh Pasal 23 masa Januari:

1. Mendapatkan dokumen terkait SPT Masa PPh Pasal 23 klien baik normal maupun pembetulan (Formulir 1724) dari pembimbing lapangan seperti gambar 3.5.

Gambar 3. 5 Dokumen SPT Masa PPh Pasal 23 PT AC

area staples

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA
PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26

FORMULIR 1724
INDUK

Masa Pajak (mm-yyyy) H.1
01 - 2021

H.2 SPT Normal H.3 Pembetulan Ke- H.4

area barcode

Jumlah Lembar SPT Termasuk Lampiran (Dituli oleh petugas) 0 H.5

A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

A.1 NPWP 01.123.456.7-890-000
A.2 NAMA PT AC
A.3 ALAMAT
A.4 NO. TELEPON
A.5 EMAIL : .com

B. OBJEK PAJAK

NO	URAIAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp.)	JUMLAH PPH YANG DIPOTONG/DTN (Rp.)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5
I. PPh PASAL 23				
1	SEVIDEN	24-101-01	0,00	0,00
2	BUNGA	24-102-01	0,00	0,00
3	ROYALTI	24-103-01	0,00	0,00
4	HADIAH, PENGHARGAAN, BONUS DAN LAINNYA	24-100-01	0,00	0,00
5	SEWA DAN PENGHASILAN LAIN SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN HARTA	24-100-02	0,00	0,00
6	6a. JASA TEKNIK	24-104-01	0,00	0,00
	6b. JASA MANAJEMEN	24-104-02	0,00	0,00
	6c. JASA KONSULTAN	24-104-03	8.000.000,00	160.000,00
	6d. JASA LAIN SELAIN JASA YANG TELAH DIPOTONG PPh PASAL 21		0,00	0,00
7	JUMLAH PENJUALAN ANGIKA 1 S.D 6i		8.000.000,00	160.000,00
8	JUMLAH PPh PASAL 23 YANG KURANG DISETOR SETELAH DIKURANGI PPh PASAL 23 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)			160.000,00
9	JUMLAH PPh PASAL 23 YANG KURANG DISETOR SEHUBUNGAN DENGAN PENAMBAHAN DAN PEMBELAN BUKTI PEMOTONGAN			0,00
II. PPh PASAL 26				
10	SEVIDEN	27-101-01	0,00	0,00
11	BUNGA	27-102-01	0,00	0,00
12	ROYALTI	27-103-01	0,00	0,00
13	SEWA DAN PENGHASILAN LAIN SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN HARTA	27-100-01	0,00	0,00
14	BUNGA SEHUBUNGAN DENGAN JASA PENYEWAAN DAN KEGIATAN	27-104-01	0,00	0,00
15	HADIAH DAN PENGHARGAAN	27-100-02	0,00	0,00
16	PENDUN DAN PEMBAYARAN BERKALA LAINNYA	27-100-03	0,00	0,00
17	PREMI SWAP DAN TRANSAKSI LINDUNG NILAI LAINNYA	27-102-02	0,00	0,00
18	KEUNTUNGAN KARINA PEMEBASAN UTANG	27-100-04	0,00	0,00
19	PENGHASILAN DARI PENJUALAN ATAU PENGALIHAN HARTA DI INDONESIA	27-100-05	0,00	0,00
20	PREMI ASURANSI/ REASURANSI	27-100-06	0,00	0,00
21	PENGHASILAN DARI PENJUALAN ATAU PENGALIHAN SAHAM	27-100-07	0,00	0,00
22	PENGHASILAN KEWAJIBAN PAJAK BUKTI SETELAH PAJAK	27-100-01	0,00	0,00
23	JUMLAH PENJUALAN ANGIKA 10 S.D 22		0,00	0,00
24	JUMLAH PPh PASAL 26 YANG KURANG DISETOR SETELAH DIKURANGI PPh PASAL 26 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)			0,00
25	JUMLAH PPh PASAL 26 YANG KURANG DISETOR SEHUBUNGAN DENGAN PENAMBAHAN DAN PEMBELAN BUKTI PEMOTONGAN			0,00

1) Tidak termasuk seviden seperti WP orang pribadi selain negar
2) Tidak termasuk bunga yang menjadi objek PPh Pasal 4 ayat (2)
3) Selain yang telah dipotong PPh pasal 21 ayat (1) huruf a
4) Tidak termasuk sewa tanah dan bangunan yang telah dibayar PPh Pasal 4 ayat (2)
5) Jika jasa lain sebagaimana angka 6d atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan mengenai penjumlahan dari kode objek pajak 24-104-01 sampai dengan 24-104-03 pada Daftar Baku Perincoran PPh Pasal 23/26

BAGIAN C. LAMPIRAN

C.1 Bukti Potongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 1 lembar
C.2 Surat Seleksi Pajak/Bukti 1 lembar
C.3 Bukti Pemadukan 1 lembar
C.4 Surat Klaim Khusus 1 lembar
C.5 Fotokopi Surat Keterangan Bebas 1 lembar
C.6 Fotokopi Surat Keterangan Domisili 1 lembar
C.7 Fotokopi SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 yang dibuktikan termasuk lampiran dan Bukti Penyetoran Surat

BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN

D.1 WAJIB PAJAK/ WAKIL WAJIB PAJAK (PENGURUS, DLL)
D.2 KLASA, NAMA DAN ALAMAT
D.3 NAMA AGUS
D.4 NPWP 02.345.678.9-011-000
D.5 TANGGAL 01 02 2021
D.6 TEMPAT KOTA TANGERANG SELATAN

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengutar bahwa dokumen ini telah dipadukan secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah

Sumber: Dokumentasi Perusahaan

2. Menerima Bukti Penerimaan Negara dari pembimbing lapangan

Gambar 3. 6 Dokumen Bukti Penerimaan Elektronik PT AC

	KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200 email : pengaduan@pajak.go.id ; informasi@pajak.go.id	
	BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK (BPE) NOMOR TANDA TERIMA ELEKTRONIK : 12345678901234567890	
NPWP : 01.123.456.7-890-000 Nama : PT AC Jenis Pajak : PPH2326 Pembetulan Ke- : 0 Tanggal Terima : 10-02-2021 Tahun Pajak : 2021 Masa Pajak : 1	5	QR Code 
Terima Kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda		

Sumber: Dokumentasi Perusahaan

3. Menerima Bukti Penerimaan Eletronik dari pembimbing lapangan

Gambar 3. 7 Dokumen Bukti Penerimaan Negara PT AC

2/10/2021 <https://mib.bankmandiri.co.id/corp/front/billpayment.do?action=doPrintBillPayme>

Nomor Referensi Transaksi	:	
No. Ref Perkumpulan	:	
Dari Rekening	:	
Customer Reference Number	:	
To Institution	:	50012 Pajak/PNBP/Cu
BUKTI PENERIMAAN NEGARA	:	Penerimaan Pajak 3
Data Pembayaran	:	-
Tanggal dan Jam Bayar	:	10/02/2021 15:17:07
Tanggal Buku	:	11/02/21
Kode Cabang Bank	:	008
NTB	:	00003456789 4
NTPN	:	1A11111AA11A1AA
STAN	:	672719
Data Setoran	:	-
Kode Billing	:	
Nama Wajib Pajak	:	PT AC
Alamat	:	
Nomor Objek Pajak	:	
Mata Anggaran	:	411124
Jenis Setoran	:	104
Masa Pajak	:	01012021
Nomor Ketetapan	:	00000000000000
Jumlah Setoran	:	Rp. 160,000.00
Mata Uang	:	IDR
Terbilang	:	seratus enam puluh ribu rupiah
Keterangan	:	1 k computer dan tidak memerlukan tanda tangan
NPWP	:	01.123.456.7-890-000
Daftar Pembayaran	:	160,000.00
Admin Bank	:	IDR 0.00
Total Bayar	:	IDR 160,000.00
Beneficiary Notification	:	
Notification Flag	:	Don't Send
Mode Instruksi	:	
Langsung	:	10-Feb-2021

Sumber: Dokumentasi Perusahaan

4. Menerima *file Excel* yang didalamnya terdapat format *table* (massa, status pembetulan, jasa yang berkaitan dengan PPh 23, total DPP, besarnya pajak PPh 23, tanggal bayar, NTPN, tanggal lapor dan status SPT) dan melakukan *input* SPT Masa PPh Pasal 23 baik status normal atau pembetulan. Pada kolom status pembetulan, massa, jasa yang berkaitan dengan PPh 23, total DPP, dan besarnya pajak PPh 23 angkanya berasal dari Formulir 1724 SPT Masa PPh Pasal 23. Kolom tanggal lapor dan status SPT angkanya diperoleh dari Bukti Penerimaan Elektronik. Sedangkan untuk kolom tanggal bayar dan NTPN diperoleh dari Bukti Penerimaan Negara. Langkahnya sebagai berikut:

Masa Pajak Januari 2021 SPT PPh 23 Normal maka proses *penginputan* sebagai berikut:

- 1) Jumlah penghasilan bruto sebesar Rp 8.000.000 diperoleh dari SPT Masa PPh Pasal 23 seperti nomor 1.
- 2) Jumlah pajak yang dipotong sebesar Rp 160.000 diperoleh dari SPT Masa PPh Pasal 23 seperti nomor 2.
- 3) Total DPP diperoleh dari penjumlahan semua penerima penghasilan seperti nomor 3.
- 4) Jumlah Pajak Penghasilan PPh 21 sebesar Rp 160.000 diperoleh dari SPT Masa PPh 23 seperti nomor 4.

- 5) Tanggal bayar yaitu 10 Februari 2021 diperoleh dari Bukti Penerimaan Negara seperti nomor 5.
 - 6) NTPN diperoleh dari Bukti Penerimaan Negara seperti nomor 6.
 - 7) Tanggal lapor yaitu 10 Februari 2021 diperoleh dari Bukti Penerimaan Elektronik seperti nomor 7.
 - 8) Tanggal lapor yaitu 10 Februari 2021 diperoleh dari Bukti Penerimaan Elektronik seperti nomor 8.
5. Melakukan rekapitulasi PPh Pasal 23 status normal dan pembetulan sampai dengan banyaknya dokumen terkait dengan SPT Masa PPh Pasal 23 yang telah diberikan oleh pembimbing lapangan (setahun atau tidak sampai setahun).

**Gambar 3. 8 Format Tabel dalam
Pengisian Rekapitulasi PPh Pasal 23 PT AC**

NO	MASA	STATUS PEMBETULAN	Jasa Teknik	Jasa Manajeme	Jasa Konsultar	Jasa Lain yang telah dipotong PPh21	Total DPP	PPh23
1	JANUARI	Normal	-	-	8.000.000,00	-	8.000.000,00	160.000,00
2	FEBRUARI	Normal	-	-	8.000.000,00	-	8.000.000,00	160.000,00
3	MARET	Normal	-	-	228.500.000,00	-	228.500.000,00	4.570.000,00
4	APRIL	Normal	-	-	8.000.000,00	35.573.500,00	43.573.500,00	871.470,00
5	MEI	Normal	-	-	8.000.000,00	-	8.000.000,00	160.000,00
6	JUNI							
7	JULI							
8	AGUSTUS				1			
9	SEPTEMBER							2
10	OKTOBER							
11	NOVEMBER							
12	DESEMBER							
	JUMLAH				260.500.000,00	35.573.500,00	296.073.500,00	5.921.470,00

TANGGAL BAYAR	NTPN/kode billing	TANGGAL LAPOR	STATUS SPT
10 Februari 2021	1A111111AA11A1AA	10 Februari 2021	KB
09 Maret 2021	2B222222BB22B2BB	10 Maret 2021	KB
08 April 2021	3C333333CC33C3CC	12 April 2021	KB
06 Mei 2021	4D444444DD44D4DD	06 Mei 2021	KB
09 Juni 2021	5E555555EE55E5EE	09 Juni 2021	KB

Sumber: Dokumentasi Perusahaan

3.3.1.3 Melakukan Rekapitulasi Bukti Penerimaan Negara SPT PPh Pasal 25

Dokumen yang dibutuhkan dalam merekapitulasi PPh Pasal 25 yaitu Bukti Penerimaan Negara (BPN). Rekapitulasi Bukti Penerimaan Negara SPT PPh Pasal 25 dilakukan untuk periode Januari hingga Mei 2021. Berikut merupakan proses rekapitulasi Bukti Penerimaan Negara (BPN) PPh Pasal 25 masa Januari 2020:

1. Menerima *file* Bukti Penerimaan Negara PPh Pasal 25 dari pembimbing lapangan yang berasal dari klien.

Gambar 3. 9 Bukti Penerimaan Negara PT AC

BANK CENTRAL ASIA, TBK.		BUKTI PENERIMAAN NEGARA PENERIMAAN PAJAK		KEMENTERIAN KEUANGAN	
1	DATA PEMBAYARAN				
	TANGGAL & JAM BAYAR	11/02/2020 16:49:40		NTB	: 00003456789
	TANGGAL BUKU	:		NTPN	: 1A111111AA11A1AA
	KODE CABANG BANK	:		STAN	: 326028
	DATA SETORAN				2
	KODE BILLING	:	1111111111111111		
	NPWP	:	01.123.456.7-890-000		
	NAMA WAJIB PAJAK	:	PT AC		
	ALAMAT	:	GEDUNG SUKA SUKA LT 3, ALAM SUTERA		
	NOMOR OBJEK PAJAK	:			
	MATA ANGGARAN	:	41126		
	JENIS SETORAN	:	100		
	MASA PAJAK	:	01-01-2020		
	NO KETETAPAN	:			
	JUMLAH SETORAN	:			3
	TERBILANG	:		MATA UANG	: IDR

2. Menerima *file Excel* dari pembimbing lapangan dengan format tabel (masa, tanggal bayar, NTPN, dan PPh terutang) yang sudah tersedia

Gambar 3. 10 Format Tabel Rekapitulasi BPN PPh Pasal 25 PT AC

A	B	C	D	E
		1	PPH PASAL 25	2
				3
NO	MASA	TGL	NTPN	JMLH
1	JANUARI	11 Februari 2020	1A111111AA11A1AA	10.000.000.000,00
2	FEBRUARI	09 Maret 2020	2B222222BB22B2BB	20.435.661.977
3	MARET	08 April 2020	3C333333CC33C3CC	20.435.661.977
4	APRIL	-	-	-
5	MEI	-	-	-
6	JUNI	-	-	-
7	JULI	05 Agustus 2020	4D444444DD44D4DD	12.831.984.294
8	AGUSTUS	07 September 2020	5E555555EE55E5EE	12.831.984.294
9	SEPTEMBER	07 Oktober 2020	6F666666FF66F6FF	12.831.984.294
10	OKTOBER	06 November 2020	7G777777GG77G7GG	17.831.869.854
11	NOVEMBER	10 Desember 2020	8H888888HH88H8HH	17.831.869.854
12	DESEMBER	08 Januari 2020	9I999999II99I9II 861474EQ2171TD57	17.831.869.854
		JUMLAH		153.298.548.375

Sumber: Dokumentasi Perusahaan

3. Melakukan *input* data yang berasal dari Bukti Penerimaan Negara seperti gambar 3.10. Langkah yang dilakukan pada masa Januari yaitu:
 - 1) Mengisi tanggal bayar yaitu 11 Februari 2020.
 - 2) Mengisi NTPN yaitu 1A111111AA11A1AA.
 - 3) Mengisi jumlah setoran yaitu Rp 10.000.000.000.
4. Melakukan rekapitulasi PPh Pasal 25 hingga masa yang ditentukan.

3.3.1.4 Impor PPh Pasal 23 dengan e-Bupot

Dokumen yang diperlukan dalam melakukan penginputan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 yaitu NPWP perusahaan, *password* E-FIN, *file excel* yang di dalamnya memuat masa pajak, tahun pajak, kode objek pajak, penghasilan bruto, dan status fasilitas perusahaan. *Impor* PPh Pasal 23 dengan e-Bupot dilakukan untuk periode Juni 2021. Proses melakukan

penginputan PPh Pasal 23 dengan e-bupot ditujukan kepada PT AC dan PT DC. Berikut proses melakukan penginputan PPh Pasal 23 menggunakan e-bupot:

1. Menerima *file excel* dari pembimbing lapangan yang isinya berupa tabel yang harus di rekapitulasi terlebih dahulu terkait masa pajak, tahun pajak, NPWP, kode objek pajak, penghasilan bruto, dan status fasilitas perusahaan berdasarkan data yang diberikan pembimbing lapangan.

Gambar 3. 11 Data Excel Rekapitulasi

No	Masa Pajak	Tahun Pajak	Tgl Pemotongan (dd/MM/yyyy)	Ber-NPWP ? (Y/N)	NPWP (tanpa format/tanda baca)	NIK (tanpa format/tanda baca)	Nomor Telp
1	6	2021	03/06/2021	Y	1A111111AA11A1AA		
2	6	2021	10/06/2021	Y	2B222222BB22B2BB		
3	6	2021	21/06/2021	Y	3C333333CC33C3CC		
Kode Objek Pajak	Penanda tangan BP Pengurus ? (Y/N)	Penghasilan Bruto	Mendapatkan Fasilitas ? (N/SKB/DTP)	Nomor SKB	Nomor Aturan DTP	NTPN DTP	
24-104-27	Y	1408000	N				
24-104-05	Y	8000000	N				
24-104-27	Y	1789344	N				

Pada Gambar 3.11 merupakan data *excel* yang harus diisi terlebih dahulu sebelum melakukan *impor*, data tersebut berdasarkan data yang sudah diberikan oleh pembimbing lapangan. Pada kolom masa pajak diisi masa 6 atau Juni, pada kolom tahun pajak diisi 2021, pada kolom tanggal pemotongan diisi tanggal 3 Juni 2021, kolom ber-NPWP diisi dengan Y yang menandakan jika memiliki NPWP, pada kolom NPWP diisikan nomor NPWP 1A111111AA11A1AA, kolom kode diisi dengan 24-104-27 yang menandakan jika usaha Wajib Pajak bergerak dalam bidang Jasa penyimpanan, pengolahan dan/atau penyaluran data, informasi, dan/atau program, penandatanganan BP

pengurus diisi dengan Y yang menandakan jika terdapat tanda tangan, kolom penghasilan bruto diisi yaitu Rp 1.408.000, dan kolom mendapat fasilitas diisi N yang menandakan Non-Fasilitas. Setelah dilakukan rekapitulasi terhadap *file excel* maka langkah selanjutnya yaitu *rename file* tersebut dengan nama NPWP perusahaan.

2. Buka situs www.djponline.pajak.go.id.
3. Melakukan *login* dengan memasukkan NPWP, *password*, dan mengisi kode keamanan.
4. Klik menu Laporan dan pilih Pra Pelaporan karena akan menggunakan e-bupot. Klik menu e-bupot PPh Pasal 23/26.

5. M

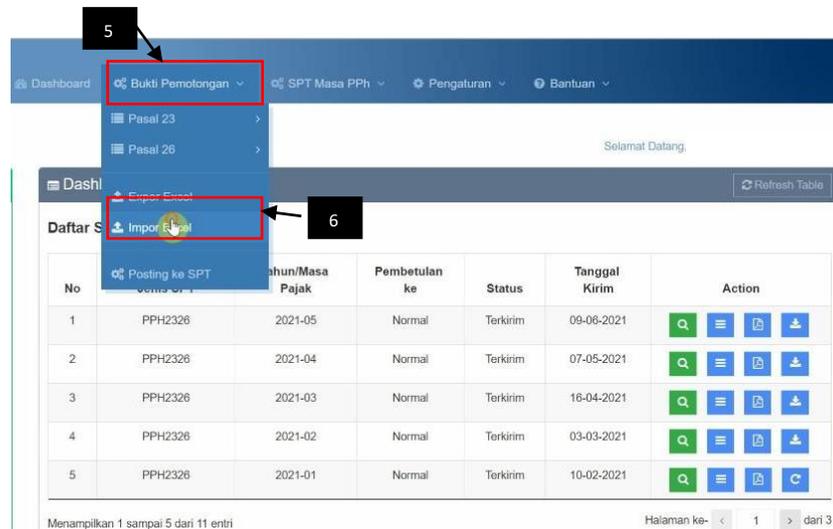
Gambar 3. 12 Menu Pada Situs DJP Online



Pada Gambar 3.12 merupakan menu pada situs DJP *online*. Jika ingin melakukan *impor* bukti potong maka pilih menu laporan seperti nomor 2, lalu pilih menu Pra Pelaporan seperti nomor 3, setelah itu pilih e-Bupot PPh Pasal 23/26 seperti nomor 4.

6. Saat akan melakukan impor maka pilih menu Bukti Pemotongan lalu klik Impor *Excel*.

Gambar 3. 13 Impor Excel Rekapitulasi



Pada Gambar 3.13 merupakan cara untuk melakukan *import excel*.

Pilih menu Bukti Pemotongan seperti nomor 5 lalu pilih *import excel* seperti nomor 6.

6. Pada bagian File terdapat kotak Choose File maka yang dilakukan adalah *upload file excel* yang bernama nomor NPWP lalu klik Simpan.

Gambar 3. 14 Upload File Excel Rekapitulasi



Pada Gambar 3.14 merupakan cara melakukan *upload file excel* yang telah dilakukan rekapitulasi. Pada menu File(*.xls) klik *Choose File* lalu pilih *file excel* yang akan di *upload* seperti nomor 7 jika sudah maka klik *Simpan* seperti nomor 8. Jika proses *upload* sudah tersimpan maka proses *upload* akan menjadi 100% seperti nomor 9.

7. Lakukan *refresh* hingga keluar status keterangan Validasi

Gambar 3. 15 Proses Validasi

Nomor Tiket	Nama File	Tanggal Upload	Jumlah Baris	Status	Keterangan Upload
928953	(redacted)	05-07-2021 11:07:11	1	Upload Excel	
858924	(redacted)	04-06-2021 13:23:52	5	Validasi selesai	Bukti Potong berhasil di-generate
707578	(redacted)	07-05-2021	6	Validasi selesai	Bukti Potong berhasil di-generate

Nomor Tiket	Nama File	Tanggal Upload	Jumlah Baris	Status	Keterangan Upload
928953	(redacted)	05-07-2021 11:07:11	3	Validasi selesai	Bukti Potong berhasil di-generate
858924	(redacted)	04-06-2021 13:23:52	5	Validasi selesai	Bukti Potong berhasil di-generate
797578	(redacted)	07-05-2021 16:14:46	5	Validasi selesai	Bukti Potong berhasil di-generate
713449	(redacted)	09-04-2021 17:32:01	2	Validasi selesai	Bukti Potong berhasil di-generate
619396	(redacted)	03-03-2021 08:55:02	3	Validasi selesai	Bukti Potong berhasil di-generate

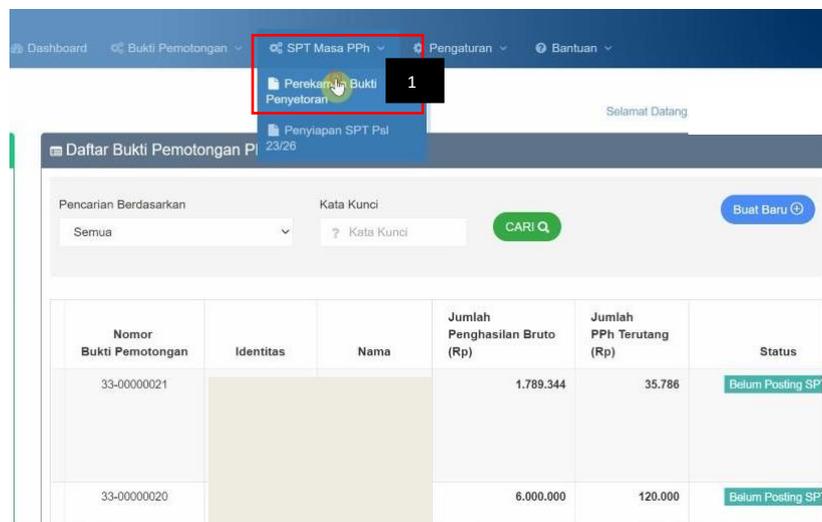
Jika proses *impor* sudah berhasil maka yang harus dilakukan adalah klik menu *refresh* seperti Gambar 3.15 nomor 11. Jika dilakukan *refresh* maka akan terdapat perubahan pada status yang sebelumnya *Upload Excel* seperti nomor 12 menjadi *Validasi Selesai* seperti nomor 13.

3.3.1.5 Membuat *ID Billing* PPh Pasal 23

Dokumen yang diperlukan yaitu NPWP perusahaan. Membuat *ID Billing* PPh Pasal 23 dilakukan untuk periode Juni 2021. Berikut proses membuat *ID Billing* PPh Pasal 23:

1. Buka situs www.djponline.pajak.go.id.
2. Melakukan *login* dengan memasukkan NPWP, *password*, dan mengisi kode keamanan.
3. Klik menu Laporan dan pilih Pra Pelaporan.
4. Klik menu e-bupot PPh Pasal 23/26.
5. Pilih SPT Masa PPh dan klik Perekaman Bukti Penyetoran.

Gambar 3. 16 Perekaman Bukti Penyetoran



Pada Gambar 3.16 merupakan cara melakukan perekaman bukti penyetoran yaitu pilih menu SPT Masa PPh dan pilih Perekaman Bukti Penyetoran seperti nomor 1.

6. Isi Tahun Pajak dan Masa Pajak.

Gambar 3. 17 Mengisi Data Masa Pajak

Kode Objek Pajak	Jenis Pajak	Jenis Setoran	PPH yang Dipotong/DTP (Rp)	ID Billing	Buat ID Billing
411124104	411124	104	437.386		<input type="button" value="Buat Kode Billing"/>

Pada *tab* Input Bukti Penyetoran seperti Gambar 3.17 harus mengisi Tahun Pajak yaitu 2021 dan Masa Pajak yaitu 6 atau bulan Juni seperti nomor 2.

7. Klik Buat Kode *Billing* lalu klik OK seperti pada Gambar 3.18 nomor 3 dan 4

Gambar 3. 18 Membuat Kode *Billing*

Buat ID Billing

Apakah Anda akan membuat id Billing Untuk Jenis Pajak ini?

8. Klik Cetak Kode *Billing*

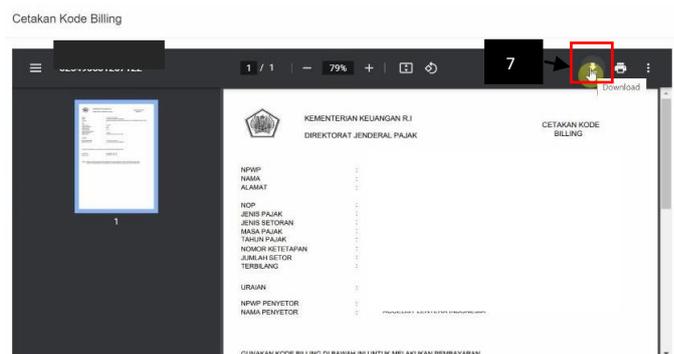
Gambar 3. 19 Membuat Kode *Billing*



Pada Gambar 3.19 merupakan gambar jika kita sudah melakukan proses membuat kode *billing* maka kita akan memperoleh kode *billing* yaitu 12345678910111213141 seperti nomor 5. Setelah mendapatkan kode *billing* maka dapat melakukan cetak dengan klik Cetak Kode *Biling* seperti nomor 6.

- 8. *Download file* kode *billing* dengan format *pdf*.

Gambar 3. 20 Cetak Kode *Billing*



Pada Gambar 3.20 merupakan gambar melakukan cetak pada kode *billing* yaitu dengan klik gambar panah kebawah yang menandakan akan melakukan *download file pdf* seperti nomor 7.

3.3.1.2 PT DC

a) Melakukan Rekapitulasi SPT PPh Pasal 21

Dokumen yang dibutuhkan dalam merekapitulasi PPh Pasal 21 yaitu Bukti Penerimaan Elektronik (BPE), Bukti Penerimaan Negara, dan dokumen yang berkaitan dengan SPT Masa PPh Pasal 21. Berikut adalah cara melakukan rekapitulasi PPh Pasal 21:

1. Menerima dokumen terkait SPT Masa PPh Pasal 21 klien baik normal maupun pembetulan (Formulir 1721) dari pembimbing lapangan seperti gambar 3.21.

Gambar 3. 21 Dokumen SPT Masa PPh Pasal 21 PT DC

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26		FORMULIR 1721	
MASA PAJAK : [mm - yyyy] 01 - 2021		Bacalah petunjuk pengisian sebelum mengisi formulir ini		JUNJAH LEMBAR SPT TERMASUK LAMPIRAN : (SPT OLAH PIUTAK)	
1. NPWP 01.111.111.1-110-000		2. NAMA PT DC		3. ALAMAT	
4. NO. TELEPON : 438		5. EMAIL : 438		area barcode	
A. IDENTITAS PEMOTONG					
B. OBJEK PAJAK					
NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIFOTONG (Rp)
1.	PEGAWAI TETAP	21-100-01	23	200.000.000	15.000.000
2.	PENERIMA PENSUN BERKALA	21-100-02		0	0
3.	PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU TENAGA KERJA LEPAS	21-100-03	44	17.400.000	0
4.	BUKAN PEGAWAI:				
4a.	DISTRIBUTOR MULTILEVEL MARKETING (MLM)	21-100-04	0	0	0
4b.	PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI	21-100-05	0	0	0
4c.	PENJAJA BARANG DAGANGAN	21-100-06	0	0	0
4d.	TENAGA AHLI	21-100-07	0	0	0
4e.	BUKAN PEGAWAI YANG MEMERMA-BEALAH YANG BERHAF BERSINAMBUNGAN	21-100-08	34	318.957.897	1.945.480
4f.	BUKAN PEGAWAI YANG MEMERMA-BEALAH YANG TIDAK BERHAF BERSINAMBUNGAN	21-100-09	0	0	0
	INSIATU BERNYAWA YANG TIDAK BERSINAMBUNGAN	21-100-10	0	0	0
6.	MANTAN PEGAWAI YANG MEMERMA-JASA PRODUKSI/TANJEM BOMBE ATAU BILANGAN LAIN	21-100-11	0	0	0
7.	PEGAWAI YANG MELAKUKAN PENARIKAN DANA PENSUN	21-100-12	0	0	0
8.	PESERTA KEGIATAN	21-100-13	0	0	0
9.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIFOTONG PPh PASAL 21 TIDAK PAJAL LAINNYA	21-100-99	0	0	0
10.	PEGAWAI/PEMBERI JAJA/PESERTA KEGIATAN/PENERIMA PENSUN BERKALA SEBAGAI WAJIB PAJAK LUAR NEGERI	27-100-99	0	0	0
11.	JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 10)		100	610.047.213	16.945.000
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR					
12.	STP PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 (HANYA POKOK PAJAK)			0,00	0
13.	KELEBIHAN PENYETORAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 DARI MASA PAJAK			0,00	0
14.	JUMLAH (ANGKA 12 + ANGKA 13)			0,00	0
15.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR (ANGKA 11 KOLOM 6 - ANGKA 14)			0,00	16.945.000
16.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR PADA SPT YANG DIBETULKAN (PERKORANAN DAN/ATAU ANGKA 15 DARI SPT YANG DIBETULKAN)			0,00	0
17.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR KARENA PEMBEUTLAN (ANGKA 15 - ANGKA 16)			0,00	0
18.	KELEBIHAN SETOR PADA ANGKA 15 ATAU ANGKA 17 AKAN DIKOMPENSASIKAN KE MASA PAJAK (mm - yyyy)			0,00	-

Sumber: Dokumentasi Perusahaan

2. Menerima Bukti Penerimaan Negara dari pembimbing lapangan seperti gambar 3.22.

Gambar 3. 22 Dokumen Bukti Penerimaan Negara PT DC

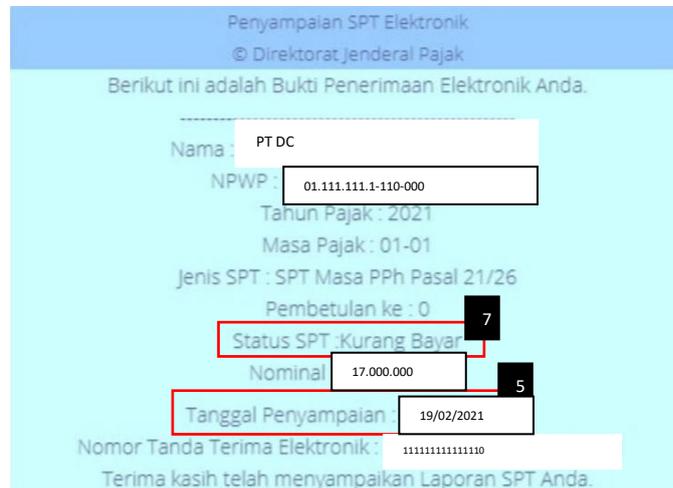
2/10/2021 <https://mib.bankmandiri.co.id/corp/front/billpayment.do?action=doPrintBillPayment>

Nomor Referensi Transaksi	:	
No. Ref Perkumpulan	:	
Dari Rekening	:	
Customer Reference Number	:	
To Institution	:	50012 Pajak/PNBP/Cukai
BUKTI PENERIMAAN NEGARA	:	Penerimaan Pajak
Tanggal dan Jam Bayar	:	11/02/2021/14:17:0
Kode Cabang Bank	:	008
NTB	:	
NTPN	:	
STAN	:	
Data Setoran	:	
Kode Billing	:	PT DC
Nama Wajib Pajak	:	
Alamat	:	
Nomor Objek Pajak	:	
Mata Anggaran	:	411121
Jenis Setoran	:	100
Masa Pajak	:	01012021
Nomor Ketetapan	:	000000000000000
Jumlah Setoran	:	Rp. 10,904,205.00
Mata Uang	:	IDR
Terbilang	:	sepuluh juta sembilan ratus empat ribu dua ratus lima rupiah
Keterangan	:	Informasi ini hasil cetak computer dan tidak memerlukan tanda tangan
NPWP	:	
Daftar Pembayaran	:	01.111.111.1-110-000 : 10,904,205.00
Admin Bank	:	
Total Bayar	:	IDR 10,904,205.00
Beneficiary Notification	:	
Notification Flag	:	Don't Send
Mode Instruksi	:	
Langsung	:	10-Feb-2021

Sumber: Dokumentasi Perusahaan

3. Menerima Bukti Penerimaan Eletronik dari pembimbing lapangan seperti gambar 3.23.

Gambar 3. 23 Dokumen Bukti Penerimaan Elektronik PT DC



Sumber: Dokumentasi Perusahaan

4. Menerima *file Excel* yang didalamnya terdapat format *table* (masa, status pembetulan, jumlah penerima penghasilan, penghasilan bruto, jumlah penerima penghasilan, jumlah pajak yang dipotong, total pajak yang disetorkan, tanggal lapor, tanggal bayar, dan status SPT) dan melakukan *input* SPT Masa PPh Pasal 21 baik status normal atau pembetulan. Pada kolom status pembetulan, masa, jumlah penerima penghasilan, penghasilan bruto, dan jumlah pajak yang dipotong angkanya berasal dari Formulir 1721 SPT Masa PPh Pasal 21. Kolom tanggal lapor dan status SPT angkanya diperoleh dari Bukti Penerimaan Elektronik. Sedangkan untuk kolom tanggal bayar diperoleh dari Bukti Penerimaan Negara. Langkahnya sebagai berikut:

Masa Pajak Januari 2021 SPT PPh 21 Normal maka proses *penginputan* sebagai berikut:

- 1) Jumlah tiap penerima penghasilan sebesar 23 diperoleh dari SPT Masa PPh Pasal 21 seperti nomor 1.
- 2) Jumlah penghasilan bruto sebesar Rp 200.000.000 diperoleh dari SPT Masa PPh Pasal 21 seperti nomor 2.
- 3) Jumlah pajak yang dipotong sebesar Rp 15.000.000 diperoleh dari SPT Masa PPh Pasal 21 seperti nomor 3.
- 4) Total pajak yang disetor sebesar Rp 16.945.000 diperoleh dari SPT Masa PPh Pasal 21 seperti nomor 4.
- 5) Tanggal lapor yaitu 19 Februari 2021 diperoleh dari Bukti Penerimaan Elektronik seperti nomor 5.
- 6) Tanggal bayar yaitu 11 Februari 2021 diperoleh dari Bukti Penerimaan Negara seperti nomor 6.
- 7) Status SPT Kurang Bayar diperoleh dari Bukti Penerimaan Elektronik seperti nomor 7.

Gambar 3. 24 Format Tabel dalam Pengisian

Rekapitulasi PPh Pasal 21 PT DC

MASA	STATUS PEMBEHALAN	Jumlah		Penghasilan Bruto		Jumlah		Penghasilan Bruto		Jumlah		Penghasilan Bruto		TOTAL
		Penerima Pengh.	Pegawai Tetap	Penerima Pengh.	Pegawai Tidak Tetap	Penerima Pengh.	Tenaga Ahli	Penerima Pengh.	Bukan Pegawai Berkecukupan	Penerima Pengh.	Bukan Pegawai Tidak Berkecukupan			
JANUARI	NORMAL	23	200.000.000	44	17.400.000			34	318.957.897					610.047.213
FEBRUARI	NORMAL	23	362.553.544	44	19.726.348			30	257.095.434					646.374.121
MARET	NORMAL	23	294.396.056	9	5.752.288			41	330.150.038					698.455.870
APRIL	NORMAL	23	294.396.056	12	10.175.521			40	304.325.517					608.897.094
MEL	NORMAL													
JUNI	NORMAL	1	2											
JULI	NORMAL													
AGUSTUS	NORMAL													
SEPTEMBER	NORMAL													
OCTOBER	NORMAL													
NOVEMBER	NORMAL													
DESEMBER	NORMAL													
TOTAL		90	1.200.191.261	109	53.054.137			145	1.210.528.886					2.463.774.304

Jml Pajak Dipotong					TOTAL	Jumlah Penghasilan Bruto		Jml Pajak Dipotong			TOTAL yang disktor	SPT MASA PPh21		STATUS SPT
Pegawai Tetap	Pegawai Tidak Tetap	Tenaga Ahli	Bukan Pegawai Berkecukupan	Bukan Pegawai Tidak Berkecukupan		PESANGON	PENSIUN, TUNJANGAN	PESANGON	PENSIUN, TUNJANGAN	TOTAL		TGL JABAR	TGL BAWAR	
15.000.000			1.945.480		16.945.000					17.928.743	19 Feb 2021	11 Feb 2021	xi	
25.621.497			1.307.321		26.939.818					26.939.818	10 Maret 2021	09 Maret 2021	xi	
16.727.234			780.162		17.507.396					17.507.396	16 April 2021	08 April 2021	xi	
											10 Mei 2021	06 Mei 2021	xi	
73.670.206	48.718		4.970.941		78.689.865					78.689.865				

Sumber: Dokumentasi Perusahaan

- Melakukan rekapitulasi PPh Pasal 21 status normal dan pembehalan sampai dengan banyaknya dokumen terkait dengan SPT Masa PPh Pasal 21 yang telah diberikan oleh pembimbing lapangan (setahun atau tidak sampai setahun).

b) Melakukan Rekapitulasi SPT PPh Pasal 23

Dokumen yang dibutuhkan dalam merekapitulasi PPh Pasal 23 yaitu Bukti Penerimaan Elektronik (BPE), Bukti Penerimaan Negara, dan dokumen yang berkaitan dengan SPT Masa PPh Pasal 23 (formulir 1724). Rekapitulasi SPT PPh Pasal 23 dilakukan untuk periode Februari, Maret,

dan Mei 2021 serta atas transaksi jasa konsultan. Berikut adalah cara melakukan rekapitulasi PPh Pasal 23 masa Januari:

1. Mendapatkan dokumen terkait SPT Masa PPh Pasal 23 klien baik normal maupun pembetulan (Formulir 1724) dari pembimbing lapangan seperti gambar 3.25.

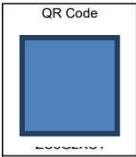
Gambar 3. 25 Dokumen SPT Masa PPh Pasal 23 PT DC

The form is a 'SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26'. It is a 'FORMULIR 1724 INDUK'. The taxpayer is identified as 'A.1 NPWP 01.111.111.1-110-000', 'A.2 NAMA PT DC', and 'A.5 EMAIL : l.com'. The tax object table (B. OBJEK PAJAK) lists various items, with a red box highlighting a row for 'JASA KONSULTAN' with a value of 10,000.00. The total amount for PPh Pasal 23 is 10,000.00. The form also includes a section for attachments (C. LAMPIRAN) and a declaration section (D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN).

Sumber: Dokumentasi Perusahaan

2. Menerima Bukti Penerimaan Negara dari pembimbing lapangan

Gambar 3. 26 Dokumen Bukti Penerimaan Elektronik PT DC

	<p>KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</p> <p>LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200 email : pengaduan@pajak.go.id ; informasi@pajak.go.id</p>
BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK (BPE)	
NOMOR TANDA TERIMA ELEKTRONIK : 11111111111111111111	
NPWP	01.111.111.1-110-000
Nama	PT DC
Jenis Pajak	PPH2326
Pembetulan Ke-	0
Tanggal Terima	10-02-2021 5
Tahun Pajak	2021
Masa Pajak	1
	
Terima Kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda	

Sumber: Dokumentasi Perusahaan

3. Menerima Bukti Penerimaan Elektronik dari pembimbing lapangan

Gambar 3. 27 Dokumen Bukti Penerimaan Negara PT DC

2/10/2021 <https://mib.bankmandiri.co.id/corp/front/billpayment.do?action=doPrintBillPayme>

Nomor Referensi Transaksi	:	
No. Ref Perkumpulan	:	
Dari Rekening	:	
Customer Reference Number	:	
To Institution	:	50012 Pajak/PNBP/C
BUKTI PENERIMAAN NEGARA	:	Penerimaan Pajak
Data Pembayaran	:	-
Tanggal dan Jam Bayar	:	10/02/2021 15:17:07
Tanggal Buku	:	11/02/21
Kode Cabang Bank	:	008
NTB	:	
NTPN	:	2B222222BB22B2BB
STAN	:	072719
Data Setoran	:	-
Kode Billing	:	
Nama Wajib Pajak	:	PT DC
Alamat	:	
Nomor Objek Pajak	:	
Mata Anggaran	:	411124
Jenis Setoran	:	104
Masa Pajak	:	01012021
Nomor Ketetapan	:	00000000000000000000
Jumlah Setoran	:	Rp. 100.000
Mata Uang	:	IDR
Terbilang	:	
Keterangan	:	UI.123.456.7890000 ik computer dan tidak memerlukan tanda tangan
NPWP	:	
Daftar Pembayaran	:	00 TOTAL 100.000
Admin Bank	:	IDR
Total Bayar	:	IDR 100.000
Beneficiary Notification	:	
Notification Flag	:	Don't Send
Mode Instruksi	:	
Langsung	:	10-Feb-2021

Sumber: Dokumentasi Perusahaan

4. Menerima file Excel yang didalamnya terdapat format table (massa, status pembetulan, jasa yang berkaitan dengan PPh 23, total DPP, besarnya pajak PPh 23, tanggal bayar, NTPN, tanggal lapor dan status SPT) dan melakukan input SPT Masa PPh Pasal 23 baik status normal atau pembetulan. Pada kolom status pembetulan, massa, jasa yang berkaitan dengan PPh 23, total DPP, dan besarnya pajak PPh 23 angkanya berasal dari Formulir 1724 SPT Masa PPh Pasal 23. Kolom tanggal lapor dan status SPT angkanya diperoleh dari Bukti

Penerimaan Elektronik. Sedangkan untuk kolom tanggal bayar dan NTPN diperoleh dari Bukti Penerimaan Negara. Langkahnya sebagai berikut:

Masa Pajak Januari 2021 SPT PPh 23 Normal maka proses *penginputan* sebagai berikut:

- 1) Jumlah penghasilan bruto sebesar Rp 10.000.000 diperoleh dari SPT Masa PPh Pasal 23 seperti nomor 1.
- 2) Jumlah pajak yang dipotong sebesar Rp 100.000 diperoleh dari SPT Masa PPh Pasal 23 seperti nomor 2.
- 3) Total DPP diperoleh dari penjumlahan semua penerima penghasilan seperti nomor 3.
- 4) Jumlah Pajak Penghasilan PPh 21 sebesar Rp 100.000 diperoleh dari SPT Masa PPh 23 seperti nomor 4.
- 5) Tanggal bayar yaitu 10 Februari 2021 diperoleh dari Bukti Penerimaan Negara seperti nomor 5.
- 6) NTPN diperoleh dari Bukti Penerimaan Negara seperti nomor 6.
- 7) Tanggal lapor yaitu 10 Februari 2021 diperoleh dari Bukti Penerimaan Elektronik seperti nomor 7.
- 8) Tanggal lapor yaitu 10 Februari 2021 diperoleh dari Bukti Penerimaan Elektronik seperti nomor 8.

DC. Berikut proses melakukan *penginputan* PPh Pasal 23 menggunakan e-bupot:

1. Menerima *file excel* dari pembimbing lapangan yang isinya berupa tabel yang harus di rekapitulasi terlebih dahulu terkait masa pajak, tahun pajak, NPWP, kode objek pajak, penghasilan bruto, dan status fasilitas perusahaan berdasarkan data yang diberikan pembimbing lapangan.

Gambar 3. 29 Data Excel Rekapitulasi

No	Masa Pajak	Tahun Pajak	Tgl Pemotongan (dd/MM/yyyy)	Ber-NPWP ? (Y/N)	NPWP (tanpa format/tanda baca)	NIK (tanpa format/tanda baca)	Nomor Telp
1	6	2021	03/06/2021	Y	2B222222BB2222BB		
2	6	2021	10/06/2021	Y	1A111111AA11A1AA		
3	6	2021	21/06/2021	Y	3C333333CC3333CC		
Kode Objek Pajak	Penanda tangan BP Pengurus ? (Y/N)	Penghasilan Bruto	Mendapatkan Fasilitas ? (M/SKB/DTP)	Nomor SKB	Nomor Aturan DTP	NTPN DTP	
24-104-27	Y	1000000	N				
24-104-03	Y	0000000	N				
24-104-27	Y	1789344	N				

2. Pada Gambar 3.29 merupakan data *excel* yang harus diisi terlebih dahulu sebelum melakukan *impor*, data tersebut berdasarkan data yang sudah diberikan oleh pembimbing lapangan. Pada kolom masa pajak diisi masa 6 atau Juni, pada kolom tahun pajak diisi 2021, pada kolom tanggal pemotongan diisi tanggal 3 Juni 2021, kolom ber-NPWP diisi dengan Y yang menandakan jika memiliki NPWP, pada kolom NPWP diisikan nomor NPWP 2B222222BB2222BB, kolom kode diisi dengan 24-104-27 yang menandakan jika usaha Wajib Pajak bergerak dalam bidang Jasa penyimpanan, pengolahan dan/atau penyaluran data, informasi, dan/atau program, penandatanganan BP pengurus diisi dengan Y yang menandakan jika terdapat tanda tangan,

kolom penghasilan bruto diisi yaitu Rp 1.000.000, dan kolom mendapat fasilitas diisi N yang menandakan Non-Fasilitas. Setelah dilakukan rekapitulasi terhadap *file excel* maka langkah selanjutnya yaitu *rename file* tersebut dengan nama NPWP perusahaan.

3. Buka situs www.djponline.pajak.go.id.
4. Melakukan *login* dengan memasukan NPWP, *password*, dan mengisi kode keamanan.
5. Klik menu Laport dan pilih Pra Pelaporan karena akan menggunakan e-bupot. Klik menu e-bupot PPh Pasal 23/26.

6. M

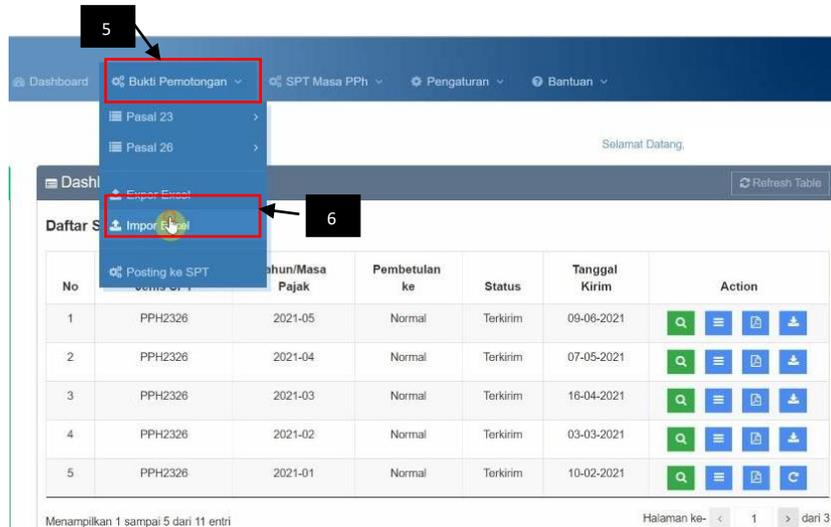
Gambar 3.30 Menu Pada Situs DJP Online



Pada Gambar 3.30 merupakan menu pada situs DJP *online*. Jika ingin melakukan *impor* bukti potong maka pilih menu lapor seperti nomor 2, lalu pilih menu Pra Pelaporan seperti nomor 3, setelah itu pilih e-Bupot PPh Pasal 23/26 seperti nomor 4.

7. Saat akan melakukan impor maka pilih menu Bukti Pemotongan lalu klik *Impor Excel*.

Gambar 3. 31 Impor Excel Rekapitulasi



Pada Gambar 3.31 merupakan cara untuk melakukan *import excel*.

Pilih menu Bukti Pemotongan seperti nomor 5 lalu pilih *import excel* seperti nomor 6.

7. Pada bagian File terdapat kotak Choose File maka yang dilakukan adalah *upload file excel* yang bernama nomor NPWP lalu klik Simpan.

Gambar 3. 32 Upload File Excel Rekapitulasi



Pada Gambar 3.32 merupakan cara melakukan *upload file excel* yang telah dilakukan rekapitulasi. Pada menu File(*.xls) klik *Choose File* lalu pilih *file excel* yang akan di *upload* seperti nomor 7 jika sudah maka klik *Simpan* seperti nomor 8. Jika proses *upload* sudah tersimpan maka proses *upload* akan menjadi 100% seperti nomor 9.

8. Lakukan *refresh* hingga keluar status keterangan Validasi

Gambar 3. 33 Proses Validasi

Daftar Dokumen

11 Refresh

Nomor Tiket	Nama File	Tanggal Upload	Jumlah Baris	Status	Keterangan Upload
926953	(redacted)	05-07-2021 11:07:11	1	Upload Excel	(redacted)
858924	(redacted)	04-06-2021 13:23:52	5	Validasi selesai	Bukti Potong berhasil di-generate
797578	(redacted)	07-05-2021	5	Validasi selesai	Bukti Potong berhasil di-generate

Refresh

Nomor Tiket	Nama File	Tanggal Upload	Jumlah Baris	Status	Keterangan Upload
926953	(redacted)	05-07-2021 11:07:11	3	Validasi selesai	Bukti Potong berhasil di-generate
858924	(redacted)	04-06-2021 13:23:52	5	Validasi selesai	Bukti Potong berhasil di-generate
797578	(redacted)	07-05-2021 16:14:46	5	Validasi selesai	Bukti Potong berhasil di-generate
713449	(redacted)	09-04-2021 17:32:01	2	Validasi selesai	Bukti Potong berhasil di-generate
619396	(redacted)	03-03-2021 08:55:02	3	Validasi selesai	Bukti Potong berhasil di-generate

Jika proses *impor* sudah berhasil maka yang harus dilakukan adalah klik menu *refresh* seperti Gambar 3.33 nomor 11. Jika dilakukan *refresh* maka akan terdapat perubahan pada status yang sebelumnya

Upload Excel seperti nomor 12 menjadi *Validasi Selesai* seperti nomor 13.

3.3.1.3 Gereja K

a) Melakukan Rekapitulasi SPT PPh Pasal 21

Dokumen yang dibutuhkan dalam merekapitulasi PPh Pasal 21 yaitu Bukti Penerimaan Elektronik (BPE), Bukti Penerimaan Negara, dan dokumen yang berkaitan dengan SPT Masa PPh Pasal 21. Proses melakukan rekapitulasi SPT PPh Pasal 21 dilakukan untuk periode Januari hingga Mei 2021. Berikut adalah cara melakukan rekapitulasi PPh Pasal 21:

1. Menerima dokumen terkait SPT Masa PPh Pasal 21 klien baik normal maupun pembetulan (Formulir 1721) dari pembimbing lapangan seperti gambar 3.34.

Gambar 3. 35 Dokumen Bukti Penerimaan Negara Gereja K

2/10/2021 <https://mib.bankmandiri.co.id/corp/front/billpayment.do?action=doPrintBillPayment>

Nomor Referensi Transaksi	:	
No. Ref Perkumpulan	:	
Dari Rekening	:	
Customer Reference Number	:	
To Institution	:	50012 Pajak/PNBP/Cukai
BUKTI PENERIMAAN NEGARA	:	Penerimaan Pajak
Data Pembayaran	:	
Tanggal dan Jam Bayar	:	13/02/2021 15:17:07
Tanggal Buku	:	
Kode Cabang Bank	:	
NTB	:	
NTPN	:	
STAN	:	
Data Setoran	:	
Kode Billing	:	
Nama Wajib Pajak	:	
Alamat	:	
Nomor Objek Pajak	:	
Mata Anggaran	:	411121
Jenis Setoran	:	100
Masa Pajak	:	01012021
Nomor Ketetapan	:	0000000000000000
Jumlah Setoran	:	Rp. 11.000.000
Mata Uang	:	IDR 11.000.000
Terbilang	:	
Keterangan	:	02.222.222.2-220-000
NPWP	:	
Daftar Pembayaran	:	00 TOTAL
Admin Bank	:	IDR 11.000.000
Total Bayar	:	IDR 11.000.000
Beneficiary Notification	:	
Notification Flag	:	Don't Send
Mode Instruksi	:	Langsung
Langsung	:	10-Feb-2021

Gereja K

Empat ribu dua ratus lima rupiah
puter dan tidak memerlukan tanda tangan

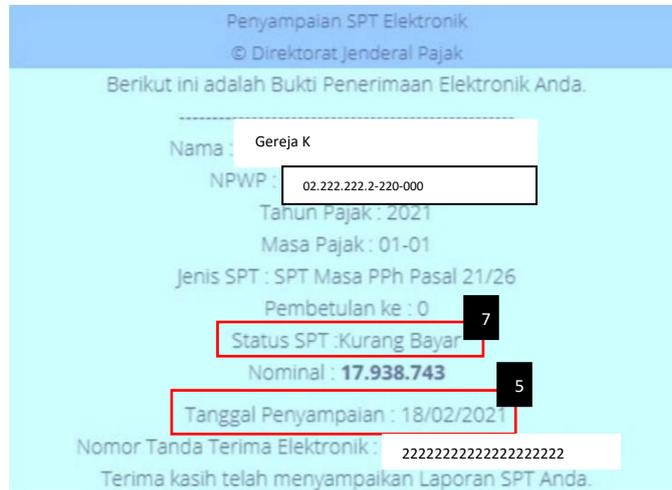
11.000.000

Print Simpan Sebagai Tutup

Sumber: Dokumentasi Perusahaan

3. Menerima Bukti Penerimaan Eletronik dari pembimbing lapangan seperti gambar 3.36.

Gambar 3. 36 Dokumen Bukti Penerimaan Elektronik Gereja K



Sumber: Dokumentasi Perusahaan

4. Menerima *file Excel* yang didalamnya terdapat format *table* (masa, status pembetulan, jumlah penerima penghasilan, penghasilan bruto, jumlah penerima penghasilan, jumlah pajak yang dipotong, total pajak yang disetorkan, tanggal lapor, tanggal bayar, dan status SPT) dan melakukan *input* SPT Masa PPh Pasal 21 baik status normal atau pembetulan. Pada kolom status pembetulan, massa, jumlah penerima penghasilan, penghasilan bruto, dan jumlah pajak yang dipotong angkanya berasal dari Formulir 1721 SPT Masa PPh Pasal 21. Kolom tanggal lapor dan status SPT angkanya diperoleh dari Bukti Penerimaan Elektronik. Sedangkan untuk kolom tanggal bayar diperoleh dari Bukti Penerimaan Negara. Langkahnya sebagai berikut:

Masa Pajak Januari 2021 SPT PPh 21 Normal maka proses penginputan sebagai berikut:

- 1) Jumlah tiap penerima penghasilan sebesar 22 diperoleh dari SPT Masa PPh Pasal 21 seperti nomor 1.
- 2) Jumlah penghasilan bruto sebesar Rp 273.689.316 diperoleh dari SPT Masa PPh Pasal 21 seperti nomor 2.
- 3) Jumlah pajak yang dipotong sebesar Rp 15.993.263 diperoleh dari SPT Masa PPh Pasal 21 seperti nomor 3.
- 4) Total pajak yang disetor sebesar Rp 17.938.743 diperoleh dari SPT Masa PPh Pasal 21 seperti nomor 4.
- 5) Tanggal lapor yaitu 18 Februari 2021 diperoleh dari Bukti Penerimaan Elektronik seperti nomor 5.
- 6) Tanggal bayar yaitu 10 Februari 2021 diperoleh dari Bukti Penerimaan Negara seperti nomor 6.
- 7) Status SPT Kurang Bayar diperoleh dari Bukti Penerimaan Elektronik seperti nomor 7.

Gambar 3. 37 Format Tabel dalam Pengisian

Rekapitulasi PPh Pasal 21 Gereja K

MASA	STATUS PEMBETULAN	Jumlah		Penghasilan Bruto		Jumlah		Penghasilan Bruto		Jumlah		Penghasilan Bruto		TOTAL
		Penerima Pengh.	Pegawai Tetap	Penerima Pengh.	Pegawai Tidak Tetap	Penerima Pengh.	Tenaga Ahli	Penerima Pengh.	Bukan Pegawai Berkecukupan	Penerima Pengh.	Bukan Pegawai Tidak Berkecukupan			
JANUARI	NORMAL	22	275.689.316	44	16.000.000			34	318.957.897					608.647.213
FEBRUARI	NORMAL	22	295.552.345	44	16.000.000			30	257.995.434					563.547.321
MARET	NORMAL	23	362.553.544	9	5.752.288			41	390.150.038					698.455.870
APRIL	NORMAL	23	294.396.056	12	10.175.521			40	304.325.517					608.897.094
MEL	NORMAL													
JUNI	NORMAL	1		2										
JULI	NORMAL													
AGUSTUS	NORMAL													
SEPTEMBER	NORMAL													
OCTOBER	NORMAL													
NOVEMBER	NORMAL													
DESEMBER	NORMAL													
TOTAL		90	1.200.191.261	109	53.854.137			145	1.210.528.886					2.463.774.304

Pegawai Tetap	Pegawai Tidak Tetap	Jml Pajak Dipotong				TOTAL	Jumlah Penghasilan Bruto			TOTAL	Jml Pajak Dipotong			Total yang disktor	SPT MASA PPh21		STATUS SPT
		Tenaga Ahli	Bukan Pegawai Berkecukupan	Bukan Pegawai Tidak	TOTAL		PESANGON	PENSIUN	TUNJANGAN		PESANGON	PENSIUN	TUNJANGAN		TGL LABA	TGL BAYAR	
15.993.263			1.945.480		17.938.743								17.938.743	18 Februari 2021	10 Februari 2021	KH	
15.318.218	48.218		1.945.480		17.309.916								17.309.916	10 Maret 2021	09 Maret 2021	KH	
25.632.497			1.307.321		26.939.818								26.939.818	16 April 2021	08 April 2021	KH	
16.727.234			780.162		17.507.396								17.507.396	10 Mei 2021	06 Mei 2021	KH	
73.670.206	48.718		4.970.941		78.689.865								78.689.865				

Sumber: Dokumentasi Perusahaan

- Melakukan rekapitulasi PPh Pasal 21 status normal dan pembetulan sampai dengan banyaknya dokumen terkait dengan SPT Masa PPh Pasal 21 yang telah diberikan oleh pembimbing lapangan (setahun atau tidak sampai setahun).

b) **Input e-SPT PPh Pasal 21**

Tugas melakukan *input* e-SPT PPh Pasal 21 dilakukan untuk beberapa perusahaan dengan periode yang sama yaitu Agustus 2021 serta dilakukan untuk 4 pegawai tetap dan 46 pegawai tidak tetap. Dokumen yang diperlukan saat melakukan *penginputan* e-SPT PPh Pasal 21 adalah *database* perusahaan terkait, Bukti Penerimaan Negara (BPN), dan

dokumen terkait SPT Masa PPh Pasal 21 dari pembimbing lapangan.

Berikut merupakan proses *penginputan* e-SPT PPh Pasal 21:

1. *Instal* aplikasi e-SPT PPh Pasal 21/26.

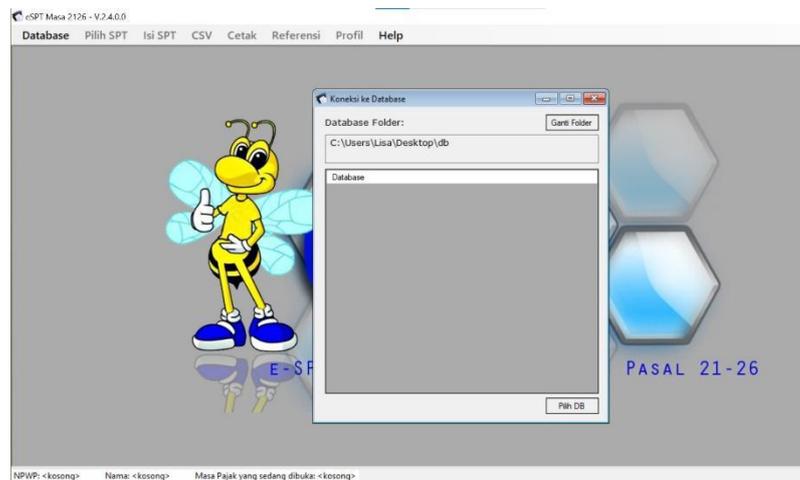
Gambar 3. 38 Aplikasi E-SPT PPh Pasal 21



Sumber: Dokumentasi Pribadi

2. Buka aplikasi e-SPT PPh Pasal 21/26.

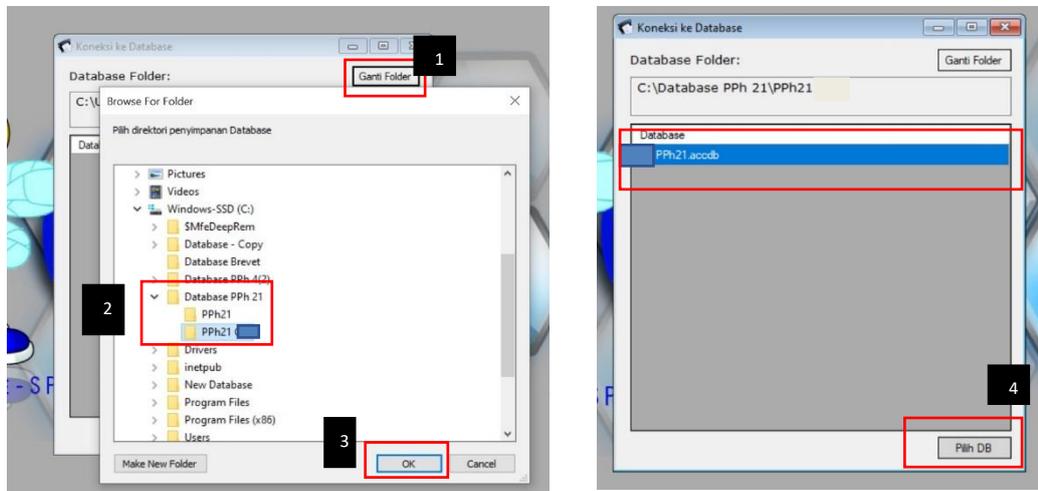
Gambar 3. 39 Halaman Awal Ketika Membuka E-SPT



Sumber: Dokumentasi Pribadi

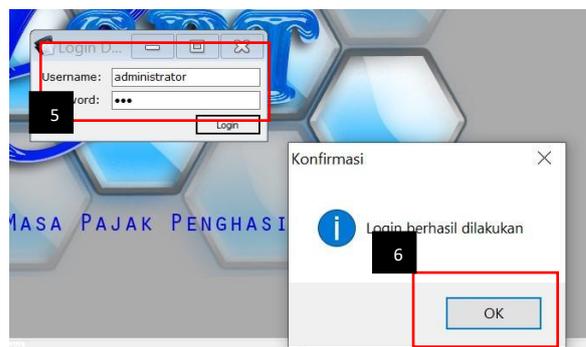
3. Memilih *database* yang akan digunakan lalu klik *database* untuk membukanya dan melakukan *login database* dengan mengisi *username* dan *password*.

Gambar 3. 40 Membuka Database di E-SPT



Pada Gambar 3.40 merupakan cara untuk membuka *database* yang akan digunakan agar bisa melakukan *input* data pada e-SPT PPh Pasal 21. Jika *folder database* yang dipilih sudah sesuai format maka akan memiliki format *.accdb* maka langkah selanjutnya bisa klik Pilih DB. Jika *database* sudah berhasil terbuka maka langkah selanjutnya yaitu melakukan *login*.

Gambar 3. 41 Login Pada E-SPT PPh Pasal 21

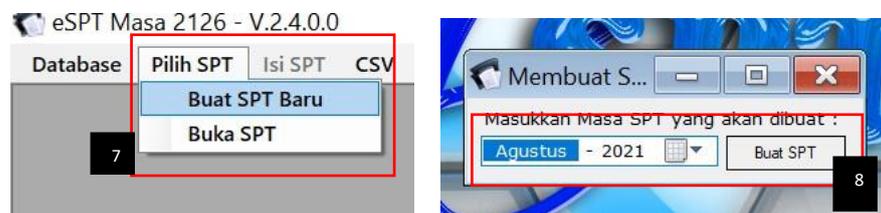


Pada Gambar 3.41 saat ingin melakukan *login* maka harus memasukan *username* yaitu *administrator* dan *password* yaitu *123* jika sudah lalu

klik *Login*. Jika *login* berhasil maka akan keluar pemberitahuan jika *login* telah berhasil dan bisa klik OK.

4. Jika *database* sudah terbuka pilih SPT dan buat SPT baru dengan mengisi masa pajak yang diperlukan. Lalu klik Buat SPT.

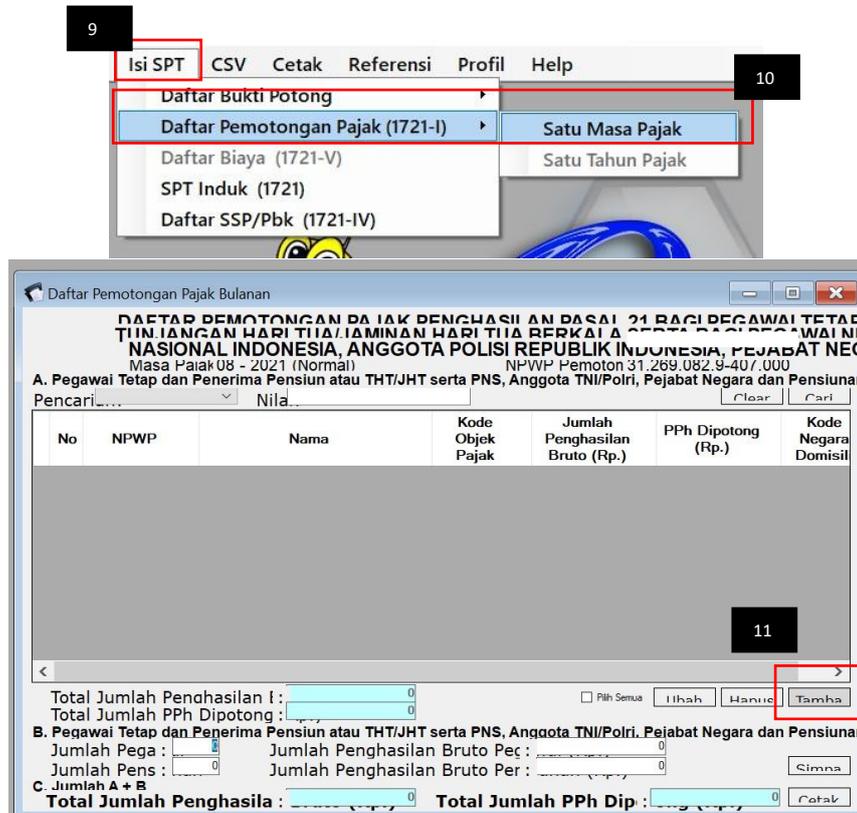
Gambar 3. 42 Membuat SPT Baru Gereja K



Pada Gambar 3.42 merupakan langkah jika sebelumnya Wajib Pajak belum membuat SPT pada periode tertentu yaitu dapat dengan memilih Pilih SPT dan pilih Buat SPT Baru. Jika sudah memilih Buat SPT Baru langkah selanjutnya yaitu memilih Masa SPT yang akan dibuat untuk Gereja K masa yang akan dibuat adalah masa Agustus 2021 jika sudah klik Buat SPT.

5. Pilih isi SPT lalu klik daftar pemotongan pajak (1721-1) kemudian pilih Satu Masa Pajak. Jika ingin melakukan *input* data transaksi klik Tambah untuk melakukan pengisian penghasilan bagi pegawai tetap.

Gambar 3. 43 Menginput Daftar Pemotongan Gereja K

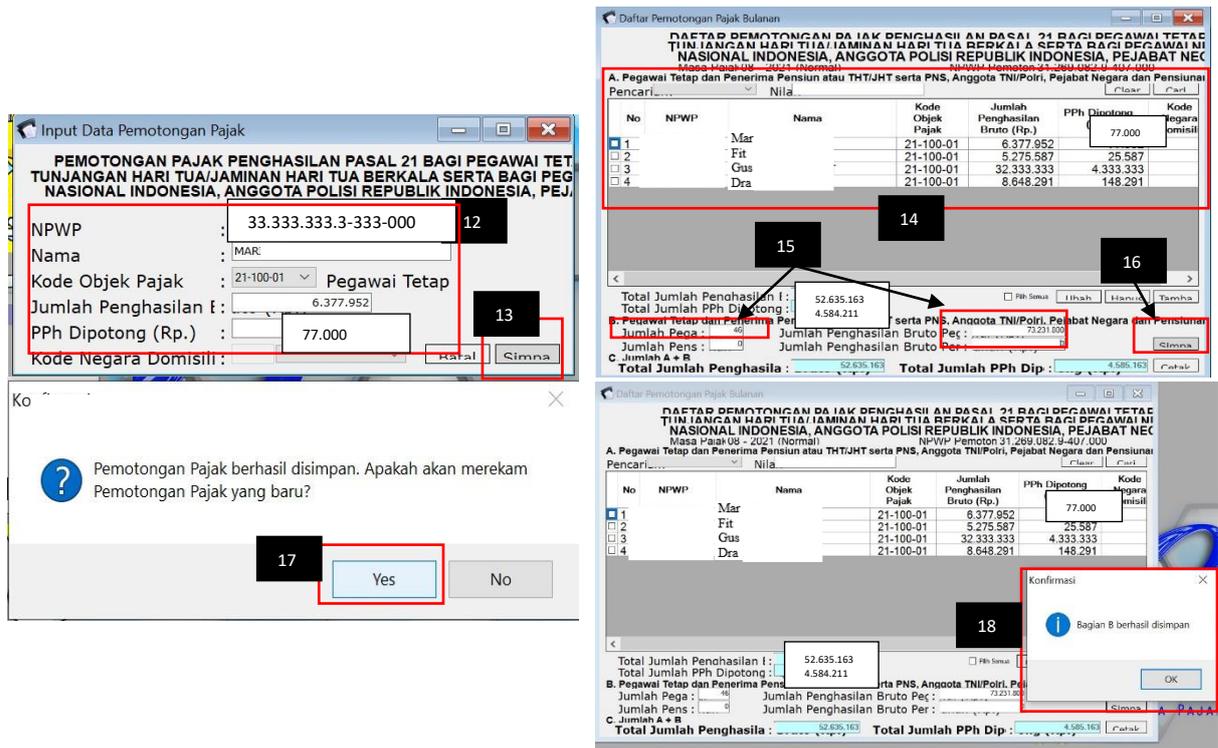


Pada Gambar 3.43 akan dilakukan *penginputan* Daftar Pemotongan selama Satu Masa Pajak maka yang harus dilakukan adalah pilih menu Isi SPT seperti nomor 9, lalu pilih Daftar Pemotongan Pajak (1721-I) Satu Masa Pajak seperti nomor 10. Lalu akan muncul tampilan Daftar Pemotongan Pajak Bulanan untuk mengisi data pegawai tetap yang penghasilannya diatas PTKP maka pilih Tambah seperti nomor 11.

6. Isikan data nomor NPWP, nama, kode objek pajak, jumlah penghasilan bruto, dan PPh dipotong lalu klik simpan. Pastikan semua data pegawai tetap sudah terisi sesuai dengan jumlah pegawai tetap. Isi juga daftar pegawai tetap yang penghasilannya tidak lebih PTKP

denga nisi pada kolom jumlah pegawai dan jumlah penghasilan bruto lalu klik simpan.

Gambar 3. 44 Mengisi Data Daftar Pemotongan Pajak



Pada Gambar 3.44 merupakan cara untuk mengisi Daftar Pemotongan berdasarkan data yang sudah diberikan pembimbing lapangan. Bagi pegawai tetap yang memiliki penghasilan diatas PTKP maka harus mengisi NPWP yaitu 33.333.333.3-333-000, nama yaitu Mar, kode pajak 21-100-01 yang menandakan pegawai tetap, jumlah penghasilan bruto yaitu Rp 6.377.952, dan PPh yang dipotong Rp 77.000. Setelah itu bisa terus mengisi daftar pemotongan bagi Wajib Pajak berpenghasilan diatas PTKP hingga 4 pegawai, jika sudah maka klik Simpan dan akan muncul semua pegawai tetap penghasilan diatas PTKP seperti nomor 14. Bagi pegawai tetap penghasilan di bawah PTKP

PTKP maka bisa mengisi jumlah pegawai sebanyak 46 dan jumlah penghasilan bruto sebesar Rp 73.231.800 seperti nomor 15. Lalu klik Simpan untuk menyimpan perubahan karena telah mengisi bagian pegawai tetap di bawah PTKP. Jika muncul kotak notifikasi Bagian B Berhasil disimpan maka klik OK.

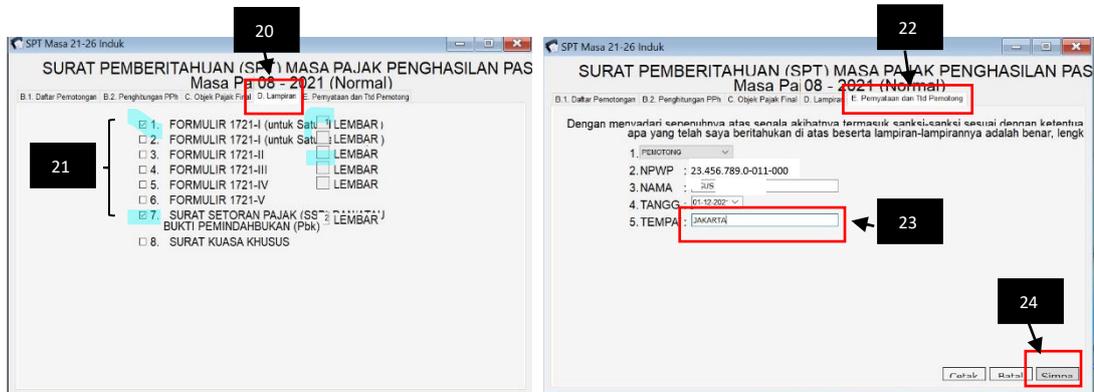
- Setelah proses pengisian SPT selesai selanjutnya pilih menu isi SPT pilih SPT Induk (1721) maka akan menampilkan jumlah pajak terutang.

Gambar 3. 45 SPT Induk Gereja K

NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp.)	JUMLAH PAJAK PENGHASILAN (Rp.)
1.	PEGAWAI TETAP	21-100-01	50	125.866.963	4.585.163
2.	PENERIMA PENSIUN BERKALA	21-100-02	0	0	0
3.	PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU TENAGA KERJA LEPAS	21-100-03	0	0	0
4.	BUKAN PEGAWAI:				
4a.	DISTRIBUTOR MULTILEVEL MARKETING (MLM)	21-100-04	0	0	0
4b.	PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI	21-100-05	0	0	0
4c.	PENJAJA BARANG DAGANGAN	21-100-06	0	0	0
4d.	TENAGA AHLI	21-100-07	0	0	0
4e.	BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN	21-100-08	0	0	0
4f.	BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG TIDAK BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN	21-100-09	0	0	0
5.	ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ATAU DEWAN PENGAWAS YANG TIDAK MERANGKAP SEBAGAI PEGAWAI TETAP	21-100-10	0	0	0
6.	MANTAN PEGAWAI YANG MENERIMA JASA PRODUKSI, TANTIEM, BONUS ATAU IMBALAN LAIN	21-100-11	0	0	0
7.	PEGAWAI YANG MELAKUKAN PENARIKAN DANA PENSIUN	21-100-12	0	0	0
8.	PESERTA KEGIATAN	21-100-13	0	0	0
9.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 TIDAK FINAL LAINNYA	21-100-99	0	0	4.584.211
10.	PEGAWAI/PEMBERI JASA/PESERTA KEGIATAN/PENERIMA PENSIUN BERKALA SEBAGAI WAJIB PAJAK LUAR NEGERI	27-100-99	0	0	0
11.	JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 10)		50	125.866.963	4.585.163

- Pada tab SPT Induk pilih “D. Lampiran *Check List* yang akan dilampirkan” dan “E. Pernyataan dan TTd Pemotong” lalu isi kolom tempat sesuai daerah lalu klik simpan dan cetak.

Gambar 3.46 Induk Gereja K



Pada Gambar 3.46 bagian SPT Induk yang harus dilakukan adalah mengisi bagian D. Lampiran nomor 20 dengan memberikan *checklist* seperti nomor 21 yang diberi warna biru diantaranya formulir 1721-1 sebanyak 1 lembar dan SPP yang diberikan pembimbing lapangan sebanyak 2 lembar. Mengisi bagian E. Pernyataan dan TTD Pemotong seperti nomor 22 pada bagian tempat diisi Jakarta sesuai dengan informasi yang diberikan pembimbing lapangan seperti nomor 23. Setelah selesai klik Simpan seperti nomor 24.

9. Selanjutnya pajak yang terutang harus dibayarkan terlebih dahulu untuk memperoleh nomor NTPN yang dapat dilihat dari Bukti Penerimaan Negara yang diperoleh dari pembimbing lapangan. Setelah mendapatkan nomor NTPN langkah berikutnya yaitu memasukkan data tersebut ke dalam daftar SSP dengan pilih menu isi SPT lalu pilih daftar SSP setelah selesai pilih simpan dan kembali ke tampilan awal.

Gambar 3. 47 Bukti Penerimaan Negara Gereja K

325126322

PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Kp. BEKASI 17000

TANDA TERIMA
Setoran Pajak (MFM Billing)

26 Tanggal : 07-09-2021 08:45:04
No.Resi : 17000-30/2021/824812 Petugas : 550001606

Tanggal Bukti : 07-09-2021 NTP : 000011123445
Kode Cabang Pos : 017000 NTEN : 11111AA1AAAIB 27
Maktu Transaksi : 07-09-2021 08:44:57 STAN : 642793

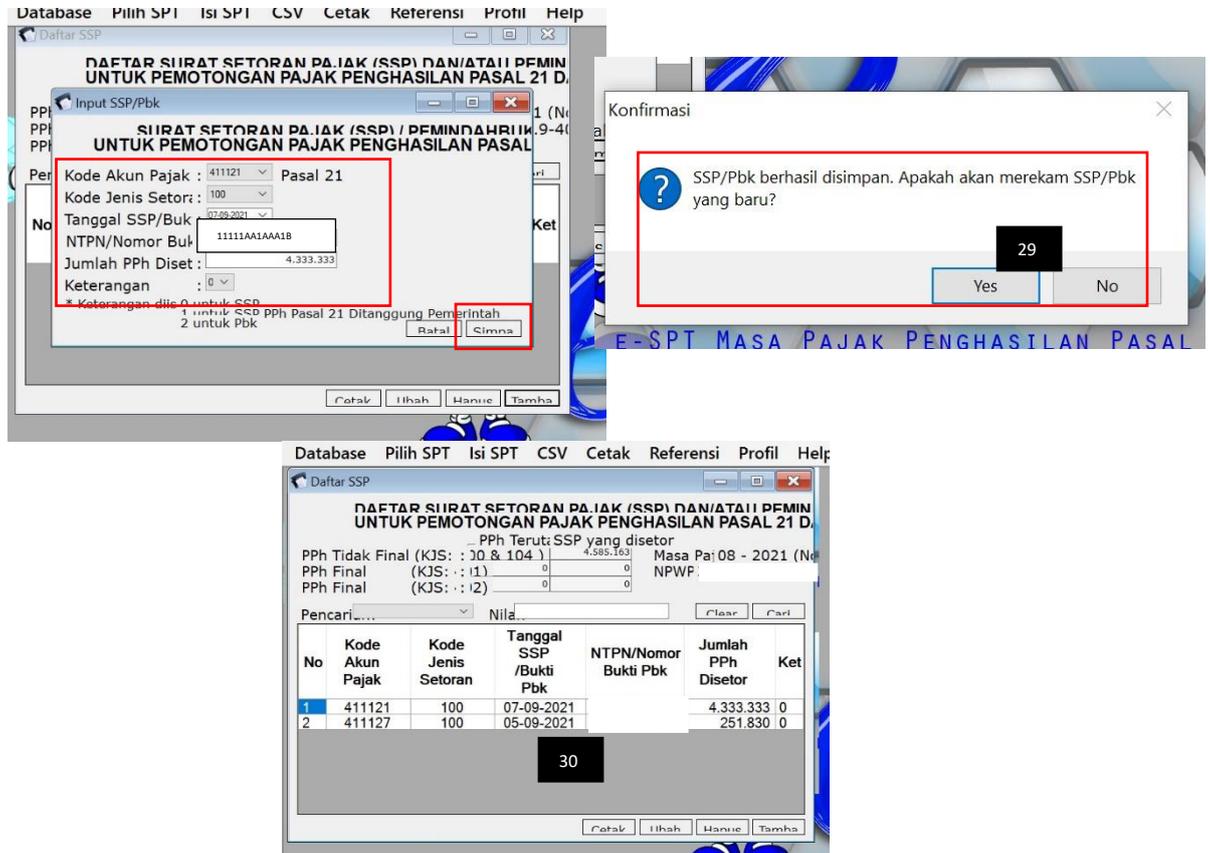
Kode Billing :
NPM:
Nama Wajib Pajak : Gereja K
Alamat:
Akun : 411121
Jenis Setoran : 100 25
Masa Pajak : 08082021
No SK : 0000000000000000
No STP :
28 Jumlah Setoran : Rp. 4.333.333

Mata Uang : IDR
KANTOR POS POS INDONESIA

Terbilang : (Empat juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah)
Syarat dan ketentuan berlaku. <http://www.posindonesia.co.id>

Sumber: Dokumentasi Perusahaan

Gambar 3. 48 Mengisi Daftar SSP Gereja K



Pada Gambar 3.48 mengisi daftar SSP seperti Bukti Penerimaan Negara yang diperoleh dari pembimbing lapangan yaitu kode akun pajak 411121 yang menandakan PPh Pasal 21 dan kode jenis setoran 100 seperti nomor 25, Tanggal SSP yaitu 7 September 2021 seperti nomor 26, NTPN 11111AA1AAA1B seperti nomor 27, dan Jumlah PPh Disetor Rp 4.333.333 seperti nomor 28 jika sudah klik Simpan. Jika ingin melanjutkan menginput SSP maka klik Yes seperti nomor 29. Saat semua SSP yang dibutuhkan sudah terinput maka akan muncul tampilan seperti nomor 30.

- Pilih menu cetak lalu pilih formulir SPT dan klik formulir apa saja yang akan dicetak (1721-1, 1721, dan Daftar SSP).

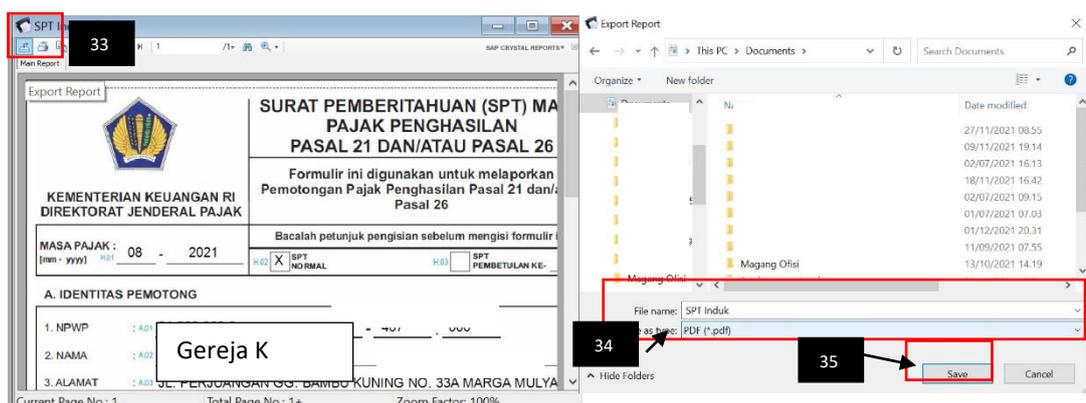
Gambar 3. 49 Mencetak SPT PPh Pasal 21



Pada Gambar 3.49 merupakan cara untuk mencetak formulir SPT PPh Masa Pasal 21 yang harus dilakukan yaitu memilih menu Cetak klik Formulir seperti gambar nomor 31 setelah itu akan muncul menu cetak SPT yang dibutuhkan pembimbing lapangan adalah formulir 1721, 1721-1, dan SSP lalu klik formulir yang akan dicetak.

- Setelah *file* terbuka lalu pilih menu *export report* untuk menyimpan formulir.

Gambar 3. 50 Export Formulir SPT



Pada Gambar 3.50 merupakan cara untuk menyimpan yang nantinya akan dicetak yaitu klik menu *Main Report* pada pojok kiri atas seperti nomor 33 yang nantinya akan diarahkan ke tempat penyimpanan laptop,

selanjutnya mengganti nama dan mengubah tipe *file* menjadi *pdf* seperti gambar nomor 34 setelah itu klik *Save* seperti gambar nomor 35.

3.3.1.4 PT PAS

a) Melakukan Rekapitulasi SPT PPh Pasal 21

Dokumen yang dibutuhkan dalam merekapitulasi PPh Pasal 21 yaitu Bukti Penerimaan Elektronik (BPE), Bukti Penerimaan Negara, dan dokumen yang berkaitan dengan SPT Masa PPh Pasal 21. Proses rekapitulasi SPT PPh Pasal 21 dilakukan untuk periode Januari hingga Mei 2021. Berikut adalah cara melakukan rekapitulasi PPh Pasal 21:

1. Menerima dokumen terkait SPT Masa PPh Pasal 21 klien baik normal maupun pembetulan (Formulir 1721) dari pembimbing lapangan seperti gambar 3.51.

Gambar 3. 51 Dokumen SPT Masa PPh Pasal 21 PT PAS

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26

FORMULIR 1721

Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26

area barcode

MASA PAJAK : 01 - 2021

Bacalah petunjuk pengisian sebelum mengisi formulir ini

JUMLAH LEMBAR SPT TERMASUK LAMPIRAN : 01

SPT NORMAL SPT PEMBEHALAN KE-

A. IDENTITAS PEMOTONG

1. NPWP : 04.444.444.4-440-000

2. NAMA : PT PAS

3. ALAMAT : [REDACTED]

4. NO. TELEPON : [REDACTED] 5. EMAIL : [REDACTED]

B. OBJEK PAJAK

NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIPOYONG (Rp)
1.	PEGAWAI TETAP	21-100-01	22	273.689.316	15.993.263
2.	PENERIMA PENSUN BERKALA	21-100-02	0	0	0
3.	PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU TENAGA KERJA LEPAS	21-100-03	44	17.400.000	0
4.	BUKAN PEGAWAI:				
4a.	DISTRIBUTOR MULTILEVEL MARKETING (MLM)	21-100-04	0	0	0
4b.	PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI	21-100-05	0	0	0
4c.	PENAJA BARANG DAGANGAN	21-100-06	0	0	0
4d.	TENAGA AHLI	21-100-07	0	0	0
4e.	BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA GAJALAN YANG BERKAITAN DENGAN MASA LAYANAN	21-100-08	34	318.957.897	1.000.000
4f.	BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA GAJALAN YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN MASA LAYANAN	21-100-09	0	0	0
4g.	MANTAN PEGAWAI YANG MENERIMA GAJALAN PRODUKSI/TAWARAN BOKU ATAU BAHAN LAIN	21-100-10	0	0	0
4h.	PEGAWAI YANG MELAKUKAN PENARIKAN DANA PENSUN	21-100-11	0	0	0
4i.	PESERTA KEGIATAN	21-100-12	0	0	0
4j.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 TIDAK FINAL	21-100-13	0	0	0
4k.	PEGAWAI/PEKERJA/PEKERJA BERTAMBAH/PEKERJA PENSUN BERKALA SEBAGAI WAJIB PAJAK LUAR NEGERI	21-100-99	0	0	0
10.	JUMLAH (JUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 9)		100	610.047.213	16.993.263

PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR

12. STP PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 (HANYA POKOK PAJAK) : 0,00

13. KELEBIHAN PENYETORAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 DARI MASA PAJAK : 0,00

14. JUMLAH (ANGKA 12 + ANGKA 13) : 0,00

15. PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR (ANGKA 11 KOLONG 6 - ANGKA 14) : 16.993.263

16. PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR PADA SPT YANG DIBETULKAN (PERHATIKAN DARI BAGIAN B ANGKA 15 DARI SPT YANG DIBETULKAN) : 0,00

17. PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR KARENA PEMBEHALAN (ANGKA 15 - ANGKA 16) : 0,00

18. KELEBIHAN SETOR PADA ANGKA 15 ATAU ANGKA 17 AKAN DIKOMPENSASIKAN KE MASA PAJAK (mm - yyyy) : 0,00

HALAMAN 1

Sumber: Dokumentasi Perusahaan

- Menerima Bukti Penerimaan Negara dari pembimbing lapangan seperti gambar 3.52.

Gambar 3. 52 Dokumen Bukti Penerimaan Negara PT PAS

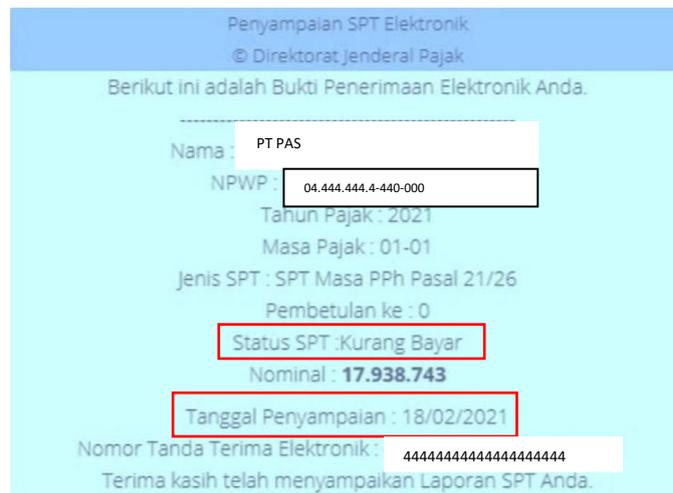
2/10/2021 <https://mib.bankmandiri.co.id/corp/front/billpayment.do?action=doPrintBillPayment>

Nomor Referensi Transaksi	:	
No. Ref Perkumpulan	:	
Dari Rekening	:	
Customer Reference Number	:	
To Institution	:	50012 Pajak/PNBP/Cukai
BUKTI PENERIMAAN NEGARA	:	Penerimaan Pajak
Data Pembayaran	:	
Tanggal dan Jam Bayar	:	14/02/2021 15:17:07
Anggaran Bank	:	
Kode Cabang Bank	:	
NTB	:	
NTPN	:	
STAN	:	
Data Setoran	:	
Kode Billing	:	
Nama Wajib Pajak	:	PT PAS
Alamat	:	
Nomor Objek Pajak	:	
Mata Anggaran	:	411121
Jenis Setoran	:	100
Masa Pajak	:	01012021
Nomor Ketetapan	:	0000000000000000
Jumlah Setoran	:	Rp. 11.500.000
Mata Uang	:	IDR 11.500.000
Terbilang	:	11.500.000
Keterangan	:	04.444.444.4-440-000 empat ribu dua ratus lima rupiah puler dan tidak memerlukan tanda tangan
NPWP	:	
Daftar Pembayaran	:	00 TOTAL 11.500.000
Admin Bank	:	IDR 0.00
Total Bayar	:	IDR 10.904.205.00
Beneficiary Notification	:	11.500.000
Notification Flag	:	Don't
Mode Instruksi	:	
Langsung	:	10-Feb-2021

Sumber: Dokumentasi Perusahaan

3. Menerima Bukti Penerimaan Eletronik dari pembimbing lapangan seperti gambar 3.53.

Gambar 3. 53 Dokumen Bukti Penerimaan Elektronik PT PAS



Sumber: Dokumentasi Perusahaan

4. Menerima *file Excel* yang didalamnya terdapat format *table* (masa, status pembedulan, jumlah penerima penghasilan, penghasilan bruto, jumlah penerima penghasilan, jumlah pajak yang dipotong, total pajak yang disetorkan, tanggal lapor, tanggal bayar, dan status SPT) dan melakukan *input* SPT Masa PPh Pasal 21 baik status normal atau pembedulan. Pada kolom status pembedulan, massa, jumlah penerima penghasilan, penghasilan bruto, dan jumlah pajak yang dipotong angkanya berasal dari Formulir 1721 SPT Masa PPh Pasal 21. Kolom tanggal lapor dan status SPT angkanya diperoleh dari Bukti Penerimaan Elektronik. Sedangkan untuk kolom tanggal bayar diperoleh dari Bukti Penerimaan Negara. Langkahnya sebagai berikut:

Masa Pajak Januari 2021 SPT PPh 21 Normal maka proses *penginputan* sebagai berikut:

- 1) Jumlah tiap penerima penghasilan sebesar 22 diperoleh dari SPT Masa PPh Pasal 21 seperti nomor 1.
- 2) Jumlah penghasilan bruto sebesar Rp 273.689.316 diperoleh dari SPT Masa PPh Pasal 21 seperti nomor 2.
- 3) Jumlah pajak yang dipotong sebesar Rp 15.993.263 diperoleh dari SPT Masa PPh Pasal 21 seperti nomor 3.
- 4) Total pajak yang disetor sebesar Rp 16.993.263 diperoleh dari SPT Masa PPh Pasal 21 seperti nomor 4.
- 5) Tanggal lapor yaitu 18 Februari 2021 diperoleh dari Bukti Penerimaan Elektronik seperti nomor 5.
- 6) Tanggal bayar yaitu 14 Februari 2021 diperoleh dari Bukti Penerimaan Negara seperti nomor 6.
- 7) Status SPT Kurang Bayar diperoleh dari Bukti Penerimaan Elektronik seperti nomor 7.

Gambar 3. 54 Format Tabel dalam Pengisian

Rekapitulasi PPh Pasal 21 PT PAS

MASA	STATUS PEMBETULAN	Jumlah		Penghasilan Bruto		Jumlah		Penghasilan Bruto		Jumlah		Penghasilan Bruto		TOTAL
		Penerima Pengh.	Pegawai Tetap	Penerima Pengh.	Pegawai Tidak Tetap	Penerima Pengh.	Tenaga Ahli	Penerima Pengh.	Bukan Pegawai Berkesinambungan	Penerima Pengh.	Bukan Pegawai Tidak Berkesinambungan			
JANUARI	NORMAL	22	375.689.315	44	17.400.000			34		318.957.897			630.047.213	
FEBRUARI	NORMAL	22	269.512.345	44	19.726.348			30		237.095.434			546.374.117	
MARET	NORMAL	23	362.513.544	9	5.752.288			41		330.150.038			698.415.870	
APRIL	NORMAL	23	294.396.036	12	10.175.521			40		304.325.517			608.897.094	
MAY	NORMAL													
JUNI	NORMAL	1		2										
JULI	NORMAL													
AUGUSTUS	NORMAL													
SEPTEMBER	NORMAL													
OKTOBER	NORMAL													
NOVEMBER	NORMAL													
DESEMBER	NORMAL													
TOTAL		90	1.200.191.261	109	53.894.157			145		1.210.528.886			2.463.774.304	

Jml Pajak Dipotong				TOTAL	Jumlah Penghasilan Bruto		TOTAL	Jml Pajak Dipotong		TOTAL	Total yang diotor	SPT MASA PPh21		
Pegawai Tetap	Pegawai Tidak Tetap	Tenaga Ahli	Bukan Pegawai Berkesinambungan		PESANGON	PENSUN, TUNJANGAN		PESANGON	PENSUN, TUNJANGAN			TGL LABOR	TGL BAYAR	STATUS SPT
15.993.263			1.000.000	16.993.263						17.938.742	18 Februari 2021	14 Feb 21	KR	
25.632.497			1.307.321	26.939.818						26.939.818	10 Maret 2021	09 Maret 2021	KR	
16.727.234			780.162	17.507.396						17.507.396	16 April 2021	08 April 2021	KR	
											10 Mei 2021	06 Mei 2021	KR	
73.670.206	48.718		4.970.941	78.689.865						78.689.865				

Sumber: Dokumentasi Perusahaan

- Melakukan rekapitulasi PPh Pasal 21 status normal dan pembetulan sampai dengan banyaknya dokumen terkait dengan SPT Masa PPh Pasal 21 yang telah diberikan oleh pembimbing lapangan (setahun atau tidak sampai setahun).

b) Melakukan Rekapitulasi SPT PPh Pasal 23

Dokumen yang dibutuhkan dalam merekapitulasi PPh Pasal 23 yaitu Bukti Penerimaan Elektronik (BPE), Bukti Penerimaan Negara, dan dokumen yang berkaitan dengan SPT Masa PPh Pasal 23 (formulir 1724). Proses

rekapitulasi SPT PPh Pasal 23 dilakukan untuk periode Januari hingga Mei 2021 atas transaksi jasa lain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Berikut adalah cara melakukan rekapitulasi PPh Pasal 23 masa Januari:

1. Mendapatkan dokumen terkait SPT Masa PPh Pasal 23 klien baik normal maupun pembetulan (Formulir 1724) dari pembimbing lapangan seperti gambar 3.55.

Gambar 3. 55 Dokumen SPT Masa PPh Pasal 23 PT PAS

Area studies

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26 FORMULIR 1724 INDIK

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Masa Pajak (mm/yyyy) H.1
01 - 2021

Becalah patunjuk pengisian sebelum mengisi formulir ini

H.2 SPT Normal H.3 Pembetulan Ke- H.4

JUMLAH LEMBAR SPT TERMASUK LAMPIRAN : 0 H.5
(Dua oleh pengisi)

A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

A.1 NPWP 04.444.444.4-440-000
A.2 NAMA PT PAS
A.3 ALAMAT
A.4 NO. TELEPON
A.5 EMAIL : l.com

B. OBJEK PAJAK

NO	URAIAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp.)	JUMLAH PPh YANG DIPOTONG/ DTP(Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5
I. PPh PASAL 23				
1	DEVIDEN	24-101-01	0,00	0,00
2	BUNGA	24-102-01	0,00	0,00
3	ROYALTI	24-103-01	0,00	0,00
4	HADIAH, PENGHARGAAN, BONUS DAN LAINNYA	24-105-01	0,00	0,00
5	SERVA DAN PENGHASILAN LAIN SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN HARTA	24-105-02	0,00	0,00
6	6a. JASA TEKNIK	24-104-01	0,00	0,00
6	6b. JASA MANAJEMEN	24-104-02	0,00	0,00
6	6c. JASA KONSULTAN	24-104-03	10.500,00	160.000,00
7	JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D 6)		10.500,00	160.000,00
8	JUMLAH PPh PASAL 23 YANG KURANG DISETOR SETELAH DIKURANGI PPh PASAL 23 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)			160.000,00
9	JUMLAH PPh PASAL 23 YANG KURANG DISETOR SEHUBUNGAN DENGAN PENAMBAHAN DAN PEMBELTAN BUKTI PEMOTONGAN			0,00
II. PPh PASAL 26				
10	DEVIDEN	27-101-01	0,00	0,00
11	BUNGA	27-102-01	0,00	0,00
12	ROYALTI	27-103-01	0,00	0,00
13	SERVA DAN PENGHASILAN LAIN SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN HARTA	27-105-01	0,00	0,00
14	MBALAN SEHUBUNGAN DENGAN JASA PEKERJAAN DAN KEGIATAN	27-104-01	0,00	0,00
15	HADIAH DAN PENGHARGAAN	27-105-02	0,00	0,00
16	PENSIUN DAN PEMBAYARAN BERKALA LAINNYA	27-105-03	0,00	0,00
17	PREMI SWAP DAN TRANSAKSI LINDUNG NILAI LAINNYA	27-102-02	0,00	0,00
18	KELUNTUNGAN KARENA PEMBEBASAN UTANG	27-105-04	0,00	0,00
19	PENGHASILAN DARI PENJUALAN ATAU PENGALIHAN HARTA DI INDONESIA	27-105-05	0,00	0,00
20	DIVIDEN ADJUSNED RESERVENYA	27-105-06	0,00	0,00
21	PENGHASILAN DARI PENJUALAN ATAU PENGALIHAN SAHAM	27-105-07	0,00	0,00
22	PENGHASILAN KENA PAJAK BUKIT SETELAH PAJAK	27-105-01	0,00	0,00
23	JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 10 S.D 22)		0,00	0,00
24	JUMLAH PPh PASAL 26 YANG KURANG DISETOR SETELAH DIKURANGI PPh PASAL 26 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)			0,00
25	JUMLAH PPh PASAL 26 YANG KURANG DISETOR SEHUBUNGAN DENGAN PENAMBAHAN DAN PEMBELTAN BUKTI PEMOTONGAN			0,00

1) Tidak termasuk deviden kepada WP orang pribadi selain suami;
2) Tidak termasuk bunga bank terhadap objek PPh Pasal 4 ayat (2);
3) Saham yang telah dipotong PPh pasal 21 ayat (1) huruf a;
4) Tidak termasuk sewa tanah dan bangunan yang telah dikena PPh Pasal 4 ayat (2);
5) Jasa jasa lain sebagaimana angka 6d diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan mengenai penjumlahan dari kode objek pajak 24-104-04 sampai dengan 24-104-05 pada Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23/26.

BAGIAN C. LAMPIRAN

C.1 SPT Masa Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 lembar
C.2 SPT Masa Sisa Pajak Bukti lembar
C.3 SPT Masa Pembetulan lembar
C.4 Surat Kuasa Khusus lembar
C.5 Fotokopi Surat Keterangan Bebas lembar
C.6 Fotokopi Surat Keterangan Domisili lembar
C.7 Fotokopi SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 yang dibetulkan termasuk lampiran dan Bukti Penyerahan Surat

BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN

Dengan menyetujui keabsahan data yang diisikan, termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampiran yang telah saya lampirkan adalah benar, lengkap dan jelas.

D.1 WAJIB PAJAK/ WAKIL WAJIB PAJAK (PENGURUS, DLL)
D.2 KUASA HUKUM ADA LALU
D.3 NAMA
D.4 NPWP
D.5 TANGGAL
D.6 TEMPAT

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengantar bahwa dokumen ini telah diandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah.

Sumber: Dokumentasi Perusahaan

2. Menerima Bukti Penerimaan Negara dari pembimbing lapangan

Gambar 3. 56 Dokumen Bukti Penerimaan Elektronik PT PAS

	KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	
	LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200 email : pengaduan@pajak.go.id ; informasi@pajak.go.id	
BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK (BPE)		
NOMOR TANDA TERIMA ELEKTRONIK : 44444444444444444444		
NPWP	04.444.444.4-440-000	
Nama	PT PAS	
Jenis Pajak	: PPH2326	
Pembetulan Ke-	: 0	
Tanggal Terima	: 10-02-2021 5	
Tahun Pajak	: 2021	
Masa Pajak	: 1	
Terima Kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda		

Sumber: Dokumentasi Perusahaan

3. Menerima Bukti Penerimaan Eletronik dari pembimbing lapangan

Gambar 3. 57 Dokumen Bukti Penerimaan Negara PT PAS

2/10/2021 <https://mib.bankmandiri.co.id/corp/front/billpayment.do?action=doPrintBillPayme>

Nomor Referensi Transaksi	:	
No. Ref Perkumpulan	:	
Dari Rekening	:	
Customer Reference Number	:	
To Institution	:	50012 Pajak/PNBP/Cukai
BUKTI PENERIMAAN NEGARA	:	Penerimaan Pajak
Data Pembayaran	:	-
Tanggal dan Jam Bayar	:	10/02/2021 15:17:07
Tanggal Buku	:	11/02/21
Kode Cabang Bank	:	008
NTB	:)
NTPN	:	3C333333CC33C3CC
STAN	:	07/2/19
Data Setoran	:	-
Kode Billing	:	
Nama Wajib Pajak	:	PT PAS
Alamat	:	
Nomor Objek Pajak	:	
Mata Anggaran	:	411124
Jenis Setoran	:	104
Masa Pajak	:	01012021
Nomor Ketetapan	:	0000000000000000
Jumlah Setoran	:	Rp. 110.000
Mata Uang	:	IDR
Terbilang	:	
Keterangan	:	01.123.456.7-890-000 ik computer dan tidak memerlukan tanda tangan
NPWP	:	
Daftar Pembayaran	:	00 TOTAL 110.000
Admin Bank	:	IDR
Total Bayar	:	IDR 110.000
Beneficiary Notification	:	
Notification Flag	:	Don't Send
Mode Instruksi	:	
Langsung	:	10-Feb-2021

Sumber: Dokumentasi Perusahaan

4. Menerima *file Excel* yang didalamnya terdapat format *table* (massa, status pembetulan, jasa yang berkaitan dengan PPh 23, total DPP, besarnya pajak PPh 23, tanggal bayar, NTPN, tanggal lapor dan status SPT) dan melakukan *input* SPT Masa PPh Pasal 23 baik status normal atau pembetulan. Pada kolom status pembetulan, massa, jasa yang berkaitan dengan PPh 23, total DPP, dan besarnya pajak PPh 23 angkanya berasal dari Formulir 1724 SPT Masa PPh Pasal 23. Kolom tanggal lapor dan status SPT angkanya diperoleh dari Bukti Penerimaan Elektronik. Sedangkan untuk kolom tanggal bayar dan NTPN diperoleh dari Bukti Penerimaan Negara. Langkahnya sebagai berikut:

Masa Pajak Januari 2021 SPT PPh 23 Normal maka proses *penginputan* sebagai berikut:

- 1) Jumlah penghasilan bruto sebesar Rp 10.500.000 diperoleh dari SPT Masa PPh Pasal 23 seperti nomor 1.
- 2) Jumlah pajak yang dipotong sebesar Rp 110.000 diperoleh dari SPT Masa PPh Pasal 23 seperti nomor 2.
- 3) Total DPP diperoleh dari penjumlahan semua penerima penghasilan seperti nomor 3.
- 4) Jumlah Pajak Penghasilan PPh 21 sebesar Rp 110.000 diperoleh dari SPT Masa PPh 23 seperti nomor 4.

c) **Melakukan Rekapitulasi SPT PPh Final**

Dokumen yang diperlukan Bukti Penerimaan Elektronik, Bukti Penerimaan Negara, dokumen yang terkait dengan SPT PPh dan Pasal 4 Ayat 2. Proses rekapitulasi SPT PPh Final dilakukan untuk periode Januari, Februari, Maret, dan Mei 2021 atas persewaan tanah dan bangunan. Berikut merupakan proses melakukan rekapitulasi SPT PPh Final:

1. Mendapatkan dokumen dari pembimbing lapangan terkait SPT Masa PPh Final klien seperti gambar 3.20.

Gambar 3. 59 Dokumen SPT Masa PPh Final PT PAS

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT (2)		<input checked="" type="checkbox"/> SPT Normal <input type="checkbox"/> SPT Pembetulan Ke-
		Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2)		Masa Pajak 01 / 01 / 21
BAGIAN A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK/WAJIB PAJAK				
1. NPWP : 2. Nama WP : PT PAS 3. Alamat : JL PAHLAWAN 10				
BAGIAN B. OBJEK PAJAK				
Urutan (1)	KAPRIKJS (2)	Nilai Objek Pajak (Rp) (3)	Tarif (%) (4)	PPh yang Dipotong/ Dipungut/Ditetor Sendiri (Rp) (5)
1. Bunga Deposito/Tabungan, Diskonto SEBI dan Jasa Giro a. Bunga Deposito/Tabungan 1) Yang ditempatkan di Dalam Negeri 2) Yang ditempatkan di Luar Negeri b. Diskonto Sertifikat Bank Indonesia c. Jasa Giro	41112B/404 41112B/404 41112B/404 41112B/404			
2. Transaksi Penjualan Saham a. Saham Mandiri b. Bukan Saham Mandiri	41112B/407 41112B/406			
3. Bunga/Diskonto Obligasi dan Surat Berharga Negara	41112B/401			
4. Hadiah Undian	41112B/405			
5. Persewaan Tanah dan/atau Bangunan a. Penyewa sebagai Pemotong Pajak b. Orang Pribadi/Badan yang Menyetor Sendiri PPh	41112B/403 41112B/403	597.399	10,00	59.740
6. Jasa Konstruksi a. Perencana Konstruksi 1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh 2) Penyedia Jasa yang Menyetor Sendiri PPh b. Pelaksana Konstruksi 1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh 2) Penyedia Jasa yang Menyetor Sendiri PPh c. Pengawas Konstruksi 1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh 2) Penyedia Jasa yang Menyetor Sendiri PPh	41112B/409 41112B/409 41112B/409 41112B/409 41112B/409 41112B/409 41112B/409			
7. Wajib Pajak yang Melakukan Penghasilan Hak atas Tanah/Bangunan	41112B/402			
8. Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Wajib Pajak Orang Pribadi	41112B/417			
9. Transaksi Derivatif Berjangka Kontrak Berjangka yang Diperdagangkan di Bursa	41112B/418			
10. Dividen yang Diterima/Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri	41112B/419			
11. Penghasilan Tertentu Lainnya a. b. c.				
JUMLAH		597.399		59.740
Terbilang: Lima Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah				
BAGIAN C. LAMPIRAN				
1. <input checked="" type="checkbox"/> Surat Setoran Pajak: 1 lembar. 2. <input checked="" type="checkbox"/> Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 Ayat (2). 3. <input checked="" type="checkbox"/> Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 Ayat (2): 3 lembar. 4. <input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus.				
BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN				
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi - sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya bertuliskan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.				Diisi oleh Petugas
<input checked="" type="checkbox"/> PEMOTONG PAJAK/PMPINAN Nama: ROBIN NPWP: 11.222.333.4-566-000		<input type="checkbox"/> KUJASA WAJIB PAJAK		SPT Masa Diterima: <input type="checkbox"/> Langsung dari WP <input type="checkbox"/> Melalui Pos
Tanda Tangan & Cap:		Tanggal: 10/02/2021		Tanda Tangan

Sumber: Dokumentasi Perusahaan

2. Menerima Bukti Penerimaan Negara dari pembimbing lapangan seperti gambar 3.60.

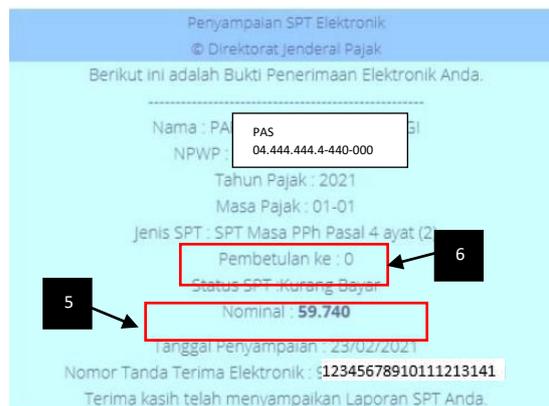
Gambar 3. 60 Bukti Penerimaan Negara PT PAS



Sumber: Dokumentasi Perusahaan

3. Menerima Bukti Penerimaan Elektronik dari pembimbing lapangan seperti gambar 3.22.

Gambar 3. 61 Bukti Penerimaan Elektronik PT PAS



Sumber: Dokumentasi Perusahaan

4. Menerima file Excel yang didalamnya terdapat format table (masa, bunga deposito/tabungan, transaksi jual saham, bunga/diskonto obligasi dan surat berharga, hadiah undian, persewaan tanah dan

bangunan, bunga simpanan, transaksi derivatif, dividen Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri, total DPP, PPh Final, tanggal bayar, NTPN, tanggal lapor, dan status SPT) yang digunakan untuk nantinya akan di *input* berdasarkan dokumen yang diberikan oleh klien.

Gambar 3. 62 Tabel Rekapitulasi PPh Final PT PAS

NO	MASA	BUNGA DEPOSITO/ TABUNGAN (SBI & GIRO)	TRANSAKSI JUAL SAHAM	BUNGA/DISKONTO OBLIGASI & SURAT BERHARGA	HADIAH UNDIAN	PERSEWAAN TANAH & BANGUNAN	JASA KONSTRUKSI	PENGALIHAN TANAH BANGUNAN
1	JANUARI					597.399		
2	FEBRUARI					168.336.524		
3	MARET					14.117.616		
4	APRIL							
5	MEI					1.268.650		
6	JUNI							
7	JULI							
8	AGUSTUS							
9	SEPTEMBER							
10	OKTOBER							
11	NOVEMBER							
12	DESEMBER							
	JUMLAH					184.320.189		

BUNGA SIMPANAN DIRAYAKAN KOPERASI	TRANSAKSI DERIVATIF	DIVIDEND WP OP DN	TOTAL DPP	PPh 4 Ayat 2	TANGGL BAYAR	NTPN	TANGGAL LAPOR	STATUS SPT2
			597.399	59.740	10 Februari 2021	1A111111AA11A1AA	23 Februari 2021	KB
			168.336.524	16.833.650	10 Maret 2021	6F666666FF66FF	12 Maret 2021	KB
			14.117.616	1.411.761	09 April 2021	7G777777GG7G7GG	15 April 2021	KB
			1.268.650	126.865	10 Juni 2021	8H888888HH88HH	18 Juni 2021	KB
			-	-				
			-	-				
			-	-				
			-	-				
			-	-				
			-	-				
			184.320.189	18.432.016				

Sumber: Dokumentasi Perusahaan

- Melakukan *input* SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat 2. Pada kolom status masa, bunga deposito/tabungan, transaksi jual saham, bunga/diskonto obligasi dan surat berharga, hadiah undian, persewaan tanah dan bangunan, bunga simpanan, transaksi derivatif, dividen Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri, total DPP, PPh Final angkanya berasal dari SPT Masa PPh Final. Kolom tanggal lapor dan status SPT angkanya diperoleh dari Bukti Penerimaan Elektronik. Sedangkan untuk kolom tanggal bayar dan NTPN diperoleh dari Bukti Penerimaan Negara.

Langkah yang dilakukan pada masa Januari yaitu:

- 1) Mengisi nominal pada uraian Persewaan Tanah dan Bangunan sebesar Rp 597.399 yang diperoleh dari SPT Masa PPh Final seperti nomor 1.
 - 2) Mengisi total DPP yang diperoleh dari rumus menjumlahkan seluruh uraian. Pada masa Januari hanya terdapat Persewaan Tanah dan Bangunan maka total DPP adalah Rp 597.399.
 - 3) Mengisi PPh Pasal 4 Ayat 2 sebesar Rp 59.740 yang diperoleh dari SPT Masa PPh Final seperti nomor 2.
 - 4) Mengisi kolom tanggal bayar yaitu 10 Februari 2021 yang diperoleh dari Bukti Penerimaan Negara seperti nomor 3.
 - 5) Mengisi kolom NTPN yaitu 1A111111AA11A1AA yang diperoleh dari Bukti Penerimaan Negara seperti nomor 4.
 - 6) Mengisi kolom tanggal lapor yaitu 23 Februari 2021 yang diperoleh dari Bukti Penerimaan Elektronik seperti nomor 5.
 - 7) Mengisi kolom status SPT Kurang Bayar yang diperoleh dari Bukti Penerimaan Elektronik seperti nomor 6.
5. Melakukan rekapitulasi PPh Final hingga masa yang ditentukan.

3.3.1.5 PT PT

a) Melakukan Rekapitulasi SPT PPh Pasal 21

Dokumen yang dibutuhkan dalam merekapitulasi PPh Pasal 21 yaitu Bukti Penerimaan Elektronik (BPE), Bukti Penerimaan Negara, dan dokumen yang berkaitan dengan SPT Masa PPh Pasal 21. Proses rekapitulasi SPT

PPH Pasal 21 dilakukan untuk periode Januari hingga Mei 2021. Berikut adalah cara melakukan rekapitulasi PPh Pasal 21:

1. Menerima dokumen terkait SPT Masa PPh Pasal 21 klien baik normal maupun pembetulan (Formulir 1721) dari pembimbing lapangan seperti gambar 3.63.

Gambar 3. 63 Dokumen SPT Masa PPh Pasal 21 PT PT

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26

FORMULIR 1721

Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26

area barcode

MASA PAJAK : 01 - 2021

Bacalah petunjuk pengisian sebelum mengisi formulir ini

JUMLAH LEMBAR SPT TERMASUK LAMPIRAN : 01

SPT NORMAL SPT PEMBETULAN KE-

A. IDENTITAS PEMOTONG

1. NPWP : 05.555.555.5-550-000

2. NAMA : PT PT

3. ALAMAT : [REDACTED]

4. NO. TELEPON : [REDACTED] 5. EMAIL : [REDACTED]

B. OBJEK PAJAK

NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIPOYONG (Rp)
1.	PEGAWAI TETAP	21-100-01	22	273.689.316	15.993.263
2.	PENERIMA PENSUN BERKALA	21-100-02	0	0	0
3.	PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU TENAGA KERJA LEPAS	21-100-03	44	17.400.000	0
4.	BUKAN PEGAWAI:				
4a.	DISTRIBUTOR MULTILEVEL MARKETING (MLM)	21-100-04	0	0	0
4b.	PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI	21-100-05	0	0	0
4c.	PENJAJA BARANG DAGANGAN	21-100-06	0	0	0
4d.	TENAGA AHLI	21-100-07	0	0	0
4e.	BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA MELAN YANG BERKAIT DENGAN MAMBUKUNGAN	21-100-08	34	318.957.897	1.500.000
4f.	BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA MELAN YANG TIDAK BERKAIT DENGAN MAMBUKUNGAN	21-100-09	0	0	0
	JASIS ATAU DEWAN PENGARAS YANG TIDAK CUKUP TETAP	21-100-10	0	0	0
5.	MANTAN PEGAWAI YANG MENERIMA JASA PRODUKSI/TAYANG BOKUS ATAU BAHAN LAIN	21-100-11	0	0	0
7.	PEGAWAI YANG MELAKUKAN PENARIKAN DANA PENSUN	21-100-12	0	0	0
8.	PESERTA KEGIATAN	21-100-13	0	0	0
9.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 TIDAK FINAL LAINNYA	21-100-99	0	0	0
10.	PEGAWAI/PEKERJA/TAHAP/PEKERJA KEMAH/PEKERJA PENSUN BERKALA SEBAGAI WAJIB PAJAK LUAR NEGARA	27-100-99	0	0	0
11.	JUMLAH (JUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 10)		100	610.047.213	17.493.263
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR					JUMLAH (Rp)
12.	STP PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 (HANYA POKOK PAJAK)				0
KELEBIHAN PENYETORAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 DARI:					
13.	MASA PAJAK :				0
14.	JUMLAH (ANGKA 12 + ANGKA 13)				0
15.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR (ANGKA 11 KOLONG - ANGKA 14)				17.493.263
LAMBANG PENGISIAN PADA ANGKA 10 & 17 APABILA SPT PEMBETULAN (DARUKAL) PADA ANGKA 10 APABILA PPh LEBIH DISETOR					
16.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR PADA SPT YANG DIBETULKAN (PENGHIAN DARI BAGIAN B ANGKA 10 DARI SPT YANG DIBETULKAN)				0
17.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR KARENA PEMBETULAN (ANGKA 15 - ANGKA 14)				0
18.	KELEBIHAN SETOR PADA ANGKA 15 ATAU ANGKA 17 AKAN DIKOMPENSASIKAN KE MASA PAJAK (mm - yyyy)				-

HALAMAN 1

Sumber: Dokumentasi Perusahaan

- Menerima Bukti Penerimaan Negara dari pembimbing lapangan seperti gambar 3.64.

Gambar 3. 64 Dokumen Bukti Penerimaan Negara PT PT

2/10/2021 <https://mib.bankmandiri.co.id/corp/front/billpayment.do?action=doPrintBillPayment>

Nomor Referensi Transaksi	:	:
No. Ref Perkumpulan	:	:
Dari Rekening	:	:
Customer Reference Number	:	:
To Institution	:	50012 Pajak/PNBP/Cukai
BUKTI PENERIMAAN NEGARA	:	Penerimaan Pajak
Date Pembayaran	:	:
Tanggal dan Jam Bayar	:	15/02/2021 15:17:07
Tanggal Buku	:	:
Kode Cabang Bank	:	:
NTB	:	:
NTPN	:	:
STAN	:	:
Data Setoran	:	:
Kode Billing	:	:
Nama Wajib Pajak	:	PT PT
Alamat	:	:
Nomor Objek Pajak	:	:
Mata Anggaran	:	411121
Jenis Setoran	:	100
Masa Pajak	:	01012021
Nomor Ketetapan	:	0000000000000000
Jumlah Setoran	:	Rp. 11.600.000
Mata Uang	:	IDR
Terbilang	:	11.600.000
Keterangan	:	05.555.555.5-550-000
NPWP	:	05.555.555.5-550-000
Daftar Pembayaran	:	00 TOTAL
Admin Bank	:	IDR 0.00
Total Bayar	:	IDR 11.600.000
Beneficiary Notification	:	Don't Send
Notification Flag	:	:
Mode Instruksi	:	10-Feb-2021
Langsung	:	:

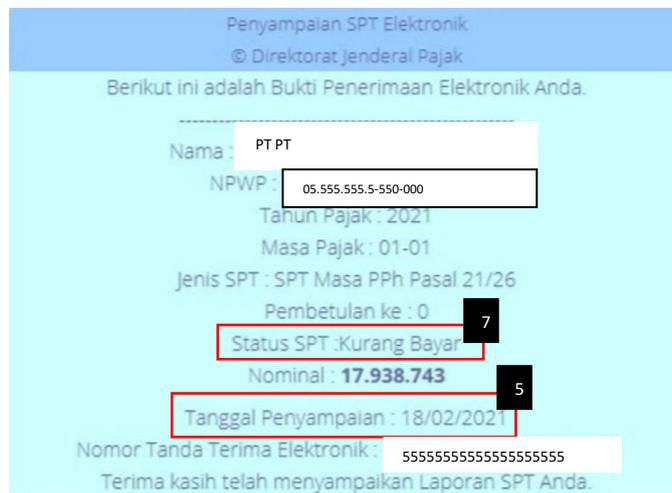
Empat ribu dua ratus lima rupiah
 uter dan tidak memerlukan tanda tangan

Print Simpan Sebagai Tutup

Sumber: Dokumentasi Perusahaan

3. Menerima Bukti Penerimaan Eletronik dari pembimbing lapangan seperti gambar 3.65.

Gambar 3. 65 Dokumen Bukti Penerimaan Elektronik PT PT



Sumber: Dokumentasi Perusahaan

4. Menerima *file Excel* yang didalamnya terdapat format *table* (masa, status pembetulan, jumlah penerima penghasilan, penghasilan bruto, jumlah penerima penghasilan, jumlah pajak yang dipotong, total pajak yang disetorkan, tanggal lapor, tanggal bayar, dan status SPT) dan melakukan *input* SPT Masa PPh Pasal 21 baik status normal atau pembetulan. Pada kolom status pembetulan, massa, jumlah penerima penghasilan, penghasilan bruto, dan jumlah pajak yang dipotong angkanya berasal dari Formulir 1721 SPT Masa PPh Pasal 21. Kolom tanggal lapor dan status SPT angkanya diperoleh dari Bukti Penerimaan Elektronik. Sedangkan untuk kolom tanggal bayar diperoleh dari Bukti Penerimaan Negara. Langkahnya sebagai berikut:

Masa Pajak Januari 2021 SPT PPh 21 Normal maka proses penginputan sebagai berikut:

- 1) Jumlah tiap penerima penghasilan sebesar 22 diperoleh dari SPT Masa PPh Pasal 21 seperti nomor 1.
- 2) Jumlah penghasilan bruto sebesar Rp 273.689.316 diperoleh dari SPT Masa PPh Pasal 21 seperti nomor 2.
- 3) Jumlah pajak yang dipotong sebesar Rp 17.493.263 diperoleh dari SPT Masa PPh Pasal 21 seperti nomor 3.
- 4) Total pajak yang disetor sebesar Rp 17.493.263 diperoleh dari SPT Masa PPh Pasal 21 seperti nomor 4.
- 5) Tanggal lapor yaitu 18 Februari 2021 diperoleh dari Bukti Penerimaan Elektronik seperti nomor 5.
- 6) Tanggal bayar yaitu 15 Februari 2021 diperoleh dari Bukti Penerimaan Negara seperti nomor 6.
- 7) Status SPT Kurang Bayar diperoleh dari Bukti Penerimaan Elektronik seperti nomor 7.

Gambar 3. 66 Format Tabel dalam Pengisian

Rekapitulasi PPh Pasal 21 PT PT

MASA	STATUS PEMBEHALAN	Penerima Pengh.		Pegawai Tetap		Penerima Pengh.		Pegawai Tidak Tetap		Penerima Pengh.		Tenaga Ahli		Penerima Pengh.		Bukan Pegawai Berkecukupan		Penerima Pengh.		Bukan Pegawai Tidak Berkecukupan		TOTAL
		Jumlah	Penghasilan Bruto	Jumlah	Penghasilan Bruto	Jumlah	Penghasilan Bruto	Jumlah	Penghasilan Bruto	Jumlah	Penghasilan Bruto	Jumlah	Penghasilan Bruto	Jumlah	Penghasilan Bruto	Jumlah	Penghasilan Bruto	Jumlah	Penghasilan Bruto	Jumlah	Penghasilan Bruto	
JANUARI	NORMAL	22	275.689.316	44	17.400.000					34												610.047.213
FEBRUARI	NORMAL	22	295.552.345	44	19.726.348					30												546.374.121
MARET	NORMAL	23	362.553.544	9	5.752.288					41												698.455.870
APRIL	NORMAL	23	294.396.056	12	10.175.521					40												608.897.094
MEL	NORMAL																					
JUNI	NORMAL																					
JULI	NORMAL	1		2																		
AGUSTUS	NORMAL																					
SEPTEMBER	NORMAL																					
OCTOBER	NORMAL																					
NOVEMBER	NORMAL																					
DESEMBER	NORMAL																					
TOTAL		90	1.200.191.261	109	53.854.137					145												1.463.774.304

Pegawai Tetap	Pegawai Tidak Tetap	Jml Pajak Dipotong				TOTAL	Jumlah Penghasilan Bruto		TOTAL	Jml Pajak Dipotong		TOTAL yang disektor	SPT MASA PPh21		STATUS SPT
		Tenaga Ahli	Bukan Pegawai Berkecukupan	Bukan Pegawai Tidak	TOTAL		PESANGON	PENGIUN TUNJANGAN		PESANGON	PENGIUN TUNJANGAN		TGL LABA	TGL BAYAR	
15.993.263			1.500.000		17.493.263						17.928.742	18 Februari 2021	15 Feb	KH	
25.632.497			1.307.321		26.939.818						26.939.818	10 Maret 2021	09 Maret 2021	KH	
16.727.234			780.162		17.507.396						17.507.396	16 April 2021	08 April 2021	KH	
												10 Mei 2021	06 Mei 2021	KH	
73.670.206	48.718		4.970.941		78.689.865						78.689.865				

Sumber: Dokumentasi Perusahaan

- Melakukan rekapitulasi PPh Pasal 21 status normal dan pembehalan sampai dengan banyaknya dokumen terkait dengan SPT Masa PPh Pasal 21 yang telah diberikan oleh pembimbing lapangan (setahun atau tidak sampai setahun).

b) Melakukan Rekapitulasi SPT PPh Pasal 23

Dokumen yang dibutuhkan dalam merekapitulasi PPh Pasal 23 yaitu Bukti Penerimaan Elektronik (BPE), Bukti Penerimaan Negara, dan dokumen yang berkaitan dengan SPT Masa PPh Pasal 23 (formulir 1724). Proses rekapitulasi SPT PPh Pasal 23 dilakukan untuk periode Januari hingga Mei 2021 atas jasa manajemen, jasa konsultan, dan jasa lain yang telah dipotong

PPh Pasal 21. Berikut adalah cara melakukan rekapitulasi PPh Pasal 23 masa Januari:

1. Mendapatkan dokumen terkait SPT Masa PPh Pasal 23 klien baik normal maupun pembetulan (Formulir 1724) dari pembimbing lapangan seperti gambar 3.67.

Gambar 3. 67 Dokumen SPT Masa PPh Pasal 23 PT PT

The image shows a tax form titled 'SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26'. It is Form 1724, used for reporting monthly income tax. The form is divided into several sections: A (Taxpayer Identification), B (Tax Object), C (Attachments), and D (Declaration and Signature). Section B contains a table with columns for 'NO', 'URAIAN', 'KODE OBJEK PAJAK', 'JUMLAH PENDAPATAN BRUTO', and 'JUMLAH PPh YANG DIPOTONG/DITR/Ph'. A red box highlights a row with a gross income of 10,500.00 and a tax deduction of 160,000.00. A handwritten number '2' is next to this row. Section C lists attachments, and Section D contains the taxpayer's declaration and signature.

Sumber: Dokumentasi Perusahaan

2. Menerima Bukti Penerimaan Negara dari pembimbing lapangan

Gambar 3. 68 Dokumen Bukti Penerimaan Elektronik PT PT

	KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	
	LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200 email : pengaduan@pajak.go.id ; informasi@pajak.go.id	
BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK (BPE)		
NOMOR TANDA TERIMA ELEKTRONIK : (11111111111111111111		
NPWP	: 05.555.555.5-550-000	QR Code 
Nama	: PT PT	
Jenis Pajak	: PPH2326	
Pembetulan Ke-	: 0	
Tanggal Terima	: 10-02-2021 5	
Tahun Pajak	: 2021	
Masa Pajak	: 1	
Terima Kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda		

Sumber: Dokumentasi Perusahaan

3. Menerima Bukti Penerimaan Eletronik dari pembimbing lapangan

Gambar 3. 69 Dokumen Bukti Penerimaan Negara PT PT

2/10/2021 <https://mib.bankmandiri.co.id/corp/front/billpayment.do?action=doPrintBillPayme>

Nomor Referensi Transaksi	:	
No. Ref Perkumpulan	:	
Dari Rekening	:	
Customer Reference Number	:	
To Institution	:	50012 Pajak/PNBP/Cukai
BUKTI PENERIMAAN NEGARA	:	Penerimaan Pajak
Data Pembayaran	:	-
Tanggal dan Jam Bayar	:	10/02/2021 15:17:07
Tanggal Buku	:	11/02/21
Kode Cabang Bank	:	008
NTB	:)
NTPN	:	4D444444D44D4DD
STAN	:	072/19
Data Setoran	:	-
Kode Billing	:	
Nama Wajib Pajak	:	PT PT
Alamat	:	
Nomor Objek Pajak	:	
Mata Anggaran	:	411124
Jenis Setoran	:	104
Masa Pajak	:	01012021
Nomor Ketetapan	:	0000000000000000
Jumlah Setoran	:	Rp. 110.000
Mata Uang	:	IDR
Terbilang	:	
Keterangan	:	01.123.456.7-890-000 ik computer dan tidak memerlukan tanda tangan
NPWP	:	
Daftar Pembayaran	:	00 TOTAL 110.000
Admin Bank	:	IDR
Total Bayar	:	IDR 110.000
Beneficiary Notification	:	
Notification Flag	:	Don't Send
Mode Instruksi	:	
Langsung	:	10-Feb-2021

Sumber: Dokumentasi Perusahaan

4. Menerima *file Excel* yang didalamnya terdapat format *table* (massa, status pembetulan, jasa yang berkaitan dengan PPh 23, total DPP, besarnya pajak PPh 23, tanggal bayar, NTPN, tanggal lapor dan status SPT) dan melakukan *input* SPT Masa PPh Pasal 23 baik status normal atau pembetulan. Pada kolom status pembetulan, massa, jasa yang berkaitan dengan PPh 23, total DPP, dan besarnya pajak PPh 23 angkanya berasal dari Formulir 1724 SPT Masa PPh Pasal 23. Kolom tanggal lapor dan status SPT angkanya diperoleh dari Bukti Penerimaan Elektronik. Sedangkan untuk kolom tanggal bayar dan NTPN diperoleh dari Bukti Penerimaan Negara. Langkahnya sebagai berikut:

Masa Pajak Januari 2021 SPT PPh 23 Normal maka proses *penginputan* sebagai berikut:

- 1) Jumlah penghasilan bruto sebesar Rp 10.500.000 diperoleh dari SPT Masa PPh Pasal 23 seperti nomor 1.
- 2) Jumlah pajak yang dipotong sebesar Rp 110.000 diperoleh dari SPT Masa PPh Pasal 23 seperti nomor 2.
- 3) Total DPP diperoleh dari penjumlahan semua penerima penghasilan seperti nomor 3.
- 4) Jumlah Pajak Penghasilan PPh 21 sebesar Rp 110.000 diperoleh dari SPT Masa PPh 23 seperti nomor 4.

c) **Melakukan Rekapitulasi SPT PPh Final**

Dokumen yang diperlukan Bukti Penerimaan Elektronik, Bukti Penerimaan Negara, dokumen yang terkait dengan SPT PPh dan Pasal 4 Ayat 2. Proses rekapitulasi SPT PPh Final dilakukan untuk periode Februari dan Maret 2021 atas persewaan tanah dan bangunan. Berikut merupakan proses melakukan rekapitulasi SPT PPh Final:

1. Mendapatkan dokumen dari pembimbing lapangan terkait SPT Masa PPh Final klien seperti gambar 3.71.

Gambar 3. 71 Dokumen SPT Masa PPh Final PT PT

Urutan (1)	KAPJKJS (2)	Nilai Obyek Pajak (Rp) (3)	Tarif (%) (4)	PPh yang Dipotong/ Dipungut/Ditetor Sendiri (Rp) (5)
1. Bunga Deposito/Tabungan, Diskonto SEI dan Jasa Giro a. Bunga Deposito/Tabungan 1) Yang ditempatkan di Dalam Negeri 2) Yang ditempatkan di Luar Negeri b. Diskonto Sertifikat Bank Indonesia c. Jasa Giro	41112B/404 41112B/404 41112B/404 41112B/404			
2. Transaksi Penjualan Saham a. Saham Perdana b. Bukan Saham Perdana	41112B/407 41112B/408	500.000	10,00	50.000
3. Bunga/Diskonto Obligasi dan Surat Berharga Negara	41112B/401			
4. Hadiah Undian	41112B/4			
5. Persewaan Tanah dan/atau Bangunan a. Penyewa sebagai Pemotong Pajak b. Orang Pribadi/Badan yang Menyetor Sendiri PPh	41112B/44 41112B/45			
6. Jasa Konstruksi a. Perencana Konstruksi 1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh 2) Penyedia Jasa yang Menyetor Sendiri PPh b. Pelaksana Konstruksi 1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh 2) Penyedia Jasa yang Menyetor Sendiri PPh c. Pengawas Konstruksi 1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh 2) Penyedia Jasa yang Menyetor Sendiri PPh	41112B/409 41112B/409 41112B/409 41112B/409 41112B/409 41112B/409			
7. Wajib Pajak yang Melakukan Penghasilan Hak atas Tanah/Bangunan	41112B/402			
8. Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Wajib Pajak Orang Pribadi	41112B/417			
9. Transaksi Derivatif Berjangka Kontrak Berjangka yang Diperdagangkan di Bursa	41112B/418			
10. Dividen yang Diterima/Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri	41112B/419			
11. Penghasilan Tertentu Lainnya a. b. c.				
JUMLAH		597.399		50.000

Terbilang Lima Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah

BAGIAN C. LAMPIRAN

1. Surat Setoran Pajak: 1 lembar.
2. Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 Ayat (2).
3. Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 Ayat (2): 3 lembar.
4. Surat Kuasa Khusus.

BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi, - sanksi sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya bertuliskan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

PEMOTONG PAJAK/PMPINAN KUJASA WALIH PAJAK

Nama: **ROBIN**
NPWP: **11.222.333.4-566-000**

Tanda Tangan & Cap: _____ Tanggal: **11/03/2021**

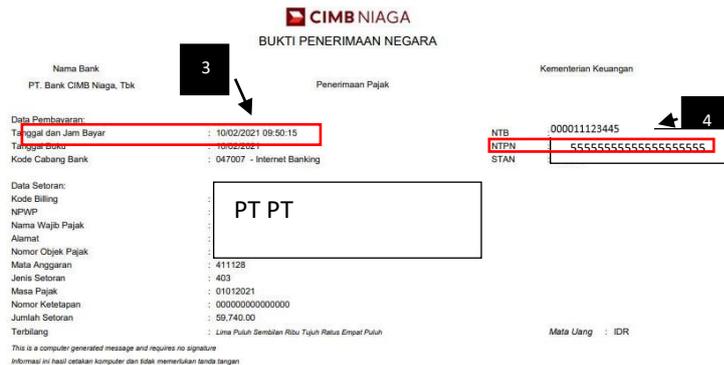
Ditisi oleh Petugas
SPT Masa Diterima: _____
 Langsung dari WP
 Melalui Pos

Tanggal: _____
[] [] [] [] [] [] [] [] [] []
[] [] [] [] [] [] [] [] [] []
[] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Sumber: Dokumentasi Perusahaan

2. Menerima Bukti Penerimaan Negara dari pembimbing lapangan seperti gambar 3.72.

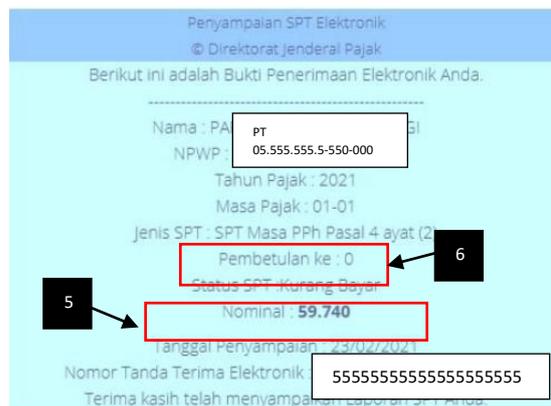
Gambar 3. 72 Bukti Penerimaan Negara PT PT



Sumber: Dokumentasi Perusahaan

3. Menerima Bukti Penerimaan Elektronik dari pembimbing lapangan seperti gambar 3.73.

Gambar 3. 73 Bukti Penerimaan Elektronik PT PT



Sumber: Dokumentasi Perusahaan

4. Menerima file Excel yang didalamnya terdapat format table (masa, bunga deposito/tabungan, transaksi jual saham, bunga/diskonto obligasi dan surat berharga, hadiah undian, persewaan tanah dan

bangunan, bunga simpanan, transaksi derivatif, dividen Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri, total DPP, PPh Final, tanggal bayar, NTPN, tanggal lapor, dan status SPT) yang digunakan untuk nantinya akan di *input* berdasarkan dokumen yang diberikan oleh klien.

Gambar 3. 74 Tabel Rekapitulasi PPh Final PT PT

NO	MASA	BUNGA DEPOSITO/ TABUNGAN (SBI & GIRO)	TRANSAKSI JUAL SAHAM	BUNGA/DISKONTO OBLIGASI & SURAT BERHARGA	HADIAH UNDIAN	PERSEWAAN TANAH & BANGUNAN	JASA KONSTRUKSI	PENGALIHAN TANAH BANGUNAN
1	JANUARI					500.000		
2	FEBRUARI							
3	MARET					14.117.616		
4	APRIL							
5	MEI					1.268.650		
6	JUNI							
7	JULI							
8	AGUSTUS							
9	SEPTEMBER							
10	OKTOBER							
11	NOVEMBER							
12	DESEMBER							
	JUMLAH					184.320.189		

BUNGA SIMPAPAN DIRAYAKAN KOPERASI	TRANSAKSI DERIVATIF	DIVIDEND WP OP DN	TOTAL DPP	PPh 4 Ayat 2	TANGGL BAYAR	NTPN	TANGGAL LAPOR	STATUS SPT2
			597.399	59.740	10 Februari 2021	9ccccccccc	23 Februari 2021	KB
			14.117.616	1.411.761	09 April 2021	9666666666666666	11 Maret 2021	KB
			1.268.650	126.865	10 Juni 2021	F7EED018H888888H888888H	18 Juni 2021	KB
			184.320.189	18.432.016				

Sumber: Dokumentasi Perusahaan

- Melakukan *input* SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat 2. Pada kolom status masa, bunga deposito/tabungan, transaksi jual saham, bunga/diskonto obligasi dan surat berharga, hadiah undian, persewaan tanah dan bangunan, bunga simpanan, transaksi derivatif, dividen Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri, total DPP, PPh Final angkanya berasal dari SPT Masa PPh Final. Kolom tanggal lapor dan status SPT angkanya diperoleh dari Bukti Penerimaan Elektronik. Sedangkan untuk kolom tanggal bayar dan NTPN diperoleh dari Bukti Penerimaan Negara.

Langkah yang dilakukan pada masa Januari yaitu:

- 1) Mengisi nominal pada uraian Persewaan Tanah dan Bangunan sebesar Rp 500.000 yang diperoleh dari SPT Masa PPh Final seperti nomor 1.
- 2) Mengisi total DPP yang diperoleh dari rumus menjumlahkan seluruh uraian. Pada masa Januari hanya terdapat Persewaan Tanah dan Bangunan maka total DPP adalah Rp 500.000.
- 3) Mengisi PPh Pasal 4 Ayat 2 sebesar Rp 50.000 yang diperoleh dari SPT Masa PPh Final seperti nomor 2.
- 4) Mengisi kolom tanggal bayar yaitu 10 Februari 2021 yang diperoleh dari Bukti Penerimaan Negara seperti nomor 3.
- 5) Mengisi kolom NTPN yaitu 5555555555 yang diperoleh dari Bukti Penerimaan Negara seperti nomor 4.
- 6) Mengisi kolom tanggal lapor yaitu 23 Februari 2021 yang diperoleh dari Bukti Penerimaan Elektronik seperti nomor 5.
- 7) Mengisi kolom status SPT Kurang Bayar yang diperoleh dari Bukti Penerimaan Elektronik seperti nomor 6.

5. Melakukan rekapitulasi PPh Final hingga masa yang ditentukan.

d) Melakukan Rekapitulasi PPN

Dokumen yang diperlukan dalam melakukan rekapitulasi adalah Bukti Penerimaan Elektronik, Bukti Penerimaan Negara, dan dokumen terkait dengan SPT PPN. Proses rekapitulasi PPN dilakukan untuk periode Januari dan Maret 2021. Berikut merupakan proses rekapitulasi PPN:

1. Mendapatkan dokumen dari pembimbing lapangan terkait SPT Masa PPN klien seperti gambar 3.75 dan 3.76.

Gambar 3. 75 Dokumen SPT Masa PPN PT PT

DAFTAR EKSPOR BKP BERWUJUD, BKP TIDAK BERWUJUD, DAN/ATAU JKP				FORMULIR 1111 A1 (Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)	
PT PT		MASA : 03 - 03 - 2021 (mm-mm-yyyy)			
NPWP : 34.567.890.1-012.000		Pembetulan Ke : 0 (not)			
URAIAN		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)	
I. Rekapitulasi Penyerahan					
A. Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP		0,00	0,00		
B. Penyerahan Dalam Negeri					
1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung		3.261.059.068,00	326.105.906,00	0,00	
2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung		0,00	0,00	0,00	
C. Rincian Penyerahan Dalam Negeri					
1. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri (jumlah IB.1 dengan Faktur Pajak Kode 01, 04, 05, dan 09 dijumlahkan IB.2)		3.261.059.068,00	326.105.906,00	0,00	
2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya dipungut oleh Pemungut PPN (jumlah IB.1 dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03)		0,00	0,00	0,00	
3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya tidak dipungut (jumlah IB.1 dengan Faktur Pajak Kode 04)		0,00	0,00	0,00	
4. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM (jumlah IB.1 dengan Faktur Pajak Kode 05)		0,00	0,00	0,00	
II. Rekapitulasi Perolehan					
A. Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean, dan Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean yang PM-nya Dapat Dikreditkan		0,00	0,00	0,00	
B. Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri yang PM-nya Dapat Dikreditkan		2.493.073.019,00	249.307.299,00	0,00	
C. Impor atau Perolehan yang PM-nya Tidak Dapat Dikreditkan termasuk Impor atau Perolehan yang Mendapat Fasilitas		0,00	0,00	0,00	
D. Jumlah Perolehan (II.A + II.B + II.C)		2.493.073.019,00	249.307.299,00	0,00	
III. Penghitungan PM Yang Dapat Dikreditkan					
A. Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan (II.A + II.B)				249.307.299,00	
B. Pajak Masukan Lainnya					
1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya			360.450.704,00		
2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT Masa Pajak 03 - 2020 (mm-yyyy)			45.572.500,00		
3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan			0,00		
4. Jumlah (III.B.1 + III.B.2 + III.B.3)			406.023.204,00		
C. Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan (III.A + III.B.4)			655.330.503,00		

DAFTAR EKSPOR BKP BERWUJUD, BKP TIDAK BERWUJUD, DAN/ATAU JKP				FORMULIR 1111 A1 (Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)	
PT PT		MASA : 03 - 03 - 2021 (mm-mm-yyyy)			
NPWP : 34.567.890.1-012.000		Pembetulan Ke : 0 (not)			
No.	Nama Pembeli BKP/Penerima Manfaat BKP Tidak Berwujud/Penerima JKP	Dokumen Tertentu	DPP (Rupiah)	Keterangan	
		Nomor	Tanggal (dd-mm-yyyy)		
JUMLAH			A1 >		

Sumber: Dokumentasi Perusahaan

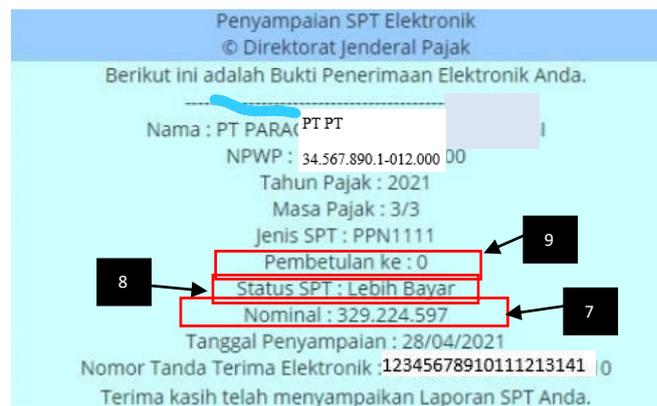
Gambar 3. 76 Dokumen SPT Masa PPN PT PT

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)		FORMULIR 1111	
NAMA PKP : PAPT PT		NPWP : 34.567.890.1-012-000		Jumlah Lembar SPT (Termasuk Lembar Dital/disk/Petunjuk) : 12	
ALAMAT : JL. JENDERAL - JAKARTA PUSAT		MASA : 03/03/2021		Tipe Buku : 1	
TELEPON : 021		KLU : 000000		Pembetulan No : 0 (nol) <input type="checkbox"/> Wajib PPhBM	
I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA					
A. Terutang PPN:					
1. Ekspor		DPP		PPN	
Rp. 0,00		Rp. 0,00		Rp. 0,00	
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri		Rp. 3.261.059.068,00		Rp. 326.105.906,00	
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN		Rp. 0,00		Rp. 0,00	
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut		Rp. 0,00		Rp. 0,00	
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN		Rp. 0,00		Rp. 0,00	
Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)		Rp. 3.261.059.068,00		Rp. 326.105.906,00	
B. Tidak Terutang PPN		Rp. 0,00		Rp. 0,00	
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)		Rp. 3.261.059.068,00		Rp. 326.105.906,00	
II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR					
A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)		Rp. 326.105.906,00		Rp. 326.105.906,00	
B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama		Rp. 0,00		Rp. 0,00	
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan		Rp. 655.330.503,00		Rp. 655.330.503,00	
D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)		Rp. -329.224.597,00		Rp. -329.224.597,00	
E. PPN kurang atau (lebih) bayar pajak SPT yang dibetulkan		Rp. 0,00		Rp. 0,00	
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)		Rp. 0,00		Rp. 0,00	
G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal		Rp. 0,00		Rp. 0,00	
H. PPN lebih bayar pada:		Rp. 0,00		Rp. 0,00	
1.1 <input checked="" type="checkbox"/> Bulir I.L.D (Dital/disk dalam hal SPT bukan Pembetulan)		Rp. 0,00		Rp. 0,00	
1.2 <input type="checkbox"/> Bulir I.L.D atau <input type="checkbox"/> Bulir I.L.F (Dital/disk dalam hal SPT Pembetulan)		Rp. 0,00		Rp. 0,00	
Dileh : 2.1 <input type="checkbox"/> PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau 2.2 <input checked="" type="checkbox"/> Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN		Rp. 0,00		Rp. 0,00	
diminta untuk : 3.1 <input checked="" type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak (mm-yyyy)		Rp. 0,00		Rp. 0,00	
3.2 <input type="checkbox"/> Dikembalikan (Restitusi)		Rp. 0,00		Rp. 0,00	
Khusus Restitusi untuk PKP :		Rp. 0,00		Rp. 0,00	
atau Pasal 17C KUP dilakukan dengan : <input type="checkbox"/> Prosedur Biasa atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan		Rp. 0,00		Rp. 0,00	
atau Pasal 17D KUP dilakukan dengan : <input type="checkbox"/> Prosedur Biasa atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan		Rp. 0,00		Rp. 0,00	
atau Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan		Rp. 0,00		Rp. 0,00	
III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI					
A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak		Rp. 0,00		Rp. 0,00	
B. PPN Terutang		Rp. 0,00		Rp. 0,00	
C. Dilunasi Tanggal		Rp. 0,00		Rp. 0,00	
D. Dilunasi Tanggal		Rp. 0,00		Rp. 0,00	
IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI					
A. PPN yang wajib dibayar kembali		Rp. 0,00		Rp. 0,00	
B. Dilunasi Tanggal		Rp. 0,00		Rp. 0,00	
V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH					
A. PPhBM yang harus dipungut sendiri		Rp. 0,00		Rp. 0,00	
B. PPhBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama		Rp. 0,00		Rp. 0,00	
C. PPhBM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B)		Rp. 0,00		Rp. 0,00	
D. PPhBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan		Rp. 0,00		Rp. 0,00	
E. PPhBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D)		Rp. 0,00		Rp. 0,00	
F. PPhBM kurang bayar dilunasi tanggal		Rp. 0,00		Rp. 0,00	
VI. KELENGKAPAN SPT					
<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 A1		<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 A2		<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 B2	
<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 A3		<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 B1		<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 B3	
<input type="checkbox"/> SSP PPN _____ lembar		<input type="checkbox"/> SSP PPhBM _____ lembar		<input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus _____ lembar	

Sumber: Dokumentasi Perusahaan

2. Menerima Bukti Penerimaan Elektronik dari pembimbing lapangan seperti gambar 3.77.

Gambar 3. 77 Bukti Penerimaan Elektronik PT PT



Sumber: Dokumentasi Perusahaan

3. Menerima *file Excel* yang didalamnya terdapat format *table* (masa, pajak keluaran, pajak masukan, kompensasi masa pajak sebelumnya, jumlah kompensasi, kurang bayar/ lebih bayar, tanggal lapor, tanggal bayar, dan NTPN) yang digunakan untuk nantinya akan di *input* berdasarkan dokumen yang diberikan oleh klien seperti gambar 3.78.

untuk kolom tanggal bayar dan NTPN diperoleh dari Bukti Penerimaan Negara jika tersedia. Langkah yang dilakukan pada masa Maret yaitu:

- 1) Mengisi kolom tiap uraian pada bagian DPP yaitu kolom uraian A.2 sebesar Rp 3.261.059.068, penyerahaan PPN yang dipungut sendiri sebesar Rp 3.261.059.069, dan B.2 sebesar Rp 2.493.073.019 yang diperoleh dari SPT Masa PPN seperti nomor 1.
- 2) Mengisi kolom uraian pada bagian PPN yaitu kolom uraian A.2 sebesar Rp 326.105.906, penyerahaan PPN yang dipungut sendiri sebesar Rp 326.105.906, dan B.2 sebesar Rp 249.073.019 yang diperoleh dari SPT Masa PPN seperti nomor 2.
- 3) Mengisi kolom kompensasi masa pajak sebelumnya sebesar Rp 360.450.704 yang diperoleh dari SPT Masa PPN seperti nomor 3.
- 4) Mengisi kolom jumlah kompensasi sebesar Rp 45.572.500 yang diperoleh dari SPT Masa PPN seperti nomor 4.
- 5) Mengisi kolom masa pajak kompensasi yaitu bulan Maret 2020 yang diperoleh dari SPT Masa PPN seperti nomor 5.
- 6) Mengisi kolom KB/LB sebesar -Rp 329.224.597 yang diperoleh dari SPT Masa PPN seperti nomor 6.

- 7) Jika terdapat KB/LB pembetulan maka diisi seperti SPT Masa PPN kotak biru.
- 8) Mengisi kolom tanggal lapor yaitu 28 April 2021 yang diperoleh dari Bukti Penerimaan Elektronik nomor 7.
- 9) Mengisi kolom nominal yaitu Rp 329.224.597 yang diperoleh dari Bukti Penerimaan Elektronik nomor 8.
- 10) Mengisi kolom status SPT LB yang diperoleh dari Bukti Penerimaan Elektronik nomor 9.

4. Melakukan rekapitulasi hingga masa yang ditentukan.

e) Melakukan Ekualisasi PPN

Ekualisasi diperlukan dalam pengecekan kesesuaian satu jenis pajak dengan jenis pajak lain yang mempunyai hubungan. Tujuan dilakukannya ekualisasi PPN yaitu mengetahui besarnya selisih perhitungan antara yang dilaporkan dengan yang tertera pada SPT Masa PPN yang terlampir pada *general ledger* berdasarkan *file* ekualisasi yang telah diterima. Proses ekualisasi PPN dilakukan untuk periode satu tahun. Berikut adalah proses ekualisasi PPN:

1. Menerima *file excel* dari pembimbing lapangan yang didalamnya sudah terdapat tabel (masa, DPP, PPN, DPP+PPN, selisih, nominal, DPP SPT Masa, PPN SPT Masa, dan selisih total) seperti gambar 3.79.

Gambar 3. 79 Format Tabel Ekualisasi PPN PT PT

No	Masa	DPP	PPN
1	Januari	1.078.348.520,00	107.834.850,00
2	Februari	4.350.840.000,00	435.084.000,00
3	Maret	3.903.913.000,00	390.391.300,00
4	April	7.816.635.456,00	781.662.545,00
5	Mei	7.843.292.500,00	784.929.250,00
6	Juni	6.175.553.456,00	617.555.345,00
7	Juli	6.095.963.863,00	609.596.386,00
8	Agustus	5.577.278.037,00	557.727.803,00
9	September	4.847.259.483,00	484.725.947,00
10	Oktober	6.773.977.400,00	677.397.740,00
11	November	4.876.571.501,00	487.657.150,00
12	Desember	8.324.723.750,00	832.472.375,00
		69.480.346.966,00	6.948.034.691,00
DPP + PPN		Nominal	Selisih
	1.186.183.370,00	1.107.657.541,00	78.525.829,00
	4.785.924.000,00	4.700.697.600,00	85.226.400,00
	4.294.304.300,00	4.223.085.739,00	71.218.561,00
	10.589.288.001,00	10.371.985.392,00	256.702.609,00
	8.634.221.750,00	8.477.454.400,00	156.767.350,00
	6.793.108.801,00	6.675.621.582,00	117.487.219,00
	6.705.560.249,00	6.531.146.472,00	174.413.777,00
	6.135.005.840,00	6.000.831.529,00	134.174.311,00
	5.331.985.430,00	5.207.002.006,00	124.983.424,00
	7.451.375.140,00	6.893.717.432,00	557.657.708,00
	5.364.228.651,00	5.269.168.826,00	95.059.825,00
	9.157.196.125,00	8.708.113.825,00	449.082.300,00
	76.428.381.657,00	74.127.082.344,00	2.301.299.313,00
DPP SPT MASA	PPN SPT MASA	DPP + PPN SPT MASA	Selisih Total

Sumber: Dokumentasi Perusahaan

- Mengisi bagian tabel DPP SPT Masa, PPN SPT Masa, dan selisih total yang telah diperbaharui datanya.

Gambar 3. 80 Format Tabel Ekualisasi PPN PT PT

No	Masa	DPP	PPN
1	Januari	1.078.348.520,00	107.834.850,00
2	Februari	4.350.840.000,00	435.084.000,00
3	Maret	3.903.913.000,00	390.391.300,00
4	April	9.626.625.456,00	962.662.545,00
5	Mei	8.351.492.500,00	835.149.250,00
6	Juni	6.175.553.456,00	617.555.345,00
7	Juli	6.095.963.863,00	609.596.386,00
8	Agustus	5.577.278.037,00	557.727.803,00
9	September	4.847.259.483,00	484.725.947,00
10	Oktober	6.773.977.400,00	677.397.740,00
11	November	4.876.571.501,00	487.657.150,00
12	Desember	8.334.723.750,00	832.472.375,00
		69.480.346.966,00	6.948.034.691,00

DPP + PPN	Nominal	Selisih
1.186.183.370,00	1.107.657.541,00	78.525.829,00
4.785.924.000,00	4.700.697.600,00	85.226.400,00
4.294.304.300,00	4.223.085.739,00	71.218.561,00
10.589.288.001,00	10.392.565.392,00	256.702.609,00
8.634.221.750,00	8.477.464.000,00	156.767.350,00
6.793.108.801,00	6.675.621.582,00	117.487.219,00
6.705.560.249,00	6.531.146.472,00	174.413.777,00
6.135.005.840,00	6.000.831.529,00	134.174.311,00
5.331.985.430,00	5.207.002.006,00	124.983.424,00
7.451.375.140,00	6.893.717.432,00	557.657.708,00
5.364.228.651,00	5.269.168.826,00	95.059.825,00
9.157.196.125,00	8.708.113.825,00	449.082.300,00
76.428.381.657,00	74.127.082.344,00	2.301.299.313,00

DPP SPT MASA	PPN SPT MASA	DPP + PPN SPT MASA	Selisih Total
1.078.348.520,00	107.834.852,00	1.186.183.372,00	- 2,00
4.350.840.000,00	435.084.000,00	4.785.924.000,00	-
3.903.913.000,00	390.391.300,00	4.294.304.300,00	-
9.626.625.456,00	962.662.545,00	10.589.288.001,00	-
8.351.492.500,00	835.149.250,00	9.186.641.750,00	- 552.420.000,00
6.175.553.456,00	617.555.345,00	6.793.108.801,00	-
6.095.963.863,00	609.596.386,00	6.705.560.249,00	-
5.577.278.037,00	557.727.803,00	6.135.005.840,00	-
4.847.259.483,00	484.725.947,00	5.331.985.430,00	-
6.773.977.400,00	677.397.740,00	7.451.375.140,00	-
4.876.571.501,00	487.657.150,00	5.364.228.651,00	-
8.334.673.750	832.467.375	9.168.141.125,00	- 10.945.000,00
69.992.496.966,00	6.999.249.693,00	76.991.746.659,00	- 563.365.002,00

Sumber: Dokumentasi Perusahaan

Langkah yang dilakukan untuk melakukan ekualisasi PPN periode Januari yaitu:

- Mengisi kolom DPP SPT Masa sebesar Rp 1.078.348.520 yang diperoleh dari nilai DPP seperti nomor 1.
- Mengisi kolom PPN SPT Masa sebesar Rp 107.834.852 yang diperoleh dari nilai PPN seperti nomor 2.

- 3) Menjumlahkan kolom DPP SPT Masa dan PPN SPT Masa pada kolom DPP+PPN SPT Masa yaitu sebesar Rp 1.186.183.372 seperti berwarna biru.
 - 4) Pada bagian kolom merah merupakan data yang telah diperbaharui oleh pembimbing lapangan.
3. Melakukan pengecekan apakah pada kolom DPP, PPN, , DPP+PPN, selisih, dan nominal terdapat perbedaan yang signifikan dengan kolom DPP SPT Masa, PPN SPT Masa, dan selisih total. Seperti yang terjadi pada periode Januari terdapat selisih sebesar Rp 2 yang diperoleh dari $DPP+PPN - DPP+PPN$ SPT Masa yang ditandai warna biru. Terdapat perbedaan setelah dilakukan pengecekan yaitu terdapat selisih pada bulan Januari sebesar Rp 2, bulan Mei sebesar Rp 552.420.000, dan bulan Desember sebesar Rp 10.945.000.
 4. *Menginput* hingga bulan Desember.

f) Melakukan Pengecekan Tanda Terima Penyerahan

Dokumen yang diperlukan dalam melakukan pengecekan tanda terima penyerahan adalah dokumen surat peringatan 1 dan 2. Proses melakukan pengecekan tanda terima penyerahan dilakukan untuk periode 2018 dan 2019. Berikut merupakan proses pengecekan tanda terima penyerahan dokumen:

1. Menerima *file* surat peringatan 1 dan 2 dari pembimbing lapangan.

Gambar 3. 81 Surat Peringatan 1 Periode 2018

DAFTAR BUKU, CATATAN, DOKUMEN YANG BELUM DIPINJAMKAN DALAM RANGKA PEMERIKSAAN		
Nama Wajib Pajak	PT PT	MA TEKNOLOGI
NPWP		
Alamat	34.567.890.1-012.000 NO 400 CEMPAKA PUTIH JAKARTA PUSAT DKI JAKARTA -	
No	Jenis>Nama Buku, Catatan, dan Dokumen	Keterangan
I. Data Perpajakan		
1	SPT Tahunan PPh Badan beserta lampiran Laporan Keuangan, neraca, rugilaba, arus kas, dan penjelas an pos-pos laporan keuangan dan SSP	Tahun 2018
2	Ekuivalensi obyektif PPh Pemotongan/Pemungutan dengan biaya usaha PPh Badan atas Obyektif Pemotongan /Pemungutan PPh Pasal 21, dan PPh Final Pasal 4(2)	Tahun 2018
3	SSB (Surat Setoran BPHTB) dan SSP PPh final atas pengalihan hak atas tanah/bangunan	Tahun 2018
4	SPPT PBB dan STTS PBB	Tahun 2018
II. Data akuntansi & dokumen usaha		
1	Audit Report Akuntan Publik atau Pernyataan Tidak Diaudit Akuntan Publik.	Tahun 2018
2	Daftar rekonsiliasi/reklasifikasi akun-akun dari general ledger ke laporan keuangan dan dari laporan keuangan ke SPT Tahunan PPh Badan	Tahun 2018
3	Buku Penjualan, Buku Piutang, Buku Pembelian, Buku Hutang, Buku Kas, Buku Bank, dan Buku Biaya	Tahun 2018
4	Daftar pembayaran gaji, upah, dan tunjangan untuk komisaris, direksi, karyawan tetap, dan karyawan tidak tetap, serta honorarium/fee /bonus yang dibayarkan kepada pihak lain dan bukti pembayaran(slip gaji, dll) dan Fc. KTP seluruh karyawan	Tahun 2018
5	File data komputer (softcopy) untuk trans aksi dan perpajakan	Tahun 2018
III. Dokumen Perusahaan		
1	Surat-surat perjanjian kredit/perikatan hutang dengan bank atau pihak lain	Tahun 2018
2	Surat-surat perjanjian/perikatan yang lain misalnya subkontrak, sewa-menyewa, Outsourcing, dll (jika ada)	Tahun 2018
3	Seluruh bukti-bukti/nota/invoice terkait penghasilan (penghasilan usaha dan dari luar usaha)	Tahun 2018
4	Seluruh bukti-bukti/nota/invoice terkait beban/harga pokok penjualan dan biaya	Tahun 2018
5	Dokumen lain yang dibutuhkan sesuai perkembangan pemeriksaan	Tahun 2018

1

Sumber: Dokumentasi Perusahaan

Gambar 3. 82 Surat Peringatan 1 Periode 2019

DAFTAR BUKU, CATATAN, DOKUMEN YANG BELUM DIPINJAMKAN DALAM RANGKA PEMERIKSAAN		
Nama Wajib Pajak	PT PT	MA TEKNOLOGI
NPWP		
Alamat	34.567.890.1-012.000 NO 400 CEMPAKA PUTIH JAKARTA PUSAT DKI JAKARTA -	
No	Jenis>Nama Buku, Catatan, dan Dokumen	Keterangan
I. Data Perpajakan		
1	Ekuivalensi Peredaran Usaha PPh Badan dengan DPP PPN dan Ekuivalensi penghasilan bruto dengan bukti potong lawan transaksi	Tahun 2019
2	Ekuivalensi obyektif PPh Pemotongan/Pemungutan dengan biaya usaha PPh Badan	Tahun 2019
4	SSB (Surat Setoran BPHTB) dan SSP PPh final atas pengalihan hak atas tanah/bangunan	Tahun 2019
5	SPPT PBB dan STTS PBB	Tahun 2019
II. Data akuntansi & dokumen usaha		
1	Daftar akun (chart of account), trial balance, buku besar (general ledger dan sub ledger)	Tahun 2019
2	Daftar rekonsiliasi/reklasifikasi akun-akun dari general ledger ke laporan keuangan dan dari laporan keuangan ke SPT Tahunan PPh Badan	Tahun 2019
3	Buku Penjualan, Buku Piutang, Buku Pembelian, Buku Hutang, Buku Kas, Buku Bank, dan Buku Biaya	Tahun 2019
4	Daftar aktiva tetap yang memuat nama/jenis aktiva, tahun perolehan, harga perolehan, golongan dan tarif sesuai dengan metode penyusutan yang digunakan, serta perhitungan penyusutan serta bukti perolehannya	Tahun 2019
5	Daftar pembayaran gaji, upah, dan tunjangan untuk komisaris, direksi, karyawan tetap, dan karyawan tidak tetap, serta honorarium/fee /bonus yang dibayarkan kepada pihak lain dan bukti pembayaran(slip gaji, dll) dan Fc. KTP seluruh karyawan	Tahun 2019
6	File data komputer (softcopy) untuk trans aksi dan perpajakan	Tahun 2019
III. Dokumen Perusahaan		
1	Surat-surat perjanjian kredit/perikatan hutang dengan bank atau pihak lain	Tahun 2019
2	Surat-surat perjanjian/perikatan yang lain misalnya subkontrak, sewa-menyewa, Outsourcing, dll (jika ada)	Tahun 2019
3	Seluruh bukti-bukti/nota/invoice terkait penghasilan (penghasilan usaha dan dari luar usaha)	Tahun 2019
4	Seluruh bukti-bukti/nota/invoice terkait beban/harga pokok penjualan dan biaya	Tahun 2019
5	Dokumen lain yang dibutuhkan sesuai perkembangan pemeriksaan	Tahun 2019

2

Sumber: Dokumentasi Perusahaan

- Membuat tabel pada *excel* yang berisi jenis buku, dokumen, dan catatan berdasarkan surat peringatan 1 dan 2 sama seperti gambar 3.81 dan 3.82.

Gambar 3. 83 Format Tabel Surat Peringatan 1 Periode 2018

1

No	Jenis>Nama Buku, Catatan dan Dokumen	Keterangan
I Data Perpajakan		
1	SPT Tahunan PPh Badan beserta lampiran Laporan Keuangan, neraca, rugilaba, arus kas, dan penjelasan pos – pos laporan keuangan dan SSP	2017 dan 2018
2	SPT Masa PPh Pasal 25, PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 4 ayat 2, bukti pemotongan/ pemungutan, dan SSP	2018
3	SPT Masa PPh/PPn, BM beserta lampiran, FP Keluaran, dan FP Masukan	2018
4	Ekuivalensi Peredaran Usaha PPh Badan dengan DPP PPN dan Ekuivalensi penghasilan bruto dengan bukti potong lawan transaksi	2018
5	Ekuivalensi obyek PPh Pemotongan/Pemungutan dengan biaya usaha PPh Badan	2018
6	SSB (Surat Setoran BPHTB) dan SSP PPh final atas pengalihan hak atas tanah/bangunan	2018
7	SPPT PBB dan STTS PBB	2018
II Data akuntansi & dokumen usaha		
1	Daftar akun (chart of account), trial balance, buku besar (general ledger dan sub ledger)	2018
2	Audit Report Akuntan Publik atau Pernyataan Tidak Diaudit Akuntan Publik	2018
3	Daftar rekonsiliasi/reklasifikasi akun-akun dari general ledger ke laporan keuangan dan dari laporan keuangan ke SPT Tahunan PPh Badan	2018
4	Buku Penjualan, Buku Piutang, Buku Pembelian, Buku Hutang, Buku Kas, Buku Bank, dan Buku Biaya	2018
5	Daftar aktiva tetap yang memuat nama/jenis aktiva, tahun perolehan, harga perolehan, golongan dan tarif sesuai dengan metoda penyusutan yang di	2018
6	Daftar pembayaran gaji, upah, dan tunjangan untuk komisaris, direksi, karyawan tetap, dan karyawan tidak tetap, serta honorarium/fee/bonus yang dibayarkan kepada pihak lain dan bukti pembayaran (slip gaji, dll) dan Fc, KTP seluruh karyawan	2018
7	File data komputer (softcopy) untuk transaksi dan perpajakan	2018
III Dokumen Perusahaan		
1	Copy Akta Pendirian, akte perubahan modal (sampai dengan perubahan terakhir)	2018
2	Struktur Organisasi Usaha dan Susunan Pengurus	2018
3	Surat-surat perjanjian kredit/perikatan hutang dengan bank atau pihak lain	2018
4	Surat-surat perjanjian/perikatan yang lain misalnya subkontrak, sewa-menyewa, Outsourcing, dll (jika ada)	2018
5	Rekening Koran semua bank (yang terkait dengan pemasukan/pengeluaran baik atas nama sendiri/perusahaan maupun lainnya)	2018
6	Seluruh bukti-bukti/nota/invoice terkait penghasilan (penghasilan usaha dan dari luar usaha)	2018
7	Seluruh bukti-bukti/nota/invoice terkait beban/harga pokok penjualan dan biaya	2018
8	Asli Dokumen Impor Pemberitahuan Impor Barang (PIB), Invoice, Bill Of Lading (B/L) Air Way Bill (AWB), Certificate of origin, Packing list, Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB), Bukti Penerimaan Negara Dalam Rangka Impor, Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak (SSPCP)	2018
9	Dokumen-dokumen lain yang dibutuhkan sesuai perkembangan pemeriksaan	2018

Sumber: Dokumentasi Perusahaan

Gambar 3. 84 Format Tabel Surat Peringatan 1 Periode 2019

No	Jenis/Nama Bukti, Catatan dan Dokumen	Keterangan	
1	Data Peringatan SPT Tahunan PPh Badan beserta lampiran Laporan Keuangan, neraca, rugi/laba, arus kas, dan penjelasan pos-pos laporan keuangan dan SSP	2018 dan 2019	Sudah dikirim 1 April 2021
2	SPT Masa PPh Pasal 25, PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 4 ayat 2, bukti pemotongan/pemungutan, dan SSP	2019	Sudah dikirim 1 April 2021
3	SPT Masa PPh/PPH, BM beserta lampiran, FP Keluaran, dan FP Masukan	2019	Sudah dikirim 1 April 2021
4	Dualisasi Peredaran Usaha PPh Badan dengan DPP PPN dan Dualisasi penghasilan bruto dengan bukti potong lawan transaksi	2019	
5	Dualisasi obyek PPh Pemotongan/Pemungutan dengan biaya usaha PPh Badan	2019	
6	SSB (Surat Setoran BPHTB) dan SSP PPh final atas pengalihan hak atas tanah/bangunan	2019	
7	SPT 180 dan SPT 182	2019	
II Data akuntansi & dokumen usaha			
1	Daftar akun (chart of account), trial balance, buku besar (general ledger dan sub ledger)	2019	
2	Audi Report Akuntan Publik atau Pernyataan Tidak Diaudit Akuntan Publik	2019	Sudah dikirim 1 April 2021
3	Daftar retribusi/insentif/ekuitas akun-akun dari general ledger ke laporan keuangan dan dari laporan keuangan ke SPT Tahunan PPh Badan	2019	
4	Buku Penjualan, Buku Piutang, Buku Pembelian, Buku Hutang, Buku Kas, Buku Bank, dan Buku Biaya	2019	
5	Daftar aktiva tetap yang memuat nomor/risiko, tahun pembelian, harga pembelian, golongan dan land sesuai dengan metode penyusutan yang di	2019	
6	Daftar pembayaran gaji, usaha dan tunjangan untuk komisioner, direksi, karyawan tetap, dan karyawan tidak tetap, serta honorarium/fee/bonus yang dibayarkan kepada pihak lain dan bukti pembayaran (slip gaji, dll) dan Fc, KTP seluruh karyawan	2019	
7	File data komputer (softcopy) untuk transaksi dan perapikan	2019	
III Dokumen Perusahaan			
1	Copy Akta Pendirian, akta perubahan modal (sampai dengan perubahan terakhir)	2019	
2	Struktur Organisasi Usaha dan Susunan Pengurus	2019	Sudah dikirim 1 April 2021
3	Surat-surat perjanjian kredit/kelebihan hutang dengan bank atau pihak lain	2019	
4	Surat-surat perjanjian/perbuatan yang lain misalnya subkontrak, sewa-menyewa, Outsourcing, dll (jika ada)	2019	
5	Rekening Koran semua bank (yang terkait dengan pemakuan/pengeluaran baik atas nama sendiri/perusahaan maupun lainnya)	2019	Sudah dikirim 1 April 2021
6	Seluruh bukti-bukti/nota/invoice terkait penghasilan (penghasilan usaha dan dari luar usaha)	2019	
7	Seluruh bukti-bukti/nota/invoice terkait beban/harga pokok penjualan dan biaya	2019	
8	Asli Dokumen Impor Pembelian/Impor Barang (PB), Invoice, Bill Of Lading (B/L), Air Way Bill (AWB), Certificate of origin, Packing list, Surat Permisian Pengeluaran Barang (SPPB), Bukti Penerimaan Negara Dalam Rangka Impor, Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak (SSPCP)	2019	Sudah dikirim 1 April 2021
9	Dokumen-dokumen lain yang dibutuhkan sesuai perkembangan perusahaan	2019	Sudah dikirim 1 April 2021 (Pakta Integritas, Berita Acara Hasil Pertemuan dengan WP, Berita Acara Pembelian Ketersangan, IO Billing dan BPN)

2

Sumber: Dokumentasi Perusahaan

3. Memberikan hasil kepada pembimbing lapangan untuk dilakukan review.

3.3.1.6 PT GL

a) Melakukan Rekapitulasi SPT PPh Pasal 21

Dokumen yang dibutuhkan dalam merekapitulasi PPh Pasal 21 yaitu Bukti Penerimaan Elektronik (BPE), Bukti Penerimaan Negara, dan dokumen yang berkaitan dengan SPT Masa PPh Pasal 21. Proses rekapitulasi SPT PPh Pasal 21 dilakukan untuk periode Januari hingga Mei 2021. Berikut adalah cara melakukan rekapitulasi PPh Pasal 21:

1. Menerima dokumen terkait SPT Masa PPh Pasal 21 klien baik normal maupun pembetulan (Formulir 1721) dari pembimbing lapangan seperti gambar 3.85.

Gambar 3. 85 Dokumen SPT Masa PPh Pasal 21 PT GL

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26		FORMULIR 1721	
MASA PAJAK : [mm - yyyy] 01 - 2021		Bacalah petunjuk pengisian sebelum mengisi formulir ini		JUNJAH LEMBAR SPT TERMASUK LAMPIRAN : (SPT DAN/ATAU LAMPIRAN)	
A. IDENTITAS PEMOTONG		1. NPWP 06.666.666.6-660-000		2. NAMA PT GL	
3. ALAMAT		4. NO. TELEPON : <small>KOR</small>		5. EMAIL : <small>KOR</small>	
B. OBJEK PAJAK					
NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIFOTONG (Rp)
1.	PEGAWAI TETAP	21-100-01	22	273.689.316	15.993.263
2.	PENERIMA PENSUN BERKALA	21-100-02	0	0	0
3.	PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU TENAGA KERJA LEPAS	21-100-03	44	17.400.000	0
4. BUKAN PEGAWAI:					
4a.	DISTRIBUTOR MULTILEVEL MARKETING (MLM)	21-100-04	0	0	0
4b.	PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI	21-100-05	0	0	0
4c.	PENJAJA BARANG DAGANGAN	21-100-06	0	0	0
4d.	TENAGA AHLI	21-100-07	0	0	0
4e.	BUKAN PEGAWAI YANG MEMERHA-MERHA YANG BERGAYAT BERSERBIMUNGKAM	21-100-08	34	318.957.897	1.600.000
4f.	BUKAN PEGAWAI YANG MEMERHA-MERHA YANG TIDAK BERGAYAT BERSERBIMUNGKAM	21-100-09	0	0	0
5.	INSIATU BERNAS PENGAWAS YANG TIDAK BERNAS TETAP	21-100-10	0	0	0
6.	MANTAN PEGAWAI YANG MEMERHA-JASA PRODUKSI/TANTEM BONEKA ATAU BILANGAN LAIN	21-100-11	0	0	0
7.	PEGAWAI YANG MELAKUKAN PENARIKAN DANA PENSUN	21-100-12	0	0	0
8.	PESERTA KEGIATAN	21-100-13	0	0	0
9.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIFOTONG PPh PASAL 21 TIDAK PAJAK LAINNYA	21-100-99	0	0	0
10.	PEGAWAI/PEMBERI JASA/PESERTA KEGIATAN/PENERIMA PENSUN BERKALA SEBAGAI WAJIB PAJAK LUAR NEGERI	27-100-99	0	0	0
11.	JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 10)		100	610.047.213	17.593.263
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR					JUMLAH (Rp)
12.	STP PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 (HANYA POKOK PAJAK)			0,00	0
13.	KELEBIHAN PENYETORAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 DARI MASA PAJAK			0,00	0
14.	JUMLAH (ANGKA 12 + ANGKA 13)			0,00	0
15.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR (ANGKA 11 KOLOM 6) - ANGKA 14)			0,00	17.593.263
16.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR PADA SPT YANG DIBETULKAN (PERKORAN DAN/ATAU ANGKA 15 DARI SPT YANG DIBETULKAN)			0,00	0
17.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR KARENA PEMBELULAN (ANGKA 15 - ANGKA 16)			0,00	0
18.	KELEBIHAN SETOR PADA ANGKA 15 ATAU ANGKA 17 AKAN DIKOMPENSASIKAN KE MASA PAJAK (mm - yyyy)			0,00	-

Sumber: Dokumentasi Perusahaan

2. Menerima Bukti Penerimaan Negara dari pembimbing lapangan seperti gambar 3.86.

Gambar 3. 86 Dokumen Bukti Penerimaan Negara PT GL

2/10/2021 <https://mib.bankmandiri.co.id/corp/front/billpayment.do?action=doPrintBillPayment>

Nomor Referensi Transaksi	:	
No. Ref Perkumpulan	:	
Dari Rekening	:	
Customer Reference Number	:	
To Institution	:	50012 Pajak/PNBP/Cukai
BUKTI PENERIMAAN NEGARA	:	Penerimaan Pajak
Data Pembayaran	:	
Tanggal dan Jam Bayar	:	11/02/2021 15:17:07
Tanggal buku	:	
Kode Cabang Bank	:	008
NTB	:	
NTPN	:	PT GL
STAN	:	
Data Setoran	:	
Kode Billing	:	
Nama Wajib Pajak	:	
Alamat	:	
Nomor Objek Pajak	:	
Mata Anggaran	:	411121
Jenis Setoran	:	100
Masa Pajak	:	01012021
Nomor Ketetapan	:	0000000000000000
Jumlah Setoran	:	Rp. 11.700.000
Mata Uang	:	IDR 11.700.000
Terbilang	:	11.700.000
Keterangan	:	06.666.666.6-660-000
NPWP	:	
Daftar Pembayaran	:	00 TOTAL 11.700.000
Admin Bank	:	IDR 0.00
Total Bayar	:	IDR 11.700.000
Beneficiary Notification	:	
Notification Flag	:	Don't Send
Mode Instruksi	:	Langsung
Langsung	:	10-Feb-2021

Empat ribu dua ratus lima rupiah
puter dan tidak memerlukan tanda tangan

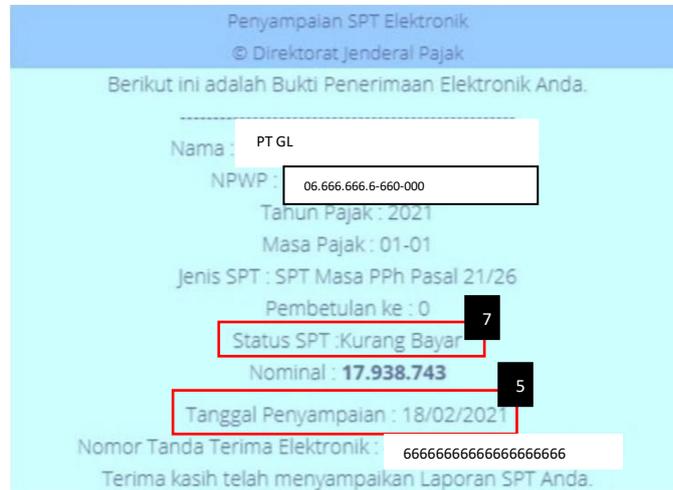
11.700.000

Print Simpan Sebagai Tutup

Sumber: DoDokumentasi Perusahaan

3. Menerima Bukti Penerimaan Eletronik dari pembimbing lapangan seperti gambar 3.87.

Gambar 3. 87 Dokumen Bukti Penerimaan Elektronik PT GL



Sumber: Dokumentasi Perusahaan

4. Menerima *file Excel* yang didalamnya terdapat format *table* (masa, status pembedulan, jumlah penerima penghasilan, penghasilan bruto, jumlah penerima penghasilan, jumlah pajak yang dipotong, total pajak yang disetorkan, tanggal lapor, tanggal bayar, dan status SPT) dan melakukan *input* SPT Masa PPh Pasal 21 baik status normal atau pembedulan. Pada kolom status pembedulan, massa, jumlah penerima penghasilan, penghasilan bruto, dan jumlah pajak yang dipotong angkanya berasal dari Formulir 1721 SPT Masa PPh Pasal 21. Kolom tanggal lapor dan status SPT angkanya diperoleh dari Bukti Penerimaan Elektronik. Sedangkan untuk kolom tanggal bayar diperoleh dari Bukti Penerimaan Negara. Langkahnya sebagai berikut:

Masa Pajak Januari 2021 SPT PPh 21 Normal maka proses *penginputan* sebagai berikut:

- 1) Jumlah tiap penerima penghasilan sebesar 22 diperoleh dari SPT Masa PPh Pasal 21 seperti nomor 1.
- 2) Jumlah penghasilan bruto sebesar Rp 273.689.316 diperoleh dari SPT Masa PPh Pasal 21 seperti nomor 2.
- 3) Jumlah pajak yang dipotong sebesar Rp 17.593.263 diperoleh dari SPT Masa PPh Pasal 21 seperti nomor 3.
- 4) Total pajak yang disetor sebesar Rp 17.593.263 diperoleh dari SPT Masa PPh Pasal 21 seperti nomor 4.
- 5) Tanggal lapor yaitu 18 Februari 2021 diperoleh dari Bukti Penerimaan Elektronik seperti nomor 5.
- 6) Tanggal bayar yaitu 11 Februari 2021 diperoleh dari Bukti Penerimaan Negara seperti nomor 6.
- 7) Status SPT Kurang Bayar diperoleh dari Bukti Penerimaan Elektronik seperti nomor 7.

Gambar 3. 88 Format Tabel dalam Pengisian

Rekapitulasi PPh Pasal 21 PT GL

MASA	STATUS PEMBETULAN	Penerima Pengh.		Pegawai Tetap		Penerima Pengh.		Pegawai Tidak Tetap		Penerima Pengh.		Tenaga Ahli		Penerima Pengh.		Bukan Pegawai Berkesinambungan		Penerima Pengh.		Bukan Pegawai Tidak Berkesinambungan		TOTAL
		Jumlah	Penghasilan Bruto	Jumlah	Penghasilan Bruto	Jumlah	Penghasilan Bruto	Jumlah	Penghasilan Bruto	Jumlah	Penghasilan Bruto	Jumlah	Penghasilan Bruto	Jumlah	Penghasilan Bruto	Jumlah	Penghasilan Bruto	Jumlah	Penghasilan Bruto			
JANUARI	NORMAL	22	273.689.316	44	17.400.000					34												630.047.316
FEBRUARI	NORMAL	22	289.552.345	44	19.749.348					30												546.314.137
MARET	NORMAL	23	362.553.544	9	5.752.288					41												698.455.870
APRIL	NORMAL	23	294.396.056	12	10.175.521					40												628.897.094
MAY	NORMAL																					
JUNI	NORMAL																					
JULI	NORMAL																					
AGUSTUS	NORMAL	1		2																		
SEPTEMBER	NORMAL																					
OKTOBER	NORMAL																					
NOVEMBER	NORMAL																					
DESEMBER	NORMAL																					
TOTAL		90	1.200.191.261	109	53.054.157					145												2.463.774.304

Jml Pajak Dipotong						Jumlah Penghasilan Bruto			Jml Pajak Dipotong			SPT MASA PPh21			
Pegawai Tetap	Pegawai Tidak Tetap	Tenaga Ahli	Bukan Pegawai Berkesinambungan	Bukan Pegawai Tidak Berkesinambungan	TOTAL	PESANGON	PENSUN, TUNJANGAN HARI TUA	TOTAL	PESANGON	PENSUN, TUNJANGAN HARI TUA	TOTAL	TOTAL yang dioctok	TGL LAPOR	TGL BAYAR	STATUS SPT
17.993.263			1.600.000		17.593.263							17.993.263	18 Februari 2021	11 Feb 21	OK
25.632.497			1.907.321		26.939.818							26.939.818	10 Maret 2021	07 Maret 2021	OK
16.727.234			780.162		17.507.396							17.507.396	16 April 2021	08 April 2021	OK
													03 Mei 2021	06 Mei 2021	OK
73.670.206	48.718		4.970.941		78.689.865							78.689.865			

Sumber: Dokumentasi Perusahaan

5. Melakukan rekapitulasi PPh Pasal 21 status normal dan pembetulan sampai dengan banyaknya dokumen terkait dengan SPT Masa PPh Pasal 21 yang telah diberikan oleh pembimbing lapangan (setahun atau tidak sampai setahun).

b) Melakukan Rekapitulasi SPT PPh Pasal 23

Dokumen yang dibutuhkan dalam merekapitulasi PPh Pasal 23 yaitu Bukti Penerimaan Elektronik (BPE), Bukti Penerimaan Negara, dan dokumen yang berkaitan dengan SPT Masa PPh Pasal 23 (formulir 1724). Proses melakukan rekapitulasi SPT PPh Pasal 23 dilakukan untuk bulan Januari

hingga Mei 2021 atas jasa manajemen, jasa konsultan, dan jasa lain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Berikut adalah cara melakukan rekapitulasi PPh Pasal 23 masa Januari:

1. Mendapatkan dokumen terkait SPT Masa PPh Pasal 23 klien baik normal maupun pembetulan (Formulir 1724) dari pembimbing lapangan seperti gambar 3.67.

Gambar 3. 89 Dokumen SPT Masa PPh Pasal 23 PT GL

The image shows a tax form (Formulir 1724) for PPh Pasal 23. The form is titled "SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26". It includes fields for taxpayer identification (PT GL), tax object details, and a table of tax items. A red box highlights a row for "JASA KONSULTAN" with a gross amount of 10,600.00 and a tax amount of 160,000.00. The form also includes sections for attachments and declarations.

NO	URAIAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENDAPATAN BRUTO (Rp.)	JUMLAH PPh YANG DIPOTONG/ DTP (Rp.)
1	DEVIDEN	24-101-01	0,00	0,00
2	BUNGA	24-102-01	0,00	0,00
3	ROYALTI	24-103-01	0,00	0,00
4	HADIAH, PENGHARGAAN, SEMENTA DAN LAINNYA	24-100-01	0,00	0,00
5	SEWA DAN PENGHASILAN LAIN SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN HARTA	24-100-02	0,00	0,00
6	JASA TEKNIK	24-104-01	0,00	0,00
7	JASA MANAJEMEN	24-104-02	0,00	0,00
8	JASA KONSULTAN	24-104-03	10.600,00	160.000,00
9	JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 8)		10.600,00	160.000,00

Sumber: Dokumentasi Perusahaan

2. Menerima Bukti Penerimaan Negara dari pembimbing lapangan

Gambar 3. 90 Dokumen Bukti Penerimaan Elektronik PT GL

	KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	
	LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200 email : pengaduan@pajak.go.id ; informasi@pajak.go.id	
BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK (BPE)		
NOMOR TANDA TERIMA ELEKTRONIK : 66666666666666666666		
NPWP	: 06.666.666.6-660-000	QR Code 
Nama	: PT GL	
Jenis Pajak	: PPH2326	
Pembetulan Ke-	: 0	
Tanggal Terima	: 10-02-2021 5	
Tahun Pajak	: 2021	
Masa Pajak	: 1	
Terima Kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda		

Sumber: Dokumentasi Perusahaan

3. Menerima Bukti Penerimaan Eletronik dari pembimbing lapangan.

Gambar 3. 91 Dokumen Bukti Penerimaan Negara PT GL

2/10/2021 <https://mib.bankmandiri.co.id/corp/front/billpayment.do?action=doPrintBillPayme>

Nomor Referensi Transaksi	:	
No. Ref Perkumpulan	:	
Dari Rekening	:	
Customer Reference Number	:	
To Institution	:	50012 Pajak/PNBP/Cukai
BUKTI PENERIMAAN NEGARA	:	Penerimaan Pajak
Data Pembayaran	:	-
Tanggal dan Jam Bayar	:	10/02/2021 15:17:07
Tanggal Buku	:	11/02/21
Kode Cabang Bank	:	008
NTB	:	
NTPN	:	5E555555E55E5EE
STAN	:	072/19
Data Setoran	:	-
Kode Billing	:	
Nama Wajib Pajak	:	PT GL
Alamat	:	
Nomor Objek Pajak	:	
Mata Anggaran	:	411124
Jenis Setoran	:	104
Masa Pajak	:	01012021
Nomor Ketetapan	:	0000000000000000
Jumlah Setoran	:	Rp. 120.000
Mata Uang	:	IDR
Terbilang	:	
Keterangan	:	01.123.456.7-890-000 ik computer dan tidak memerlukan tanda tangan
NPWP	:	
Daftar Pembayaran	:	00 TOTAL 120.000
Admin Bank	:	IDR
Total Bayar	:	IDR 120.000
Beneficiary Notification	:	
Notification Flag	:	Don't Send
Mode Instruksi	:	
Langsung	:	10-Feb-2021

Sumber: Dokumentasi Perusahaan

4. Menerima *file Excel* yang didalamnya terdapat format *table* (massa, status pembetulan, jasa yang berkaitan dengan PPh 23, total DPP, besarnya pajak PPh 23, tanggal bayar, NTPN, tanggal lapor dan status SPT) dan melakukan *input* SPT Masa PPh Pasal 23 baik status normal atau pembetulan. Pada kolom status pembetulan, massa, jasa yang berkaitan dengan PPh 23, total DPP, dan besarnya pajak PPh 23 angkanya berasal dari Formulir 1724 SPT Masa PPh Pasal 23. Kolom tanggal lapor dan status SPT angkanya diperoleh dari Bukti Penerimaan Elektronik. Sedangkan untuk kolom tanggal bayar dan NTPN diperoleh dari Bukti Penerimaan Negara. Langkahnya sebagai berikut:

Masa Pajak Januari 2021 SPT PPh 23 Normal maka proses *penginputan* sebagai berikut:

- 1) Jumlah penghasilan bruto sebesar Rp 10.600.000 diperoleh dari SPT Masa PPh Pasal 23 seperti nomor 1.
- 2) Jumlah pajak yang dipotong sebesar Rp 120.000 diperoleh dari SPT Masa PPh Pasal 23 seperti nomor 2.
- 3) Total DPP diperoleh dari penjumlahan semua penerima penghasilan seperti nomor 3.
- 4) Jumlah Pajak Penghasilan PPh 21 sebesar Rp 120.000 diperoleh dari SPT Masa PPh 23 seperti nomor 4.

c) **Melakukan Rekapitulasi SPT PPh Final**

Dokumen yang diperlukan Bukti Penerimaan Elektronik, Bukti Penerimaan Negara, dokumen yang terkait dengan SPT PPh dan Pasal 4 Ayat 2. Proses melakukan rekapitulasi SPT PPh Final dilakukan untuk bulan Maret 2021 atau persewaan tanah dan bangunan. Berikut merupakan proses melakukan rekapitulasi SPT PPh Final:

1. Mendapatkan dokumen dari pembimbing lapangan terkait SPT Masa PPh Final klien seperti gambar 3.93.

Gambar 3. 93 Dokumen SPT Masa PPh Final PT GL

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT (2)

Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2)

SPT Normal
 SPT Pembetulan Ke-
Masa Pajak: 03 / 2021

BAGIAN A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK
1. NPWP
2. Nama WP
3. Alamat
PT GL

BAGIAN B. OBJEK PAJAK

Urutan (1)	KAPJKJS (2)	Nilai Objek Pajak (Rp) (3)	Tarif (%) (4)	PPh yang Dipotong/ Dipungut/Ditetor Sendiri (Rp) (5)
1. Bunga Deposito/Tabungan, Diskonto SEBI dan Jasa Giro				
a. Bunga Deposito/Tabungan				
1) Yang ditempatkan di Dalam Negeri	41112B/404			
2) Yang ditempatkan di Luar Negeri	41112B/404			
b. Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	41112B/404			
c. Jasa Giro	41112B/404			
2. Transaksi Penjualan Saham				
a. Saham Perdana	41112B/407			
b. Bukan Saham Perdana	41112B/408			
3. Bunga/Diskonto Obligasi dan Surat Berharga Negara	41112B/401			
4. Hadiah Undian	41112B/4			
5. Persewaan Tanah dan/atau Bangunan				
a. Penyewa sebagai Pemotong Pajak	41112B/44	600.000	10,00	60.000
b. Orang Pribadi/Badan yang Menyetor Sendiri PPh	41112B/44			
6. Jasa Konstruksi				
a. Perencana Konstruksi				
1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh	41112B/409			
2) Penyedia Jasa yang Menyetor Sendiri PPh	41112B/409			
b. Pelaksana Konstruksi				
1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh	41112B/409			
2) Penyedia Jasa yang Menyetor Sendiri PPh	41112B/409			
c. Pengawas Konstruksi				
1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh	41112B/409			
2) Penyedia Jasa yang Menyetor Sendiri PPh	41112B/409			
7. Wajib Pajak yang Melakukan Penghasilan Hak atas Tanah/Bangunan	41112B/402			
8. Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Wajib Pajak Orang Pribadi	41112B/417			
9. Transaksi Derivatif Berjangka Kontrak Berjangka yang Diperdagangkan di Bursa	41112B/418			
10. Dividen yang Diterima/Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri	41112B/419			
11. Penghasilan Tertentu Lainnya				
a.				
b.				
c.				
JUMLAH		597.399		60.000

Terbilang: Lima Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah

BAGIAN C. LAMPIRAN

1. Surat Setoran Pajak: 1 lembar.
2. Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 Ayat (2).
3. Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 Ayat (2): 3 lembar.
4. Surat Kuasa Khusus.

BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi, sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritaskan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

PEMOTONG PAJAK/PMPINAN KUJASA WALIH PAJAK

Nama: ROBIN
NPWP: 11.222.333.4-566-000

Tanda Tangan & Cap: [Tanda Tangan]
Tanggal: 10/03/2021

Dilisi oleh Petugas SPT Masa Diterima: [Tanda Tangan]
Langsung dari WP Melalui Pos: [Tanda Tangan]

F.1.1.32.04

Sumber: Dokumentasi Perusahaan

2. Menerima Bukti Penerimaan Negara dari pembimbing lapangan seperti gambar 3.94.

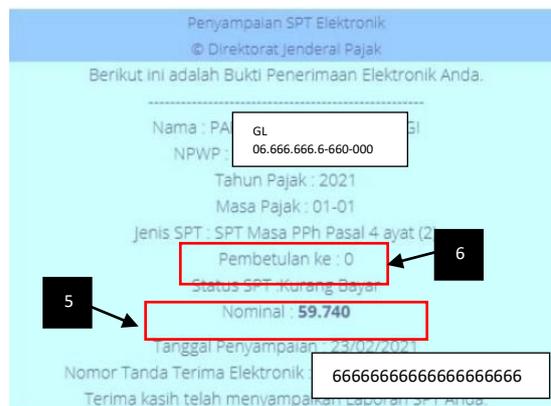
Gambar 3. 94 Bukti Penerimaan Negara PT GL



Sumber: Dokumentasi Perusahaan

3. Menerima Bukti Penerimaan Elektronik dari pembimbing lapangan seperti gambar 3.95.

Gambar 3. 95 Bukti Penerimaan Elektronik PT GL



Sumber: Dokumentasi Perusahaan

4. Menerima file Excel yang didalamnya terdapat format table (masa, bunga deposito/tabungan, transaksi jual saham, bunga/diskonto obligasi dan surat berharga, hadiah undian, persewaan tanah dan

bangunan, bunga simpanan, transaksi derivatif, dividen Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri, total DPP, PPh Final, tanggal bayar, NTPN, tanggal lapor, dan status SPT) yang digunakan untuk nantinya akan di *input* berdasarkan dokumen yang diberikan oleh klien.

Gambar 3. 96 Tabel Rekapitulasi PPh Final PT GL

NO	MASA	BUNGA DEPOSITO/ TABUNGAN (SBI & GIRO)	TRANSAKSI JUAL SAHAM	BUNGA/DISKONTO OBLIGASI & SURAT BERHARGA	HADIAH UNDIAN	PERSEWAAN TANAH & BANGUNAN	JASA KONSTRUKSI	PENGALIHAN TANAH BANGUNAN
1	JANUARI					600.000		
2	FEBRUARI					108.336.524		
3	MARET					14.117.616		
4	APRIL							
5	MEI					1.268.650		
6	JUNI							
7	JULI							
8	AGUSTUS							
9	SEPTEMBER							
10	OKTOBER				SH88888H8888H			
11	NOVEMBER					1		
12	DESEMBER							
	JUMLAH					0,189		

BUNGA SIMPANAN DIBAYARKAN KOPERASI	TRANSAKSI DERIVATIF	DIVIDEND WP OP DN	TOTAL DPP	PPh 4 Ayat 2	TANGGL BAYAR	NTPN	TANGGAL LAPOR	STATUS SPT2
			597.399	59.740	10 Februari 2021	6666666666	23 Februari 2021	KB
			168.336.524	16.833.650	10 Maret 2021		12 Maret 2021	KB
			14.117.616	1.411.761	09 April 2021	6F666666FF6666FF	15 April 2021	KB
			-	-	-	-	-	-
			1.268.650	126.865	10 Juni 2021	F7677777G677G7GG	18 Juni 2021	KB
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
			184.320.189	18.432.016				

Sumber: Dokumentasi Perusahaan

- Melakukan *input* SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat 2. Pada kolom status masa, bunga deposito/tabungan, transaksi jual saham, bunga/diskonto obligasi dan surat berharga, hadiah undian, persewaan tanah dan bangunan, bunga simpanan, transaksi derivatif, dividen Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri, total DPP, PPh Final angkanya berasal dari SPT Masa PPh Final. Kolom tanggal lapor dan status SPT angkanya diperoleh dari Bukti Penerimaan Elektronik. Sedangkan untuk kolom tanggal bayar dan NTPN diperoleh dari Bukti Penerimaan Negara.

Langkah yang dilakukan pada masa Januari yaitu:

- 1) Mengisi nominal pada uraian Persewaan Tanah dan Bangunan sebesar Rp 600.000 yang diperoleh dari SPT Masa PPh Final seperti nomor 1.
- 2) Mengisi total DPP yang diperoleh dari rumus menjumlahkan seluruh uraian. Pada masa Januari hanya terdapat Persewaan Tanah dan Bangunan maka total DPP adalah Rp 600.000.
- 3) Mengisi PPh Pasal 4 Ayat 2 sebesar Rp 60.000 yang diperoleh dari SPT Masa PPh Final seperti nomor 2.
- 4) Mengisi kolom tanggal bayar yaitu 10 Februari 2021 yang diperoleh dari Bukti Penerimaan Negara seperti nomor 3.
- 5) Mengisi kolom NTPN yaitu 6666666666 yang diperoleh dari Bukti Penerimaan Negara seperti nomor 4.
- 6) Mengisi kolom tanggal lapor yaitu 23 Februari 2021 yang diperoleh dari Bukti Penerimaan Elektronik seperti nomor 5.
- 7) Mengisi kolom status SPT Kurang Bayar yang diperoleh dari Bukti Penerimaan Elektronik seperti nomor 6.

5. Melakukan rekapitulasi PPh Final hingga masa yang ditentukan.

d) Melakukan Rekapitulasi PPN

Dokumen yang diperlukan dalam melakukan rekapitulasi adalah Bukti Penerimaan Elektronik, Bukti Penerimaan Negara, dan dokumen terkait dengan SPT PPN. Proses rekapitulasi PPN dilakukan untuk periode Januari dan Maret 2021. Berikut merupakan proses rekapitulasi PPN:

1. Mendapatkan dokumen dari pembimbing lapangan terkait SPT Masa PPN klien seperti gambar 3.97 dan 3.98.

Gambar 3. 97 Dokumen SPT Masa PPN PT GL

REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN				FORMULIR 1111 AB (Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)	
NAMA/NPK : PT GL NPWP : 06.666.666.6-066.000		MASA : 03 - 03 - 2021 (mm-mm-yyyy)			
		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)	
I. Rekapitulasi Penyerahan					
A. Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP					
A.1		0,00	2		
B. Penyerahan Dalam Negeri					
1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung		A.2	3.000.000,00	2	300.000,00
2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung			0,00		0,00
C. Rincian Penyerahan Dalam Negeri					
1. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri (jumlah IB 1 dengan Faktur Pajak Kode 01, 04, 05 dan 09 diaman 15, 2)		1	3.261.059.068,00	326.105.906,00	0,00
2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya dipungut oleh Pemungut PPN (jumlah IB 1 dengan Faktur Pajak Kode 03)		2	0,00	0,00	0,00
3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya tidak dipungut (jumlah IB 1 dengan Faktur Pajak Kode 07)		3	0,00	0,00	0,00
4. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM (jumlah IB 1 dengan Faktur Pajak Kode 08)		4	0,00	0,00	0,00
II. Rekapitulasi Perolehan					
A. Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean, dan Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean yang PM-nya Dapat Dikreditkan		B.1	0,00	0,00	0,00
B. Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri yang PM-nya Dapat Dikreditkan		B.2	2.493.073.019,00	249.307.299,00	0,00
C. Impor atau Perolehan yang PM-nya Tidak Dapat Dikreditkan termasuk Impor atau Perolehan yang Mendapat Fasilitas		B.3	0,00	0,00	0,00
D. Jumlah Perolehan (II.A + II.B + II.C)			2.493.073.019,00	249.307.299,00	0,00
III. Penghitungan PM Yang Dapat Dikreditkan					
A. Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan (II.A + II.B)		5		249.307.299,00	3
B. Pajak Masukan Lainnya					
1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya				360.450.704,00	
2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT Masa Pajak 03 - 2020 (mm-yyyy)				45.572.500,00	
3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan				0,00	4
4. Jumlah (III.B.1 + III.B.2 + III.B.3)				406.023.204,00	
C. Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan (III.A + III.B.4)		5		655.330.503,00	

DAFTAR EKSPOR BKP BERWUJUD, BKP TIDAK BERWUJUD, DAN/ATAU JKP				FORMULIR 1111 A1 (Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)	
NAMA/NPK : PT GL NPWP : 06.666.666.6-066.000		MASA : 03 - 03 - 2021 (mm-mm-yyyy)			
No.	Nama	Dokumen Tertentu	DPP (Rupiah)	Keterangan	
		Nomor	Tanggal (dd-mm-yyyy)		
JUMLAH		A1 >			

Sumber: Dokumentasi Perusahaan

Gambar 3. 98 Dokumen SPT Masa PPN PT GL

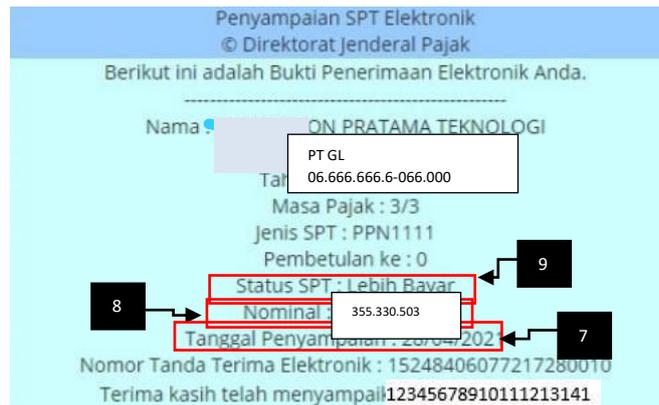
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)		FORMULIR 1111	
NAMA PKP : PT GL		NPWP : 06.666.666.6-066.000		Jumlah Lembar SPT (Termasuk Lampiran) Ditai oleh Pemangku	
ALAMAT : AKAJ		MASA : 12		Pembetulan No 0 (no) <input type="checkbox"/> Wajib PPhBM	
TELEPON : 0212020110		KLU : UZUR			
I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA					
A. Tentang PPN:					
1. Ekspor (A) Rp. 0,00 PPN Rp. 300.000,00					
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri (1) Rp. 3.000.000,00 PPN Rp. 0,00					
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemangku PPN (2) Rp. 0,00 PPN Rp. 0,00					
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut (3) Rp. 0,00 PPN Rp. 0,00					
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN (4) Rp. 0,00 PPN Rp. 0,00					
Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5) Rp. 3.000.000,00 PPN Rp. 300.000,00					
B. Tidak Tentang PPN Rp. 3.000.000,00					
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B) Rp. 3.000.000,00					
II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR					
A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2) (1) Rp. 300.000,00					
B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama (2) Rp. 0,00					
C. Pajak Masukan yang dapat dipotong/hitungkan (5) Rp. 655.330.503,00					
D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C) Rp. -355.330.503,00					
E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp. 0,00					
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E) Rp. 0,00					
G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal (dd-mm-yyyy) NTPN :					
H. PPN lebih bayar pada :					
1.1 <input checked="" type="checkbox"/> Butir II.D (Disi dalam hal SPT bukan Pembetulan) 1.2 <input type="checkbox"/> Butir II.D atau <input type="checkbox"/> Butir II.F (Disi dalam hal SPT Pembetulan)					
Doleh : 2.1 <input type="checkbox"/> PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau 2.2 <input checked="" type="checkbox"/> Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN					
diminta untuk : 3.1 <input checked="" type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak (mm-yyyy)					
3.2 <input type="checkbox"/> Dikembalikan (Restitusi)					
Khusus Restitusi untuk PKP :					
atau <input type="checkbox"/> Pasal 17C KUP dilakukan dengan : <input type="checkbox"/> Prosedur Biasa atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan					
atau <input type="checkbox"/> Pasal 17D KUP dilakukan dengan : <input type="checkbox"/> Prosedur Biasa atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan					
atau <input type="checkbox"/> Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan					
III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI					
A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp. 0,00					
B. PPN Terutang : Rp. 0,00					
C. Dilunasi Tanggal : (dd-mm-yyyy) NTPN :					
IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI					
A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp. 0,00					
B. Dilunasi Tanggal : (dd-mm-yyyy) NTPN :					
V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH					
A. PPhBM yang harus dipungut sendiri (1) Rp. 0,00					
B. PPhBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama Rp. 0,00					
C. PPhBM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B) Rp. 0,00					
D. PPhBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp. 0,00					
E. PPhBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D) Rp. 0,00					
F. PPhBM kurang bayar dilunasi tanggal (dd-mm-yyyy) NTPN :					
VI. KELENGKAPAN SPT					
<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 AB <input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 A2 <input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 B2 <input type="checkbox"/> SSP PPN _____ lembar <input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus					
<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 A1 <input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 B1 <input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 B3 <input type="checkbox"/> SSP PPhBM _____ lembar <input type="checkbox"/> _____ lembar					

6

Sumber: Dokumentasi Perusahaan

2. Menerima Bukti Penerimaan Elektronik dari pembimbing lapangan seperti gambar 3.99.

Gambar 3. 99 Bukti Penerimaan Elektronik PT GL



Sumber: Dokumentasi Perusahaan

3. Menerima *file Excel* yang didalamnya terdapat format *table* (masa, pajak keluaran, pajak masukan, kompensasi masa pajak sebelumnya, jumlah kompensasi, kurang bayar/ lebih bayar, tanggal lapor, tanggal bayar, dan NTPN) yang digunakan untuk nantinya akan di *input* berdasarkan dokumen yang diberikan oleh klien seperti gambar 3.100.

Penerimaan Negara jika tersedia. Langkah yang dilakukan pada masa Maret yaitu:

- 1) Mengisi kolom tiap uraian pada bagian DPP yaitu kolom uraian A.2 sebesar Rp 3.000.000.000, penyerahan PPN yang dipungut sendiri sebesar Rp 3.000.000.000, dan B.2 sebesar Rp 2.493.073.019 yang diperoleh dari SPT Masa PPN seperti nomor 1.
- 2) Mengisi kolom uraian pada bagian PPN yaitu kolom uraian A.2 sebesar Rp 300.000.000, penyerahan PPN yang dipungut sendiri sebesar Rp 300.000.000, dan B.2 sebesar Rp 249.073.019 yang diperoleh dari SPT Masa PPN seperti nomor 2.
- 3) Mengisi kolom kompensasi masa pajak sebelumnya sebesar Rp 360.450.704 yang diperoleh dari SPT Masa PPN seperti nomor 3.
- 4) Mengisi kolom jumlah kompensasi sebesar Rp 45.572.500 yang diperoleh dari SPT Masa PPN seperti nomor 4.
- 5) Mengisi kolom masa pajak kompensasi yaitu bulan Maret 2020 yang diperoleh dari SPT Masa PPN seperti nomor 5.
- 6) Mengisi kolom KB/LB sebesar -Rp 355.330.503 yang diperoleh dari SPT Masa PPN seperti nomor 6.
- 7) Jika terdapat KB/LB pembetulan maka diisi seperti SPT Masa PPN kotak biru.

- 8) Mengisi kolom tanggal lapor yaitu 28 April 2021 yang diperoleh dari Bukti Penerimaan Elektronik nomor 7.
- 9) Mengisi kolom nominal yaitu Rp 355.330.503 yang diperoleh dari Bukti Penerimaan Elektronik nomor 8.
- 10) Mengisi kolom status SPT LB yang diperoleh dari Bukti Penerimaan Elektronik nomor 9.

5. Melakukan rekapitulasi hingga masa yang ditentukan.

3.3.1.7 PT SRM

a) Melakukan Rekapitulasi SPT PPh Pasal 21

Dokumen yang dibutuhkan dalam merekapitulasi PPh Pasal 21 yaitu Bukti Penerimaan Elektronik (BPE), Bukti Penerimaan Negara, dan dokumen yang berkaitan dengan SPT Masa PPh Pasal 21. Berikut adalah cara melakukan rekapitulasi PPh Pasal 21:

1. Menerima dokumen terkait SPT Masa PPh Pasal 21 klien baik normal maupun pembetulan (Formulir 1721) dari pembimbing lapangan seperti gambar 3.101.

Gambar 3. 101 Dokumen SPT Masa PPh Pasal 21 PT SRM

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26

FORMULIR 1721

Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26

area barcode

MASA PAJAK : (mm - yyyy) 01 - 2021

Bacalah petunjuk pengisian sebelum mengisi formulir ini

JUNJAH LEMBAR SPT TERMASUK LAMPIRAN : (SPT DAN/ATAU LAMPIRAN) 01 - 01

SPT NORMAL SPT PEMBEHALAN KE-

A. IDENTITAS PEMOTONG

1. NPWP : 07.777.777.7-770-000

2. NAMA : PT SRM

3. ALAMAT : _____

4. NO. TELEPON : _____ 5. EMAIL : _____

B. OBJEK PAJAK

NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIFOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PEGAWAI TETAP	21-100-01	22	273.689.316	15.993.263
2.	PENERIMA PENSUN BERKALA	21-100-02	0	0	0
3.	PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU TENAGA KERJA LEPAS	21-100-03	44	17.400.000	0
4. BUKAN PEGAWAI:					
4a.	DISTRIBUTOR MULTILEVEL MARKETING (MLM)	21-100-04	0	0	0
4b.	PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI	21-100-05	0	0	0
4c.	PENJAJA BARANG DAGANGAN	21-100-06	0	0	0
4d.	TENAGA AHLI	21-100-07	0	0	0
4e.	PEKERJA BERSAMAAN	21-100-08	34	318.957.897	1.700.000
4f.	PEKERJA BERSAMAAN YANG MENEMUKAN YANG LAIN SEPERTI BERSAMAAN	21-100-09	0	0	0
5. PASIWA (BANK, PERUSAHAAN YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PERUSAHAAN PEMOTONG)					
5a.	PERUSAHAAN YANG MENEMUKAN YANG LAIN SEPERTI PERUSAHAAN	21-100-10	0	0	0
5b.	MANTAN PEGAWAI YANG MENEMUKAN YANG LAIN SEPERTI MANTAN PEGAWAI	21-100-11	0	0	0
5c.	PEGAWAI YANG MELAKUKAN PENARIKAN DANA PENSUN	21-100-12	0	0	0
5d.	PESERTA KEGIATAN	21-100-13	0	0	0
5e.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIFOTONG PPh PASAL 21 TIDAK PAJAK	21-100-99	0	0	0
5f.	PEGAWAI/PEKERJA JALAN PESERTA KEGIATAN PENERIMA PENSUN BERKALA SEBAGAI WAJIB PAJAK LUAR NEGERI	27-100-99	0	0	0
11.	JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 s.d. 10)		100	610.047.213	17.693.263
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR					
12. STP PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 (HANYA POKOK PAJAK)					0
13. KELEBIHAN PENYETORAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 DARI MASA PAJAK : (mm - yyyy) _____					0
14. JUMLAH (ANGKA 12 + ANGKA 13)					0
15. PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR (ANGKA 11 KOLOM 4) - ANGKA 14)					17.693.263
16. PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR PADA SPT YANG DIBETULKAN (PERKURANGAN DARI ANGKA 15 DAN/ATAU ANGKA 16 DARI SPT YANG DIBETULKAN)					
17. PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR KARENA PEMBEHALAN (ANGKA 15 - ANGKA 16)					0
18. KELEBIHAN SETOR PADA ANGKA 15 ATAU ANGKA 17 AKAN DIKOMPENSASIKAN KE MASA PAJAK (mm - yyyy)					0

HALAMAN 1

Sumber: Dokumentasi Perusahaan

- Menerima Bukti Penerimaan Negara dari pembimbing lapangan seperti gambar 3.102

Gambar 3. 102 Dokumen Bukti Penerimaan Negara PT SRM

2/10/2021 <https://mib.bankmandiri.co.id/corp/front/billpayment.do?action=doPrintBillPayment>

Nomor Referensi Transaksi	:	
No. Ref Perkumpulan	:	
Dari Rekening	:	
Customer Reference Number	:	
To Institution	:	50012 Pajak/PNBP/Cukai
BUKTI PENERIMAAN NEGARA	:	Penerimaan Pajak
Data Pembayaran	:	
Tanggal dan Jam Bayar	:	12/02/2021 15:17:07
Tanggal buku	:	
Kode Cabang Bank	:	008
NTB	:	
NTPN	:	
STAN	:	
Data Setoran	:	
Kode Billing	:	
Nama Wajib Pajak	:	PT SRM
Alamat	:	
Nomor Objek Pajak	:	
Mata Anggaran	:	411121
Jenis Setoran	:	100
Masa Pajak	:	01012021
Nomor Ketetapan	:	00000000000000000000
Jumlah Setoran	:	Rp. 11.800.000
Mata Uang	:	IDR
Terbilang	:	
Keterangan	:	07.777.777.7-770-000 empat ribu dua ratus lima rupiah puter dan tidak memerlukan tanda tangan
NPWP	:	
Daftar Pembayaran	:	00 TOTAL 11.800.000
Admin Bank	:	IDR 0.00
Total Bayar	:	IDR 11.800.000
Beneficiary Notification	:	
Notification Flag	:	Don't Send
Mode Instruksi	:	
Langsung	:	10-Feb-2021

Print Simpan Sebagai Tutup

Sumber: Dokumentasi Perusahaan

3. Menerima Bukti Penerimaan Eletronik dari pembimbing lapangan seperti gambar 3.103.

Gambar 3. 103 Dokumen Bukti Penerimaan Elektronik PT SRM

Penyampaian SPT Elektronik
© Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : PT SRM
NPWP : 07.777.777.7-770-000
Tahun Pajak : 2021
Masa Pajak : 01-01
Jenis SPT : SPT Masa PPh Pasal 21/26
Pembedulan ke : 0
Status SPT : Kurang Bayar
Nominal : 17.938.743
Tanggal Penyampaian : 18/02/2021

Nomor Tanda Terima Elektronik :
Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

Sumber: Dokumentasi Perusahaan

4. Menerima *file Excel* yang didalamnya terdapat format *table* (masa, status pembedulan, jumlah penerima penghasilan, penghasilan bruto, jumlah penerima penghasilan, jumlah pajak yang dipotong, total pajak yang disetorkan, tanggal lapor, tanggal bayar, dan status SPT) dan melakukan *input* SPT Masa PPh Pasal 21 baik status normal atau pembedulan. Pada kolom status pembedulan, massa, jumlah penerima penghasilan, penghasilan bruto, dan jumlah pajak yang dipotong angkanya berasal dari Formulir 1721 SPT Masa PPh Pasal 21. Kolom tanggal lapor dan status SPT angkanya diperoleh dari Bukti Penerimaan Elektronik. Sedangkan untuk kolom tanggal bayar diperoleh dari Bukti Penerimaan Negara. Langkahnya sebagai berikut:

Masa Pajak Januari 2021 SPT PPh 21 Normal maka proses penginputan sebagai berikut:

- 1) Jumlah tiap penerima penghasilan sebesar 22 diperoleh dari SPT Masa PPh Pasal 21 seperti nomor 1.
- 2) Jumlah penghasilan bruto sebesar Rp 273.689.316 diperoleh dari SPT Masa PPh Pasal 21 seperti nomor 2.
- 3) Jumlah pajak yang dipotong sebesar Rp 17.693.263 diperoleh dari SPT Masa PPh Pasal 21 seperti nomor 3.
- 4) Total pajak yang disetor sebesar Rp 17.693.263 diperoleh dari SPT Masa PPh Pasal 21 seperti nomor 4.
- 5) Tanggal lapor yaitu 18 Februari 2021 diperoleh dari Bukti Penerimaan Elektronik seperti nomor 5.
- 6) Tanggal bayar yaitu 12 Februari 2021 diperoleh dari Bukti Penerimaan Negara seperti nomor 6.
- 7) Status SPT Kurang Bayar diperoleh dari Bukti Penerimaan Elektronik seperti nomor 7.

Gambar 3. 104 Format Tabel dalam Pengisian

Rekapitulasi PPh Pasal 21 PT SRM

MASA	STATUS PEMBETULAN	Jumlah		Penghasilan Bruto		Jumlah		Penghasilan Bruto		Jumlah		Penghasilan Bruto		TOTAL
		Penerima Pengh.	Pegawai Tetap	Penerima Pengh.	Pegawai Tidak Tetap	Penerima Pengh.	Tenaga Ahli	Penerima Pengh.	Bukan Pegawai Berkeseluruhan	Penerima Pengh.	Bukan Pegawai Tidak Berkeseluruhan			
JANUARI	NORMAL	22		275.689.316	44	17.400.000			34		318.957.897			610.047.213
FEBRUARI	NORMAL	22		295.552.345	44	19.726.348			30		257.095.434			546.374.121
MARET	NORMAL	23		362.553.544	9	5.752.288			41		390.150.038			698.455.870
APRIL	NORMAL	23		294.396.056	12	10.175.521			40		304.325.517			608.897.094
MAY	NORMAL													
JUNI	NORMAL		1											
JULI	NORMAL		2											
AUGUSTUS	NORMAL													
SEPTEMBER	NORMAL													
OCTOBER	NORMAL													
NOVEMBER	NORMAL													
DESEMBER	NORMAL													
TOTAL		90		1.200.191.261	109	53.054.157			145		1.210.528.886			2.463.774.304

Jml Pajak Dipotong					TOTAL	Jumlah Penghasilan Bruto		Jml Pajak Dipotong		TOTAL	Total yang disetor	SPT MASA PPh21		STATUS SPT
Pegawai Tetap	Pegawai Tidak Tetap	Tenaga Ahli	Bukan Pegawai Berkeseluruhan	Bukan Pegawai Tidak		PESANGON	PENSIUN, TUNJANGAN	PESANGON	PENSIUN, TUNJANGAN			TGL LABA	TGL BAYAR	
15.993.263			1.700.000		17.693.263					17.928.742		18 Februari 2021	12 Feb	KH
25.632.497			1.307.321		26.939.818					26.939.818		10 Maret 2021	09 Maret 2021	KH
16.727.234			780.162		17.507.396					17.507.396		16 April 2021	08 April 2021	KH
												10 Mei 2021	06 Mei 2021	KH
73.670.206	48.718		4.970.941		78.689.865					78.689.865				

Sumber: Dokumentasi Perusahaan

- Melakukan rekapitulasi PPh Pasal 21 status normal dan pembetulan sampai dengan banyaknya dokumen terkait dengan SPT Masa PPh Pasal 21 yang telah diberikan oleh pembimbing lapangan (setahun atau tidak sampai setahun).

b) Melakukan Rekapitulasi SPT PPh Pasal 23

Dokumen yang dibutuhkan dalam merekapitulasi PPh Pasal 23 yaitu Bukti Penerimaan Elektronik (BPE), Bukti Penerimaan Negara, dan dokumen yang berkaitan dengan SPT Masa PPh Pasal 23 (formulir 1724). Proses rekapitulasi SPT PPh Pasal 23 dilakukan untuk periode Maret 2021 atas jasa manajemen. Berikut adalah cara melakukan rekapitulasi PPh Pasal 23 masa Januari:

1. Mendapatkan dokumen terkait SPT Masa PPh Pasal 23 klien baik normal maupun pembetulan (Formulir 1724) dari pembimbing lapangan seperti gambar 3.105.

Gambar 3. 105 Dokumen SPT Masa PPh Pasal 23 PT SRM

Area staples

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26		FORMULIR 1724 INDUK	
Masa Pajak (mm-yyyy) H.1 01 - 2021		SPT Normal H.3 <input type="checkbox"/> Pembetulan Ke- H.4		Jumlah Lembar SPT Termasuk Lampiran : 0 H.5 (Dua oleh pelengk)	
A. IDENTITAS PEMOTONG P1					
A.1 NPWP		07.777.777.7-770-000			
A.2 NAMA		PT SRM			
A.3 ALAMAT					
A.4 NO. TELEPON		A.5 EMAIL : t.com			
B. OBJEK PAJAK					
NO	URAIAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp.)	JUMLAH PPh YANG DIPOTONG/ DTP(Rp)	
I. PPh PASAL 23					
1	DEVIDEN	24-101-01	0,00	0,00	
2	BUNGA	24-102-01	0,00	0,00	
3	ROYALTI	24-103-01	0,00	0,00	
4	HADIAH, PENGHARGAAN, BONUS DAN LAINNYA	24-105-01	0,00	0,00	
5	SERVA DAN PENGHASILAN LAIN SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN HARTA	24-105-02	0,00	0,00	
6	6a. JASA TEKNIK	24-104-01	0,00	0,00	
	6b. JASA MANAJEMEN	24-104-02	0,00	0,00	
	6c. JASA KONSULTAN	24-104-03	10.700,00	160.000,00	
Jumlah (Penjumlahan Angka 1 s.d. 6)			10.700,00	160.000,00	
Jumlah PPh Pasal 23 yang kurang disetor setelah dikurangi PPh Pasal 23 ditanggung pemerintah (DTP)				160.000,00	
Jumlah PPh Pasal 23 yang kurang disetor sehubungan dengan penambahan dan pembetulan bukti pemotongan				0,00	
II. PPh PASAL 26					
10	DEVIDEN	27-101-01	0,00	0,00	
11	BUNGA	27-102-01	0,00	0,00	
12	ROYALTI	27-103-01	0,00	0,00	
13	SERVA DAN PENGHASILAN LAIN SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN HARTA	27-105-01	0,00	0,00	
14	HADIAH DAN PENGHARGAAN	27-104-01	0,00	0,00	
15	HADIAH DAN PENGHARGAAN	27-105-02	0,00	0,00	
16	PENGLIN DAN PEMBAYARAN BERKALA LAINNYA	27-105-03	0,00	0,00	
17	PREMI SWAP DAN TRANSAKSI LINDUNG NILAI LAINNYA	27-102-02	0,00	0,00	
18	KELUNTUNGAN KARENA PEMBEBASAN UTANG	27-105-04	0,00	0,00	
19	PENGHASILAN DARI PENJUALAN ATAU PENGALIHAN HARTA DI INDONESIA	27-105-05	0,00	0,00	
20	DIVIDEN KURANG RESERVA	27-105-06	0,00	0,00	
21	PENGHASILAN DARI PENJUALAN ATAU PENGALIHAN SAHAM	27-105-07	0,00	0,00	
22	PENGHASILAN KENA PAJAK BUKIT SETELAH PAJAK	27-105-01	0,00	0,00	
Jumlah (Penjumlahan Angka 10 s.d. 22)			0,00	0,00	
Jumlah PPh Pasal 26 yang kurang disetor setelah dikurangi PPh Pasal 26 ditanggung pemerintah (DTP)				0,00	
Jumlah PPh Pasal 26 yang kurang disetor sehubungan dengan penambahan dan pembetulan bukti pemotongan				0,00	
1) Tidak termasuk deviden kepada WP orang pribadi bukan residen 2) Tidak termasuk bunga bank terhadap objek PPh Pasal 4 ayat (2) 3) Selain yang telah dipotong PPh pasal 21 ayat (1) huruf a 4) Tidak termasuk sewa tanah dan bangunan yang telah dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2) 5) Jika jasa lain sebagaimana angka 6d diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan merupakan penjumlahan dari kode objek pajak 24-104-04 sampai dengan 24-104-05 pada Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23/26					
BAGIAN C. LAMPIRAN					
C.1	<input checked="" type="checkbox"/> Lembar Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26	<input type="checkbox"/>	lembar		
C.2	<input checked="" type="checkbox"/> Surat Salinan Pajak Bukti	<input type="checkbox"/>	lembar		
C.3	<input type="checkbox"/> Hasil Pembetulan Bukti	<input type="checkbox"/>	lembar		
C.4	<input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus	<input type="checkbox"/>	lembar		
C.5	<input type="checkbox"/> Fotokopi Surat Keterangan Bebas	<input type="checkbox"/>	lembar		
C.6	<input type="checkbox"/> Fotokopi Surat Keterangan Domisili	<input type="checkbox"/>	lembar		
C.7	<input type="checkbox"/> Fotokopi SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 yang dibatalkan termasuk lampiran dan Bukti Penyetoran Surat	<input type="checkbox"/>	lembar		
BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN					
Dengan menyetor kepalang dan dengan menyetor kembali sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya bertafikan di atas beserta lampiran-lampiran saya adalah benar, lengkap dan jelas.					
D.1	<input checked="" type="checkbox"/> WAJIB PAJAK/ WAKIL WAJIB PAJAK (PENGURUS, DLL)			Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa dokumen ini telah diandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah.	
D.2	<input type="checkbox"/> KUASA				
D.3	NAMA				
D.4	NPWP				
D.5	TANGGAL	J 14 02 21			
D.6	TEMPAT	KOTA TANGERANG SELATAN			

Sumber: Dokumentasi Perusahaan

2. Menerima Bukti Penerimaan Negara dari pembimbing lapangan

Sumber: Dokumentasi Perusahaan

4. Menerima *file Excel* yang didalamnya terdapat format *table* (massa, status pembetulan, jasa yang berkaitan dengan PPh 23, total DPP, besarnya pajak PPh 23, tanggal bayar, NTPN, tanggal lapor dan status SPT) dan melakukan *input* SPT Masa PPh Pasal 23 baik status normal atau pembetulan. Pada kolom status pembetulan, massa, jasa yang berkaitan dengan PPh 23, total DPP, dan besarnya pajak PPh 23 angkanya berasal dari Formulir 1724 SPT Masa PPh Pasal 23. Kolom tanggal lapor dan status SPT angkanya diperoleh dari Bukti Penerimaan Elektronik. Sedangkan untuk kolom tanggal bayar dan NTPN diperoleh dari Bukti Penerimaan Negara. Langkahnya sebagai berikut:

Masa Pajak Januari 2021 SPT PPh 23 Normal maka proses *penginputan* sebagai berikut:

- 1) Jumlah penghasilan bruto sebesar Rp 10.700.000 diperoleh dari SPT Masa PPh Pasal 23 seperti nomor 1.
- 2) Jumlah pajak yang dipotong sebesar Rp 130.000 diperoleh dari SPT Masa PPh Pasal 23 seperti nomor 2.
- 3) Total DPP diperoleh dari penjumlahan semua penerima penghasilan seperti nomor 3.

Gambar 3. 110 Purchase Order PT DHR

PT DHR
PURCHASE ORDER

PT SAKTI
Up. Ibu Rama

4 PO No: 5/11/2015
Jakarta, 10/12/2015
Delivery Date: 17/12/2015

5

Dengan Hormat,
Bersama ini kami menyatakan persetujuan untuk mencetak BILINGUAL HANDBILL MAM16 - THE SPOTLIGHT OF FAITH untuk [redacted] pada perusahaan Bapak/Ibu berdasarkan penawaran harga melalui telepon/e-mail.
Di bawah ini adalah pesanan kami dengan spesifikasi sebagai berikut:

ITEM CODE & SPECIFICATION	QTY	UNIT PRICE	CUR	TOTAL
HK EN BC16 - HK BILINGUAL HANDBILL MAM16 - THE SPOTLIGHT OF FAITH Size : A5 Paper : Art Paper 120 gsm Color : 4/4 CMYKBlack Finishing : 1 fold	30,500	150,00	RP	4,575,000.00
Total:				4,575,000.00
Tax 10%: RP				457,500.00
Grand Total: RP				5,032,500.00

NOTE: MINTA PROOF SEBELUM DICETAK

Sumber: Dokumentasi Perusahaan

Gambar 3. 111 Faktur Pajak PT DHR

Faktur Pajak

Nomor Seri Faktur Pajak: 020.003-11-12345678

13

Pengusaha Kena Pajak:
Nama: PT SAKTI
Alamat: JL. JAMBUI 10, JAKARTA UTARA
NPWP: 01.123.456.7-890-000

Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak:
Nama: PT DHR
Alamat: Kota/Kab. JL. MIRING 15, JAKARTA BARAT
NPWP: 02.345.678.9-011-000

No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Usang Muka/Termin
1	HK EN BC16 - HK BILINGUAL HANDBILL MAM 16 Rp 150 x 30.500	4.575.000,00
Harga Jual / Penggantian		4.575.000,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Usang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		4.575.000,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		457.500,00
Total PPh-BM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

14&15

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengutar bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik, sehingga tidak memerlukan tanda tangan bawah pada Faktur Pajak ini.

Sumber: Dokumentasi Perusahaan

Gambar 3. 112 Surat Jalan PT DHR

Jakarta, 18 Dec 2015

SURAT - JALAN

Kepada Yth : PT Duta Harapan Dunia

No : 112.12.15.45

Dikirim dengan kendaraan : Jakarta

No	Nama Barang	Banyaknya	Keterangan
1	HK EN BC 16 HK BILINGUAL HANDBILL MAMIE THE SPOTLIGHT OF FAITH	30.500 PCS	25 PAK @ 1.200 PCS 1 PAK @ 500 PCS

Harap diterima dengan baik
Menerima

PT SAKTI
JL JAMBU 10, JAKARTA UTARA
01.123.456.7-890-000

PT. Pusaka Sejahtera Mandiri

Nama jelas/cap.

Sumber: Dokumentasi Perusahaan

Gambar 3. 113 Invoice PT DHR

PT SAKTI
PT. PUSAKA SEJAHTERA MANDIRI
JAKARTA

No. : 123/ABC/XXX/45

PEMBAYARAN

Sudah terima dari : PT. Duta Harapan Dunia
Jakarta

Banyaknya uang : Lima Juta Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah =

Untuk pembayaran : 28.500 Pcs HK EN BC16 - HK BILINGUAL HANDBILL 16 @ Rp. 150 / = Rp. 4.275.000 + PPN 10%

Jakarta, 18 Desember 2015

Bank Central Asia No. Rek. 309-3000-354
atas nama : PT. Pusaka Sejahtera Mandiri
Cabang : Kelaya Barat

Jumlah : Rp. 3.032.500,-

PT. Pusaka Sejahtera Mandiri

Sumber: Dokumentasi Perusahaan

2. Menerima format *table Excel* dari pembimbing lapangan.

Gambar 3. 114 Format Tabel Matriks PPh Pasal 23

Payment Voucher			Purchase Order		Invoice				
Tanggal	Nomor PV	Total Amount	Tanggal	Nomor PO	Tanggal	Nomor Invoice	Total Harga	PPN	Total
28/12/2015	PV 12b/XXX/34	5.032.500	05/11/2015	123456	15/12/2015	123/ABC/XXX/45	4.575.000	457.500	5.032.500
28/12/2015	PV 12b/XXX/34	32.665.000	05/11/2015	789101	15/12/2015	456/ABC/XXX/45	3.000.000		3.000.000
28/12/2015	PV 12b/XXX/34	336.600	12/11/2015	213141	01/12/2015	789/ABC/XXX/45	306.000	30.600	336.600

Surat Jalan		Faktur Pajak							
Tanggal	Nomor SJ	NO FAKTUR	TANGGAL	REVISI	MASA	TABUNG	STATUS FAKTUR	Koreksi - 11	PPN
14/12/2015	001234	020.003-11-12345678	15/12/2015	2	12	2015	Normal	Koreksi - 11	4.575.000
14/12/2015	004567	030.004-12-23456789	15/12/2015	2	12	2015	Normal	Koreksi - 12	3.000.000
01/12/2015	008901	040.005-13-97654321	01/12/2015	7	12	2015	Normal	Koreksi - 12	306.000,00

Sumber: Dokumentasi Perusahaan

3. Melakukan *input* data asli ke *table excel* yang telah disediakan seperti gambar 3.114. Berikut langkah *inputan*:
 - 1) Mengisi data yang terdapat pada informasi *payment voucher* berupa tanggal 28 Desember 2015, nomor *payment voucher* yaitu PV 12b/XXX/34, dan total *amount* sebesar Rp 5.032.500.
 - 2) Mengisi data yang terdapat pada informasi *purchase order* berupa tanggal 5 November 2015 dan nomor *purchase order* yaitu 123456.
 - 3) Mengisi data yang terdapat pada informasi *invoice* berupa tanggal 15 Desember 2015, nomor *invoice* 123/ABC/XXX/45, total harga yaitu Rp 4.575.000, PPN yaitu 457.500, dan total yaitu Rp 5.032.500.
 - 4) Mengisi data yang terdapat pada informasi surat jalan yaitu tanggal 14 Desember 2015 dan nomor surat jalan 0001234, NPWP yaitu 02.345.678.9-011.000,
 - 5) Mengisi data yang terdapat pada informasi faktur pajak yaitu nomor faktur 020.003.11-12345678, tanggal faktur yaitu 15

Desember 2015, *bundle* 2, masa yaitu 12, tahun 2015, status faktur yaitu normal, koreksi – 12, DPP sejumlah Rp 4.575.000, dan PPN sejumlah Rp 457.500.

4. Memberikan hasil *input* matriks kepada pembimbing lapangan untuk dilakukan *review*.

3.3.1.9 PT DM

a) Melakukan Rekapitulasi SPT PPh Pasal 21

Dokumen yang dibutuhkan dalam merekapitulasi PPh Pasal 21 yaitu Bukti Penerimaan Elektronik (BPE), Bukti Penerimaan Negara, dan dokumen yang berkaitan dengan SPT Masa PPh Pasal 21. Proses rekapitulasi dilakukan untuk 3 anak cabang periode 2020. Berikut adalah cara melakukan rekapitulasi PPh Pasal 21:

1. Menerima dokumen terkait SPT Masa PPh Pasal 21 klien baik normal maupun pembetulan (Formulir 1721) dari pembimbing lapangan seperti gambar 3.101.

Gambar 3. 115 Dokumen SPT Masa PPh Pasal 21 PT DM

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26

FORMULIR 1721

Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26

area barcode

MASA PAJAK : 01 - 2021

Bacalah petunjuk pengisian sebelum mengisi formulir ini

JUMLAH LEMBAR SPT TERMASUK LAMPIRAN : 001 (SPT) 000 (SPT OLEH PERUSAHA)

A. IDENTITAS PEMOTONG

1. NPWP : 08.888.888.8-BB0-000

2. NAMA : PT DM

3. ALAMAT : _____

4. NO. TELEPON : _____ 5. EMAIL : _____

B. OBJEK PAJAK

NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PEGAWAI TETAP	21-100-01	22	273.689.316	15.993.263
2.	PENERIMA PENSILN BERKALA	21-100-02	0	0	0
3.	PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU TENAGA KERJA LEPAS	21-100-03	44	17.400.000	0
4.	BUKAN PEGAWAI:				
4a.	DISTRIBUTOR MULTILEVEL MARKETING (MLM)	21-100-04	0	0	0
4b.	PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI	21-100-05	0	0	0
4c.	PENJAJA BARANG DAGANGAN	21-100-06	0	0	0
4d.	TENAGA AHLI	21-100-07	0	0	0
4e.	BUKAN PEGAWAI YANG MENEMPAH MELAYU YANG BERKAITAN DENGAN BUKAN PEGAWAI	21-100-08	34	318.957.897	1.800.000
4f.	BUKAN PEGAWAI YANG MENEMPAH MELAYU YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN BUKAN PEGAWAI	21-100-09	0	0	0
	ARIS ATAU DEWAN PENGAWAS YANG TIDAK ISKAWAN TETAP	21-100-10	0	0	0
5.	MANTAN PEGAWAI YANG MENEMPAH MELAYU JASA PRODUKSI/STANTEN/ BONUS ATAU BUKAN LAINNYA	21-100-11	0	0	0
7.	PEGAWAI YANG MELAKUKAN PENARIKAN DANA PENSILN	21-100-12	0	0	0
8.	PESERTA KEGIATAN	21-100-13	0	0	0
9.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 TIDAK FINAL LAINNYA	21-100-99	0	0	0
10.	PEGAWAI/PEMBERI JALAPESERTA KEGIATAN/PENERIMA PENSILN BERKALA SEKAGAI WADAI PAJAK LUAR NEGARA	27-100-99	0	0	0
11.	JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 10)		100	610.047.213	17.793.263
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR					JUMLAH (Rp)
12.	STP PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 (HANYA POKOK PAJAK)			0,00	0
13.	KELEBIHAN PENYETORAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 DARI: MASA PAJAK : _____ TAHUN KALENDER (yyyy)			0,00	0
14.	JUMLAH (ANGKA 12 + ANGKA 13)			0,00	0
15.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR (ANGKA 11 KURUS - ANGKA 14)			0,00	17.793.263
LAMA/TRANS PENYISIRAN PADA ANGKA 15 & 17 APABILA SPT PEMBEHALAN (DARU/TAU) PADA ANGKA 15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/62/63/64/65/66/67/68/69/70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/100					
16.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR PADA SPT YANG DIBETULKAN (PINDAHAN DARI BAGIAN B ANGKA 15 DARI SPT YANG DIBETULKAN)			0,00	0
17.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR KARENA PEMBEHALAN (ANGKA 15 - ANGKA 16)			0,00	0
18.	KELEBIHAN SETOR PADA ANGKA 15 ATAU ANGKA 17 AKAN DIKOMPENSASIKAN KE MASA PAJAK (mm - yyyy)			0,00	-

HALAMAN 1

Sumber: Dokumentasi Perusahaan

2. Menerima Bukti Penerimaan Negara dari pembimbing lapangan seperti gambar 3.116

Gambar 3. 116 Dokumen Bukti Penerimaan Negara PT DM

2/10/2021 <https://mib.bankmandiri.co.id/corp/front/billpayment.do?action=doPrintBillPayment>

Nomor Referensi Transaksi	:	
No. Ref Perkumpulan	:	
Dari Rekening	:	
Customer Reference Number	:	
To Institution	:	50012 Pajak/PNBP/Cukai
BUKTI PENERIMAAN NEGARA	:	Penerimaan Pajak
Data Pembayaran	:	
Tanggal dan Jam Bayar	:	13/02/2021 15:17:07
Tanggal Buku	:	11/02/21
Kode Cabang Bank	:	008
NTB	:	
NTPN	:	
STAN	:	
Data Setoran	:	
Kode Billing	:	
Nama Wajib Pajak	:	PT DM
Alamat	:	
Nomor Objek Pajak	:	
Mata Anggaran	:	411121
Jenis Setoran	:	100
Masa Pajak	:	01012021
Nomor Ketetapan	:	00000000000000000000
Jumlah Setoran	:	Rp. 11.900.000
Mata Uang	:	IDR
Terbilang	:	
Keterangan	:	08.888.888.8-880-000
NPWP	:	
Daftar Pembayaran	:	00 TOTAL
Admin Bank	:	IDR 11.900.000
Total Bayar	:	IDR 11.900.000
Beneficiary Notification	:	
Notification Flag	:	Don't Send
Mode Instruksi	:	
Langsung	:	10-Feb-2021

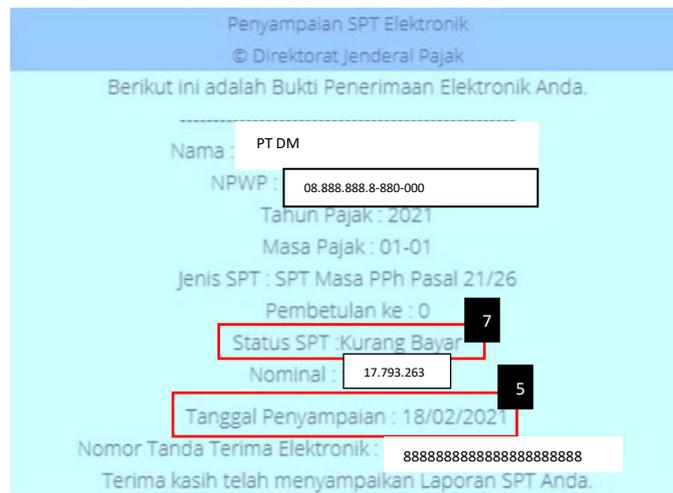
Print Simpan Sebagai Tutup

o

Dokumentasi Perusahaan

3. Menerima Bukti Penerimaan Eletronik dari pembimbing lapangan seperti gambar 3.117.

Gambar 3. 117 Dokumen Bukti Penerimaan Elektronik PT DM



Sumber: Dokumentasi Perusahaan

4. Menerima *file Excel* yang didalamnya terdapat format *table* (masa, status pembedulan, jumlah penerima penghasilan, penghasilan bruto, jumlah penerima penghasilan, jumlah pajak yang dipotong, total pajak yang disetorkan, tanggal lapor, tanggal bayar, dan status SPT) dan melakukan *input* SPT Masa PPh Pasal 21 baik status normal atau pembedulan. Pada kolom status pembedulan, massa, jumlah penerima penghasilan, penghasilan bruto, dan jumlah pajak yang dipotong angkanya berasal dari Formulir 1721 SPT Masa PPh Pasal 21. Kolom tanggal lapor dan status SPT angkanya diperoleh dari Bukti Penerimaan Elektronik. Sedangkan untuk kolom tanggal bayar diperoleh dari Bukti Penerimaan Negara. Langkahnya sebagai berikut:

Masa Pajak Januari 2021 SPT PPh 21 Normal maka proses *penginputan* sebagai berikut:

- 1) Jumlah tiap penerima penghasilan sebesar 22 diperoleh dari SPT Masa PPh Pasal 21 seperti nomor 1.
- 2) Jumlah penghasilan bruto sebesar Rp 273.689.316 diperoleh dari SPT Masa PPh Pasal 21 seperti nomor 2.
- 3) Jumlah pajak yang dipotong sebesar Rp 17.793.263 diperoleh dari SPT Masa PPh Pasal 21 seperti nomor 3.
- 4) Total pajak yang disetor sebesar Rp 17.793.263 diperoleh dari SPT Masa PPh Pasal 21 seperti nomor 4.
- 5) Tanggal lapor yaitu 18 Februari 2021 diperoleh dari Bukti Penerimaan Elektronik seperti nomor 5.
- 6) Tanggal bayar yaitu 13 Februari 2021 diperoleh dari Bukti Penerimaan Negara seperti nomor 6.
- 7) Status SPT Kurang Bayar diperoleh dari Bukti Penerimaan Elektronik seperti nomor 7.

Gambar 3. 118 Format Tabel dalam Pengisian

Rekapitulasi PPh Pasal 21 PT SRM

MASA	STATUS PEMBETULAN	Pembetulan		Normal		Pembetulan		Normal		TOTAL	
		Jumlah	Penghasilan Bruto	Jumlah	Penghasilan Bruto	Jumlah	Penghasilan Bruto	Jumlah	Penghasilan Bruto		
		Penerima Pengh.	Pogawal Tetap	Penerima Pengh.	Pogawal Tidak Tetap	Penerima Pengh.	Tenaga Ahli	Penerima Pengh.	Bukan Pegawai Berkesinambungan	Penerima Pengh.	Bukan Pegawai Tidak Berkesinambungan
JANUARI	NORMAL	22	375.689.315	44	17.400.000			34	318.957.897		610.047.213
FEBRUARI	NORMAL	22	269.512.345	44	19.726.348			30	237.095.434		546.374.127
MARET	NORMAL	23	362.513.544	9	5.752.288			41	330.150.038		698.415.870
APRIL	NORMAL	23	294.396.036	12	10.175.521			40	304.325.517		608.897.094
MAY	NORMAL										
JUNI	NORMAL	1		2							
JULI	NORMAL										
AUGUSTUS	NORMAL										
SEPTEMBER	NORMAL										
OKTOBER	NORMAL										
NOVEMBER	NORMAL										
DESEMBER	NORMAL										
TOTAL		90	1.200.191.261	109	53.854.157			145	1.210.528.886		2.463.774.304

Jml Pajak Dipotong				TOTAL	Jumlah Penghasilan Bruto		TOTAL	Jml Pajak Dipotong		TOTAL	Total yang diotor	SPT MASA PPh21		STATUS SPT
Pogawal Tetap	Pogawal Tidak Tetap	Tenaga Ahli	Bukan Pegawai Berkesinambungan		PESANGON	PENSIUN, TUNJANGAN		PESANGON	PENSIUN, TUNJANGAN			TGL LABOR	TGL BAYAR	
15.993.263			1.800.000	17.793.263					17.938.743			18 Februari 2021	13 Feb	KR
25.632.497			1.307.321	26.939.818					26.939.818			10 Maret 2021	09 Maret 2021	KR
16.727.234			780.162	17.507.396					17.507.396			16 April 2021	08 April 2021	KR
												10 Mei 2021	06 Mei 2021	KR
73.670.206	48.718		4.970.941	78.689.865					78.689.865					

Sumber: Dokumentasi Perusahaan

- Melakukan rekapitulasi PPh Pasal 21 status normal dan pembetulan sampai dengan banyaknya dokumen terkait dengan SPT Masa PPh Pasal 21 yang telah diberikan oleh pembimbing lapangan (setahun atau tidak sampai setahun).

b) Melakukan Rekapitulasi SPT PPh Pasal 23

Dokumen yang dibutuhkan dalam merekapitulasi PPh Pasal 23 yaitu Bukti Penerimaan Elektronik (BPE), Bukti Penerimaan Negara, dan dokumen yang berkaitan dengan SPT Masa PPh Pasal 23 (formulir 1724). Proses rekapitulasi SPT PPh Pasal 23 dilakukan untuk periode April dan November

2020 atas dividend. Berikut adalah cara melakukan rekapitulasi PPh Pasal 23 masa Januari:

1. Mendapatkan dokumen terkait SPT Masa PPh Pasal 23 klien baik normal maupun pembetulan (Formulir 1724) dari pembimbing lapangan seperti gambar 3.119.

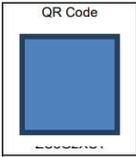
Gambar 3. 119 Dokumen SPT Masa PPh Pasal 23 PT DM

The image shows a tax form titled 'SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26'. The taxpayer is PT DM, with a tax ID of 08.888.888.8-880-000. The form includes a table of tax items (B. OBJEK PAJAK) with columns for NO, URAIAN, KODE OBJEK PAJAK, JUMLAH PENDAPATAN BRUTO, and JUMLAH PPh YANG DIPOTONG/DITRANSFER. A red box highlights a row for 'G. JASA LAIN SELAIN JASA YANG TELAH DIPOTONG PPh PASAL 21' with a value of 10,800.00. A red arrow points to this row from a '2' in a box on the right. The form also includes sections for attachments (C. LAMPIRAN) and a declaration (D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN).

Sumber: Dokumentasi Perusahaan

2. Menerima Bukti Penerimaan Negara dari pembimbing lapangan

Gambar 3. 120 Dokumen Bukti Penerimaan Elektronik PT DM

	<p>KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</p> <p>LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200 email : pengaduan@pajak.go.id ; informasi@pajak.go.id</p>
BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK (BPE)	
NOMOR TANDA TERIMA ELEKTRONIK : 66666666666666666666666666666666	
NPWP	: 08.888.888.8-880-000
Nama	: PT DM
Jenis Pajak	: PPH2326
Pembetulan Ke-	: 0
Tanggal Terima	: 10-02-2021
Tahun Pajak	: 2021
Masa Pajak	: 1
	
Terima Kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda	

Sumber: Dokumentasi Perusahaan

3. Menerima Bukti Penerimaan Elektronik dari pembimbing lapangan

Gambar 3. 121 Dokumen Bukti Penerimaan Negara PT DM

2/10/2021 <https://mib.bankmandiri.co.id/corp/front/billpayment.do?action=doPrintBillPayme>

Nomor Referensi Transaksi	:	
No. Ref Perkumpulan	:	
Dari Rekening	:	
Customer Reference Number	:	
To Institution	:	50012 Pajak/PNBP/C
BUKTI PENERIMAAN NEGARA	:	Penerimaan Pajak
Data Pembayaran	:	-
Tanggal dan Jam Bayar	:	10/02/2021 15:17:07
Tanggal Buku	:	11/02/21
Kode Cabang Bank	:	008
NTB	:	
NTPN	:	99999AAAAA999AA
STAN	:	
Data Setoran	:	
Kode Billing	:	
Nama Wajib Pajak	:	PT DM
Alamat	:	
Nomor Objek Pajak	:	
Mata Anggaran	:	411124
Jenis Setoran	:	104
Masa Pajak	:	01012021
Nomor Ketetapan	:	0000000000000000
Jumlah Setoran	:	Rp. 140.000
Mata Uang	:	IDR
Terbilang	:	
Keterangan	:	UI.124.430.1-890400 ik computer dan tidak memerlukan tanda tangan
NPWP	:	
Daftar Pembayaran	:	00 TOTAL 140.000
Admin Bank	:	IDR
Total Bayar	:	IDR 140.000
Beneficiary Notification	:	
Notification Flag	:	Don't Send
Mode Instruksi	:	
Langsung	:	10-Feb-2021

Sumber: Dokumentasi Perusahaan

4. Menerima file Excel yang didalamnya terdapat format table (massa, status pembetulan, jasa yang berkaitan dengan PPh 23, total DPP, besarnya pajak PPh 23, tanggal bayar, NTPN, tanggal lapor dan status SPT) dan melakukan input SPT Masa PPh Pasal 23 baik status normal atau pembetulan. Pada kolom status pembetulan, massa, jasa yang berkaitan dengan PPh 23, total DPP, dan besarnya pajak PPh 23 angkanya berasal dari Formulir 1724 SPT Masa PPh Pasal 23. Kolom tanggal lapor dan status SPT angkanya diperoleh dari Bukti Penerimaan Elektronik. Sedangkan untuk kolom tanggal bayar dan

NTPN diperoleh dari Bukti Penerimaan Negara. Langkahnya sebagai berikut:

Masa Pajak Januari 2021 SPT PPh 23 Normal maka proses *penginputan* sebagai berikut:

- 1) Jumlah penghasilan bruto sebesar Rp 10.800.000 diperoleh dari SPT Masa PPh Pasal 23 seperti nomor 1.
- 2) Jumlah pajak yang dipotong sebesar Rp 140.000 diperoleh dari SPT Masa PPh Pasal 23 seperti nomor 2.
- 3) Total DPP diperoleh dari penjumlahan semua penerima penghasilan seperti nomor 3.
- 4) Jumlah Pajak Penghasilan PPh 21 sebesar Rp 140.000 diperoleh dari SPT Masa PPh 23 seperti nomor 4.
- 5) Tanggal bayar yaitu 10 Februari 2021 diperoleh dari Bukti Penerimaan Negara seperti nomor 5.
- 6) NTPN diperoleh dari Bukti Penerimaan Negara seperti nomor 6.
- 7) Tanggal lapor yaitu 10 Februari 2021 diperoleh dari Bukti Penerimaan Elektronik seperti nomor 7.
- 8) Tanggal lapor yaitu 10 Februari 2021 diperoleh dari Bukti Penerimaan Elektronik seperti nomor 8.

VAT number, tanggal FP, nomor bukti potong, tanggal bukti potong, DPP, tarif pajak, PPh 23, KAP/KJS, keterangan transaksi, nomor akun biaya, dan nama akun biaya) yang digunakan untuk nantinya akan di *input* berdasarkan dokumen yang diberikan oleh klien.

Gambar 3. 123 Data List Bukti Potong PPh Pasal 23 PT DM 2020

Masa	Dok. Number	Nama Vendor	NIK	NPWP	Alamat	Invoice Number	VAT Number	Tgl FP
PPh 23 - Januari 2020	1900000031				00.000.000.0-000.000	NATASHA		27/11/2019
PPh 23 - Januari 2020	1900000032				00.000.000.0-000.000			08/11/2019
PPh 23 - Januari 2020	1900000033				00.000.000.0-000.000	NATASHA		21/11/2019

Nomor Bupot	Tanggal Bupot	DPP	Tarif Pajak	PPh 23	KAP/KJS	Keterangan Atas Transaksi	No. Akun Biaya	Nama Akun Biaya
	31/01/2020	750.000	2%	15.000,00	Jan-411124/104	19100815INV - BI P'AMBILN SRTF MERK DUA JARI,HER.	0061121001	Legal and Other Professional Fee
	31/01/2020	1.250.000	2%	25.000,00	Jan-411124/104	19100769INV-BI P .AMBL SRTF TOLAK, LINU GO, PROLINU,T	0061121001	Legal and Other Professional Fee
	31/01/2020	1.750.000	2%	35.000,00	Jan-411124/104	19100803INV - BI P'AMBL SRTF 7 MEREK	0061121001	Legal and Other Professional Fee

Sumber: Dokumentasi Perusahaan

Pada Gambar 3.123 merupakan data bukti potong PPh Pasal 23 yang diperoleh dari pembimbing lapangan. Ketika ingin melakukan *grouping* PPh Pasal 23 data yang dibutuhkan hanya Masa Pajak, Nama Akun Biaya, DPP, dan PPh 23.

- Membuat *sheet* baru dalam excel dan membuat format *table* baru yang didalamnya terdapat kolom masa, nama akun biaya, DPP, dan besarnya pajak PPh 23.

Gambar 3. 124 Format Tabel Grouping PPh Pasal 23

1	Masa	Nama Akun Biaya	DPP	PPh23
	PPh 23	Legal & Prof Fee	193.766.713	30.716.929
	PPh 23	Legal and Other Professional Fee	2.637.979.786	47.409.876
	PPh 23	Maintenance of Building	754.403.160	15.088.070
	PPh 23	Market Research and Survey	3.588.272.838	71.765.459
	PPh 23	Medical Treatment and Hospitalization	267.003.000	5.340.060

3. Melakukan *input* data yang berasal dari file *excel* asli dari pembimbing tetapi tidak memasukan semua data hanya data masa, nama akun biaya, DPP, dan besarnya pajak PPh 23 saja yang di *input*. Pada Gambar 3.124 nomor 1 maka langkah yang dilakukan untuk *grouping* PPh Pasal 23 periode Januari 2020:

- 1) Mengisi kolom Masa dengan PPh 23 karena bulan tidak diperhatikan.
- 2) Mengisi kolom Nama Akun Biaya dengan *Legal and Other Professional Fee*.
- 3) Mengisi kolom DPP sebesar Rp 2.637.979.786 setelah dilakukan penjumlahan akan seluruh akun *Legal and Other Professional Fee*.
- 4) Mengisi kolom PPh 23 sebesar Rp 47.409.876 setelah dilakukan penjumlahan *Legal and Other Professional Fee*.

4. Melakukan *grouping* hingga semua cabang yang diberikan.

d) Melakukan Rekapitulasi Bukti Penerimaan Negara PPh Pasal 25

Dokumen yang dibutuhkan dalam merekapitulasi PPh Pasal 25 yaitu Bukti Penerimaan Negara (BPN). Proses rekapitulasi Bukti Penerimaan Negara PPh Pasal 25 dilakukan untuk periode 2020. Berikut merupakan proses rekapitulasi Bukti Penerimaan Negara (BPN) PPh Pasal 25 masa Januari 2020:

1. Menerima *file* Bukti Penerimaan Negara PPh Pasal 25 dari pembimbing lapangan yang berasal dari klien.

Gambar 3. 125 Bukti Penerimaan Negara PT DM

BANK CENTRAL ASIA, TBK.	BUKTI PENERIMAAN NEGARA PENERIMAAN PAJAK	KEMENTERIAN KEUANGAN
DATA PEMBAYARAN		
1	TANGGAL & JAM BAYAR : 10/02/2020 15:49:40	NTB : 000011123445
	TANGGAL BUKU : 11/02/20	NTPN : 1A111111AA11A1AA 2
	KODE CABANG BANK : 0000	STAN : 326028
DATA SETORAN		
	KODE BILLING : 0123456789011121	
	NPWP : 02.345.678.9-012-000	
	NAMA WAJIB PAJAK : PT SM	
	ALAMAT : GEDUNG TINGGI SEKALI LT. 20, JAKARTA N -	
	NOMOR OBJEK PAJAK : 411126	
	MATA ANGGARAN : 100	
	JENIS SETORAN : 01-01-2020	
	MASA PAJAK : 0000000000000000 3	
	NO KETETAPAN : 20.435.661.977.00	MATA UANG : IDR
	JUMLAH SETORAN TERBILANG : DUA PULUH MILYAR EMPAT RATUS TIGA PULUH LIMA JUTA ENAM RATUS ENAM PULUH SATU RIBU SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH TUJUH	

Sumber: Dokumentasi Perusahaan

2. Menerima file Excel dari pembimbing lapangan dengan format tabel (masa, tanggal bayar, NTPN, dan PPh terutang) yang sudah tersedia.

Gambar 3. 126 Format Tabel Rekapitulasi BPN PPh Pasal 25 PT DM

A	B	C	D	E
PPH PASAL 25				
		1	2	3
NO	MASA	TANGGL BAYAR	NTPN	PPH TERHUTANG
1	JANUARI	10 Februari 2020	1A111111AA11A1AA	20.435.661.977
2	FEBRUARI	09 Maret 2020	2B222222BB22B2BB	20.435.661.977
3	MARET	08 April 2020	3C333333CC33C3CC	20.435.661.977
4	APRIL	-	-	-
5	MEI	-	-	-
6	JUNI	-	-	-
7	JULI	05 Agustus 2020	4D444444DD44D4DD	12.831.984.294
8	AGUSTUS	07 September 2020	5E555555EE55E5EE	12.831.984.294
9	SEPTEMBER	07 Oktober 2020	6F666666FF66F6FF	12.831.984.294
10	OKTOBER	06 November 2020	7G777777GG77G7GG	17.831.869.854
11	NOVEMBER	10 Desember 2020	8H888888HH88H8HH	17.831.869.854
12	DESEMBER	08 Januari 2020	9I999999II99I9II	17.831.869.854
		JUMLAH		153.298.548.375

Sumber: Dokumentasi Perusahaan

Melakukan *input* data yang berasal dari Bukti Penerimaan Negara seperti gambar 3.126. Langkah yang dilakukan pada masa Januari yaitu:

- 1) Mengisi tanggal bayar yaitu 10 Februari 2020.
- 2) Mengisi NTPN yaitu 1A111111AA11A1AA.
- 3) Mengisi jumlah setoran yaitu Rp 20.435.661.977.

3. Melakukan rekapitulasi PPh Pasal 25 hingga masa yang ditentukan.

e) Melakukan Rekapitulasi SPT PPh Final

Dokumen yang diperlukan Bukti Penerimaan Elektronik, Bukti Penerimaan Negara, dokumen yang terkait dengan SPT PPh dan Pasal 4 Ayat 2. Proses rekapitulasi SPT PPh Final dilakukan untuk periode April, Mei, September, Oktober, November 2020 atas transaksi dividend wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan penghasilan lain. Berikut merupakan proses melakukan rekapitulasi SPT PPh Final:

1. Mendapatkan dokumen dari pembimbing lapangan terkait SPT Masa PPh Final klien seperti gambar 3.127.

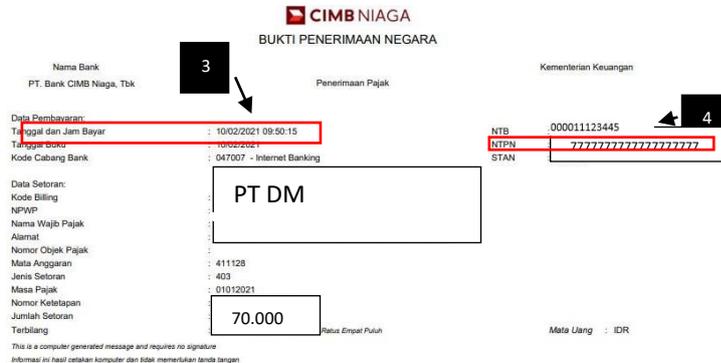
Gambar 3. 127 Dokumen SPT Masa PPh Final PT DM

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		SURAT PEMBERITAHAUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT (2) Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2)		<input checked="" type="checkbox"/> SPT Normal <input type="checkbox"/> SPT Pembetulan Ke -
				Masa Pajak 01 / 2021
BAGIAN A. IDENTITAS PEMOTONG				
1. NPWP 2. Nama WP 3. Alamat				
PT DM				
BAGIAN B. OBJEK PAJAK				
Urutan	KAPJKS	Nilai Objek Pajak (Rp)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong/ Dipungut/Ditetor Sendiri (Rp)
1. Bunga Deposito/tabungan a. Bunga Deposito/Tabungan 1) Yang ditempatkan di Dalam Negeri 2) Yang ditempatkan di Luar Negeri b. Diskonto Sertifikat Bank Indonesia c. Jasa Giro	411128/404 411128/404 411128/404 411128/404			
2. Transaksi Penjualan Saham a. Saham Perdi b. Bukan Saham Perdi	411128/407 411128/406			
3. Bunga/Diskonto Obligasi dan Surat Berharga Negara	411128/401			
4. Hadiah Undian	411128/4			
5. Persewaan Tanah dan/atau Bangunan: a. Penyewa sebagai Pemotong Pajak b. Orang Pribadi/Badan yang Menyeter Sendiri PPh	411128/4 411128/4	700.000	10,00	70.000
6. Jasa Konstruksi a. Perencana Konstruksi 1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh 2) Penyedia Jasa yang Menyeter Sendiri PPh b. Pelaksana Konstruksi 1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh 2) Penyedia Jasa yang Menyeter Sendiri PPh c. Pengawas Konstruksi 1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh 2) Penyedia Jasa yang Menyeter Sendiri PPh	411128/409 411128/409 411128/409 411128/409 411128/409 411128/409			
7. Wajib Pajak yang Melakukan Pengalihan Hak atas Tanah/Bangunan	411128/402			
8. Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Wajib Pajak Orang Pribadi	411128/417			
9. Transaksi Derivatif Berupa Kontrak Berjangka yang Diperdagangkan di Bursa	411128/418			
10. Dividen yang Diterima/Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri	411128/419			
11. Penghasilan Tertentu Lainnya a. b. c.				
JUMLAH				70.000
Terbilang Lima Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh, Rupiah				
BAGIAN C. LAMPIRAN				
1. <input checked="" type="checkbox"/> Surat Setoran Pajak - 1 lembar. 2. <input checked="" type="checkbox"/> Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 Ayat (2). 3. <input checked="" type="checkbox"/> Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) - 3 lembar. 4. <input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus.				
BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN				
Dengan menyatakan sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi - sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampiranannya adalah benar, lengkap dan jelas.				Dilisi oleh Petugas
<input checked="" type="checkbox"/> PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN <input type="checkbox"/> KUJASA WAJIB PAJAK				SPT Masa Diterima: <input type="checkbox"/> Langsung dari WP <input type="checkbox"/> Melalui Pos
Nama: ROBIN NPWP: 11.222.333.4-566-000				Tempat Tanggal
Tanda Tangan & Cap		Tanggal: 01/02/2021		Tanda Tangan
F.1.132.04				

Sumber: Dokumentasi Perusahaan

2. Menerima Bukti Penerimaan Negara dari pembimbing lapangan seperti gambar 3.128.

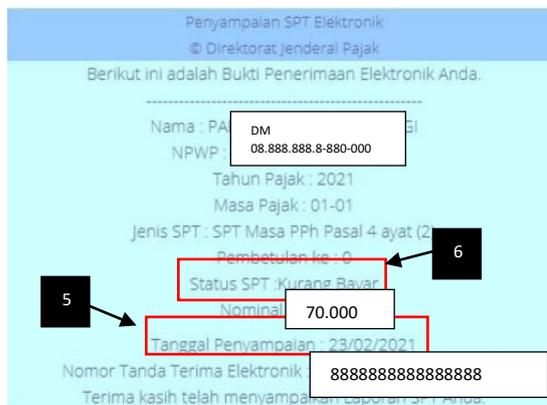
Gambar 3. 128 Bukti Penerimaan Negara PT DM



Sumber: Dokumentasi Perusahaan

3. Menerima Bukti Penerimaan Elektronik dari pembimbing lapangan seperti gambar 3.95.

Gambar 3. 129 Bukti Penerimaan Elektronik PT DM



Sumber: Dokumentasi Perusahaan

4. Menerima file Excel yang didalamnya terdapat format table (masa, bunga deposito/tabungan, transaksi jual saham, bunga/diskonto obligasi dan surat berharga, hadiah undian, persewaan tanah dan bangunan, bunga simpanan, transaksi derivatif, dividen Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri, total DPP, PPh Final, tanggal bayar,

NTPN, tanggal lapor, dan status SPT) yang digunakan untuk nantinya akan di *input* berdasarkan dokumen yang diberikan oleh klien.

Gambar 3. 130 Tabel Rekapitulasi PPh Final PT DM

NO	MASA	BUNGA DEPOSITO/ TABUNGAN (SBI & GIRO)	TRANSAKSI JUAL SAHAM	BUNGA/DISKONTO OBLIGASI & SURAT BERHARGA	HADIAH UNDIAN	PERSEWAAN TANAH & BANGUNAN	JASA KONSTRUKSI	PENGALIHAN TANAH BANGUNAN
1	JANUARI					700.000		
2	FEBRUARI							
3	MARET					14.117.616		
4	APRIL							
5	MEI					1.268.650		
6	JUNI							
7	JULI							
8	AGUSTUS							
9	SEPTEMBER							
10	OKTOBER							
11	NOVEMBER							
12	DESEMBER							
	JUMLAH					184.320.189		

BUNGA SIMPANAN DIRAYAKAN KOPERASI	TRANSAKSI DERIVATIF	DIVIDEND WP OP DN	TOTAL DPP	PPh 4 Ayat 2	TANGGL BAYAR	NTPN	TANGGAL LAPOR	STATUS SPTZ
			700.000	70.000	10 Februari 2021	7777777777	23 Februari 2021	KB
			14.117.616	1.411.761	20 Maret 2021	9688888888888888	12 Maret 2021	KB
			-	-	09 April 2021	E97F17G777777777777777	15 April 2021	KB
			1.268.650	126.865	10 Juni 2021	F7EE0018H8888888888888888	18 Juni 2021	KB
			-	-				
			-	-				
			-	-				
			-	-				
			-	-				
			184.320.189	18.432.016				

Sumber: Dokumentasi Perusahaan

- Melakukan *input* SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat 2. Pada kolom status masa, bunga deposito/tabungan, transaksi jual saham, bunga/diskonto obligasi dan surat berharga, hadiah undian, persewaan tanah dan bangunan, bunga simpanan, transaksi derivatif, dividen Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri, total DPP, PPh Final angkanya berasal dari SPT Masa PPh Final. Kolom tanggal lapor dan status SPT angkanya diperoleh dari Bukti Penerimaan Elektronik. Sedangkan untuk kolom tanggal bayar dan NTPN diperoleh dari Bukti Penerimaan Negara.

Langkah yang dilakukan pada masa Januari yaitu:

- 1) Mengisi nominal pada uraian Persewaan Tanah dan Bangunan sebesar Rp 700.000 yang diperoleh dari SPT Masa PPh Final seperti nomor 1.
 - 2) Mengisi total DPP yang diperoleh dari rumus menjumlahkan seluruh uraian. Pada masa Januari hanya terdapat Persewaan Tanah dan Bangunan maka total DPP adalah Rp 700.000.
 - 3) Mengisi PPh Pasal 4 Ayat 2 sebesar Rp 70.000 yang diperoleh dari SPT Masa PPh Final seperti nomor 2.
 - 4) Mengisi kolom tanggal bayar yaitu 10 Februari 2021 yang diperoleh dari Bukti Penerimaan Negara seperti nomor 3.
 - 5) Mengisi kolom NTPN yaitu 88888888888 yang diperoleh dari Bukti Penerimaan Negara seperti nomor 4.
 - 6) Mengisi kolom tanggal lapor yaitu 23 Februari 2021 yang diperoleh dari Bukti Penerimaan Elektronik seperti nomor 5.
 - 7) Mengisi kolom status SPT Kurang Bayar yang diperoleh dari Bukti Penerimaan Elektronik seperti nomor 6.
9. Melakukan rekapitulasi PPh Final hingga masa yang ditentukan.

f) Melakukan Komparasi Laporan Keuangan

Dokumen yang dibutuhkan dalam melakukan komparasi laporan keuangan adalah laporan keuangan perusahaan tahun 2020 dan 2019. Berikut proses melakukan komparasi laporan keuangan:

1. Mencari laporan keuangan yang dibutuhkan pada *website* perusahaan.

Gambar 3. 131 Laporan Keuangan Bagian Aset PT DM

PT DM

SIDO MUNCUL TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT DM

SIDO MUNCUL TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF
FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2020
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

The original consolidated financial statements included here are in the Indonesian language

	31 Desember 2020/ December 31, 2020	Catatan/ Notes	31 Desember 2019/ December 31, 2019	
A				ASSETS
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	1.031.954	4,32,33	864.824	Cash and cash equivalents
Piutang usaha	5.322,33		269.281	Trade receivables
Pihak ketiga - neto	296.885		269.281	Third parties - net
Pihak berelasi	366.872	31	260.124	Related parties
Piutang lain-lain	6.322,33		-	Other receivables
Pihak ketiga	3.890		7.699	Third parties
Persediaan - neto	309.478	7,23	299.244	Inventories - net
Pajak dibayar di muka	-	15a	1.661	Prepaid taxes
Uang muka	2.682	8a	4.087	Advance payments
Aset lancar lainnya	40.320	9	9.315	Other current assets
Total Aset Lancar	2.052.081		1.716.235	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR				NON-CURRENT ASSETS
Uang muka	4.021	8b	14.929	Advances payments
Aset pajak tangguhan	59.920	15e	52.005	Deferred tax assets
Aset tetap - neto	1.568.264	10	1.565.718	Fixed assets - net
Goodwill	91.369	12	91.369	Goodwill
Aset tidak lancar lainnya	73.864	11	69.304	Other non-current assets
Total Aset Tidak Lancar	1.797.435		1.813.322	Total Non-current Assets
TOTAL ASET	3.849.516		3.529.557	TOTAL ASSETS

Gambar 3. 132 Laporan Keuangan Bagian Liabilitas PT DM

PT DM

LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT DM

CONSOLIDATED STATEMENT OF
FINANCIAL POSITION (continued)
As of December 31, 2020
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

The original consolidated financial statements included here are in the Indonesian language

	31 Desember 2020/ December 31, 2020	Catatan/ Notes	31 Desember 2019/ December 31, 2019	
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS				LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PENDEK				CURRENT LIABILITIES
Utang usaha		13,32,33		Trade payables
Pihak ketiga	181.931		134.073	Third parties
Pihak berelasi	21.760	31	12.724	Related parties
Utang lain-lain	14,32,33			Other payables
Pihak ketiga	10.142		11.214	Third parties
Pihak berelasi	109	31	107	Related parties
Utang pajak	152.808	15b	105.837	Taxes payable
Beban akrual	150.540	16,32,33	119.179	Accrued expenses
Pendapatan diterima di muka	6.711	31	7.496	Unearned revenue
Liabilitas sewa - jangka pendek	2.974	2b,32	-	Lease liabilities - current
Liabilitas jangka pendek lainnya	33.068	15g,32	18.240	Other current liabilities
Total Liabilitas Jangka Pendek	560.043		408.670	Total Current Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG				NON-CURRENT LIABILITIES
Liabilitas imbalan kerja karyawan	54.682	17b	42.803	Employee benefits liabilities
Liabilitas pajak tangguhan	8.835	15e	13.177	Deferred tax liabilities
Liabilitas sewa - jangka panjang	4.216	2b	-	Lease liabilities - non-current
Total Liabilitas Jangka Panjang	67.733		55.980	Total Non-current Liabilities
TOTAL LIABILITAS	627.776		464.650	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS				EQUITY
Ekuitas yang dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk				Equity Attributable to Owners of the Parent Entity
Modal saham - nominal				Share capital - Rp50 par value
Rp50 (nilai penuh) pada 2020 dan				per share (full amount) in 2020
Rp100 (nilai penuh) pada 2019				and Rp100 par value per share (full amount) in 2019
Modal dasar -				Authorized -
100.000.000.000 saham pada 2020				100,000,000,000 shares in 2020
dan 50.000.000.000 saham pada 2019				50,000,000,000 shares in 2019
Modal ditempatkan dan disetor penuh				Issued and fully paid - share capital
- 30.000.000.000 saham pada 2020				- 30,000,000,000 shares in 2020
dan 15.000.000.000 saham pada 2019				and 15,000,000 shares in 2019
	1.500.000	18	1.500.000	
Tambahan modal disetor	707.314	19	706.434	Additional paid-in capital
Saham treasuri	(58.895)	18	(59.279)	Treasury shares
Saldo laba				Retained earnings
Ditentukan penggunaannya	322.984	19	322.984	Appropriated
Belum ditentukan penggunaannya	750.330		594.561	Unappropriated
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk: Kepentingan nonpengendali	3.221.733		3.064.707	Equity attributable to the owners of parent entity
	7		7	Non-controlling interest
TOTAL EKUITAS	3.221.740		3.064.707	TOTAL EQUITY
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	3.849.516		3.529.557	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Gambar 3. 133 Laporan Keuangan *Profit and Loss*

22. PENJUALAN		22. SALES		
	2020	2019		
Jamu herbal dan suplemen	2.221.363	2.063.955	Herbal medicine and supplement	
Makanan dan minuman	1.005.615	886.232	Food and beverages	
Farmasi	108.433	117.247	Pharmacy	
Total	3.335.411	3.067.434	Total	

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, penjualan kepada pihak berelasi masing-masing sebesar Rp1.790.902 dan Rp1.614.210 (Catatan 31).

For the years ended December 31, 2020 and 2019, sales to related parties amounted to Rp1.790.902 and Rp1.614.210 respectively (Note 31).

23. BEBAN POKOK PENJUALAN		23. COST OF GOODS SOLD		
	2020	2019		
Beban Pokok Penjualan			Cost of Goods Sold	
Bahan baku			Raw materials	
Persediaan awal	185.641	199.487	Beginning inventories	
Pembelian	1.138.306	1.031.200	Purchases	
Persediaan akhir (Catatan 7)	(219.939)	(185.641)	Ending inventories (Note 7)	
Total bahan baku digunakan	1.104.008	1.045.056	Total raw material used	
Upah langsung	153.942	141.215	Direct labor	
Beban produksi tidak langsung (Catatan 24)	214.805	201.348	Overhead expenses (Note 24)	
Total biaya produksi	1.472.755	1.387.619	Total production cost	
Barang dalam proses			Work-in-process	
Persediaan awal	55.072	59.013	Beginning inventories	
Persediaan akhir (Catatan 7)	(53.402)	(55.072)	Ending inventories (Note 7)	
Barang jadi			Finished goods	
Persediaan awal	68.764	58.520	Beginning inventories	
Persediaan akhir (Catatan 7)	(49.196)	(68.764)	Ending inventories (Note 7)	
Beban penyisihan penurunan nilai persediaan (Catatan 7)	2.635	5.554	Provision for decline in value of inventories (Note 7)	
Total Beban Pokok Penjualan	1.496.628	1.386.870	Total Cost of Goods Sold	

Tidak terdapat transaksi kumulatif dengan pemasok individual yang melebihi 10% dari total penjualan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

There are no cumulative transactions with individual supplier that exceeds 10% of the consolidated total sales for the years ended December 31, 2020 and 2019.

25. BEBAN PENJUALAN DAN PEMASARAN		25. SELLING AND MARKETING EXPENSES		
	2020	2019		
Iklan dan promosi	359.480	357.109	Advertising and promotion	
Gaji dan tunjangan	59.770	49.949	Salary and allowance	
Ongkos angkut (Catatan 31)	30.224	28.327	Freight out (Note 31)	
Sumbangan	11.324	3.374	Donation	
Sewa (Catatan 31)	4.394	4.525	Rent (Note 31)	
Perjalanan dinas	2.396	4.946	Travelling	
Penyusutan (Catatan 10)	1.144	917	Depreciation (Note 10)	
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp1.000)	23.618	22.182	Others (each below Rp1.000)	
Total	492.330	471.331	Total	

26. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI		26. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES		
	2020	2019		
Gaji, tunjangan dan imbalan pascakerja	146.028	135.815	Salary, allowance and post-employment benefits	
Penyusutan (Catatan 10)	6.936	8.734	Depreciation (Note 10)	
Jasa profesional	5.834	6.541	Professional fees	
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp900)	41.861	40.496	Others (each below Rp900)	
Total	200.659	191.686	Total	

29. PENDAPATAN LAIN-LAIN		29. OTHER INCOME		
	2020	2019		
Penghasilan sewa (Catatan 31)	4.522	7.074	Rental income (Note 31)	
Laba atas pelepasan aset tetap (Catatan 10)	269	-	Gain on disposal of fixed assets (Note 10)	
Penulisan cadangan penurunan nilai piutang usaha (Catatan 5)	-	63	Reversal of allowance for impairment in value of trade receivable (Note 5)	
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp500)	4.769	6.515	Others (each below Rp500)	
Total	9.560	13.652	Total	

30. BEBAN LAIN-LAIN		30. OTHER EXPENSES		
	2020	2019		
Penambahan cadangan penurunan nilai piutang usaha (Catatan 5)	2.338	-	Addition of allowance for impairment in value of trade receivable (Note 5)	
Rugi selisih kurs	1.229	1.612	Loss on foreign exchange	
Bunga dan denda pajak	6	18	Interest and tax penalty	
Rugi atas pelepasan aset tetap (Catatan 10)	-	5.162	Loss on disposal of fixed assets (Note 10)	
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp500)	756	163	Others (each below Rp 500)	
Total	4.329	6.955	Total	

LABA USAHA		1.151.025		1.024.244		OPERATING PROFIT	
Penghasilan keuangan	49.045	27	49.745	Finance income			
Biaya keuangan	(522)	28	(154)	Finance cost			
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	1.199.548		1.073.835	PROFIT BEFORE INCOME TAX EXPENSE			
Beban pajak penghasilan - neto	(265.532)	15c, 15d	(266.146)	Income tax expense - net			
LABA TAHUN BERJALAN	934.016		807.689	PROFIT FOR THE YEAR			
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN				OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)			
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				Item that will not be reclassified to profit or loss:			
Rugi pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja	(5.834)		(7.526)	Remeasurement loss on employee benefits liabilities			
Pajak penghasilan terkait yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	1.283	15e	1.881	Income tax relating to item that will not be reclassified to profit or loss			
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				Item that will be reclassified to profit or loss:			
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	292			Exchange differences due to financial statement translation			
RUGI KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN, SETELAH PAJAK	(4.259)		(5.568)	OTHER COMPREHENSIVE LOSS FOR THE YEAR, NET OF TAX			
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	929.757		802.121	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR			

Pada Gambar 3.131 sampai dengan Gambar 3.133 merupakan gambar laporan keuangan yang dibutuhkan untuk melakukan komparasi. Saat melakukan komparasi yang dibutuhkan adalah bagian Aset, Liabilitas, dan unsur – unsur yang menjadi *profit and loss* perusahaan.

2. Menerima file excel dari pembimbing lapangan yang berisikan format dalam melakukan komparasi.

Gambar 3. 134 Format Tabel Komparasi Laporan Keuangan

KETERANGAN AKUN	2020	2019	Seliah	Vertikal %	Horizontal %
ASET					
ASET LANCAR					
Kas dan setara kas	1.031.954.000.000	864.824.000.000	167.130.000.000	26,81%	16,20%
Piutang usaha					
Pihak ketiga - neto	296.885.000.000	269.281.000.000	27.604.000.000	7,71%	9,30%
Pihak berelasi	366.872.000.000	260.124.000.000	106.748.000.000	9,53%	29,10%
Piutang lain-lain					
Pihak ketiga	3.890.000.000	7.699.000.000	- 3.809.000.000	0,10%	-97,92%
Persediaan - neto	309.478.000.000	299.244.000.000	10.234.000.000	8,04%	3,31%
Pajak dibayar di muka	-	1.661.000.000	- 1.661.000.000	0,00%	-
Uang muka	2.682.000.000	4.087.000.000	- 1.405.000.000	0,07%	-52,39%
Ases lancar lainnya	40.220.000.000	8.315.000.000	31.905.000.000	1,05%	76,90%
Total Aset Lancar	2.052.081.000.000	1.716.235.000.000	335.846.000.000	53,31%	16,73%
ASET TIDAK LANCAR					
Uang muka	4.021.000.000	14.929.000.000	- 10.908.000.000	0,10%	-271,28%
Ases pajak tangguhan	59.920.000.000	52.005.000.000	7.915.000.000	1,56%	13,21%
Ases tetap - neto	1.568.264.000.000	1.585.718.000.000	- 17.454.000.000	40,74%	-1,11%
Goodwill	91.366.000.000	-	91.366.000.000	0,27%	0,00%
Ases tidak lancar lainnya	73.864.000.000	69.304.000.000	4.560.000.000	1,92%	6,17%
Total Aset Tidak Lancar	1.703.435.000.000	1.840.333.000.000	- 136.898.000.000	- 6,66%	- 6,28%
JUMLAH ASET	3.849.516.000.000	3.529.557.000.000	319.959.000.000	100,00%	8,31%

KETERANGAN AKUN	2020	2019	Seliah	Vertikal %	Horizontal %
LIABILITAS DAN EKUITAS					
LIABILITAS					
LIABILITAS JANGKA PENDEK					
Utang usaha					
Pihak ketiga	181.931.000.000	134.073.000.000	47.858.000.000	32,49%	26,31%
Pihak berelasi	21.760.000.000	12.724.000.000	9.036.000.000	3,89%	81,33%
Utang lain-lain					
Pihak ketiga	10.142.000.000	11.214.000.000	- 1.072.000.000	1,81%	-10,57%
Pihak berelasi	109.000.000	107.000.000	2.000.000	0,02%	1,83%
Utang pajak	152.808.000.000	105.837.000.000	46.971.000.000	27,29%	30,74%
Beban akrual	150.540.000.000	119.179.000.000	31.361.000.000	26,88%	20,83%
Pendapatan diterima di muka	6.711.000.000	7.496.000.000	- 785.000.000	1,00%	-11,70%
Liabilitas sewa - jangka pendek	2.974.000.000	-	2.974.000.000	0,53%	100,00%
Liabilitas sewa - jangka pendek lainnya	33.068.000.000	18.240.000.000	14.828.000.000	5,90%	44,84%
Total Liabilitas Jangka Pendek	560.043.000.000	408.870.000.000	151.173.000.000	100,00%	26,93%
LIABILITAS JANGKA PANJANG					
Liabilitas imbalan kerja karyawan	54.682.000.000	42.803.000.000	11.879.000.000	9,76%	21,72%
Liabilitas pajak tangguhan	8.835.000.000	13.177.000.000	- 4.342.000.000	1,58%	-49,15%
Liabilitas sewa - jangka panjang	4.216.000.000	-	4.216.000.000	0,75%	100,00%
Total Liabilitas Jangka Panjang	67.733.000.000	55.980.000.000	11.753.000.000	12,09%	17,35%
TOTAL LIABILITAS	627.776.000.000	464.850.000.000	162.926.000.000	112,09%	25,95%
EKUITAS					
Ekuitas yang dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk					
Modal saham - nominal					
Modal dasar					
Modal ditempatkan dan disetor	1.500.000.000.000	1.500.000.000.000	-	46,56%	0,00%
Tambah modal disetor	707.314.000.000	706.434.000.000	880.000.000	21,95%	0,12%
Saham treasury	- 58.895.000.000	- 59.279.000.000	384.000.000	- 1,83%	- 0,65%
Saldo laba					
Ditemukan penggunaannya	322.984.000.000	322.984.000.000	-	10,03%	0,00%
Belum ditemukan penggunaannya	750.330.000.000	594.561.000.000	155.769.000.000	23,29%	20,76%
Ekuitas yang dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	3.221.733.000.000	3.064.707.000.000	157.026.000.000	100,00%	49,79%
Kesimpungan nonpengendalian	7.000.000	7.000.000	-	0,00%	0,00%
Jumlah ekuitas	3.221.740.000.000	3.064.707.000.000	157.033.000.000	100,00%	49,79%
Total Liabilitas dan Ekuitas	3.849.516.000.000	3.529.557.000.000	319.959.000.000	119,49%	8,31%

KETERANGAN AKUN	2020	2019	Seliah	Vertikal %	Horizontal %
Regi atas pelipatan aset tetap	-	(5.163.000.000)	5.163.000.000	0,00%	78,44%
Lain - lain	(756.000.000)	(163.000.000)	(593.000.000)	- 0,88%	- 42,80%
Pendapatan lain - lain	9.560.000.000	19.852.000.000	(10.292.000.000)	1,03%	- 42,80%
Penghasilan sewa	6.122.000.000	7.072.000.000	(2.520.000.000)	0,48%	- 26,44%
Laba atas pelipatan aset tetap	269.000.000	-	269.000.000	0,03%	100,00%
Lain - lain	4.769.000.000	6.511.000.000	(1.746.000.000)	0,51%	- 36,61%
JABA USAHA	1.151.025.000.000	1.024.244.000.000	126.781.000.000	123,80%	11,01%
Penghasilan keuangan	49.045.000.000	49.745.000.000	(700.000.000)	5,28%	-1,43%
Biaya keuangan	(522.000.000)	(154.000.000)	(368.000.000)	- 0,06%	70,50%
JABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	1.199.548.000.000	1.079.835.000.000	125.713.000.000	129,02%	10,48%
Beban pajak penghasilan - neto	(265.532.000.000)	(266.146.000.000)	614.000.000	- 28,56%	- 0,23%
JABA TAHUN BERJALAN	934.016.000.000	807.689.000.000	126.327.000.000	100,46%	13,53%
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN					
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi					
Regi selisih kurs	(5.834.000.000)	(7.526.000.000)	1.692.000.000	- 0,63%	- 28,00%
Pajak penghasilan terkait yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	1.283.000.000	1.881.000.000	(598.000.000)	0,14%	- 46,61%
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi					
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	292.000.000	77.000.000	215.000.000	0,03%	73,63%
RUGI KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN, SETELAH PAJAK	(4.259.000.000)	(5.568.000.000)	1.309.000.000	- 0,46%	- 30,73%
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	929.757.000.000	802.121.000.000	127.636.000.000	100,00%	13,73%
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:					
Pemilik entitas induk	934.016.000.000	807.689.000.000	126.327.000.000	100,00%	13,53%
Kepentingan nonpengendalian	-	-	-	0,00%	0,00%
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:	929.757.000.000	807.689.000.000	122.068.000.000	100,00%	13,13%
Pemilik entitas induk	929.757.000.000	807.689.000.000	122.068.000.000	100,00%	13,13%
Kepentingan nonpengendalian	-	-	-	0,00%	0,00%
Laba per saham dasar yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	31.880	27.130	4.750	0,00%	13,54%

Pada Gambar 3.134 merupakan format tabel yang nantinya akan diisi oleh angka yang berasal dari laporan keuangan pada Gambar 3.131 sampai dengan Gambar 3.133.

3. Mengidentifikasi bagian aset, liabilitas, dan *profit loss* dalam laporan keuangan. Serta menginput bagian aset, liabilitas, dan *profit loss* yang terdapat pada laporan keuangan ke dalam *excel*.

Pada Gambar 3.134 mengisi tabel dengan laporan keuangan yang terdapat pada gambar 3.131 untuk tabel aset, 3.132 untuk tabel liabilitas, dan 3.133 untuk tabel *profit and loss*. Lalu tiap tabel tersebut dibuat selisih antara tahun 2020 dengan tahun 2019 untuk mengetahui peningkatan dan penurunan tiap akunnya.

3.3.1.10 PT AF

a) Melakukan Rekapitulasi SPT PPh Pasal 21

Dokumen yang dibutuhkan dalam merekapitulasi PPh Pasal 21 yaitu Bukti Penerimaan Elektronik (BPE), Bukti Penerimaan Negara, dan dokumen yang berkaitan dengan SPT Masa PPh Pasal 21. Proses rekapitulasi SPT PPh Pasal 21 dilakukan untuk periode 2020. Berikut adalah cara melakukan rekapitulasi PPh Pasal 21:

1. Menerima dokumen terkait SPT Masa PPh Pasal 21 klien baik normal maupun pembetulan (Formulir 1721) dari pembimbing lapangan seperti gambar 3.135.

Gambar 3. 135 Dokumen SPT Masa PPh Pasal 21 PT AF

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26

FORMULIR 1721

Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26

area barcode

Bacalah petunjuk pengisian sebelum mengisi formulir ini

MASA PAJAK : 01 - 2021

SPT NORMAL SPT PEMBEHALAN KE-...

JUMLAH LEMBAR SPT TERMASUK LAMPIRAN : (SINI OLAH PULUHA)

A. IDENTITAS PEMOTONG

1. NPWP : 22.222.2222.2-220-000

2. NAMA : PT AF

3. ALAMAT : _____

4. NO. TELEPON : _____ 5. EMAIL : _____

B. OBJEK PAJAK

NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)
1.	PEGAWAI TETAP	21-100-01	22	273.689.316	15.993.263
2.	PENERIMA PENSUN BERKALA	21-100-02	0	0	0
3.	PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU TENAGA KERJA LEPAS	21-100-03	44	17.400.000	0
4.	BUKAN PECAWAI:				
4a.	DISTRIBUTOR MULTILEVEL MARKETING (MLM)	21-100-04	0	0	0
4b.	PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI	21-100-05	0	0	0
4c.	PENJAJA BARANG DAGANGAN	21-100-06	0	0	0
4d.	TENAGA AHLI	21-100-07	0	0	0
4e.	BUKAN PECAWAI YANG MENEMBAH MELAY YANG BERKAITAN DENGAN BUKAN PECAWAI	21-100-08	34	318.957.897	1.900.000
4f.	BUKAN PECAWAI YANG MENEMBAH MELAY YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN BUKAN PECAWAI	21-100-09	0	0	0
5.	MANTAN PECAWAI YANG MENEMBAH MELAY YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN BUKAN PECAWAI	21-100-10	0	0	0
6.	MANTAN PECAWAI YANG MENEMBAH MELAY YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN BUKAN PECAWAI	21-100-11	0	0	0
7.	PEGAWAI YANG MELAKUKAN PENARIKAN DANA PENSUN	21-100-12	0	0	0
8.	PESERTA KEGIATAN	21-100-13	0	0	0
9.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 TIDAK PAVL LAINNYA	21-100-99	0	0	0
10.	PECAWAI/PEMBERI JASA/PESERTA KEGIATAN/PENERIMA PENSUN BERKALA SEBAGAI WAJIB PAJAK LUAR NEGERI	27-100-99	0	0	0
11.	JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 10)		100	610.047.213	17.893.263
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR					JUMLAH (Rp)
12.	STP PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 (HANYA POKOK PAJAK)			0,00	0
KELEBIHAN PENYETORAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 DARI:					
13.	MASA PAJAK : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12			0,00	0
14.	JUMLAH (ANGKA 12 + ANGKA 13)			0,00	0
15.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR (ANGKA 11 KOLOM 6 - ANGKA 14)			0,00	17.893.263
LALU/TRANS PENYISIRAN PADA ANGKA 16 & 17 APABILA SPT PEMBEHALAN (DASOKTA) PADA ANGKA 14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/62/63/64/65/66/67/68/69/70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/100					
16.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR PADA SPT YANG DIBETULKAN (PENGHASILAN DARI SINGKAP & ANGKA 15 DARI SPT YANG DIBETULKAN)			0,00	0
17.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR KARENA PEMBEHALAN (ANGKA 15 - ANGKA 16)			0,00	0
18.	KELEBIHAN SETOR PADA ANGKA 15 ATAU ANGKA 17 AKAN DIKOMPENSASIKAN KE MASA PAJAK (mm - yyyy)			0,00	-

HALAMAN 1

Sumber: Dokumentasi Perusahaan

2. Menerima Bukti Penerimaan Negara dari pembimbing lapangan seperti gambar 3.136.

Gambar 3. 136 Dokumen Bukti Penerimaan Negara PT AF

2/10/2021 <https://mib.bankmandiri.co.id/corp/front/billpayment.do?action=doPrintBillPayment>

Nomor Referensi Transaksi	:	
No. Ref Perkumpulan	:	
Dari Rekening	:	
Customer Reference Number	:	
To Institution	:	50012 Pajak/PNBP/Cukai
BUKTI PENERIMAAN NEGARA	:	Penerimaan Pajak
Tanggal dan Jam Bayar	:	14/02/2021 15:17:07
Tanggal Buku	:	11/02/21
Kode Cabang Bank	:	008
NTB	:	
NTPN	:	
STAN	:	
Data Setoran	:	
Kode Billing	:	PT AF
Nama Wajib Pajak	:	
Alamat	:	
Nomor Objek Pajak	:	
Mata Anggaran	:	411121
Jenis Setoran	:	100
Masa Pajak	:	01012021
Nomor Ketetapan	:	000
Jumlah Setoran	:	Rp. 12.000.000
Mata Uang	:	IDR
Terbilang	:	
Keterangan	:	22.222.222.2-220-000
NPWP	:	
Daftar Pembayaran	:	00 TOTAL
Admin Bank	:	IDR 000
Total Bayar	:	IDR 12.000.000
Beneficiary Notification	:	
Notification Flag	:	Don't Send
Mode Instruksi	:	
Langsung	:	10-Feb-2021

6

Print Simpan Sebagai Tutup

o

Dokumentasi Perusahaan

3. Menerima Bukti Penerimaan Eletronik dari pembimbing lapangan seperti gambar 3.137.

Penerimaan Elektronik. Sedangkan untuk kolom tanggal bayar diperoleh dari Bukti Penerimaan Negara. Langkahnya sebagai berikut:

Masa Pajak Januari 2021 SPT PPh 21 Normal maka proses *penginputan* sebagai berikut:

- 1) Jumlah tiap penerima penghasilan sebesar 22 diperoleh dari SPT Masa PPh Pasal 21 seperti nomor 1.
- 2) Jumlah penghasilan bruto sebesar Rp 273.689.316 diperoleh dari SPT Masa PPh Pasal 21 seperti nomor 2.
- 3) Jumlah pajak yang dipotong sebesar Rp 17.893.263 diperoleh dari SPT Masa PPh Pasal 21 seperti nomor 3.
- 4) Total pajak yang disetor sebesar Rp 17.893.263 diperoleh dari SPT Masa PPh Pasal 21 seperti nomor 4.
- 5) Tanggal lapor yaitu 18 Februari 2021 diperoleh dari Bukti Penerimaan Elektronik seperti nomor 5.
- 6) Tanggal bayar yaitu 14 Februari 2021 diperoleh dari Bukti Penerimaan Negara seperti nomor 6.
- 7) Status SPT Kurang Bayar diperoleh dari Bukti Penerimaan Elektronik seperti nomor 7.

Gambar 3. 138 Format Tabel dalam Pengisian

Rekapitulasi PPh Pasal 21 PT SRM

MASA	STATUS PEMBETULAN	Penerima Pengh.		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap		Tenaga Ahli		Bukan Pegawai Berkesinambungan		TOTAL
		Jumlah	Penghasilan Bruto	Jumlah	Penghasilan Bruto	Jumlah	Penghasilan Bruto	Jumlah	Penghasilan Bruto	Jumlah	Penghasilan Bruto	
JANUARI	NORMAL	22	375.689.315	44	17.400.000			34				610.047.213
FEBRUARI	NORMAL	22	269.512.345	44	18.726.348			30				546.374.111
MARET	NORMAL	23	362.513.544	9	5.752.288			41				698.415.670
APRIL	NORMAL	23	294.396.036	12	10.175.521			40				608.697.094
MAY	NORMAL											
JUNI	NORMAL	1		2								
JULI	NORMAL											
AUGUSTUS	NORMAL											
SEPTEMBER	NORMAL											
OKTOBER	NORMAL											
NOVEMBER	NORMAL											
DESEMBER	NORMAL											
TOTAL		90	1.200.191.261	109	53.854.157			145			1.210.528.886	2.463.774.304

Jml Pajak Dipotong				TOTAL	Jumlah Penghasilan Bruto		TOTAL	Jml Pajak Dipotong		TOTAL	Total yang diotor	SPT MASA PPh21		STATUS SPT
Pegawai Tetap	Pegawai Tidak Tetap	Tenaga Ahli	Bukan Pegawai Berkesinambungan		PESANGON	PENSIUN, TUNJANGAN		PESANGON	PENSIUN, TUNJANGAN			TGL LABOR	TGL BAYAR	
15.993.263			1.900.000	17.893.263						17.938.742	18 Februari 2021	14 Feb	KR	
25.621.497			1.307.321	26.939.818						26.939.818	10 Maret 2021	09 Maret 2021	KR	
16.727.234			780.162	17.507.396						17.507.396	16 April 2021	08 April 2021	KR	
											10 Mei 2021	06 Mei 2021	KR	
3				4							5	6	7	
73.670.206	48.718		4.970.941	78.689.865						78.689.865				

Sumber: Dokumentasi Perusahaan

5. Melakukan rekapitulasi PPh Pasal 21 status normal dan pembetulan sampai dengan banyaknya dokumen terkait dengan SPT Masa PPh Pasal 21 yang telah diberikan oleh pembimbing lapangan (setahun atau tidak sampai setahun).

b) Melakukan Rekapitulasi SPT PPh Pasal 23

Dokumen yang dibutuhkan dalam merekapitulasi PPh Pasal 23 yaitu Bukti Penerimaan Elektronik (BPE), Bukti Penerimaan Negara, dan dokumen yang berkaitan dengan SPT Masa PPh Pasal 23 (formulir 1724). Proses rekapitulasi SPT PPh Pasal 23 dilakukan untuk periode Januari hingga Mei

2021 atas jasa konsultan. Berikut adalah cara melakukan rekapitulasi PPh Pasal 23 masa Januari:

1. Mendapatkan dokumen terkait SPT Masa PPh Pasal 23 klien baik normal maupun pembetulan (Formulir 1724) dari pembimbing lapangan seperti gambar 3.139.

Gambar 3. 139 Dokumen SPT Masa PPh Pasal 23 PT AF

The image shows a tax form (Formulir 1724) for PPh Pasal 23. The form is titled "SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26". It contains fields for taxpayer information (NPWP, name, address, email), tax object details, and a table of tax payments. A red box highlights a row in the table with a value of 10,900.00. A black arrow points to this row from a box labeled "2" on the right side of the image.

NO	URAIAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PPh YANG DIPOTONG/ DTP (Rp)
1	DEVIDEN	24-101-01	0,00	0,00
2	BUNGA	24-102-01	0,00	0,00
3	ROYALTI	24-103-01	0,00	0,00
4	HADIAH, PENGHARGAAN, BONEUS DAN LAINNYA	24-100-01	0,00	0,00
5	SEWA DAN PENGHASILAN LAIN SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN HARTA	24-100-02	0,00	0,00
6	JASA TENIKE	24-104-01	0,00	0,00
7	JASA KONSULTAN	24-104-03	10.900,00	160.000,00
8	JASA LAIN SELAIN JASA YANG TELAH DIPOTONG PPh PASAL 21		10.900,00	0,00
9	JUMLAH PPh PASAL 23 YANG KURANG DISETOR SETELAH DIKURANGI PPh PASAL 23 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)			160.000,00

Sumber: Dokumentasi Perusahaan

2. Menerima Bukti Penerimaan Negara dari pembimbing lapangan

Gambar 3. 140 Dokumen Bukti Penerimaan Elektronik PT AF

	<p>KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</p> <p>LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200 email : pengaduan@pajak.go.id ; informasi@pajak.go.id</p>
BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK (BPE)	
NOMOR TANDA TERIMA ELEKTRONIK : 99999999999999999999	
NPWP	: 22.222.222.2-220-000
Nama	: PT AF
Jenis Pajak	: PPH2326
Pembetulan Ke-	: 0
Tanggal Terima	: 10-02-2021
Tahun Pajak	: 2021
Masa Pajak	: 1

QR Code



Terima Kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda

Sumber: Dokumentasi Perusahaan

3. Menerima Bukti Penerimaan Elektronik dari pembimbing lapangan

Gambar 3. 141 Dokumen Bukti Penerimaan Negara PT AF

2/10/2021 <https://mib.bankmandiri.co.id/corp/front/billpayment.do?action=doPrintBillPayme>

Nomor Referensi Transaksi	:	
No. Ref Perkumpulan	:	
Dari Rekening	:	
Customer Reference Number	:	
To Institution	:	50012 Pajak/PNBP/C
BUKTI PENERIMAAN NEGARA	:	Penerimaan Pajak
Data Pembayaran	:	-
Tanggal dan Jam Bayar	:	10/02/2021 15:17:07
Tanggal Buku	:	11/02/21
Kode Cabang Bank	:	008
NTB	:	
NTPN	:	33333AAAAA333AA
STAN	:	
Data Setoran	:	
Kode Billing	:	
Nama Wajib Pajak	:	PT AF
Alamat	:	
Nomor Objek Pajak	:	
Mata Anggaran	:	411124
Jenis Setoran	:	104
Masa Pajak	:	01012021
Nomor Ketetapan	:	0000000000000000
Jumlah Setoran	:	Rp. 150.000
Mata Uang	:	IDR
Terbilang	:	
Keterangan	:	Informasi ini hasil cetak computer dan tidak memerlukan tanda tangan
NPWP	:	315782615451000
Daftar Pembayaran	:	00 TOTAL 150.000
Admin Bank	:	IDR
Total Bayar	:	IDR 150.000
Beneficiary Notification	:	
Notification Flag	:	Don't Send
Mode Instruksi	:	
Langsung	:	10-Feb-2021

Sumber: Dokumentasi Perusahaan

4. Menerima file Excel yang didalamnya terdapat format table (massa, status pembetulan, jasa yang berkaitan dengan PPh 23, total DPP, besarnya pajak PPh 23, tanggal bayar, NTPN, tanggal lapor dan status SPT) dan melakukan input SPT Masa PPh Pasal 23 baik status normal atau pembetulan. Pada kolom status pembetulan, massa, jasa yang berkaitan dengan PPh 23, total DPP, dan besarnya pajak PPh 23 angkanya berasal dari Formulir 1724 SPT Masa PPh Pasal 23. Kolom tanggal lapor dan status SPT angkanya diperoleh dari Bukti Penerimaan Elektronik. Sedangkan untuk kolom tanggal bayar dan

NTPN diperoleh dari Bukti Penerimaan Negara. Langkahnya sebagai berikut:

Masa Pajak Januari 2021 SPT PPh 23 Normal maka proses *penginputan* sebagai berikut:

- 1) Jumlah penghasilan bruto sebesar Rp 10.900.000 diperoleh dari SPT Masa PPh Pasal 23 seperti nomor 1.
- 2) Jumlah pajak yang dipotong sebesar Rp 150.000 diperoleh dari SPT Masa PPh Pasal 23 seperti nomor 2.
- 3) Total DPP diperoleh dari penjumlahan semua penerima penghasilan seperti nomor 3.
- 4) Jumlah Pajak Penghasilan PPh 21 sebesar Rp 150.000 diperoleh dari SPT Masa PPh 23 seperti nomor 4.
- 5) Tanggal bayar yaitu 10 Februari 2021 diperoleh dari Bukti Penerimaan Negara seperti nomor 5.
- 6) NTPN diperoleh dari Bukti Penerimaan Negara seperti nomor 6.
- 7) Tanggal lapor yaitu 10 Februari 2021 diperoleh dari Bukti Penerimaan Elektronik seperti nomor 7.
- 8) Tanggal lapor yaitu 10 Februari 2021 diperoleh dari Bukti Penerimaan Elektronik seperti nomor 8.

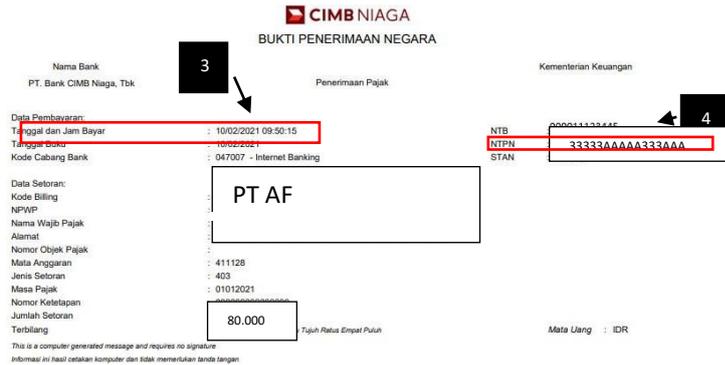
Gambar 3. 143 Dokumen SPT Masa PPh Final PT AF

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT (2)		<input checked="" type="checkbox"/> SPT Normal <input type="checkbox"/> SPT Pembetulan Ke-	
Formule ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2)		Masa Pajak		01 / 2021	
BAGIAN A. IDENTITAS PEMERINTAH					
1. NPWP					
2. Nama WP: PT AF					
3. Alamat					
BAGIAN B. OBJEK PAJAK					
Urutan	KAPJKJS	Nilai Objek Pajak (Rp)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong/ Dipungut/Diotor Sendiri (Rp)	
1. Bunga Deposito/Tabungan, Diskonto SEBI dan Jasa Giro					
a. Bunga Deposito/Tabungan					
1) Yang ditempatkan di Dalam Negeri	41112B/404				
2) Yang ditempatkan di Luar Negeri	41112B/404				
b. Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	41112B/404				
c. Jasa Giro	41112B/404				
2. Transaksi Penjualan Saham					
a. Saham Pendiri	41112B/407				
b. Bukan Saham Pendiri	41112B/406				
3. Bunga/Diskonto Obligasi dan Surat Berharga Negara	41112B/401				
4. Hadiah Undian	41112B/401				
5. Persewaan Tanah dan/atau Bangunan					
a. Penyewa sebagai Pemotong Pajak	41112B/401	800.000	10,00	80.000	
b. Orang Pribadi/Badan yang Menytor Sendiri PPh	41112B/401				
6. Jasa Konstruksi					
a. Perencana Konstruksi					
1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh	41112B/409				
2) Penyedia Jasa yang Menytor Sendiri PPh	41112B/409				
b. Pelaksana Konstruksi					
1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh	41112B/409				
2) Penyedia Jasa yang Menytor Sendiri PPh	41112B/409				
c. Pengawas Konstruksi					
1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh	41112B/409				
2) Penyedia Jasa yang Menytor Sendiri PPh	41112B/409				
7. Waifu Pajak yang Melakukan Pengalihan Hak atas Tanah/Bangunan	41112B/402				
8. Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Waifu Pajak Orang Pribadi	41112B/417				
9. Transaksi Derivatif Berupa Kontrak Berjangka yang Diperdagangkan di Bursa	41112B/418				
10. Dividen yang Diterima/Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri	41112B/419				
11. Penghasilan Tertentu Lainnya					
a.					
b.					
c.					
JUMLAH				80.000	
Terbilang: Lima Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah					
BAGIAN C. LAMPIRAN					
1. <input checked="" type="checkbox"/> Surat Setoran Pajak: 1 lembar.					
2. <input checked="" type="checkbox"/> Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 Ayat (2).					
3. <input checked="" type="checkbox"/> Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 Ayat (2): 3 lembar.					
4. <input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus.					
BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN					
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi - sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampiranannya adalah benar, lengkap dan jelas.				Disisi oleh Petugas SPT Masa Ditama: <input type="checkbox"/> Langsung dari WP <input type="checkbox"/> Melalui Pos	
<input checked="" type="checkbox"/> PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN		<input type="checkbox"/> KULASA WAJIB PAJAK		Nama: ROBIN NPWP: 11.222.333.4-566-000	
Tanda Tangan & Cap		Tanggal: 01/02/2021		Tanda Tangan	

Sumber: Dokumentasi Perusahaan

- Menerima Bukti Penerimaan Negara dari pembimbing lapangan seperti gambar 3.144.

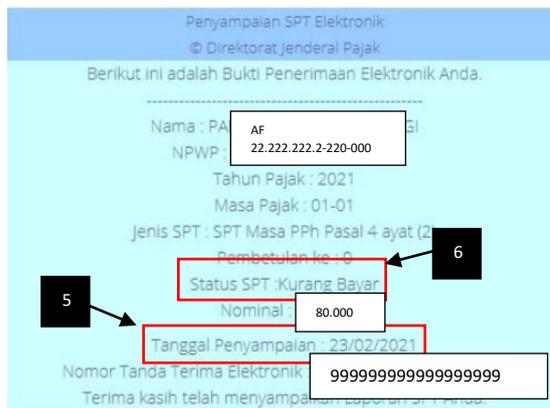
Gambar 3. 144 Bukti Penerimaan Negara PT AF



Sumber: Dokumentasi Perusahaan

3. Menerima Bukti Penerimaan Elektronik dari pembimbing lapangan seperti gambar 3.145.

Gambar 3. 145 Bukti Penerimaan Elektronik PT AF



Sumber: Dokumentasi Perusahaan

4. Menerima file Excel yang didalamnya terdapat format table (masa, bunga deposito/tabungan, transaksi jual saham, bunga/diskonto

obligasi dan surat berharga, hadiah undian, persewaan tanah dan bangunan, bunga simpanan, transaksi derivatif, dividen Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri, total DPP, PPh Final, tanggal bayar, NTPN, tanggal lapor, dan status SPT) yang digunakan untuk nantinya akan di *input* berdasarkan dokumen yang diberikan oleh klien.

Gambar 3. 146 Tabel Rekapitulasi PPh Final PT AF

NO	MASA	BUNGA DEPOSITO/ TABUNGAN (SBI & GIRO)	TRANSAKSI JUAL SAHAM	BUNGA/DISKONTO OBLIGASI & SURAT BERHARGA	HADIAH UNDIAN	PERSEWAAN TANAH & BANGUNAN	JASA KONSTRUKSI	PENGALIHAN TANAH BANGUNAN
1	JANUARI					800.000		
2	FEBRUARI							
3	MARET					14.117.616		
4	APRIL							
5	MEI					1.268.650		
6	JUNI					1		
7	JULI							
8	AGUSTUS							
9	SEPTEMBER							
10	OKTOBER							
11	NOVEMBER							
12	DESEMBER							
	JUMLAH					184.320.189		

BUNGA SIMPANAN DIRAYAKAN KOPERASI	TRANSAKSI DERIVATIF	DIVIDEND WP OP DN	TOTAL DPP	PPh 4 Ayat 2	TANGGL BAYAR	NTPN	TANGGAL LAPOR	STATUS SPT2
			800.000	80.000	10 Februari 2021	33333AAAAA333	23 Februari 2021	KB
			14.117.616	1.411.761	10 Maret 2021	E97FF7A2RELK9EEG	12 Maret 2021	KB
					09 April 2021		15 April 2021	KB
			1.268.650	126.865	10 Juni 2021	F7EED0T4IMFOHFA0	18 Juni 2021	KB
				2	3	4	5	6
			184.320.189	18.432.016				

Sumber: Dokumentasi Perusahaan

- Melakukan *input* SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat 2. Pada kolom status masa, bunga deposito/tabungan, transaksi jual saham, bunga/diskonto obligasi dan surat berharga, hadiah undian, persewaan tanah dan bangunan, bunga simpanan, transaksi derivatif, dividen Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri, total DPP, PPh Final angkanya berasal dari SPT Masa PPh Final. Kolom tanggal lapor dan status SPT angkanya diperoleh dari Bukti Penerimaan Elektronik. Sedangkan

untuk kolom tanggal bayar dan NTPN diperoleh dari Bukti Penerimaan Negara.

Langkah yang dilakukan pada masa Januari yaitu:

- 1) Mengisi nominal pada uraian Persewaan Tanah dan Bangunan sebesar Rp 800.000 yang diperoleh dari SPT Masa PPh Final seperti nomor 1.
- 2) Mengisi total DPP yang diperoleh dari rumus menjumlahkan seluruh uraian. Pada masa Januari hanya terdapat Persewaan Tanah dan Bangunan maka total DPP adalah Rp 800.000.
- 3) Mengisi PPh Pasal 4 Ayat 2 sebesar Rp 80.000 yang diperoleh dari SPT Masa PPh Final seperti nomor 2.
- 4) Mengisi kolom tanggal bayar yaitu 10 Februari 2021 yang diperoleh dari Bukti Penerimaan Negara seperti nomor 3.
- 5) Mengisi kolom NTPN yaitu 33333AAAAA333AA yang diperoleh dari Bukti Penerimaan Negara seperti nomor 4.
- 6) Mengisi kolom tanggal lapor yaitu 23 Februari 2021 yang diperoleh dari Bukti Penerimaan Elektronik seperti nomor 5.
- 7) Mengisi kolom status SPT Kurang Bayar yang diperoleh dari Bukti Penerimaan Elektronik seperti nomor 6.

10. Melakukan rekapitulasi PPh Final hingga masa yang ditentukan.

d) Melakukan Rekapitulasi PPN

Dokumen yang diperlukan dalam melakukan rekapitulasi adalah Bukti Penerimaan Elektronik, Bukti Penerimaan Negara, dan dokumen terkait dengan SPT PPN. Proses rekapitulasi PPN dilakukan untuk periode Januari dan Maret 2021. Berikut merupakan proses rekapitulasi PPN:

1. Mendapatkan dokumen dari pembimbing lapangan terkait SPT Masa PPN klien seperti gambar 3.147 dan 3.148.

Gambar 3. 147 Dokumen SPT Masa PPN PT AF

DEKADITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN				FORMULIR 1111 AB	
NAMA PNP : PT AF				MASA : 03 - 03 - 2021 (mm-nm-yyyy)	
NPWP : 22.222.222.2-022.000				Dibuatkan Ke : 0 (not)	
		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)	
I. Rekapitulasi Penyerahan					
A. Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP		A1 >	0,00	2	
B. Penyerahan Dalam Negeri					
1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung		A2 >	4.000.000,00	1	400.000,00
2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung			0,00		0,00
C. Rincian Penyerahan Dalam Negeri					
1. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri (jumlah IB 1 dengan Faktur Pajak Kode 01, 04, 05 dan 09 dijumlahkan IB 2)		1 >	3.261.059.068,00		326.105.906,00
2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya dipungut oleh Pemungut PPN (jumlah IB 1 dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03)		2 >	0,00		0,00
3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya tidak dipungut (jumlah IB 1 dengan Faktur Pajak Kode 07)		3 >	0,00		0,00
4. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM (jumlah IB 1 dengan Faktur Pajak Kode 08)		4 >	0,00		0,00
II. Rekapitulasi Perolehan					
A. Inpor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean, dan Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Yang PM-nya Dapat Dikreditkan		B1 >	0,00		0,00
B. Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri Yang PM-nya Dapat Dikreditkan		B2 >	2.493.073.019,00		249.307.299,00
C. Inpor atau Perolehan Yang PM-nya Tidak Dapat Dikreditkan dan/atau Inpor atau Perolehan Yang Mendapat Fasilitas		B3 >	0,00		0,00
D. Jumlah Perolehan (II.A + II.B + II.C)			2.493.073.019,00		249.307.299,00
III. Penghitungan PM Yang Dapat Dikreditkan					
A. Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan (II.A + II.B)					249.307.299,00
B. Pajak Masukan Lainnya					
1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya					360.450.704,00
2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak 03 - 2020 (mm-yyyy)					45.572.500,00
3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan					0,00
4. Jumlah (III.B.1 + III.B.2 + III.B.3)					406.023.204,00
C. Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan (III.A + III.B.4)		5 >			655.330.503,00

DAFTAR EKSPOR BKP BERWUJUD, BKP TIDAK BERWUJUD, DAN/ATAU JKP				FORMULIR 1111 A1	
NAMA PNP : PT AF				MASA : 03 - 03 - 2021 (mm-nm-yyyy)	
NPWP : 22.222.222.2-022.000				Dibuatkan Ke : 0 (not)	
No.	Nama	Dokumen Tertentu	Nomor	Tanggal (dd mm-yyyy)	DPP (Rupiah)
					Keterangan
JUMLAH					
A1 >					
	Berwujud/Penerima JKP				

Sumber: Dokumentasi Perusahaan

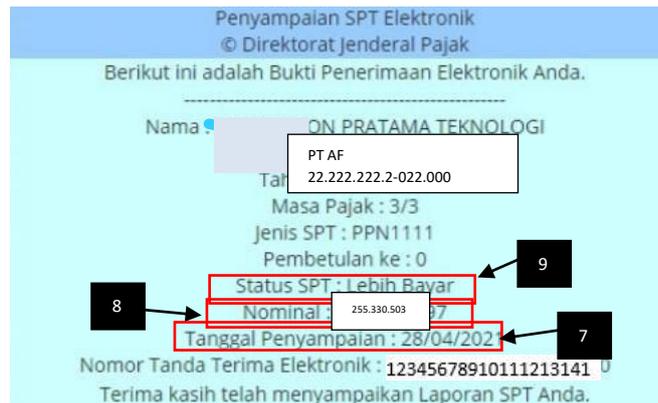
Gambar 3. 148 Dokumen SPT Masa PPN PT AF

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)		FORMULIR 1111	
Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam <input type="checkbox"/> yang sesuai		NPWP: 22.222.222.2-022.000		Jumlah Lembar SPT (Termasuk Lampiran) Dituliskan Pengisian	
NAMA PKP: PT AF	ALAMAT: AKAF....	MASA: 12	Pembetulan No: 0 (nol) <input type="checkbox"/> Wajib PPhBM		
TELEFON: 0214209013	BLK: YUZUR				
I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA					
A. Terutang PPN:					
1. Ekspor: Rp. 0,00					
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri: Rp. 4.000.000,00					
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN: Rp. 0,00					
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut: Rp. 0,00					
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN: Rp. 0,00					
Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5): Rp. 4.000.000,00					
B. Tidak Terutang PPN: Rp. 0,00					
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B): Rp. 4.000.000,00					
II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR					
A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2): Rp. 400.000,00					
B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama: Rp. 0,00					
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan: Rp. 656.330.503,00					
D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C): Rp. -255.330.503,00					
E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang sebelumnya: Rp. 0,00					
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E): Rp. 0,00					
G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal: (dd-mm-yyyy) NTPN: _____					
H. PPN lebih bayar pada:					
1. <input checked="" type="checkbox"/> Butir II.D (Ditai dalam hal SPT bukan Pembetulan) 1.2 <input type="checkbox"/> Butir II.D atau <input type="checkbox"/> Butir II.F (Ditai dalam hal SPT Pembetulan)					
Ditai: 2.1 <input type="checkbox"/> PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau 2.2 <input checked="" type="checkbox"/> Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN					
diminta untuk: 3.1 <input checked="" type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak (mm-yyyy)					
3.2 <input type="checkbox"/> Dikembalikan (Restitusi)					
Khusus Restitusi untuk PKP:					
<input type="checkbox"/> Pasal 17C KUP dilakukan dengan: <input type="checkbox"/> Prosedur Biasa atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan					
atau <input type="checkbox"/> Pasal 17D KUP dilakukan dengan: <input type="checkbox"/> Prosedur Biasa atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan					
atau <input type="checkbox"/> Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan					
III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI					
A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak: Rp. 0,00					
B. PPN Terutang: Rp. 0,00					
C. Dilunasi Tanggal: (dd-mm-yyyy) NTPN: _____					
IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI					
A. PPN yang wajib dibayar kembali: Rp. 0,00					
B. Dilunasi Tanggal: (dd-mm-yyyy) NTPN: _____					
V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH					
A. PPhBM yang harus dipungut sendiri: Rp. 0,00					
B. PPhBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama: Rp. 0,00					
C. PPhBM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B): Rp. 0,00					
D. PPhBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan: Rp. 0,00					
E. PPhBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D): Rp. 0,00					
F. PPhBM kurang bayar dilunasi tanggal: (dd-mm-yyyy) NTPN: _____					
VI. KELENGKAPAN SPT					
<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 AB <input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 A2 <input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 B2 <input type="checkbox"/> SSP PPN _____ lembar <input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus					
<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 A1 <input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 B1 <input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 B3 <input type="checkbox"/> SSP PPhBM _____ lembar <input type="checkbox"/> _____ lembar					

Sumber: Dokumentasi Perusahaan

2. Menerima Bukti Penerimaan Elektronik dari pembimbing lapangan seperti gambar 3.149.

Gambar 3. 149 Bukti Penerimaan Elektronik PT AF



Sumber: Dokumentasi Perusahaan

3. Menerima *file Excel* yang didalamnya terdapat format *table* (masa, pajak keluaran, pajak masukan, kompensasi masa pajak sebelumnya, jumlah kompensasi, kurang bayar/ lebih bayar, tanggal lapor, tanggal bayar, dan NTPN) yang digunakan untuk nantinya akan di *input* berdasarkan dokumen yang diberikan oleh klien seperti gambar 3.100.

- 1) Mengisi kolom tiap uraian pada bagian DPP yaitu kolom uraian A.2 sebesar Rp 4.000.000.000, penyerahan PPN yang dipungut sendiri sebesar Rp 4.000.000.000, dan B.2 sebesar Rp 2.493.073.019 yang diperoleh dari SPT Masa PPN seperti nomor 1.
- 2) Mengisi kolom uraian pada bagian PPN yaitu kolom uraian A.2 sebesar Rp 400.000.000, penyerahan PPN yang dipungut sendiri sebesar Rp 400.000.000, dan B.2 sebesar Rp 249.073.019 yang diperoleh dari SPT Masa PPN seperti nomor 2.
- 3) Mengisi kolom kompensasi masa pajak sebelumnya sebesar Rp 360.450.704 yang diperoleh dari SPT Masa PPN seperti nomor 3.
- 4) Mengisi kolom jumlah kompensasi sebesar Rp 45.572.500 yang diperoleh dari SPT Masa PPN seperti nomor 4.
- 5) Mengisi kolom masa pajak kompensasi yaitu bulan Maret 2020 yang diperoleh dari SPT Masa PPN seperti nomor 5.
- 6) Mengisi kolom KB/LB sebesar -Rp 255.330.503 yang diperoleh dari SPT Masa PPN seperti nomor 6.
- 7) Jika terdapat KB/LB pembetulan maka diisi seperti SPT Masa PPN kotak biru.
- 8) Mengisi kolom tanggal lapor yaitu 28 April 2021 yang diperoleh dari Bukti Penerimaan Elektronik nomor 7.

9) Mengisi kolom nominal yaitu Rp 255.330.503 yang diperoleh dari Bukti Penerimaan Elektronik nomor 8.

10) Mengisi kolom status SPT LB yang diperoleh dari Bukti Penerimaan Elektronik nomor 9.

5. Melakukan rekapitulasi hingga masa yang ditentukan.

e) Membuat Kertas Kerja Pemeriksaan

Tugas membuat kertas kerja dilakukan untuk PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 26. Dokumen yang dibutuhkan dalam membuat kertas kerja yaitu dokumen yang terkait dengan SPT Masa perusahaan dan *file excel* yang berisikan format dari pembimbing lapangan. Membuat kertas kerja pemeriksaan dilakukan untuk periode 2020. Berikut proses membuat kertas kerja:

1. Menerima beberapa *file pdf* SPT Masa dari pembimbing lapangan.

Gambar 3. 151 SPT Masa PPh Pasal 23 Periode Januari

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26		FORMULIR 1724 INDUK	
Masa Pajak (mm-yyyy) H.1 01 - 2020		Formulir ini digunakan untuk melaporkan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26 Bacalah petunjuk pengisian sebelum mengisi formulir ini		area barcode	
H.2 <input checked="" type="checkbox"/> SPT Normal		H.3 <input type="checkbox"/> Pembetulan Ke-		H.4	
A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK		A.1 NPWP : 45.678.890.1-013-000		JUMLAH LEMBAR SPT TERMASUK LAMPIRAN : 0 H.5 (Diisi oleh petugas)	
A.2 NAMA : P1 TAF		A.3 ALAMAT : GEDUNG TOWER LT 1-3, JL BELIMBING – JAKARTA			
A.4 NO. TELEPON : (021)		A.5 EMAIL : .co.id			
B. OBJEK PAJAK					
NO	URAIAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp.)	JUMLAH PPh YANG DIPOTONG/ DTP(Rp)	
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	
1. PPh PASAL 23					
1	DEVIDEN	24-101-01	0,00	1	0,00
2	BUNGA	24-102-01	0,00	2	0,00
3	ROYALTI	24-103-01	0,00		0,00
4	HADIAH, PENGHARGAAN, BONUS DAN LAINNYA	24-100-01	0,00		0,00
5	SEWA DAN PENGHASILAN LAIN SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN HARTA	24-100-02	366.773.225,00		8.580.303,00
6					
	6a. JASA TEKNIK	24-104-01	0,00		0,00
	6b. JASA MANAJEMEN	24-104-02	0,00		0,00
	6c. JASA KONSULTAN	24-104-03	3.800.000,00		76.000,00
	6d. JASA LAIN SELAIN JASA YANG TELAH DIPOTONG PPh PASAL 21		8.750.209.850,00		177.522.857,00
7	JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D 6)		9.120.783.075,00		186.179.160,00
8	JUMLAH PPh PASAL 23 YANG KURANG DISETOR SETELAH DIKURANGI PPh PASAL 23 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)				186.179.160,00
9	JUMLAH PPh PASAL 23 YANG KURANG DISETOR SEHUBUNGAN DENGAN PENAMBAHAN DAN PEMBETULAN BUKTI PEMOTONGAN				0,00

Sumber: Dokumentasi Perusahaan

Pada Gambar 3.151 merupakan SPT Masa PPh Pasal 23 PT AF pada periode Januari 2020. Data yang diperlukan untuk membuat kertas kerja pemeriksaan adalah data jumlah penghasilan bruto seperti nomor 1 dan jumlah PPh yang dipotong seperti nomor 2.

- Melakukan rekapitulasi terhadap SPT Masa tersebut di *file excel* yang di dalamnya sudah terdapat format.

Gambar 3. 152 Tabel Rekapitulasi PPh Pasal 23

Penghasilan Bruto														
No.	Uraian	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Jumlah
1	Direksi *)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Ruang *)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Royalti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295480000	0	0	295480000
4	Hutang dan pengurangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta	366773225	389568716	192795535	602881188	353197935	182398100	538732000	255209333	610558205	318382925	284024350	598551111	4588765611
6	Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Jumlah	366773225	389568716	192795535	602881188	353197935	182398100	538732000	255209333	610558205	318382925	284024350	598551111	4588765611
PPh yang dipotong														
No.	Uraian	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Jumlah
1	Direksi *)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Ruang *)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Royalti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44332000	0	0	44332000
4	Hutang dan pengurangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta	8180303	9064677	5291604	13406760	6251237	4850034	12171790	5229083	5292277	7448123	6311797	9619948	93517623
6	Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Jumlah	8180303	9064677	5291604	13406760	6251237	4850034	12171790	5229083	5292277	7448123	6311797	9619948	93517623
8	Jumlah	366773225	389568716	192795535	602881188	353197935	182398100	538732000	255209333	610558205	318382925	284024350	598551111	4588765611

Pada Gambar 3.152 merupakan tabel rekapitulasi PPh Pasal 23 dari periode Januari hingga Desember 2020. Pada periode Januari terdapat pajak atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta dengan jumlah penghasilan bruto Rp 366.773.225 seperti nomor 1 dan jumlah PPh yang dipotong sebesar Rp 8.580.303 seperti nomor 2 data tersebut bersumber dari SPT Masa PPh Pasal 23 pada Gambar 3.151. Setelah melakukan rekapitulasi PPh Pasal 23 dari periode Januari hingga Desember selanjutnya adalah menjumlah tiap uraian

yang terdapat pada SPT Masa PPh Pasal 23 periode Januari yaitu total pajak atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta dengan jumlah penghasilan bruto Rp 4.584.765.611 dan jumlah PPh yang dipotong Rp 93.517.623 seperti nomor 3.

- Melakukan rekapitulasi berdasarkan perhitungan menurut Wajib Pajak dan perhitungan menurut Pemeriksa.

Gambar 3. 153 Rekapitulasi Menurut Pemeriksa dan Wajib Pajak

Menurut Pemeriksa																
No	U R A I A N	TARIF	REF	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	GABUNGAN
1	OBJEK PAJAK															
	a. Dividen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b. Bunga			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c. Royalti			0	0	0	0	0	0	0	0	0	296.680.000	0	0	296.680.000
	d. Hasil dan Penghasilan			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e. Sewa			366.773.225	389.566.716	182.705.525	692.881.188	253.197.925	182.398.100	538.732.000	255.209.330	610.358.295	318.382.825	279.334.850	588.782.159	4.578.324.111
	f. Jasa			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1) Jasa Teknik			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2) Jasa Manajemen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	802.121.919	0	61.000.000	863.121.919
	3) Jasa Konsultasi			3.800.000	3.800.000	363.856.900	45.550.000	52.800.000	4.000.000	109.538.550	281.277.050	129.959.400	207.479.800	45.542.900	12.153.300	1.779.407.000
	4) Jasa Lainnya			8.750.209.850	9.817.081.100	7.353.175.425	10.058.308.405	7.114.073.325	14.073.870.300	17.125.988.103	16.710.992.026	16.837.821.517	16.348.034.435	14.859.081.780	17.738.955.820	158.179.590.000
	JUMLAH OBJEK PPh PASAL 23			9.120.783.075	10.211.029.816	8.489.736.950	10.706.689.593	7.419.771.250	14.260.268.400	17.774.248.653	17.227.478.403	17.378.139.182	17.971.098.979	15.284.479.530	18.446.901.278	164.291.223.110
2	PAJAK TERUTANG															
	a. Dividen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b. Bunga			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c. Royalti			0	0	0	0	0	0	0	0	0	44.352.000	0	0	44.352.000
	d. Hasil dan Penghasilan			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e. Sewa			8.580.303	9.064.077	5.291.004	13.406.700	6.251.227	4.850.034	12.171.780	5.229.083	5.292.277	7.448.123	6.124.133	9.489.948	93.179.983
	f. Jasa			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1) Jasa Teknik			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2) Jasa Manajemen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.220.000	1.220.000
	3) Jasa Konsultasi			76.000	76.000	18.077.120	910.000	1.050.000	80.000	2.190.571	5.225.541	2.599.188	4.149.596	910.858	243.206	35.588.140
	4) Jasa Lainnya			177.522.857	197.461.190	149.522.048	201.550.595	144.258.503	283.083.750	322.385.311	308.559.254	287.289.316	292.923.759	280.586.196	314.152.068	2.959.296.485
	PPH PASAL 23 TERUTANG			186.178.106	206.601.873	172.881.873	215.867.756	161.569.730	288.013.784	330.747.672	319.013.878	285.180.781	348.873.518	287.621.191	325.085.882	3.133.036.588
Menurut SPT Wajib Pajak																
No	U R A I A N	TARIF	REF	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	GABUNGAN
1	OBJEK PAJAK															
	a. Dividen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b. Bunga			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c. Royalti			0	0	0	0	0	0	0	0	0	296.680.000	0	0	296.680.000
	d. Hasil dan Penghasilan			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e. Sewa			366.773.225	389.566.716	182.705.525	692.881.188	253.197.925	182.398.100	538.732.000	255.209.330	610.358.295	318.382.825	279.334.850	588.782.159	4.578.324.111
	f. Jasa			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1) Jasa Teknik			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2) Jasa Manajemen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3) Jasa Konsultasi			3.800.000	3.800.000	363.856.900	45.550.000	52.800.000	4.000.000	109.538.550	281.277.050	129.959.400	207.479.800	45.542.900	12.153.300	1.779.407.000
	4) Jasa Lainnya			8.750.209.850	9.817.081.100	7.353.175.425	10.058.308.405	7.114.073.325	14.073.870.300	17.125.988.103	16.710.992.026	16.837.821.517	16.348.034.435	14.859.081.780	17.738.955.820	158.179.590.000
	JUMLAH OBJEK PPh PASAL 23			9.120.783.075	10.211.029.816	8.489.736.950	10.706.689.593	7.419.771.250	14.260.268.400	17.774.248.653	17.227.478.403	17.378.139.182	17.971.098.979	15.284.479.530	18.446.901.278	164.291.223.110
2	PAJAK TERUTANG															
	a. Dividen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b. Bunga			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c. Royalti			0	0	0	0	0	0	0	0	0	44.352.000	0	0	44.352.000
	d. Hasil dan Penghasilan			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e. Sewa			8.580.303	9.064.077	5.291.004	13.406.700	6.251.227	4.850.034	12.171.780	5.229.083	5.292.277	7.448.123	6.124.133	9.489.948	93.179.983
	f. Jasa			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1) Jasa Teknik			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2) Jasa Manajemen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.220.000	1.220.000
	3) Jasa Konsultasi			76.000	76.000	18.077.120	910.000	1.050.000	80.000	2.190.571	5.225.541	2.599.188	4.149.596	910.858	243.206	35.588.140
	4) Jasa Lainnya			177.522.857	197.461.190	149.522.048	201.550.595	144.258.503	283.083.750	322.385.311	308.559.254	287.289.316	292.923.759	280.586.196	314.152.068	2.959.296.485

Pada Gambar 3.153 merupakan rekapitulasi PPh Pasal 23 yang dibedakan perhitungannya berdasarkan Pemeriksa dan Wajib Pajak. Pada periode Januari perhitungan atas sewa berdasarkan pemeriksa terdapat jumlah penghasilan bruto Rp 366.773.225 seperti nomor 4 dan jumlah PPh yang dipotong sebesar Rp 8.580.303 seperti nomor 5.

Berdasarkan perhitungan Wajib Pajak terdapat jumlah penghasilan bruto Rp 366.773.225 seperti nomor 6 dan jumlah PPh yang dipotong sebesar Rp 8.580.303 seperti nomor 7. Jika sudah maka menggabungkan jumlah penghasilan bruto dan pajak yang dipotong dari periode Januari pada perhitungan pemeriksa terdapat jumlah penghasilan bruto sebesar Rp 4.576.324.111 dan pajak yang terutang Rp 93.179.963 serta perhitungan Wajib Pajak terdapat jumlah penghasilan bruto sebesar Rp 4.576.324.111 dan pajak yang terutang Rp 93.179.963 hingga Desember.

4. Jika sudah dilakukan rekapitulasi maka terdapat *file excel* yang didalamnya sudah terdapat format kertas kerja maka yang dapat dilakukan yaitu membuat rumus agar antara rekapitulasi dan *file* kertas kerja dapat saling *melink*.

Gambar 3. 154 Kertas Kerja Pemeriksaan

KERTAS KERJA PEMERIKSAAN					
PPH Pasal 23		Nama	TO JITA ASTRA FINANCIAL		
		NPWP	01.657.398-6.082.000		
		Masa dan Th. Pajak	Januari - Desember 2020		
No	URAIAN	Ref.	M E N U R U T		KOREKSI (Rp)
			SPT / WP (Rp)	PEMERIKSA (Rp)	
1	OBJEK PAJAK				
a.	Dividen		0	0	0
b.	Bunga		0	0	0
c.	Royalti		295.690.000	295.690.000	0
d.	Hadiah dan Penghargaan		0	0	0
e.	Sewa		4.576.324.111	4.576.324.111	0
f.	Jasa		0	0	0
1)	Jasa Teknik		0	0	0
2)	Jasa Manajemen		863.121.914	863.121.914	0
3)	Jasa Konsultasi		1.779.407.000	1.779.407.000	0
4)	Jasa Lainnya		156.776.690.080	156.776.690.080	0
	JUMLAH OBJEK PPH PASAL 23		164.291.223.110	164.291.223.110	0
2	PAJAK TERUTANG				
a.	Dividen		0	0	0
b.	Bunga		0	0	0
c.	Royalti		44.352.000	44.352.000	0
d.	Hadiah dan Penghargaan		0	0	0
e.	Sewa		93.179.963	93.179.963	0
f.	Jasa		0	0	0
1)	Jasa Teknik		0	0	0
2)	Jasa Manajemen		1.220.000	1.220.000	0
3)	Jasa Konsultasi		35.598.140	35.598.140	0
4)	Jasa Lainnya		2.959.296.495	2.959.296.495	0
	PPH PASAL 23 TERUTANG		3.133.636.598	3.133.636.598	0
3	KREDIT PAJAK				
			3.133.636.598	0	-3.133.636.598
4	PPH PASAL 23 YANG KURANG / (LEBIH) DIBAYAR				
			0	3.133.636.598	3.133.636.598
5	SANKSI ADMINISTRASI				
a.	SKPKB				
a.1.	Bunga Pasal 13 (2) KUP			0	0
a.2.	Kenaikan Pasal 13 (3) KUP			0	0
a.3.	Bunga Pasal 13 (5) KUP			0	0
a.4.	Kenaikan Pasal 13A KUP			0	0
a.5.	Kenaikan Pasal 17C (5) KUP			0	0
a.6.	Kenaikan Pasal 17D (5) KUP			0	0
a.7.	Bunga Pasal 18 (4) UU PPh			0	0
a.8.	Kenaikan Pasal 18 (3) UU PPh			0	0
4	PPH PASAL 23 YANG KURANG / (LEBIH) DIBAYAR				
				3.133.636.598	-3.133.636.598
5	SANKSI ADMINISTRASI				
a.	SKPKB				
a.1.	Bunga Pasal 13 (2) KUP			0	0
a.2.	Kenaikan Pasal 13 (3) KUP			0	0
a.3.	Bunga Pasal 13 (5) KUP			0	0
a.4.	Kenaikan Pasal 13A KUP			0	0
a.5.	Kenaikan Pasal 17C (5) KUP			0	0
a.6.	Kenaikan Pasal 17D (5) KUP			0	0
a.7.	Bunga Pasal 18 (4) UU PPh			0	0
a.8.	Kenaikan Pasal 18 (3) UU PPh			0	0
b.	SKPKBT				
b.1.	Kenaikan Pasal 15 (2) KUP			0	0
b.2.	Bunga Pasal 15 (4) KUP			0	0
	JUMLAH SANKSI ADMINISTRASI			0	0
6	PPH PASAL 23 YANG MASIH HARUS / (LEBIH) DIBAYAR				
			0	3.133.636.598	3.133.636.598
7	STP				
a.	Denda Pasal 7 KUP			0	0
b.	Bunga Pasal 8 (2a) KUP			0	0
c.	Bunga Pasal 9 (2a) KUP			0	0
d.	Bunga Pasal 14 (3) KUP			0	0
e.	Bunga Pasal 14 (3) KUP			0	0
f.	Bunga Pasal 19 (3) KUP			0	0
	JUMLAH STP			0	0

Pada Gambar 3.154 merupakan kertas kerja pemeriksaan yang datanya diperoleh dari jumlah rekapitulasi PPh Pasal 23 perhitungan pemeriksa dan Wajib Pajak. Pada perhitungan pemeriksa terdapat jumlah penghasilan bruto sebesar Rp 4.576.324.111 dan pajak yang terutang Rp 93.179.963 serta perhitungan Wajib Pajak terdapat jumlah

penghasilan bruto sebesar Rp 4.576.324.111 dan pajak yang terutang Rp 93.179.963.

- Melakukan tugas hingga satu tahun pajak tiap cabangnya.

3.3.1.11 Rumah Sakit RS

a) Melakukan Rekapitulasi Aset dan Liabilitas dari *General Ledger*

Dokumen yang diperlukan dalam melakukan rekapitulasi *general ledger* adalah *file excel* yang diberikan oleh pembimbing lapangan yang berisikan nama akun aset dan liabilitas. Proses melakukan rekapitulasi aset dan liabilitas dari *general ledger* dilakukan untuk periode 2019 atas 2 cabang rumah sakit. Berikut merupakan langkah dalam melakukan rekapitulasi aset dan liabilitas dari *general ledger*:

- Menerima *file excel* dari pembimbing lapangan.

Gambar 3. 155 Data Tabel General Ledger

1	Monti	JENam	AccCod	AccDesc	CCod	CCDes	GLLineDes	NewGLAmount	I	J
2	Jan-19	42186031	11010101	Cash on Hand - Central Cash	0	Non-Depa PU000072428		-119.698,00		
3	Jan-19	42186950	11010101	Cash on Hand - Central Cash	0	Non-Depa Pelunasan PU		-13.419,00		
4	Jan-19	42187845	11010101	Cash on Hand - Central Cash	0	Non-Depa Pelunasan R1		-75.000,00		
5	Jan-19	42188085	11010101	Cash on Hand - Central Cash	0	Non-Depa Pelunasan PU		-27.777,00		
6	Jan-19	42191155	11010101	Cash on Hand - Central Cash	0	Non-Depa 190201 / 1-Bu		80.000.000,00		
7	Jan-19	42191158	11010101	Cash on Hand - Central Cash	0	Non-Depa 1901138 / 1-E		70.000.000,00		
8	Jan-19	42191161	11010101	Cash on Hand - Central Cash	0	Non-Depa 190228 / 1-Bu		690.000,00		
9	Jan-19	42191162	11010101	Cash on Hand - Central Cash	0	Non-Depa 001-022(31/1		59.661.107,00		
10	Jan-19	42191163	11010101	Cash on Hand - Central Cash	0	Non-Depa 023-042(2/1/		-56.316.210,00		
11	Jan-19	42191164	11010101	Cash on Hand - Central Cash	0	Non-Depa 201901001 /		7.500.000,00		
12	Jan-19	42191165	11010101	Cash on Hand - Central Cash	0	Non-Depa 043-065(3/1/		-5.623.800,00		
13	Jan-19	42191165	11010101	Cash on Hand - Central Cash	0	Non-Depa 201812031 /		-1.400.000,00		
14	Jan-19	42191167	11010101	Cash on Hand - Central Cash	0	Non-Depa 201901002 /		1.896.600,00		
15	Jan-19	42191168	11010101	Cash on Hand - Central Cash	0	Non-Depa 201901003 /		2.064.500,00		
16	Jan-19	42191169	11010101	Cash on Hand - Central Cash	0	Non-Depa 201901004 /		1.569.180,00		
17	Jan-19	42191170	11010101	Cash on Hand - Central Cash	0	Non-Depa 066-120(4,5,6		-79.437.946,00		
18	Jan-19	42191171	11010101	Cash on Hand - Central Cash	0	Non-Depa 201901005 /		9.000.000,00		
19	Jan-19	42191172	11010101	Cash on Hand - Central Cash	0	Non-Depa 201901PC009		500.000,00		
20	Jan-19	42191173	11010101	Cash on Hand - Central Cash	0	Non-Depa 121-146(07/1		-38.920.902,00		

Sumber: Dokumentasi Perusahaan

Pada Gambar 3.155 nomor 1 terdapat huruf A yang menandakan jika akun tersebut merupakan bagian dari Aset dan L yang menandakan jika akun tersebut merupakan bagian dari Liabilitas.

2. Membuat *file excel* baru yang berisikan tabel (bulan, kode akun, deskripsi akun, kategori akun, dan jumlah).

Gambar 3. 156 Format Tabel General Ledger

Month	JENAME	AccCode	AccDesc	CCCode	CCDesc	GLLineDesc	NewGLAmou
Jan-19	42186031 Receipt	11010101	Cash on Hand - C	0	Non-Department	PU0000724287,PI	-119.698,00
Jan-19	42186950 Receipt	11010101	Cash on Hand - C	0	Non-Department	Pelunasan PU000	-13.419,00
Jan-19	42187845 Receipt	11010101	Cash on Hand - C	0	Non-Department	Pelunasan R1812	-75.000,00
Jan-19	42188085 Receipt	11010101	Cash on Hand - C	0	Non-Department	Pelunasan PU000	-27.777,00
Jan-19	42191156 Misc R	11010101	Cash on Hand - C	0	Non-Department	190201 / 1-Bukof	80.000.000,00
Jan-19	42191158 Misc R	11010101	Cash on Hand - C	0	Non-Department	1901138 / 1-Bukc	70.000.000,00
Jan-19	42191156 Misc R	11010211	Bukopin PU Acc N	0	Non-Department	190201 / 1-Bukof	-80.000.000,00
Jan-19	42191158 Misc R	11010211	Bukopin PU Acc N	0	Non-Department	1901138 / 1-Bukc	-70.000.000,00

Sumber: Dokumentasi Perusahaan

3. Melakukan rekapitulasi dari *file* pembimbing lapangan dengan tabel yang telah dibuat berdasarkan urutan kode akun.

Gambar 3. 157 Rekapitulasi General Ledger

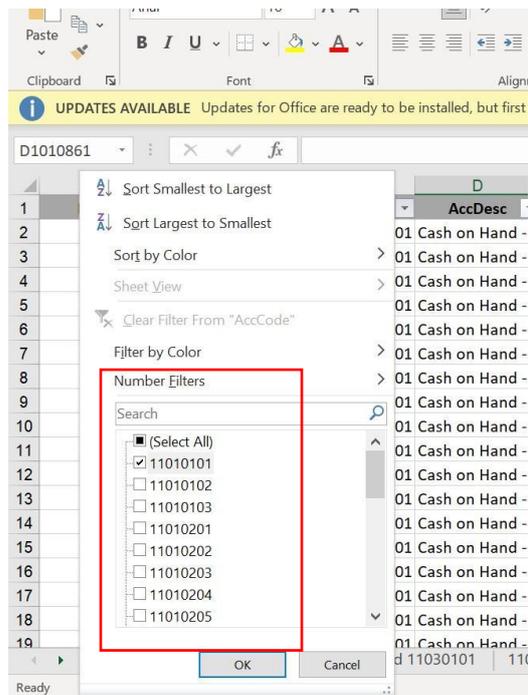
Month	JENAME	AccCode	AccDesc	CCCode	CCDesc	GLLineDesc	NewGLAmou	
Jan-19	42186031 Receipt	11010101	Cash on Hand - C	0	Non-Department	PU0000724287,PI	-119.698,00	
Jan-19	42186950 Receipt	11010101	Cash on Hand - C	0	Non-Department	Pelunasan PU000	-13.419,00	
Jan-19	42187845 Receipt	11010101	Cash on Hand - C	0	Non-Department	Pelunasan R1812	-75.000,00	
Jan-19	42188085 Receipt	11010101	Cash on Hand - C	0	Non-Department	Pelunasan PU000	-27.777,00	
Jan-19	42191156 Misc R	2	11010101	Cash on Hand - C	0	Non-Department	190201 / 1-Bukof	80.000.000,00
Jan-19	42191158 Misc R	11010101	Cash on Hand - C	0	Non-Department	1901138 / 1-Bukc	70.000.000,00	
Jan-19	42191156 Misc R	11010211	Bukopin PU Acc N	0	Non-Department	190201 / 1-Bukof	-80.000.000,00	
Jan-19	42191158 Misc R	11010211	Bukopin PU Acc N	0	Non-Department	1901138 / 1-Bukc	-70.000.000,00	

Sumber: Dokumentasi Perusahaan

Pada Gambar 3.157 merupakan hasil rekapitulasi dari *file general ledger* yang terdapat pada gambar 3.155. Pada saat melakukan rekapitulasi hal utama yang harus dilakukan adalah mengurutkan kode akun seperti gambar 3.155 nomor 2, untuk memudahkan dalam mengelompokkan

kode akun maka terlebih dahulu menggunakan filter agar tidak teracak seperti gambar 3.158.

Gambar 3. 158 Filter Kode Akun



Pada Gambar 3.158 merupakan cara untuk memudahkan dalam mengurutkan kode akun, setelah melakukan *check list* pada salah satu kode akun maka dapat mengcopy data tersebut sehingga akan muncul satu kode akun yang sama misalnya 11010101 seperti gambar 3.157 nomor 2. Setelah 1 kode akun bagian Aset habis maka bergantian dengan bagian Liabilitas setelahnya baru bisa pindah ke kode akun ke 2.

4. Melakukan rekapitulasi hingga kode akun habis

3.3.1.12 PT NS

a) Melakukan Rekapitulasi PPN

Dokumen yang diperlukan dalam melakukan rekapitulasi adalah Bukti Penerimaan Elektronik, Bukti Penerimaan Negara, dan dokumen terkait dengan SPT PPN. Proses rekapitulasi PPN dilakukan untuk periode Januari dan Maret 2021. Berikut merupakan proses rekapitulasi PPN:

1. Mendapatkan dokumen dari pembimbing lapangan terkait SPT Masa PPN klien seperti gambar 3.147 dan 3.148.

Gambar 3. 159 Dokumen SPT Masa PPN PT NS

DEKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN		FORMULIR 1111 AB (Bila tidak ada transaksi tidak perlu diampirkan)		
NAMA/NPWP : PT NS 33.333.333.3-033.000		MASA : 03 - 03 - 2021 (mm-mm-yyyy)		
		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)
I. Rekapitulasi Penyerahan				
A. Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP		0,00	2	0,00
B. Penyerahan Dalam Negeri		1	5.000.000,00	500.000,00
1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung				0,00
2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung		0,00		0,00
C. Rincian Penyerahan Dalam Negeri				
1. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri (jumlah: IB.1 dengan Faktur Pajak Kode 01, 04, 05 dan 09 ditambah IB.2)		1	3.261.059.068,00	326.105.906,00
2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya dipungut oleh Pemungut PPN (jumlah: IB.1 dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03)		2	0,00	0,00
3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya tidak dipungut (jumlah: IB.1 dengan Faktur Pajak Kode 07)		3	0,00	0,00
4. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM (jumlah: IB.1 dengan Faktur Pajak Kode 08)		4	0,00	0,00
II. Rekapitulasi Perolehan				
A. Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean, dan Pemanfaatan JKP dan Luar Daerah Pabean yang PM-nya Dapat Dikreditkan		B.1	0,00	0,00
B. Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri yang PM-nya Dapat Dikreditkan		B.2	2.493.073.019,00	249.307.299,00
C. Impor atau Pemanfaatan yang PM-nya Tidak Dapat Dikreditkan ditambah Impor atau Perolehan yang Mendapat Fasilitas		B.3	0,00	0,00
D. Jumlah Perolehan (II.A + II.B + II.C)			2.493.073.019,00	249.307.299,00
III. Penghitungan PM Yang Dapat Dikreditkan				
A. Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan (II.A + II.B)		5		3
B. Pajak Masukan lainnya				
1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya			360.450.704,00	
2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak 03 - 2020 (mm-yyyy)			45.572.500,00	4
3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan			0,00	
4. Jumlah (III.B.1 + III.B.2 + III.B.3)			406.023.204,00	
C. Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan (III.A + III.B.4)		5	655.330.503,00	

DAFTAR EKSPOR BKP BERWUJUD, BKP TIDAK BERWUJUD, DAN/ATAU JKP		FORMULIR 1111 A1 (Bila tidak ada transaksi tidak perlu diampirkan)		
NAMA/NPWP : PT NS 33.333.333.3-033.000		MASA : 03 - 03 - 2021 (mm-mm-yyyy)		
No.	Nomor	Dokumen Tertentu	DPP (Rupiah)	Keterangan
		Berwujud/Penerima JKP		
JUMLAH			A1 >	

Sumber: Dokumentasi Perusahaan

Gambar 3. 160 Dokumen SPT Masa PPN PT NS

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)

FORMULIR 1111

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NAMA PKP : PT NS
ALAMAT : AKAF...
TELEPON : 0214203010

NPAW : 33.333.333.3-033.000
MASA : 12
KLU : UZUN

Berilah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam yang sesuai yang sesuai

Jumlah Lembar SPT (Rencana Lembar) : 12
Batas-batas : 12

Pembetulan No : 0 (nol) Wajib PPhBM

I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA

A. Terutang PPN:

No	DPP	PPN
1. Ekspor	Rp. 0,00	Rp. 0,00
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp. 5.000.000,00	Rp. 500.000,00
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	Rp. 0,00	Rp. 0,00
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp. 0,00	Rp. 0,00
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	Rp. 0,00	Rp. 0,00
Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)	Rp. 5.000.000,00	Rp. 500.000,00

B. Tidak Terutang PPN
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)

II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR

A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2) Rp. 500.000,00

B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama Rp. 0,00

C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp. 655.330.503,00

D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C) Rp. -155.330.503,00

E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp. 0,00

F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E) Rp. 0,00

G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal (dd-mm-yyyy) NTPN :
H. PPN lebih bayar pada :
1.1 Bulir II.D (Disi dalam hal SPT bukan Pembetulan) 1.2 Bulir II.D atau Bulir II.F (Disi dalam hal SPT Pembetulan)

Oleh : 2.1 PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau 2.2 Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN
diminta untuk : 3.1 Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau Dikompensasikan ke Masa Pajak (mm-yyyy)
3.2 Dikembalikan (Restitusi)

Khusus Restitusi untuk PKP :
 Pasal 17C KUP dilakukan dengan : Prosedur Biasa atau Pengembalian Pendahuluan
atau Pasal 17D KUP dilakukan dengan : Prosedur Biasa atau Pengembalian Pendahuluan
atau Pasal 9 ayat (5c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan

III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp. 0,00
B. PPN Terutang : Rp. 0,00
C. Dilunasi Tanggal (dd-mm-yyyy) NTPN :

IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI

A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp. 0,00
B. Dilunasi Tanggal (dd-mm-yyyy) NTPN :

V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

A. PPhBM yang harus dipungut sendiri Rp. 0,00
B. PPhBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama Rp. 0,00
C. PPhBM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B) Rp. 0,00
D. PPhBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp. 0,00
E. PPhBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D) Rp. 0,00
F. PPhBM kurang bayar dilunasi tanggal (dd-mm-yyyy) NTPN :

VI. KELENGKAPAN SPT

Formulir 1111 AB Formulir 1111 A2 Formulir 1111 B2 SSP PPN lembar Surat Kuasa Khusus
 Formulir 1111 A1 Formulir 1111 B1 Formulir 1111 B3 SSP PPhBM lembar lembar

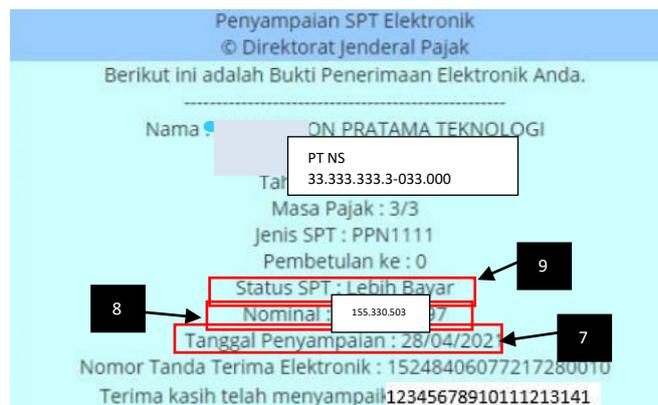
Perhatian : Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, apabila SPT Masa yang Sudah Sampaikan oleh Wajib Pajak atau Wajib Pajak Potensial yang bersangkutan telah dibetulkan dengan SPT Masa yang benar, maka SPT Masa yang bersangkutan akan dibatalkan.

6

Sumber: Dokumentasi Perusahaan

2. Menerima Bukti Penerimaan Elektronik dari pembimbing lapangan seperti gambar 3.149.

Gambar 3. 161 Bukti Penerimaan Elektronik PT NS



Sumber: Dokumentasi Perusahaan

3. Menerima *file Excel* yang didalamnya terdapat format *table* (masa, pajak keluaran, pajak masukan, kompensasi masa pajak sebelumnya, jumlah kompensasi, kurang bayar/ lebih bayar, tanggal lapor, tanggal bayar, dan NTPN) yang digunakan untuk nantinya akan di *input* berdasarkan dokumen yang diberikan oleh klien seperti gambar 3.100.

Penerimaan Negara jika tersedia. Langkah yang dilakukan pada masa Maret yaitu:

- 1) Mengisi kolom tiap uraian pada bagian DPP yaitu kolom uraian A.2 sebesar Rp 5.000.000.000, penyerahan PPN yang dipungut sendiri sebesar Rp 5.000.000.000, dan B.2 sebesar Rp 2.493.073.019 yang diperoleh dari SPT Masa PPN seperti nomor 1.
- 2) Mengisi kolom uraian pada bagian PPN yaitu kolom uraian A.2 sebesar Rp 500.000.000, penyerahan PPN yang dipungut sendiri sebesar Rp 500.000.000, dan B.2 sebesar Rp 249.073.019 yang diperoleh dari SPT Masa PPN seperti nomor 2.
- 3) Mengisi kolom kompensasi masa pajak sebelumnya sebesar Rp 360.450.704 yang diperoleh dari SPT Masa PPN seperti nomor 3.
- 4) Mengisi kolom jumlah kompensasi sebesar Rp 45.572.500 yang diperoleh dari SPT Masa PPN seperti nomor 4.
- 5) Mengisi kolom masa pajak kompensasi yaitu bulan Maret 2020 yang diperoleh dari SPT Masa PPN seperti nomor 5.
- 6) Mengisi kolom KB/LB sebesar -Rp 155.330.503 yang diperoleh dari SPT Masa PPN seperti nomor 6.
- 7) Jika terdapat KB/LB pembetulan maka diisi seperti SPT Masa PPN kotak biru.

- 8) Mengisi kolom tanggal lapor yaitu 28 April 2021 yang diperoleh dari Bukti Penerimaan Elektronik nomor 7.
- 9) Mengisi kolom nominal yaitu Rp 155.330.503 yang diperoleh dari Bukti Penerimaan Elektronik nomor 8.
- 10) Mengisi kolom status SPT LB yang diperoleh dari Bukti Penerimaan Elektronik nomor 9.

5. Melakukan rekapitulasi hingga masa yang ditentukan.

b) Melakukan Rekapitulasi Bukti Potong PPh Pasal 15

Dokumen yang diperlukan dalam melakukan rekapitulasi bukti potong PPh Pasal 15 yaitu dokumen terkait bukti potong PPh Pasal 15 dan format *excel* untuk melakukan rekapitulasi. Proses rekapitulasi bukti potong PPh Pasal 15 dilakukan untuk periode 2018. Berikut adalah proses melakukan rekapitulasi bukti potong PPh Pasal 15:

1. Menerima format *excel* dari pembimbing lapangan.

Gambar 3.163 Format Excel Rekapitulasi Bukti Potong PPh Pasal 15

2018									
No	NPWP	Nama	Masa	Bukti Pemotongan		Nilai Obyek Pajak	PPH yang Dipotong	Jenis Transaksi	
				Nomor	Tanggal				
1	9F66666666666666	PT SEMANGAT	2	12/PPH15/PN/34	28/02/2018	1.822.817.400	21.873.809		
2			1						
3			1						

Sumber: Dokumentasi Perusahaan

Pada Gambar 3.163 merupakan format tabel *excel* yang terdiri dari kolom nomor, NPWP, Nama, Masa, Bukti Pemotong yang terdiri dari Nomor Bupot dan Tanggal, Nilai Objek Pajak, PPh yang Dipotong,

dan Jenis Transaksi yang akan diisi berdasarkan Bukti Potong PPh Pasal 15.

2. Menerima dokumen terkait bukti potong PPh Pasal 15.

Gambar 3. 164 Bukti Potong PPh Pasal 15

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
KPP PRATAMA BANJARMASIN

**BUKTI PEMOTONGAN PPh
ATAS IMBALAN YANG DIBAYARKAN/TEBUTANG
KEPADA PERUSAHAAN PELAYANAN DALAM NEGERI
(FINAL)**

Nomor: 12/PPH15/PN/34 4

NPWP : 12.345.567.8-009-000
Nama WP : PT NS
Alamat : JL SERULING, JAKARTA UTARA

Jumlah Bruto Imbalan (1)	Tarif (2)	PPh yang dipotong (3)
Rp. 1.822.817.400	1,20 %	Rp. 21.873.809

Terbilang: Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Sembilan Ratus

Banjarmasin, 28 Februari 2018 5
Pemotong Pajak,

NPWP : 6F666666F66666F6
Nama WP : PT SEMANGAT 3

Perhatian:
1. Jumlah Pajak Penghasilan atau Imbalan yang dibayarkan/tebutang kepada Perusahaan Pelayanan Dalam Negeri yang dipotong di atas bukan merupakan kredit pajak dalam bentuk pemotongan (SPT) Tahunan PPh.
2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

DIREKTUR UTAMA

Sumber: Dokumentasi Perusahaan

Pada Gambar 3.164 merupakan gambar bukti potong PPh Pasal 15 PT NS periode Februari 2018 data yang diperlukan untuk melakukan rekapitulasi adalah NPWP, Nama, Masa, Bukti Pemotong yang terdiri dari Nomor Bupot dan Tanggal, Nilai Objek Pajak, PPh yang Dipotong, dan Jenis Transaksi.

3. Menginput NPWP, nama pemotong pajak, masa pajak, nomor surat bukti potong, tanggal bukti potong, nilai objek pajak, dan PPh yang

dipotong. Pada Gambar 3.73 merupakan hasil rekapitulasi Bukti Potong PPh Pasal 15. Berikut merupakan langkah merekapitulasi Bukti Potong PPh Pasal 15 periode Februari 2018:

- 1) Mengisi kolom NPWP dengan 6F666666FF66F6FF.
- 2) Mengisi kolom Nama Pemotong Pajak yaitu PT Semangat.
- 3) Mengisi kolom Masa yaitu bulan 2 atau Februari.
- 4) Mengisi Nomor Bukti Potong yaitu 12/PPH15/PN/34 dan mengisi Tanggal Bukti Potong dengan 28 Februari 2018.
- 5) Mengisi nilai objek pajak Rp 1.822.817.400.
- 6) Mengisi PPh yang Dipotong Rp 21.873.809.

4. *Menginput* hingga satu periode.

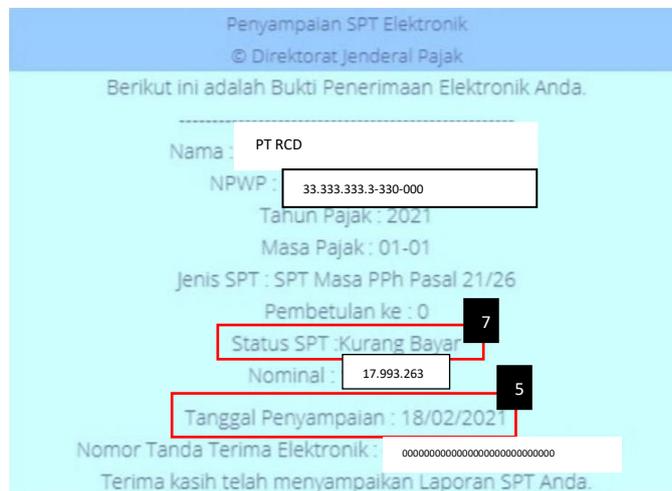
3.3.1.13 PT RCD

a) Melakukan Rekapitulasi SPT PPh Pasal 21

Dokumen yang dibutuhkan dalam merekapitulasi PPh Pasal 21 yaitu Bukti Penerimaan Elektronik (BPE), Bukti Penerimaan Negara, dan dokumen yang berkaitan dengan SPT Masa PPh Pasal 21. Proses melakukan rekapitulasi SPT PPh Pasal 21 dilakukan untuk periode Januari sampai April 2021. Berikut adalah cara melakukan rekapitulasi PPh Pasal 21:

1. Menerima dokumen terkait SPT Masa PPh Pasal 21 klien baik normal maupun pembetulan (Formulir 1721) dari pembimbing lapangan seperti gambar 3.165.

Gambar 3. 167 Dokumen Bukti Penerimaan Elektronik PT RCD



Sumber: Dokumentasi Perusahaan

4. Menerima *file Excel* yang didalamnya terdapat format *table* (masa, status pembedulan, jumlah penerima penghasilan, penghasilan bruto, jumlah penerima penghasilan, jumlah pajak yang dipotong, total pajak yang disetorkan, tanggal lapor, tanggal bayar, dan status SPT) dan melakukan *input* SPT Masa PPh Pasal 21 baik status normal atau pembedulan. Pada kolom status pembedulan, massa, jumlah penerima penghasilan, penghasilan bruto, dan jumlah pajak yang dipotong angkanya berasal dari Formulir 1721 SPT Masa PPh Pasal 21. Kolom tanggal lapor dan status SPT angkanya diperoleh dari Bukti Penerimaan Elektronik. Sedangkan untuk kolom tanggal bayar diperoleh dari Bukti Penerimaan Negara. Langkahnya sebagai berikut:

Masa Pajak Januari 2021 SPT PPh 21 Normal maka proses penginputan sebagai berikut:

- 1) Jumlah tiap penerima penghasilan sebesar 22 diperoleh dari SPT Masa PPh Pasal 21 seperti nomor 1.
- 2) Jumlah penghasilan bruto sebesar Rp 273.689.316 diperoleh dari SPT Masa PPh Pasal 21 seperti nomor 2.
- 3) Jumlah pajak yang dipotong sebesar Rp 17.993.263 diperoleh dari SPT Masa PPh Pasal 21 seperti nomor 3.
- 4) Total pajak yang disetor sebesar Rp 17.993.263 diperoleh dari SPT Masa PPh Pasal 21 seperti nomor 4.
- 5) Tanggal lapor yaitu 18 Februari 2021 diperoleh dari Bukti Penerimaan Elektronik seperti nomor 5.
- 6) Tanggal bayar yaitu 15 Februari 2021 diperoleh dari Bukti Penerimaan Negara seperti nomor 6.
- 7) Status SPT Kurang Bayar diperoleh dari Bukti Penerimaan Elektronik seperti nomor 7.

Gambar 3. 168 Format Tabel dalam Pengisian

Rekapitulasi PPh Pasal 21 PT RCD

MASA	STATUS PEMBETULAN	Penerima Pengh.		Pegawai Tetap		Penerima Pengh.		Pegawai Tidak Tetap		Penerima Pengh.		Tenaga Ahli		Penerima Pengh.		Bukan Pegawai Berkecukupan		Penerima Pengh.		Bukan Pegawai Tidak Berkecukupan		TOTAL
		Jumlah	Penghasilan Bruto	Jumlah	Penghasilan Bruto	Jumlah	Penghasilan Bruto	Jumlah	Penghasilan Bruto	Jumlah	Penghasilan Bruto	Jumlah	Penghasilan Bruto	Jumlah	Penghasilan Bruto	Jumlah	Penghasilan Bruto	Jumlah	Penghasilan Bruto	Jumlah	Penghasilan Bruto	
JANUARI	NORMAL	22	275.689.316	44	17.400.000					34												610.047.213
FEBRUARI	NORMAL	22	295.552.345	44	19.726.348					30												546.374.121
MARET	NORMAL	23	362.553.544	9	5.752.288					41												698.455.870
APRIL	NORMAL	23	294.396.056	12	10.175.521					40												608.897.094
MAY	NORMAL																					
JUNI	NORMAL																					
JULI	NORMAL	1		2																		
AGUSTUS	NORMAL																					
SEPTEMBER	NORMAL																					
OCTOBER	NORMAL																					
NOVEMBER	NORMAL																					
DESEMBER	NORMAL																					
TOTAL		90	1.200.191.261	109	53.854.137					145												1.463.774.304

Jml Pajak Dipotong					TOTAL	Jumlah Penghasilan Bruto		TOTAL	Jml Pajak Dipotong		TOTAL	Total yang disetor	SPT MASA PPh21		STATUS SPT
Pegawai Tetap	Pegawai Tidak Tetap	Tenaga Ahli	Bukan Pegawai Berkecukupan	Bukan Pegawai Tidak		PESANGON	PENSIUN, TUNJANGAN		PESANGON	PENSIUN, TUNJANGAN			TGL. LABA	TGL. BAYAR	
15.993.263			2.000.000		17.993.263						17.928.742	18 Februari 2021	15 Feb 21	KH	
25.632.497			1.307.321		26.939.818						26.939.818	10 Masi 2021	09 Masi 2021	KH	
16.727.234			780.162		17.507.396						17.507.396	16 April 2021	08 April 2021	KH	
												10 Mei 2021	06 Mei 2021	KH	
73.670.206	48.718		4.970.941		78.689.865						78.689.865				

Sumber: Dokumentasi Perusahaan

- Melakukan rekapitulasi PPh Pasal 21 status normal dan pembetulan sampai dengan banyaknya dokumen terkait dengan SPT Masa PPh Pasal 21 yang telah diberikan oleh pembimbing lapangan (setahun atau tidak sampai setahun).

b) Melakukan Rekapitulasi SPT PPh Pasal 23

Dokumen yang dibutuhkan dalam merekapitulasi PPh Pasal 23 yaitu Bukti Penerimaan Elektronik (BPE), Bukti Penerimaan Negara, dan dokumen yang berkaitan dengan SPT Masa PPh Pasal 23 (formulir 1724). Proses melakukan rekapitulasi SPT PPh Pasal 23 dilakukan untuk periode Januari hingga Mei 2021 atas transaksi persewaan tanah dan bangunan dan jasa lain

yang telah dipotong PPh Pasal 21. Berikut adalah cara melakukan rekapitulasi PPh Pasal 23 masa Januari:

1. Mendapatkan dokumen terkait SPT Masa PPh Pasal 23 klien baik normal maupun pembetulan (Formulir 1724) dari pembimbing lapangan seperti gambar 3.119.

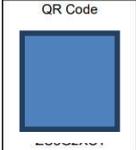
Gambar 3. 169 Dokumen SPT Masa PPh Pasal 23 PT RCD

The image shows a tax form titled 'SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26'. It includes fields for taxpayer identification (NPWP, name, address, phone, email), tax object details, and a table of tax calculations. The table has columns for 'NO', 'URAIAN', 'KODE OBJEK PAJAK', 'JUMLAH PENGHASILAN BRUTO', and 'JUMLAH PPh YANG DIPOTONG/DITR/Rp'. A red box highlights row 7, which shows a total amount of 10,900.00 and 160,000.00. A red arrow points from a box labeled '2' to this row. Below the table, there are sections for 'BAGIAN C. LAMPIRAN' and 'BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN'.

Sumber: Dokumentasi Perusahaan

2. Menerima Bukti Penerimaan Negara dari pembimbing lapangan

Gambar 3. 170 Dokumen Bukti Penerimaan Elektronik PT RCD

	<p>KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</p> <p>LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200 email : pengaduan@pajak.go.id ; informasi@pajak.go.id</p>
BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK (BPE)	
NOMOR TANDA TERIMA ELEKTRONIK : 33333333333333333333	
NPWP	33.333.333.3-330-000
Nama	PT RCD
Jenis Pajak	PPH2326
Pembetulan Ke-	0
Tanggal Terima	10-02-2021 5
Tahun Pajak	2021
Masa Pajak	1
	
Terima Kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda	

Sumber: Dokumentasi Perusahaan

3. Menerima Bukti Penerimaan Elektronik dari pembimbing lapangan

Gambar 3. 171 Dokumen Bukti Penerimaan Negara PT RCD

2/10/2021 <https://mib.bankmandiri.co.id/corp/front/billpayment.do?action=doPrintBillPayme>

Nomor Referensi Transaksi	:	
No. Ref Perkumpulan	:	
Dari Rekening	:	
Customer Reference Number	:	
To Institution	:	50012 Pajak/PNBP/C
BUKTI PENERIMAAN NEGARA	:	Penerimaan Pajak
Data Pembayaran	:	-
Tanggal dan Jam Bayar	:	10/02/2021 15:17:07
Tanggal Buku	:	11/02/21
Kode Cabang Bank	:	008
NTB	:	
NTPN	:	22222AAAAA222AA
STAN	:	
Data Setoran	:	
Kode Billing	:	
Nama Wajib Pajak	:	PT RCD
Alamat	:	
Nomor Objek Pajak	:	
Mata Anggaran	:	411124
Jenis Setoran	:	104
Masa Pajak	:	01012021
Nomor Ketetapan	:	00000000000000000000
Jumlah Setoran	:	Rp. 150.000
Mata Uang	:	IDR
Terbilang	:	
Keterangan	:	Informasi ini hasil cetak computer dan tidak memerlukan tanda tangan
NPWP	:	315782615451000
Daftar Pembayaran	:	00 TOTAL 150.000
Admin Bank	:	IDR
Total Bayar	:	IDR 150.000
Beneficiary Notification	:	
Notification Flag	:	Don't Send
Mode Instruksi	:	
Langsung	:	10-Feb-2021

Sumber: Dokumentasi Perusahaan

4. Menerima file Excel yang didalamnya terdapat format table (massa, status pembetulan, jasa yang berkaitan dengan PPh 23, total DPP, besarnya pajak PPh 23, tanggal bayar, NTPN, tanggal lapor dan status SPT) dan melakukan input SPT Masa PPh Pasal 23 baik status normal atau pembetulan. Pada kolom status pembetulan, massa, jasa yang berkaitan dengan PPh 23, total DPP, dan besarnya pajak PPh 23 angkanya berasal dari Formulir 1724 SPT Masa PPh Pasal 23. Kolom tanggal lapor dan status SPT angkanya diperoleh dari Bukti Penerimaan Elektronik. Sedangkan untuk kolom tanggal bayar dan

NTPN diperoleh dari Bukti Penerimaan Negara. Langkahnya sebagai berikut:

Masa Pajak Januari 2021 SPT PPh 23 Normal maka proses *penginputan* sebagai berikut:

- 1) Jumlah penghasilan bruto sebesar Rp 10.900.000 diperoleh dari SPT Masa PPh Pasal 23 seperti nomor 1.
- 2) Jumlah pajak yang dipotong sebesar Rp 150.000 diperoleh dari SPT Masa PPh Pasal 23 seperti nomor 2.
- 3) Total DPP diperoleh dari penjumlahan semua penerima penghasilan seperti nomor 3.
- 4) Jumlah Pajak Penghasilan PPh 21 sebesar Rp 150.000 diperoleh dari SPT Masa PPh 23 seperti nomor 4.
- 5) Tanggal bayar yaitu 10 Februari 2021 diperoleh dari Bukti Penerimaan Negara seperti nomor 5.
- 6) NTPN diperoleh dari Bukti Penerimaan Negara seperti nomor 6.
- 7) Tanggal lapor yaitu 10 Februari 2021 diperoleh dari Bukti Penerimaan Elektronik seperti nomor 7.
- 8) Tanggal lapor yaitu 10 Februari 2021 diperoleh dari Bukti Penerimaan Elektronik seperti nomor 8.

Gambar 3. 173 Bukti Penerimaan Negara PT RCD

BANK CENTRAL ASIA, TBK. BUKTI PENERIMAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN
PENERIMAAN PAJAK

1 DATA PEMBAYARAN

TANGGAL & JAM BAYAR : 10/02/2020 15:49:40

TANGGAL BUKU : 11/02/20

KODE CABANG BANK : 000000

NTB : 000011123445

NTPN : 22222AAAAA222AA

STAN : 320026

2

DATA SETORAN

KODE BILLING : 33.333.333.3-033-000

NPWP : PT RCD

NAMA WAJIB PAJAK : PT RCD

ALAMAT : PT RCD

NOMOR OBJEK PAJAK : PT RCD

MATA ANGGARAN : 411126

JENIS SETORAN : 100

MASA PAJAK : 01-01-2020

NO KETETAPAN : PT RCD

JUMLAH SETORAN : 20.000.000.000

TERBILANG : 20.000.000.000

MATA UANG : IDR

3

Sumber: Dokumentasi Perusahaan

4. Menerima file Excel dari pembimbing lapangan dengan format tabel (masa, tanggal bayar, NTPN, dan PPh terutang) yang sudah tersedia.

Gambar 3. 174 Format Tabel Rekapitulasi BPN PPh Pasal 25 PT RCD

PPH PASAL 25				
NO	MASA	TANGGL BAYAR	NTPN	PPH TERHUTANG
1	JANUARI	10 Februari 2020	22222AAAAA222AA	20.000.000.000
2	FEBRUARI	09 Maret 2020	2B222222BB22B2BB	-
3	MARET	08 April 2020	3C333333CC33C3CC	20.435.661.977
4	APRIL	-	-	-
5	MEI	-	-	-
6	JUNI	-	-	-
7	JULI	05 Agustus 2020	4D444444DD44D4DD	12.831.984.294
8	AGUSTUS	07 September 2020	5E555555EE55E5EE	12.831.984.294
9	SEPTEMBER	07 Oktober 2020	6F666666FF66F6FF	12.831.984.294
10	OKTOBER	06 November 2020	7G777777GG77G7GG	17.831.869.854
11	NOVEMBER	10 Desember 2020	8H888888HH88H8HH	17.831.869.854
12	DESEMBER	08 Januari 2020	9I999999II99I9II	17.831.869.854
JUMLAH				153.298.548.375

Sumber: Dokumentasi Perusahaan

Melakukan *input* data yang berasal dari Bukti Penerimaan Negara seperti gambar 3.126. Langkah yang dilakukan pada masa Januari yaitu:

- 1) Mengisi tanggal bayar yaitu 10 Februari 2020.
 - 2) Mengisi NTPN yaitu 22222AAAAA222AAA.
 - 3) Mengisi jumlah setoran yaitu Rp 20.000.000.000.
5. Melakukan rekapitulasi PPh Pasal 25 hingga masa yang ditentukan.

d) Melakukan Rekapitulasi PPN

Dokumen yang diperlukan dalam melakukan rekapitulasi adalah Bukti Penerimaan Elektronik, Bukti Penerimaan Negara, dan dokumen terkait dengan SPT PPN. Proses rekapitulasi PPN dilakukan untuk periode Januari dan Maret 2021. Berikut merupakan proses rekapitulasi PPN:

1. Mendapatkan dokumen dari pembimbing lapangan terkait SPT Masa PPN klien seperti gambar 3.175 dan 3.176.

Gambar 3. 175 Dokumen SPT Masa PPN PT RCD

DEKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN		FORMULIR 1111 AB (Bila tidak ada transaksi tidak perlu diampirkan)		
NAMA/NPWP : PT RCD NPWP : 33.333.333.3-033.000		MASA : 03 - 03 - 2021 (mm-mm-yyyy)		
		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)
I. Rekapitulasi Penyerahan				
A. Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP				
A.1		0,00	0,00	0,00
B. Penyerahan Dalam Negeri				
1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung		6.000.000,00	600.000,00	0,00
2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung		0,00	0,00	0,00
C. Rincian Penyerahan Dalam Negeri				
1. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri (jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 01, 04, 05 dan 09 ditambah I.B.2)		3.261.059.068,00	326.105.906,00	0,00
2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya dipungut oleh Pemungut PPN (jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03)		0,00	0,00	0,00
3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya tidak dipungut (jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 07)		0,00	0,00	0,00
4. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM (jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 08)		0,00	0,00	0,00
II. Rekapitulasi Perolehan				
A. Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean, dan Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean yang PM-nya Dapat Dikreditkan				
A.1		0,00	0,00	0,00
B. Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri yang PM-nya Dapat Dikreditkan				
B.1		2.493.073.019,00	249.307.299,00	0,00
C. Impor atau Perolehan yang PM-nya Tidak Dapat Dikreditkan dan/atau Impor atau Perolehan yang Mendapat Fasilitas				
C.1		0,00	0,00	0,00
D. Jumlah Perolehan (II.A + II.B + II.C)		2.493.073.019,00	249.307.299,00	0,00
III. Penghitungan PM yang Dapat Dikreditkan				
A. Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan (II.A + II.B)			249.307.299,00	
B. Pajak Masukan Lainnya				
1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya			360.450.704,00	
2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak 03 - 2020 (mm-yyyy)			45.572.500,00	
3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan			0,00	
4. Jumlah (III.B.1 + III.B.2 + III.B.3)			406.023.204,00	
C. Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan (III.A + III.B.4)			655.330.503,00	

DAFTAR EKSPOR BKP BERWUJUD, BKP TIDAK BERWUJUD, DAN/ATAU JKP		FORMULIR 1111 A1 (Bila tidak ada transaksi tidak perlu diampirkan)		
NAMA/NPWP : PT RCD NPWP : 33.333.333.3-033.000		MASA : 03 - 03 - 2021 (mm-mm-yyyy)		
No.	Nomor	Tanggal (dd-mm-yyyy)	DPP (Rupiah)	Keterangan
	Berwujud/Penerima JKP			
JUMLAH		A1 >		

Sumber: Dokumentasi Perusahaan

Gambar 3. 176 Dokumen SPT Masa PPN PT RCD

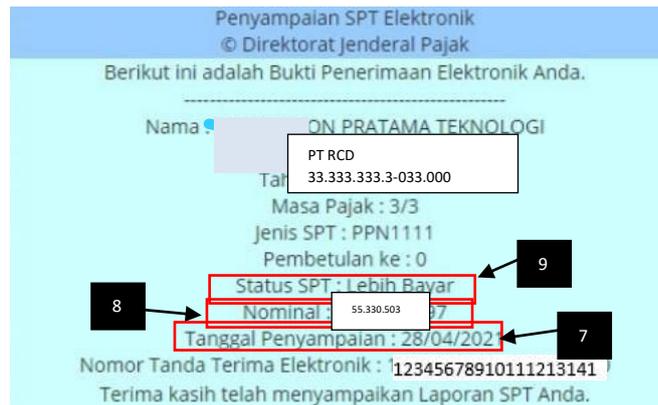
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)		FORMULIR 1111	
Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam <input type="checkbox"/> yang sesuai		NPWP: 33.333.333.3-033.000		Jumlah Lembar SPT (Termasuk Lampiran) Dituliskan Pengisian	
NAMA PKP: PT RCD	ALAMAT: AKAF...	MASA: 12	Pembetulan No: 0 (nol) <input type="checkbox"/> Wajib PPhBM		
TELEFON: 0214209013	BLK: YUZUS				
I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA					
A. Terutang PPN:					
1. Ekspor (A.1) Rp. 0,00 PPN Rp. 600.000,00					
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri (1) Rp. 6.000.000,00 PPN Rp. 0,00					
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN (2) Rp. 0,00 PPN Rp. 0,00					
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut (3) Rp. 0,00 PPN Rp. 0,00					
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN (4) Rp. 0,00 PPN Rp. 0,00					
Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5) Rp. 6.000.000,00 PPN Rp. 600.000,00					
B. Tidak Terutang PPN Rp. 0,00 PPN Rp. 0,00					
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B) Rp. 6.000.000,00 PPN Rp. 600.000,00					
II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR					
A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2) (1) Rp. 600.000,00					
B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama Rp. 0,00					
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan (5) Rp. 656.330.503,00					
D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C) Rp. -55.330.503,00					
E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang sebelumnya Rp. 0,00					
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E) Rp. 0,00					
G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal (dd-mm-yyyy) NTPN:					
H. PPN lebih bayar pada:					
1.1 <input checked="" type="checkbox"/> Butir II.D (Ditai dalam hal SPT bukan Pembetulan) 1.2 <input type="checkbox"/> Butir II.D atau <input type="checkbox"/> Butir II.F (Ditai dalam hal SPT Pembetulan)					
Dish: 2.1 <input type="checkbox"/> PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau 2.2 <input checked="" type="checkbox"/> Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN					
diminta untuk: 3.1 <input checked="" type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak (mm-yyyy)					
3.2 <input type="checkbox"/> Dikembalikan (Restitusi)					
Khusus Restitusi untuk PKP:					
Pasal 17C KUP dilakukan dengan: <input type="checkbox"/> Prosedur Biasa atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan					
atau Pasal 17D KUP dilakukan dengan: <input type="checkbox"/> Prosedur Biasa atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan					
atau Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan					
III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI					
A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak: Rp. 0,00					
B. PPN Terutang: Rp. 0,00					
C. Dilunasi Tanggal: (dd-mm-yyyy) NTPN:					
IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI					
A. PPN yang wajib dibayar kembali: Rp. 0,00					
B. Dilunasi Tanggal: (dd-mm-yyyy) NTPN:					
V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH					
A. PPhBM yang harus dipungut sendiri (1) Rp. 0,00					
B. PPhBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama Rp. 0,00					
C. PPhBM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B) Rp. 0,00					
D. PPhBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp. 0,00					
E. PPhBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D) Rp. 0,00					
F. PPhBM kurang bayar dilunasi tanggal (dd-mm-yyyy) NTPN:					
VI. KELENGKAPAN SPT					
<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 AB <input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 A2 <input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 B2 <input type="checkbox"/> SSP PPN lembar <input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus					
<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 A1 <input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 B1 <input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 B3 <input type="checkbox"/> SSP PPhBM lembar <input type="checkbox"/> _____ lembar					

6

Sumber: Dokumentasi Perusahaan

2. Menerima Bukti Penerimaan Elektronik dari pembimbing lapangan seperti gambar 3.149.

Gambar 3. 177 Bukti Penerimaan Elektronik PT RCD



Sumber: Dokumentasi Perusahaan

3. Menerima *file Excel* yang didalamnya terdapat format *table* (masa, pajak keluaran, pajak masukan, kompensasi masa pajak sebelumnya, jumlah kompensasi, kurang bayar/ lebih bayar, tanggal lapor, tanggal bayar, dan NTPN) yang digunakan untuk nantinya akan di *input* berdasarkan dokumen yang diberikan oleh klien seperti gambar 3.100.

- 1) Mengisi kolom tiap uraian pada bagian DPP yaitu kolom uraian A.2 sebesar Rp 6.000.000.000, penyerahan PPN yang dipungut sendiri sebesar Rp 6.000.000.000, dan B.2 sebesar Rp 2.493.073.019 yang diperoleh dari SPT Masa PPN seperti nomor 1.
- 2) Mengisi kolom uraian pada bagian PPN yaitu kolom uraian A.2 sebesar Rp 600.000.000, penyerahan PPN yang dipungut sendiri sebesar Rp 600.000.000, dan B.2 sebesar Rp 249.073.019 yang diperoleh dari SPT Masa PPN seperti nomor 2.
- 3) Mengisi kolom kompensasi masa pajak sebelumnya sebesar Rp 360.450.704 yang diperoleh dari SPT Masa PPN seperti nomor 3.
- 4) Mengisi kolom jumlah kompensasi sebesar Rp 45.572.500 yang diperoleh dari SPT Masa PPN seperti nomor 4.
- 5) Mengisi kolom masa pajak kompensasi yaitu bulan Maret 2020 yang diperoleh dari SPT Masa PPN seperti nomor 5.
- 6) Mengisi kolom KB/LB sebesar -Rp 55.330.503 yang diperoleh dari SPT Masa PPN seperti nomor 6.
- 7) Jika terdapat KB/LB pembetulan maka diisi seperti SPT Masa PPN kotak biru.
- 8) Mengisi kolom tanggal lapor yaitu 28 April 2021 yang diperoleh dari Bukti Penerimaan Elektronik nomor 7.

9) Mengisi kolom nominal yaitu Rp 55.330.503 yang diperoleh dari Bukti Penerimaan Elektronik nomor 8.

10) Mengisi kolom status SPT LB yang diperoleh dari Bukti Penerimaan Elektronik nomor 9.

5. Melakukan rekapitulasi hingga masa yang ditentukan.

e) **Melakukan Rekapitulasi Bukti Potong PPh Pasal 15**

Dokumen yang diperlukan dalam melakukan rekapitulasi bukti potong PPh Pasal 15 yaitu dokumen terkait bukti potong PPh Pasal 15 dan format *excel* untuk melakukan rekapitulasi. Proses rekapitulasi bukti potong PPh Pasal 15 dilakukan untuk periode 2018. Berikut adalah proses melakukan rekapitulasi bukti potong PPh Pasal 15:

1. Menerima format *excel* dari pembimbing lapangan.

Gambar 3. 179 Format Excel Rekapitulasi Bukti Potong PPh Pasal 15

No	NPWP	Nama	Masa	Bukti Pemotongan		Nilai Objek Pajak	PPh yang Dipotong	Jenis Transaksi
				Nomor	Tanggal			
1	31.331.331.3-033.000	PT SEMANGAT	2	12/PPH15/PN/34	28/02/2018	1.000.000.000	12.000.000	

Sumber: Dokumentasi Perusahaan

Pada Gambar 3.179 merupakan format tabel *excel* yang terdiri dari kolom nomor, NPWP, Nama, Masa, Bukti Pemotongan yang terdiri dari Nomor Bupot dan Tanggal, Nilai Objek Pajak, PPh yang Dipotong, dan Jenis Transaksi yang akan diisi berdasarkan Bukti Potong PPh Pasal 15.

2. Menerima dokumen terkait bukti potong PPh Pasal 15.

Gambar 3. 180 Bukti Potong PPh Pasal 15

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR PELAYANAN PAJAK
 KPP PRATAMA BANJARBARA

**BUKTI PEMOTONGAN PPh
 ATAS IMBALAN YANG DIBAYARKAN/TERUTANG
 KEPADA PERUSAHAAN PELAYANAN DALAM NEGERI
 (FINAL)**

Nomor: 12/PPH15/PN/34 4

NPWP : PT RCD
 Nama WP : 33.333.333.3-033.000
 Alamat :

Jumlah Bruto Imbalan (1)	Tarif (2)	PPh yang dipotong (3)
Rp. 1.000.000.000 6	1,20 %	Rp. 12.000.000 7

Terbilang: Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Sembilan Rupiah

Banjarbaru, 28 Februari 2018 5
 Pemotong Pajak.

NPWP : 6F666666F6666666
 Nama WP : PT SEMANGAT 3

Perhatian:
 1. Jumlah Pajak Penghasilan atas imbalan yang dibayarkan/terutang kepada Perusahaan Pelayanan Dalam Negeri yang didorong di atas bukan merupakan kredit pajak dalam bentuk Pemotongan (SPT) Tahunan PPh.
 2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila dia dengan lengkap dan benar

DIREKTUR UTAMA

Sumber: Dokumentasi Perusahaan

Pada Gambar 3.180 merupakan gambar bukti potong PPh Pasal 15 PT NS periode Februari 2018 data yang diperlukan untuk melakukan rekapitulasi adalah NPWP, Nama, Masa, Bukti Pemotong yang terdiri dari Nomor Bupot dan Tanggal, Nilai Objek Pajak, PPh yang Dipotong, dan Jenis Transaksi.

3. Menginput NPWP, nama pemotong pajak, masa pajak, nomor surat bukti potong, tanggal bukti potong, nilai objek pajak, dan PPh yang dipotong. Pada Gambar 3.73 merupakan hasil rekapitulasi Bukti Potong PPh Pasal 15. Berikut merupakan langkah merekapitulasi Bukti Potong PPh Pasal 15 periode Februari 2018:

- 1) Mengisi kolom NPWP dengan 33.333.333.3-033.000.
 - 2) Mengisi kolom Nama Pemotong Pajak yaitu PT Semangat.
 - 3) Mengisi kolom Masa yaitu bulan 2 atau Februari.
 - 4) Mengisi Nomor Bukti Potong yaitu 12/PPH15/PN/34 dan mengisi Tanggal Bukti Potong dengan 28 Februari 2018.
 - 5) Mengisi nilai objek pajak Rp 1.000.000.000.
 - 6) Mengisi PPh yang Dipotong Rp 12.000.000.
4. Menginput hingga satu periode.

3.3.1.14 CV A

a) *Input e-SPT PPh Pasal 21*

Tugas melakukan *input e-SPT PPh Pasal 21* dilakukan untuk beberapa perusahaan dengan periode yang sama yaitu Agustus 2021. Dokumen yang diperlukan saat melakukan *penginputan e-SPT PPh Pasal 21* adalah *database* perusahaan terkait, Bukti Penerimaan Negara (BPN), dan dokumen terkait SPT Masa PPh Pasal 21 dari pembimbing lapangan. Proses *input e-SPT* dilakukan untuk periode Agustus 2021 atas 4 pegawai tetap dan 46 pegawai tidak tetap. Berikut merupakan proses *penginputan e-SPT PPh Pasal 21*:

1. *Instal* aplikasi e-SPT PPh Pasal 21/26.

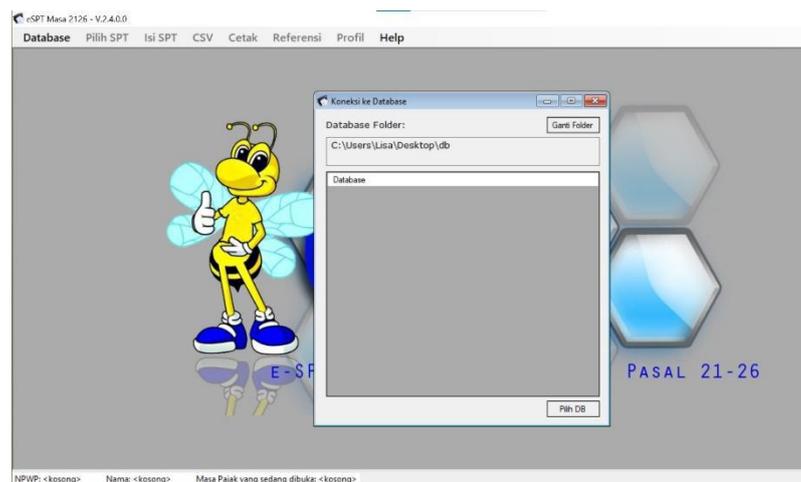
Gambar 3. 181 Aplikasi E-SPT PPh Pasal 21



Sumber: Dokumentasi Pribadi

2. *Buka* aplikasi e-SPT PPh Pasal 21/26.

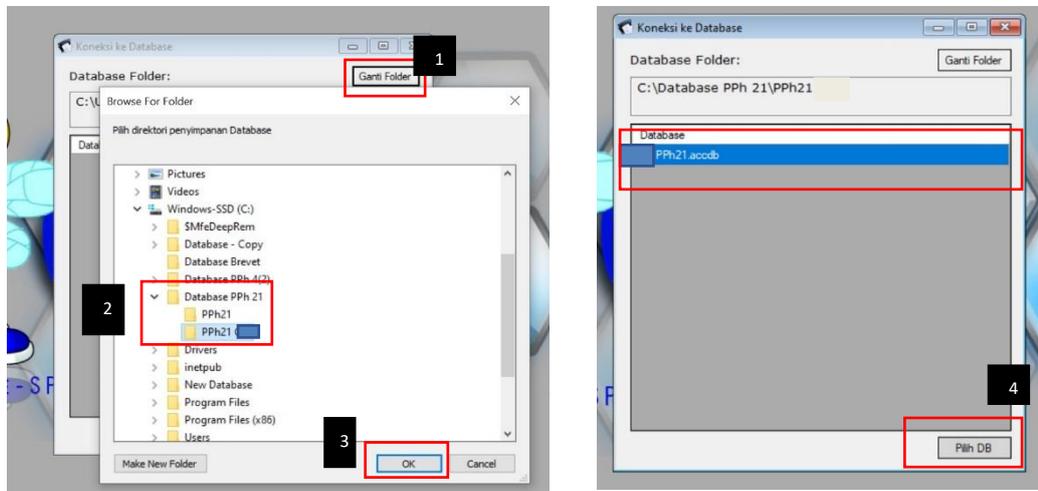
Gambar 3. 182 Halaman Awal Ketika Membuka E-SPT



Sumber: Dokumentasi Pribadi

3. Memilih *database* yang akan digunakan lalu klik *database* untuk membukanya dan melakukan *login database* dengan mengisi *username* dan *password*.

Gambar 3. 183 Membuka Database di E-SPT



Pada Gambar 3.183 merupakan cara untuk membuka *database* yang akan digunakan agar bisa melakukan *input* data pada e-SPT PPh Pasal 21. Jika *folder database* yang dipilih sudah sesuai format maka akan memiliki format *.accdb* maka langkah selanjutnya bisa klik Pilih DB. Jika *database* sudah berhasil terbuka maka langkah selanjutnya yaitu melakukan *login*.

Gambar 3. 184 Login Pada E-SPT PPh Pasal 21

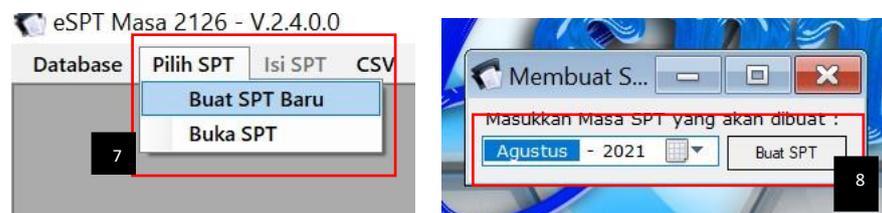


Pada Gambar 3.184 saat ingin melakukan *login* maka harus memasukan *username* yaitu *administrator* dan *password* yaitu *123* jika

sudah lalu klik *Login*. Jika *login* berhasil maka akan keluar pemberitahuan jika *login* telah berhasil dan bisa klik OK.

4. Jika *database* sudah terbuka pilih SPT dan buat SPT baru dengan mengisi masa pajak yang diperlukan. Lalu klik Buat SPT.

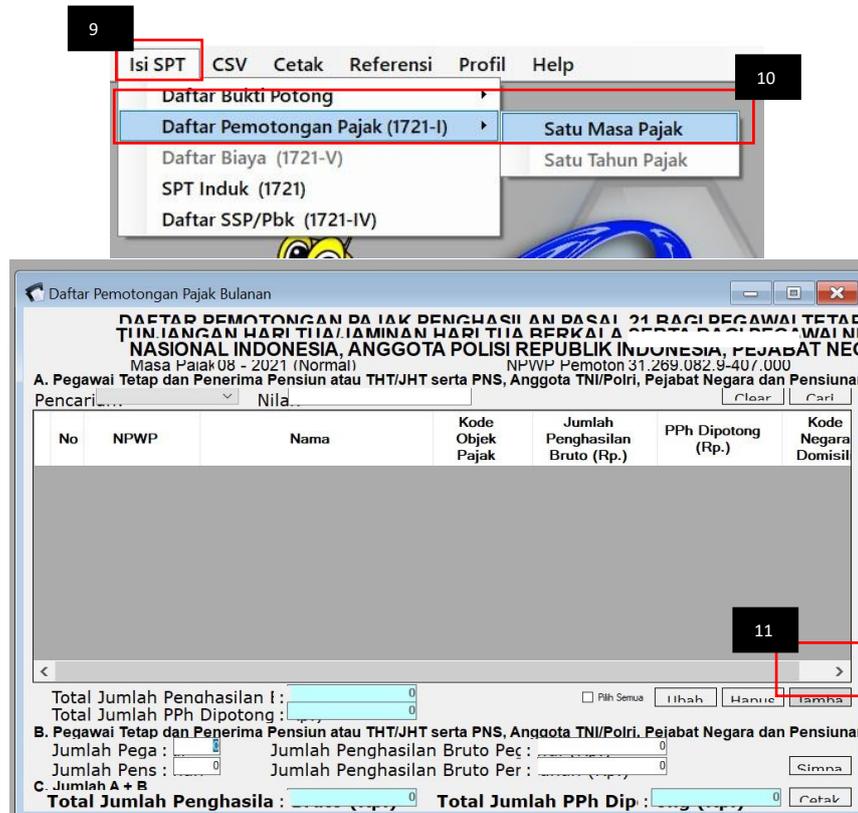
Gambar 3. 185 Membuat SPT Baru CV A



Pada Gambar 3.185 merupakan langkah jika sebelumnya Wajib Pajak belum membuat SPT pada periode tertentu yaitu dapat dengan memilih Pilih SPT dan pilih Buat SPT Baru. Jika sudah memilih Buat SPT Baru langkah selanjutnya yaitu memilih Masa SPT yang akan dibuat untuk CV A masa yang akan dibuat adalah masa Agustus 2021 jika sudah klik Buat SPT.

5. Pilih isi SPT lalu klik daftar pemotongan pajak (1721-1) kemudian pilih Satu Masa Pajak. Jika ingin melakukan *input* data transaksi klik Tambah untuk melakukan pengisian penghasilan bagi pegawai tetap.

Gambar 3. 186 Menginput Daftar Pemotongan CV A

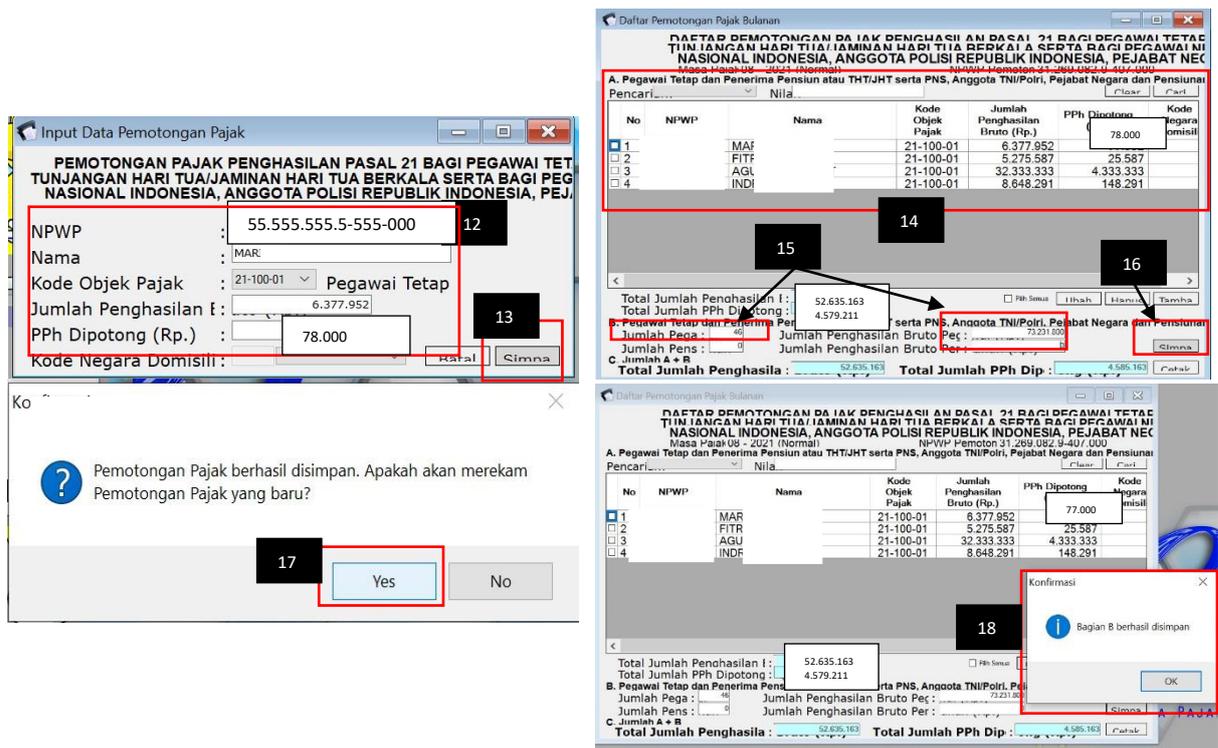


Pada Gambar 3.186 akan dilakukan penginputan Daftar Pemotongan selama Satu Masa Pajak maka yang harus dilakukan adalah pilih menu Isi SPT seperti nomor 9, lalu pilih Daftar Pemotongan Pajak (1721-I) Satu Masa Pajak seperti nomor 10. Lalu akan muncul tampilan Daftar Pemotongan Pajak Bulanan untuk mengisi data pegawai tetap yang penghasilannya diatas PTKP maka pilih Tambah seperti nomor 11.

6. Isikan data nomor NPWP, nama, kode objek pajak, jumlah penghasilan bruto, dan PPh dipotong lalu klik simpan. Pastikan semua data pegawai tetap sudah terisi sesuai dengan jumlah pegawai tetap. Isi juga daftar pegawai tetap yang penghasilannya tidak lebih PTKP

denga nisi pada kolom jumlah pegawai dan jumlah penghasilan bruto lalu klik simpan.

Gambar 3. 187 Mengisi Data Daftar Pemotongan Pajak



Pada Gambar 3.44 merupakan cara untuk mengisi Daftar Pemotongan berdasarkan data yang sudah diberikan pembimbing lapangan. Bagi pegawai tetap yang memiliki penghasilan diatas PTKP maka harus mengisi NPWP yaitu 55.555.555.5-555-000, nama yaitu Mar, kode pajak 21-100-01 yang menandakan pegawai tetap, jumlah penghasilan bruto yaitu Rp 6.377.952, dan PPh yang dipotong Rp 78.000. Setelah itu bisa terus mengisi daftar pemotongan bagi Wajib Pajak berpenghasilan diatas PTKP hingga 4 pegawai, jika sudah maka klik Simpan dan akan muncul semua pegawai tetap penghasilan diatas PTKP seperti nomor 14. Bagi pegawai tetap penghasilan di bawah

PTKP maka bisa mengisi jumlah pegawai sebanyak 46 dan jumlah penghasilan bruto sebesar Rp 73.231.800 seperti nomor 15. Lalu klik Simpan untuk menyimpan perubahan karena telah mengisi bagian pegawai tetap di bawah PTKP. Jika muncul kotak notifikasi Bagian B Berhasil disimpan maka klik OK.

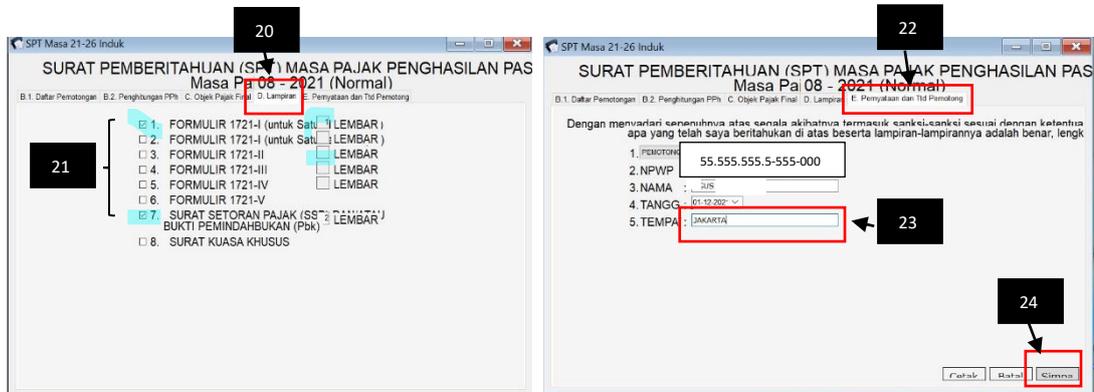
- Setelah proses pengisian SPT selesai selanjutnya pilih menu isi SPT pilih SPT Induk (1721) maka akan menampilkan jumlah pajak terutang.

Gambar 3. 188 SPT Induk CV A

NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp.)	JUMLAH PAJAK PENGHASILAN (Rp.)
1.	PEGAWAI TETAP	21-100-01	50	125.866.963	4.585.163
2.	PENERIMA PENSUN BERKALA	21-100-02	0	0	0
3.	PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU TENAGA KERJA LEPAS	21-100-03	0	0	0
4.	BUKAN PEGAWAI:				
4a.	DISTRIBUTOR MULTILEVEL MARKETING (MLM)	21-100-04	0	0	0
4b.	PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI	21-100-05	0	0	0
4c.	PENJAJA BARANG DAGANGAN	21-100-06	0	0	0
4d.	TENAGA AHLI	21-100-07	0	0	0
4e.	BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN	21-100-08	0	0	0
4f.	BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG TIDAK BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN	21-100-09	0	0	0
5.	ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ATAU DEWAN PENGAWAS YANG TIDAK MERANGKAP SEBAGAI PEGAWAI TETAP	21-100-10	0	0	0
6.	MANTAN PEGAWAI YANG MENERIMA JASA PRODUKSI, TANTIEM, BONUS ATAU IMBALAN LAIN	21-100-11	0	0	0
7.	PEGAWAI YANG MELAKUKAN PENARIKAN DANA PENSUN	21-100-12	0	0	0
8.	PESERTA KEGIATAN	21-100-13	0	0	0
9.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 TIDAK FINAL LAINNYA	21-100-99	0	0	0
10.	PEGAWAI/PEMBERI JASA/PESERTA KEGIATAN/PENERIMA PENSUN BERKALA SEBAGAI WAJIB PAJAK LUAR NEGERI	27-100-99	0	0	0
11.	JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 10)		50	125.866.963	4.579.211

- Pada tab SPT Induk pilih “D. Lampiran *Check List* yang akan dilampirkan” dan “E. Pernyataan dan TTd Pematong” lalu isi kolom tempat sesuai daerah lalu klik simpan dan cetak.

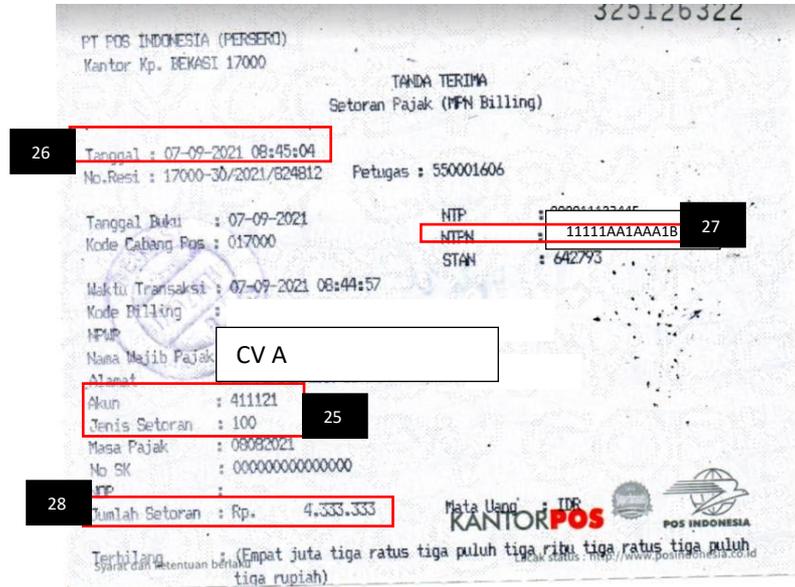
Gambar 3. 189 Induk CV A



Pada Gambar 3.189 bagian SPT Induk yang harus dilakukan adalah mengisi bagian D. Lampiran nomor 20 dengan memberikan *checklist* seperti nomor 21 yang diberi warna biru diantaranya formulir 1721-1 sebanyak 1 lembar dan SSP yang diberikan pembimbing lapangan sebanyak 2 lembar. Mengisi bagian E. Pernyataan dan TTD Pemotong seperti nomor 22 pada bagian tempat diisi Jakarta sesuai dengan informasi yang diberikan pembimbing lapangan seperti nomor 23. Setelah selesai klik Simpan seperti nomor 24.

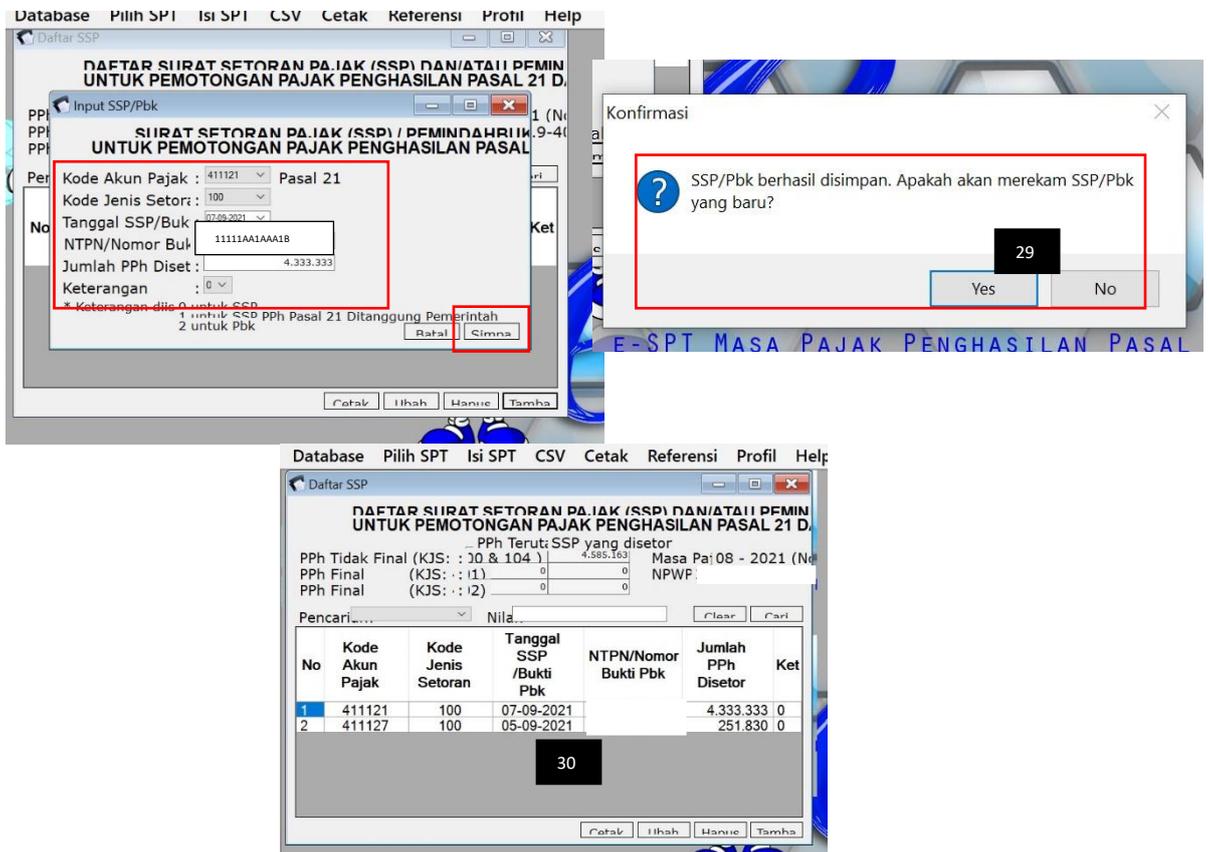
9. Selanjutnya pajak yang terutang harus dibayarkan terlebih dahulu untuk memperoleh nomor NTPN yang dapat dilihat dari Bukti Penerimaan Negara yang diperoleh dari pembimbing lapangan. Setelah mendapatkan nomor NTPN langkah berikutnya yaitu memasukan data tersebut ke dalam daftar SSP dengan pilih menu isi SPT lalu pilih daftar SSP setelah selesai pilih simpan dan kembali ke tampilan awal.

Gambar 3. 190 Bukti Penerimaan Negara CV A



Sumber: Dokumentasi Perusahaan

Gambar 3. 191 Mengisi Daftar SSP CV A



Pada Gambar 3.191 mengisi daftar SSP seperti Bukti Penerimaan Negara yang diperoleh dari pembimbing lapangan yaitu kode akun pajak 411121 yang menandakan PPh Pasal 21 dan kode jenis setoran 100 seperti nomor 25, Tanggal SSP yaitu 7 September 2021 seperti nomor 26, NTPN 11111AA1AAA1B seperti nomor 27, dan Jumlah PPh Disetor Rp 4.333.333 seperti nomor 28 jika sudah klik Simpan. Jika ingin melanjutkan menginput SSP maka klik Yes seperti nomor 29. Saat semua SSP yang dibutuhkan sudah terinput maka akan muncul tampilan seperti nomor 30.

10. Pilih menu cetak lalu pilih formulir SPT dan klik formulir apa saja yang akan dicetak (1721-1, 1721, dan Daftar SSP).

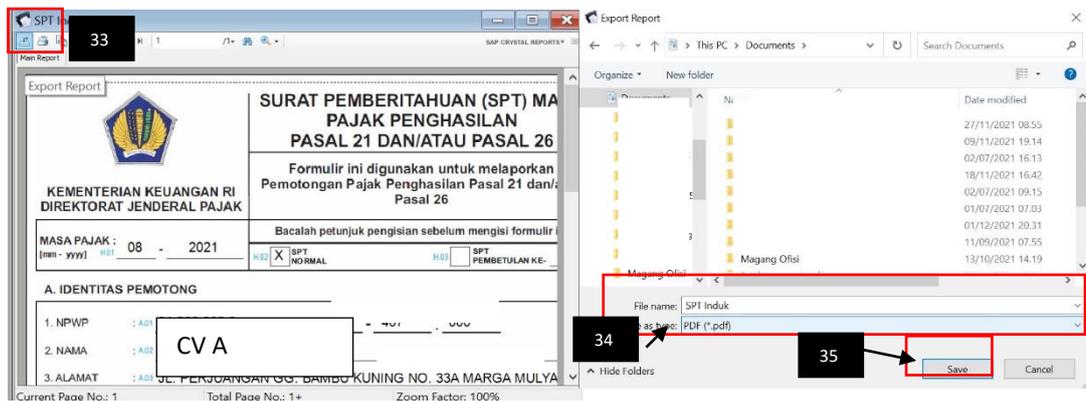
Gambar 3. 192 Mencetak SPT PPh Pasal 21



Pada Gambar 3.192 merupakan cara untuk mencetak formulir SPT PPh Masa Pasal 21 yang harus dilakukan yaitu memilih menu Cetak klik Formulir seperti gambar nomor 31 setelah itu akan muncul menu cetak SPT yang dibutuhkan pembimbing lapangan adalah formulir 1721, 1721-1, dan SSP lalu klik formulir yang akan dicetak.

11. Setelah *file* terbuka lalu pilih menu *export report* untuk menyimpan formulir.

Gambar 3.193 Export Formulir SPT



Pada Gambar 3.193 merupakan cara untuk menyimpan yang nantinya akan dicetak yaitu klik menu *Main Report* pada pojok kiri atas seperti nomor 33 yang nantinya akan diarahkan ke tempat penyimpanan laptop, selanjutnya mengganti nama dan mengubah tipe *file* menjadi *pdf* seperti gambar nomor 34 setelah itu klik *Save* seperti gambar nomor 35.

3.3.1.15 PT GJY

a) *Input e-SPT PPh Pasal 21*

Tugas melakukan *input e-SPT PPh Pasal 21* dilakukan untuk beberapa perusahaan dengan periode yang sama yaitu Agustus 2021. Dokumen yang diperlukan saat melakukan *penginputan e-SPT PPh Pasal 21* adalah *database* perusahaan terkait, *Bukti Penerimaan Negara (BPN)*, dan dokumen terkait *SPT Masa PPh Pasal 21* dari pembimbing lapangan. . Proses *input e-SPT* dilakukan untuk periode Agustus 2021 atas 4 pegawai tetap dan 46 pegawai tidak tetap. Berikut merupakan proses *penginputan e-SPT PPh Pasal 21*:

1. *Instal* aplikasi e-SPT PPh Pasal 21/26.

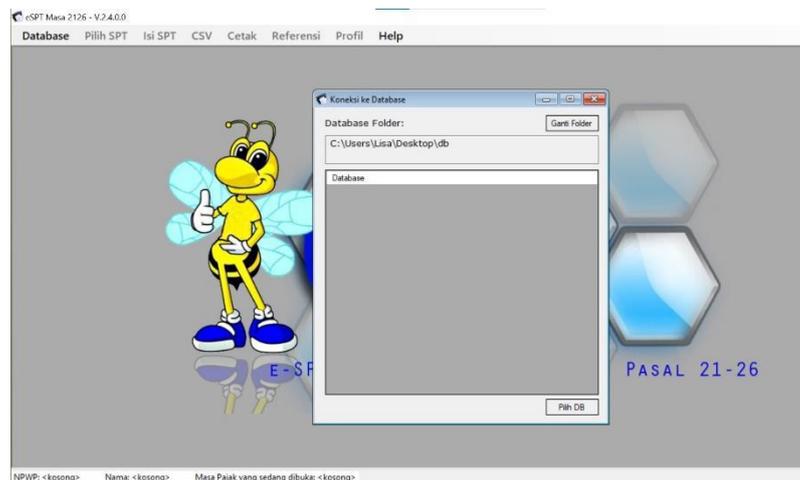
Gambar 3. 194 Aplikasi E-SPT PPh Pasal 21



Sumber: Dokumentasi Pribadi

2. Buka aplikasi e-SPT PPh Pasal 21/26.

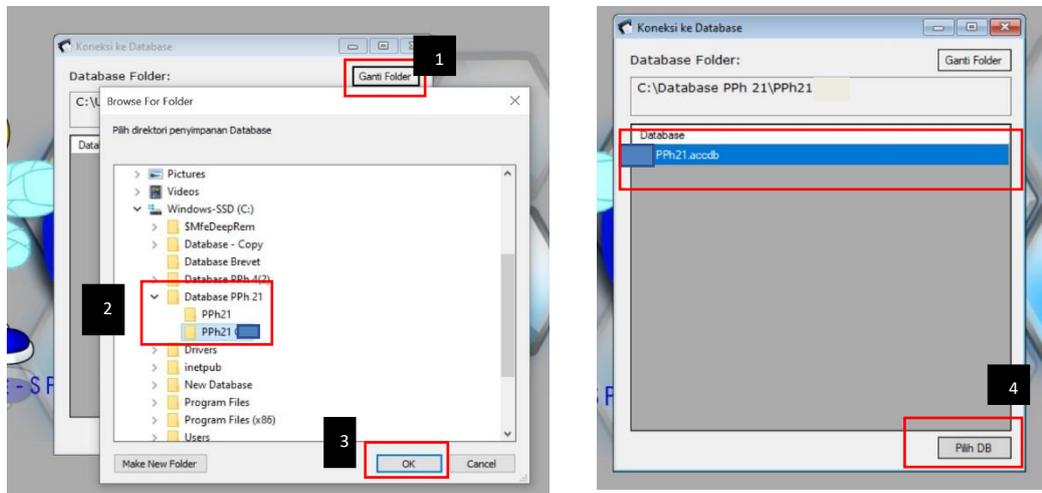
Gambar 3. 195 Halaman Awal Ketika Membuka E-SPT



Sumber: Dokumentasi Pribadi

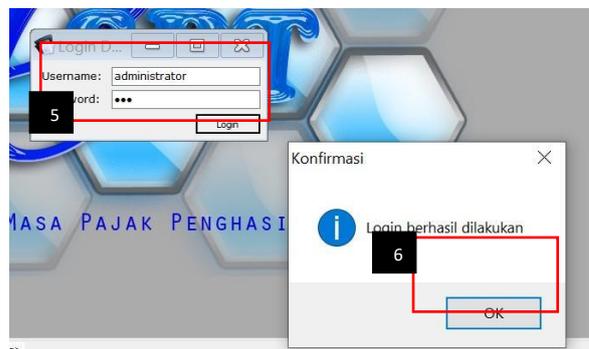
3. Memilih *database* yang akan digunakan lalu klik *database* untuk membukanya dan melakukan *login database* dengan mengisi *username* dan *password*.

Gambar 3.196 Membuka Database di E-SPT



Pada Gambar 3.196 merupakan cara untuk membuka *database* yang akan digunakan agar bisa melakukan *input* data pada e-SPT PPh Pasal 21. Jika *folder database* yang dipilih sudah sesuai format maka akan memiliki format *.accdb* maka langkah selanjutnya bisa klik Pilih DB. Jika *database* sudah berhasil terbuka maka langkah selanjutnya yaitu melakukan *login*.

Gambar 3.197 Login Pada E-SPT PPh Pasal 21

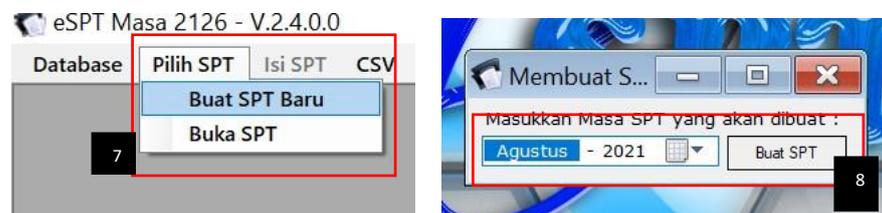


Pada Gambar 3.197 saat ingin melakukan *login* maka harus memasukan *username* yaitu *administrator* dan *password* yaitu *123* jika

sudah lalu klik *Login*. Jika *login* berhasil maka akan keluar pemberitahuan jika *login* telah berhasil dan bisa klik OK.

4. Jika *database* sudah terbuka pilih SPT dan buat SPT baru dengan mengisi masa pajak yang diperlukan. Lalu klik Buat SPT.

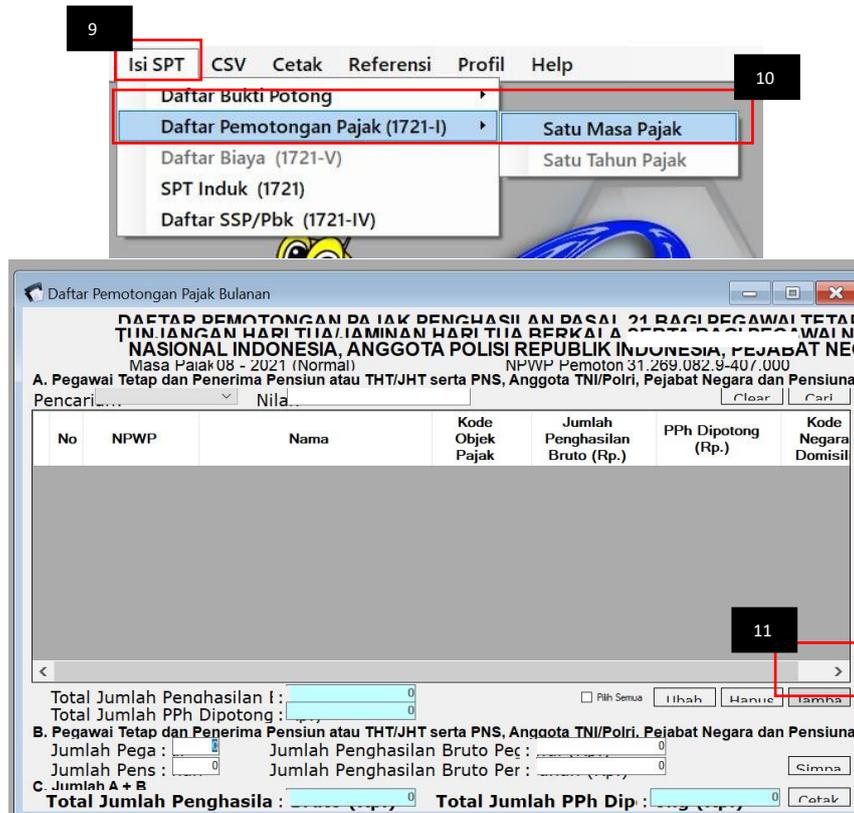
Gambar 3. 198 Membuat SPT Baru PT GJY



Pada Gambar 3.185 merupakan langkah jika sebelumnya Wajib Pajak belum membuat SPT pada periode tertentu yaitu dapat dengan memilih Pilih SPT dan pilih Buat SPT Baru. Jika sudah memilih Buat SPT Baru langkah selanjutnya yaitu memilih Masa SPT yang akan dibuat untuk PT GJY masa yang akan dibuat adalah masa Agustus 2021 jika sudah klik Buat SPT.

5. Pilih isi SPT lalu klik daftar pemotongan pajak (1721-1) kemudian pilih Satu Masa Pajak. Jika ingin melakukan *input* data transaksi klik Tambah untuk melakukan pengisian penghasilan bagi pegawai tetap.

Gambar 3. 199 Menginput Daftar Pemotongan PT GJY

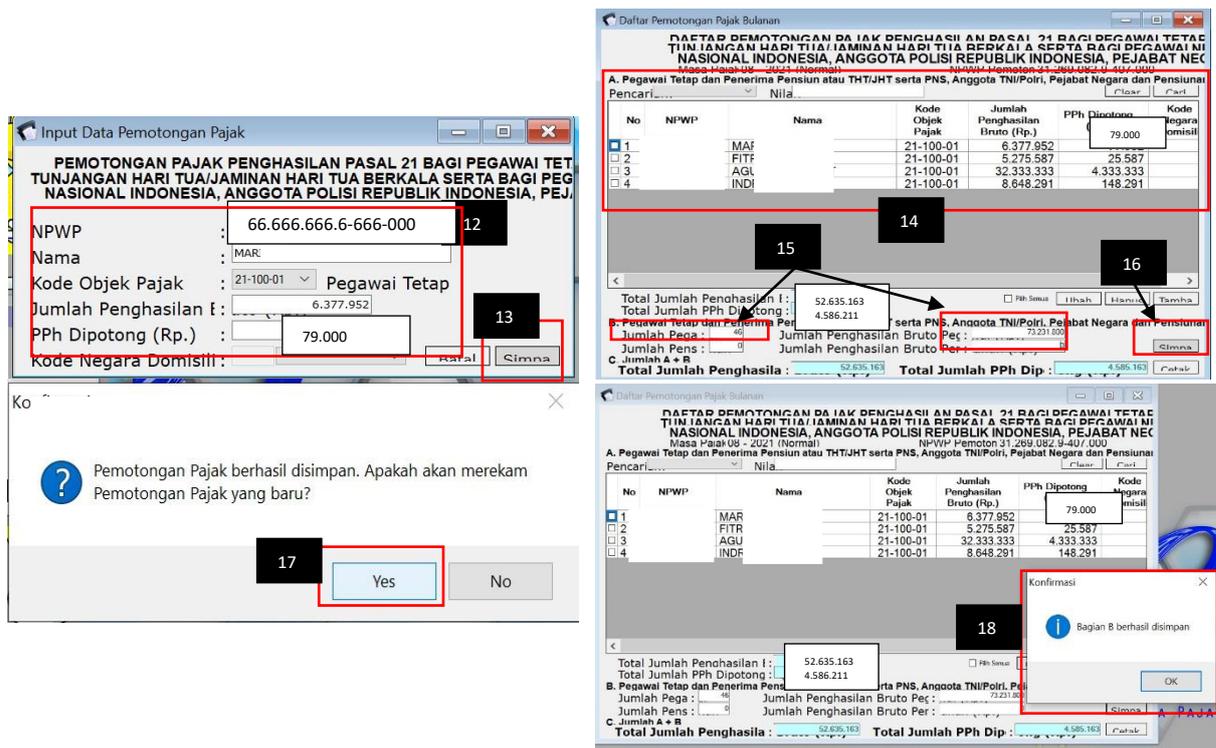


Pada Gambar 3.199 akan dilakukan penginputan Daftar Pemotongan selama Satu Masa Pajak maka yang harus dilakukan adalah pilih menu Isi SPT seperti nomor 9, lalu pilih Daftar Pemotongan Pajak (1721-I) Satu Masa Pajak seperti nomor 10. Lalu akan muncul tampilan Daftar Pemotongan Pajak Bulanan untuk mengisi data pegawai tetap yang penghasilannya diatas PTKP maka pilih Tambah seperti nomor 11.

- Isikan data nomor NPWP, nama, kode objek pajak, jumlah penghasilan bruto, dan PPh dipotong lalu klik simpan. Pastikan semua data pegawai tetap sudah terisi sesuai dengan jumlah pegawai tetap. Isi juga daftar pegawai tetap yang penghasilannya tidak lebih PTKP

denga nisi pada kolom jumlah pegawai dan jumlah penghasilan bruto lalu klik simpan.

Gambar 3. 200 Mengisi Data Daftar Pemotongan Pajak



Pada Gambar 3.200 merupakan cara untuk mengisi Daftar Pemotongan berdasarkan data yang sudah diberikan pembimbing lapangan. Bagi pegawai tetap yang memiliki penghasilan diatas PTKP maka harus mengisi NPWP yaitu 66.666.666.6-666-000, nama yaitu Mar, kode pajak 21-100-01 yang menandakan pegawai tetap, jumlah penghasilan bruto yaitu Rp 6.377.952, dan PPh yang dipotong Rp 79.000. Setelah itu bisa terus mengisi daftar pemotongan bagi Wajib Pajak berpenghasilan diatas PTKP hingga 4 pegawai, jika sudah maka klik Simpan dan akan muncul semua pegawai tetap penghasilan diatas PTKP seperti nomor 14. Bagi pegawai tetap penghasilan di bawah

PTKP maka bisa mengisi jumlah pegawai sebanyak 46 dan jumlah penghasilan bruto sebesar Rp 73.231.800 seperti nomor 15. Lalu klik Simpan untuk menyimpan perubahan karena telah mengisi bagian pegawai tetap di bawah PTKP. Jika muncul kotak notifikasi Bagian B Berhasil disimpan maka klik OK.

- Setelah proses pengisian SPT selesai selanjutnya pilih menu isi SPT pilih SPT Induk (1721) maka akan menampilkan jumlah pajak terutang.

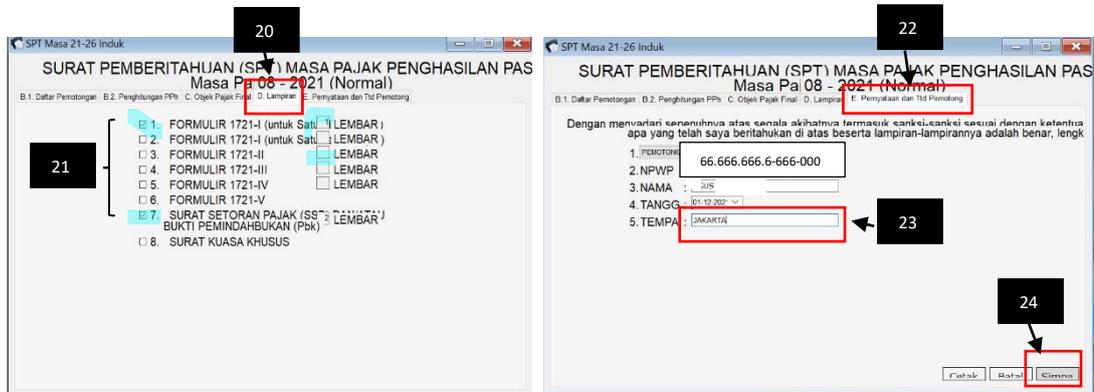
Gambar 3. 201 SPT Induk PT GJY

The screenshot shows the 'SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PAS Masa Pa 08 - 2021 (Normal)' window. It contains a table with the following data:

NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp.)	JUMLAH PAJAK PENGHASILAN (Rp.)
1.	PEGAWAI TETAP	21-100-01	50	125.866.963	4.585.163
2.	PENERIMA PENSUN BERKALA	21-100-02	0	0	0
3.	PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU TENAGA KERJA LEPAS	21-100-03	0	0	0
4.	BUKAN PEGAWAI:				
4a.	DISTRIBUTOR MULTILEVEL MARKETING (MLM)	21-100-04	0	0	0
4b.	PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI	21-100-05	0	0	0
4c.	PENJAJA BARANG DAGANGAN	21-100-06	0	0	0
4d.	TENAGA AHLI	21-100-07	0	0	0
4e.	BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN	21-100-08	0	0	0
4f.	BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG TIDAK BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN	21-100-09	0	0	0
5.	ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ATAU DEWAN PENGAWAS YANG TIDAK MERANGKAP SEBAGAI PEGAWAI TETAP	21-100-10	0	0	0
6.	MANTAN PEGAWAI YANG MENERIMA JASA PRODUKSI, TANTIEM, BONUS ATAU IMBALAN LAIN	21-100-11	0	0	0
7.	PEGAWAI YANG MELAKUKAN PENARIKAN DANA PENSUN	21-100-12	0	0	0
8.	PESERTA KEGIATAN	21-100-13	0	0	0
9.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 TIDAK FINAL LAINNYA	21-100-99	0	0	0
10.	PEGAWAI/PEMBERI JASA/PESERTA KEGIATAN/PENERIMA PENSUN BERKALA SEBAGAI WAJIB PAJAK LUAR NEGERI	27-100-99	0	0	0
11.	JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 10)		50	125.866.963	4.586.211

- Pada tab SPT Induk pilih “D. Lampiran *Check List* yang akan dilampirkan” dan “E. Pernyataan dan TTd Pematong” lalu isi kolom tempat sesuai daerah lalu klik simpan dan cetak.

Gambar 3.202 Induk PT GJY



Pada Gambar 3.202 bagian SPT Induk yang harus dilakukan adalah mengisi bagian D. Lampiran nomor 20 dengan memberikan *checklist* seperti nomor 21 yang diberi warna biru diantaranya formulir 1721-1 sebanyak 1 lembar dan SPP yang diberikan pembimbing lapangan sebanyak 2 lembar. Mengisi bagian E. Pernyataan dan TTD Pemotong seperti nomor 22 pada bagian tempat diisi Jakarta sesuai dengan informasi yang diberikan pembimbing lapangan seperti nomor 23. Setelah selesai klik Simpan seperti nomor 24.

9. Selanjutnya pajak yang terutang harus dibayarkan terlebih dahulu untuk memperoleh nomor NTPN yang dapat dilihat dari Bukti Penerimaan Negara yang diperoleh dari pembimbing lapangan. Setelah mendapatkan nomor NTPN langkah berikutnya yaitu memasukan data tersebut ke dalam daftar SSP dengan pilih menu isi SPT lalu pilih daftar SSP setelah selesai pilih simpan dan kembali ke tampilan awal.

Gambar 3. 203 Bukti Penerimaan Negara PT GJY

PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Rp. BEKASI 17000

325126322

TANDA TERIMA
Setoran Pajak (MFN Billing)

26 Tanggal : 07-09-2021 08:45:04
No.Resi : 17000-30/2021/624812 Petugas : 550001606

Tanggal Bukti : 07-09-2021 NTP : 000011033445
Kode Cabang Pos : 017000 NTEN : 11111AA1AAA1B 27
Maktu Transaksi : 07-09-2021 08:44:57 STAN : 642793

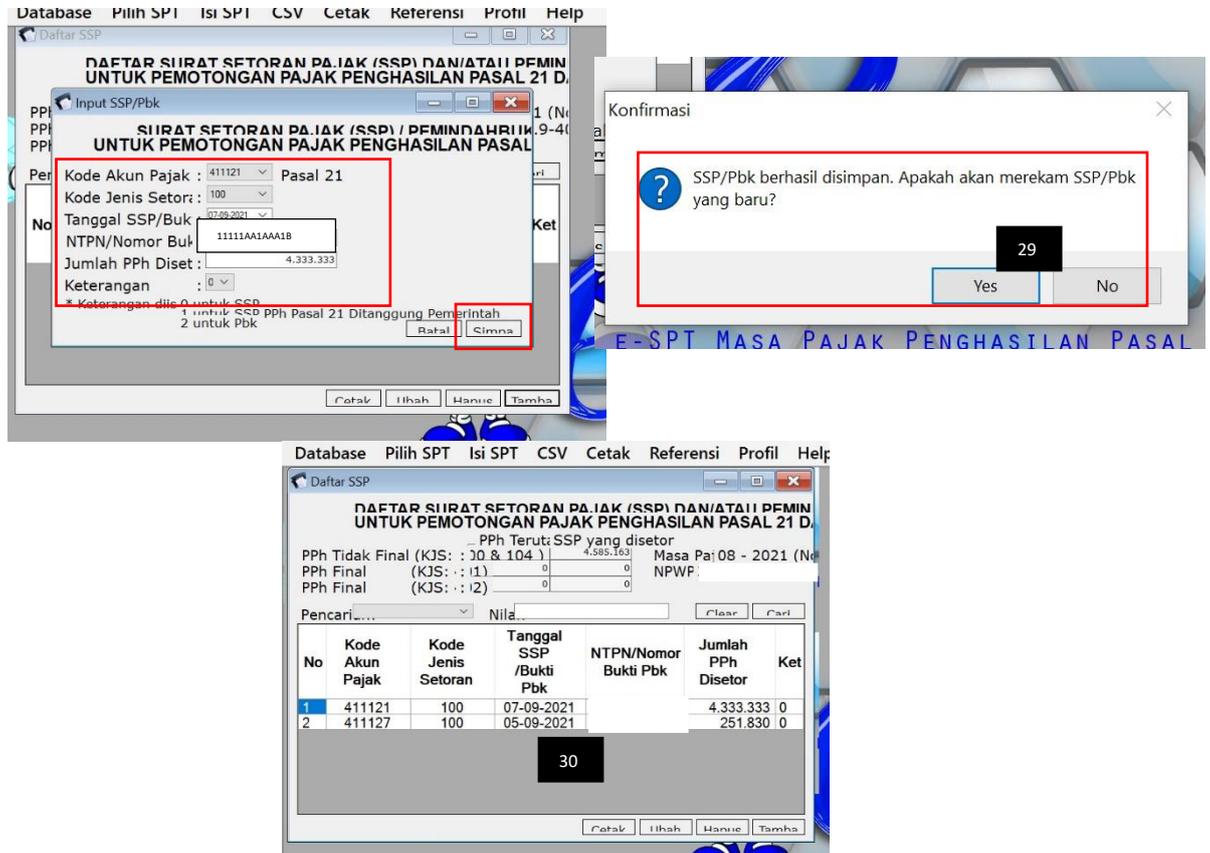
Kode Billing :
NPMR :
Nama Wajib Pajak : PT GJY
Alamat :
Akun : 411121 25
Tenis Setoran : 100
Masa Pajak : 08082021
No SK : 0000000000000000
Kant 28
Jumlah Setoran : Rp. 4.333.333

Mata Uang : IDR
KANTOR POS POS INDONESIA

Terbilang : (Empat juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah)
Syarat dan ketentuan berlaku. <http://www.posindonesia.co.id>

Sumber: Dokumentasi Perusahaan

Gambar 3. 204 Mengisi Daftar SSP PT GJY



Pada Gambar 3.204 mengisi daftar SSP seperti Bukti Penerimaan Negara yang diperoleh dari pembimbing lapangan yaitu kode akun pajak 411121 yang menandakan PPh Pasal 21 dan kode jenis setoran 100 seperti nomor 25, Tanggal SSP yaitu 7 September 2021 seperti nomor 26, NTPN 11111AA1AAA1B seperti nomor 27, dan Jumlah PPh Disetor Rp 4.333.333 seperti nomor 28 jika sudah klik Simpan. Jika ingin melanjutkan menginput SSP maka klik Yes seperti nomor 29. Saat semua SSP yang dibutuhkan sudah terinput maka akan muncul tampilan seperti nomor 30.

- Pilih menu cetak lalu pilih formulir SPT dan klik formulir apa saja yang akan dicetak (1721-1, 1721, dan Daftar SSP).

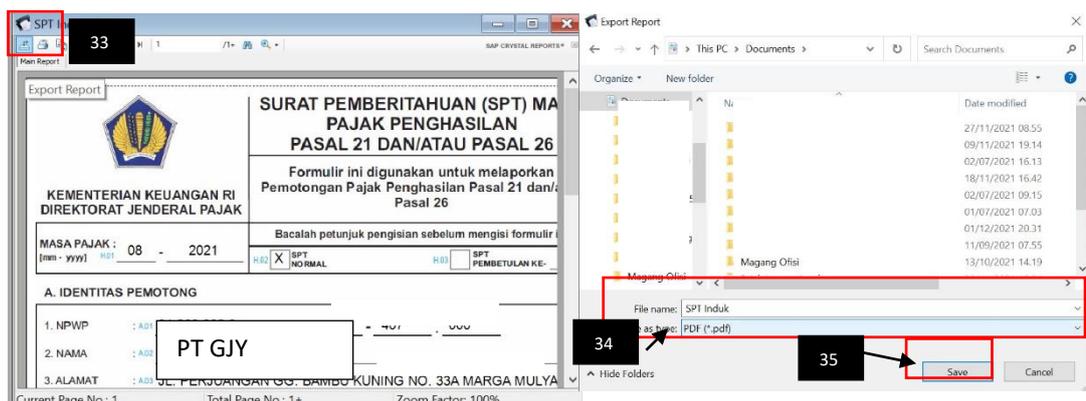
Gambar 3. 205 Mencetak SPT PPh Pasal 21



Pada Gambar 3.205 merupakan cara untuk mencetak formulir SPT PPh Masa Pasal 21 yang harus dilakukan yaitu memilih menu Cetak klik Formulir seperti gambar nomor 31 setelah itu akan muncul menu cetak SPT yang dibutuhkan pembimbing lapangan adalah formulir 1721, 1721-1, dan SSP lalu klik formulir yang akan dicetak.

- Setelah *file* terbuka lalu pilih menu *export report* untuk menyimpan formulir.

Gambar 3. 206 Export Formulir SPT



Pada Gambar 3.206 merupakan cara untuk menyimpan yang nantinya akan dicetak yaitu klik menu *Main Report* pada pojok kiri atas seperti nomor 33 yang nantinya akan diarahkan ke tempat penyimpanan laptop,

selanjutnya mengganti nama dan mengubah tipe *file* menjadi *pdf* seperti gambar nomor 34 setelah itu klik *Save* seperti gambar nomor 35.

3.3.1.16 PT KAT

a) *Input e-SPT PPh Pasal 21*

Tugas melakukan *input e-SPT PPh Pasal 21* dilakukan untuk beberapa perusahaan dengan periode yang sama yaitu Agustus 2021. Dokumen yang diperlukan saat melakukan *penginputan e-SPT PPh Pasal 21* adalah *database* perusahaan terkait, Bukti Penerimaan Negara (BPN), dan dokumen terkait SPT Masa PPh Pasal 21 dari pembimbing lapangan. . Proses *input e-SPT* dilakukan untuk periode Agustus 2021 atas 4 pegawai tetap dan 46 pegawai tidak tetap. Berikut merupakan proses *penginputan e-SPT PPh Pasal 21*:

1. *Instal* aplikasi e-SPT PPh Pasal 21/26.

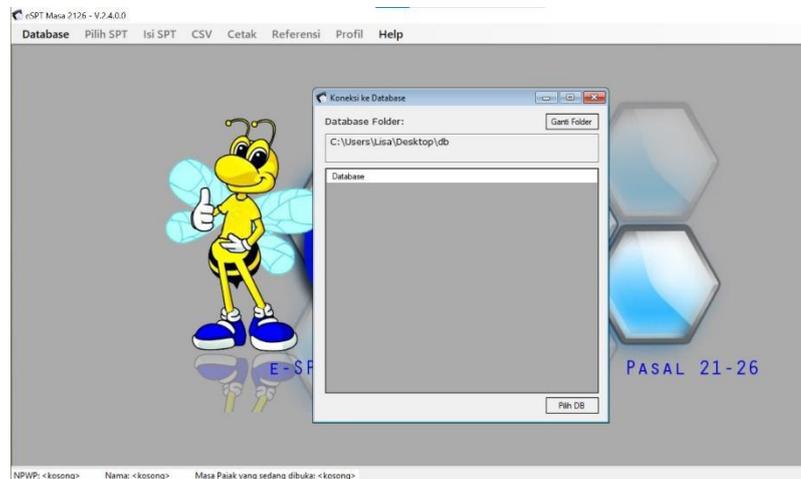
Gambar 3. 207 Aplikasi E-SPT PPh Pasal 21



Sumber: Dokumentasi Pribadi

2. Buka aplikasi e-SPT PPh Pasal 21/26.

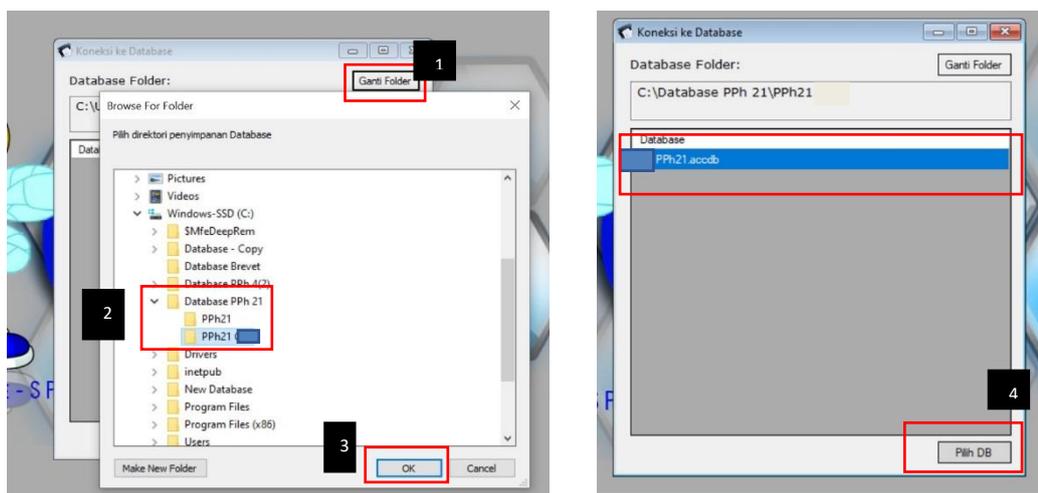
Gambar 3. 208 Halaman Awal Ketika Membuka E-SPT



Sumber: Dokumentasi Pribadi

3. Memilih *database* yang akan digunakan lalu klik *database* untuk membukanya dan melakukan *login database* dengan mengisi *username* dan *password*.

Gambar 3. 209 Membuka Database di E-SPT



Pada Gambar 3.209 merupakan cara untuk membuka *database* yang akan digunakan agar bisa melakukan *input* data pada e-SPT PPh Pasal 21. Jika *folder database* yang dipilih sudah sesuai format maka akan

memiliki format .accdb maka langkah selanjutnya bisa klik Pilih DB. Jika *database* sudah berhasil terbuka maka langkah selanjutnya yaitu melakukan *login*.

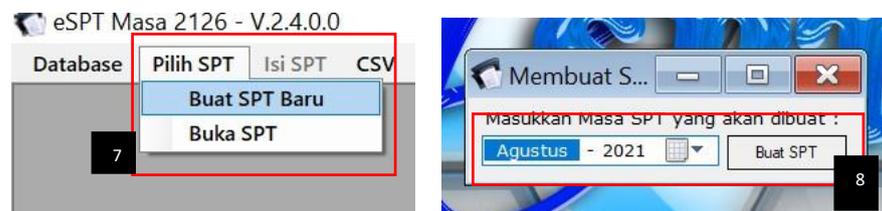
Gambar 3. 210 Login Pada E-SPT PPh Pasal 21



Pada Gambar 3.210 saat ingin melakukan *login* maka harus memasukan *username* yaitu administrator dan *password* yaitu 123 jika sudah lalu klik *Login*. Jika *login* berhasil maka akan keluar pemberitahuan jika *login* telah berhasil dan bisa klik OK.

4. Jika *database* sudah terbuka pilih SPT dan buat SPT baru dengan mengisi masa pajak yang diperlukan. Lalu klik Buat SPT.

Gambar 3. 211 Membuat SPT Baru PT KAT

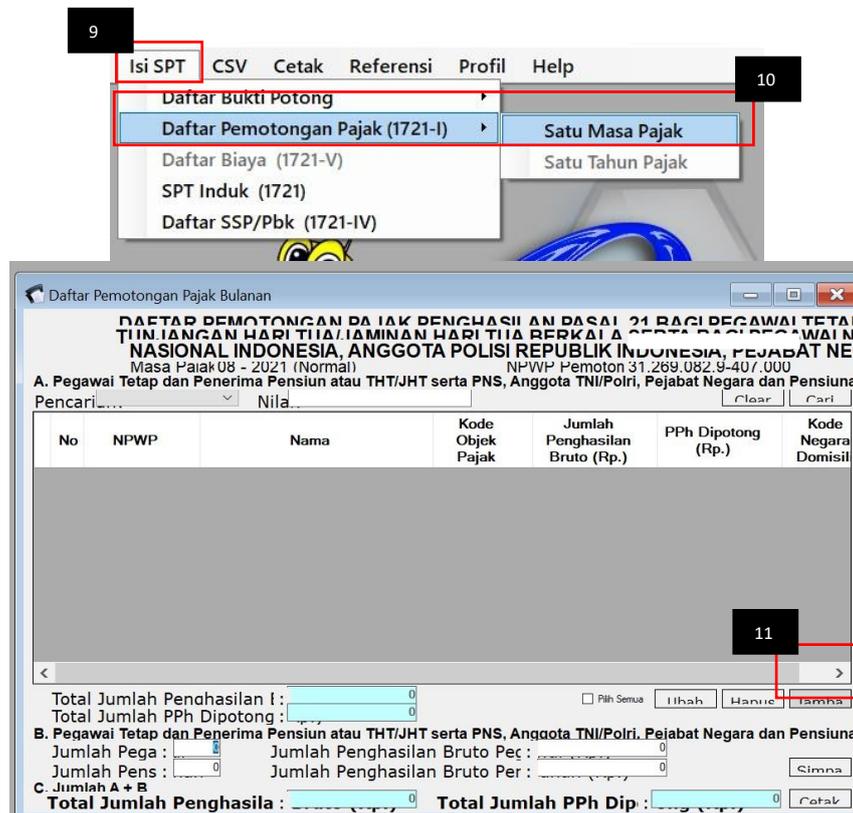


Pada Gambar 3.211 merupakan langkah jika sebelumnya Wajib Pajak belum membuat SPT pada periode tertentu yaitu dapat dengan

memilih Pilih SPT dan pilih Buat SPT Baru. Jika sudah memilih Buat SPT Baru langkah selanjutnya yaitu memilih Masa SPT yang akan dibuat untuk PT KAT masa yang akan dibuat adalah masa Agustus 2021 jika sudah klik Buat SPT.

5. Pilih isi SPT lalu klik daftar pemotongan pajak (1721-1) kemudian pilih Satu Masa Pajak. Jika ingin melakukan *input* data transaksi klik Tambah untuk melakukan pengisian penghasilan bagi pegawai tetap.

Gambar 3. 212 Menginput Daftar Pemotongan PT KAT

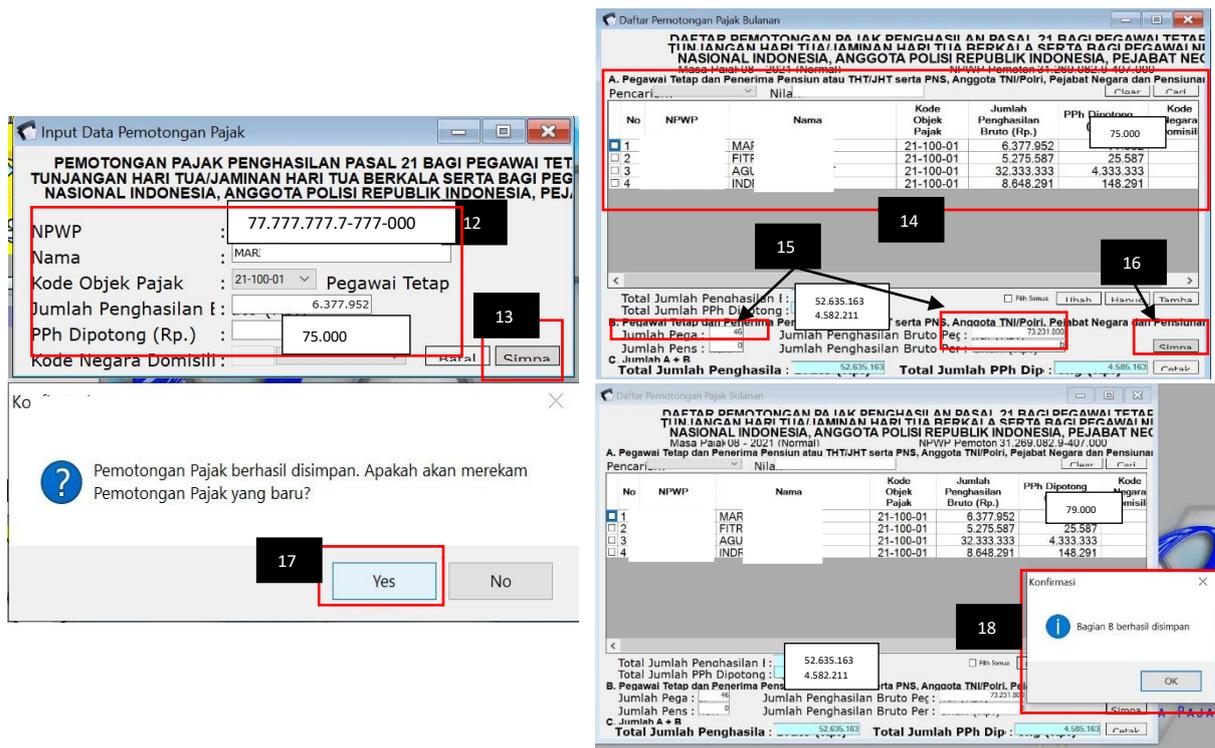


Pada Gambar 3.212 akan dilakukan penginputan Daftar Pemotongan selama Satu Masa Pajak maka yang harus dilakukan adalah pilih menu Isi SPT seperti nomor 9, lalu pilih Daftar Pemotongan Pajak (1721-I) Satu Masa Pajak seperti nomor 10. Lalu akan muncul tampilan Daftar

Pemotongan Pajak Bulanan untuk mengisi data pegawai tetap yang penghasilannya diatas PTKP maka pilih Tambah seperti nomor 11.

- Isikan data nomor NPWP, nama, kode objek pajak, jumlah penghasilan bruto, dan PPh dipotong lalu klik simpan. Pastikan semua data pegawai tetap sudah terisi sesuai dengan jumlah pegawai tetap. Isi juga daftar pegawat tetap yang penghasilannya tidak lebih PTKP denga nisi pada kolom jumlah pegawai dan jumlah penghasilan bruto lalu klik simpan.

Gambar 3. 213 Mengisi Data Daftar Pemotongan Pajak



Pada Gambar 3.200 merupakan cara untuk mengisi Daftar Pemotongan berdasarkan data yang sudah diberikan pembimbing lapangan. Bagi pegawai tetap yang memiliki penghasilan diatas PTKP maka harus mengisi NPWP yaitu 77.777.777.7-777-000, nama yaitu

Mar, kode pajak 21-100-01 yang menandakan pegawai tetap, jumlah penghasilan bruto yaitu Rp 6.377.952, dan PPh yang dipotong Rp 75.000. Setelah itu bisa terus mengisi daftar pemotongan bagi Wajib Pajak berpenghasilan diatas PTKP hingga 4 pegawai, jika sudah maka klik Simpan dan akan muncul semua pegawai tetap penghasilan diatas PTKP seperti nomor 14. Bagi pegawai tetap penghasilan di bawah PTKP maka bisa mengisi jumlah pegawai sebanyak 46 dan jumlah penghasilan bruto sebesar Rp 73.231.800 seperti nomor 15. Lalu klik Simpan untuk menyimpan perubahan karena telah mengisi bagian pegawai tetap di bawah PTKP. Jika muncul kotak notifikasi Bagian B Berhasil disimpan maka klik OK.

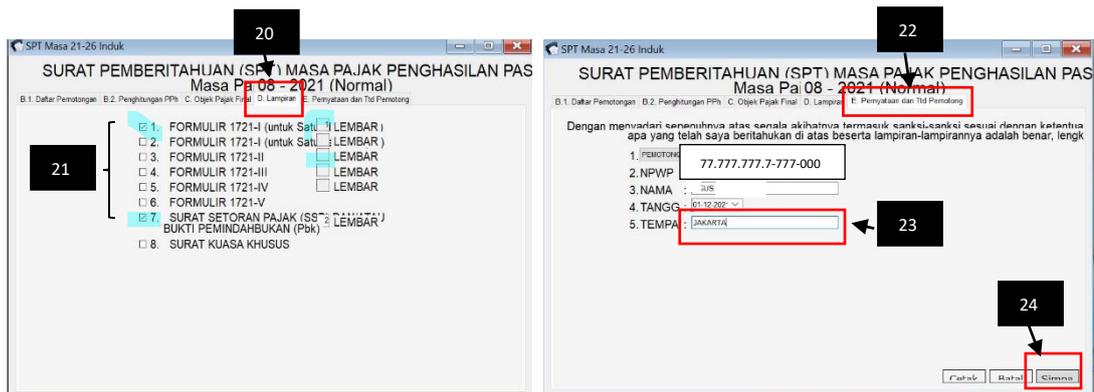
- Setelah proses pengisian SPT selesai selanjutnya pilih menu isi SPT pilih SPT Induk (1721) maka akan menampilkan jumlah pajak terutang.

Gambar 3. 214 SPT Induk PT KAT

NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp.)	JUMLAH PAJAK PENGHASILAN (Rp.)
1.	PEGAWAI TETAP	21-100-01	50	125.866.963	4.585.163
2.	PENERIMA PENSUN BERKALA	21-100-02	0	0	0
3.	PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU TENAGA KERJA LEPAS	21-100-03	0	0	0
4.	BUKAN PEGAWAI:				
4a.	DISTRIBUTOR MULTILEVEL MARKETING (MLM)	21-100-04	0	0	0
4b.	PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI	21-100-05	0	0	0
4c.	PENJAJA BARANG DAGANGAN	21-100-06	0	0	0
4d.	TENAGA AHLI	21-100-07	0	0	0
4e.	BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN	21-100-08	0	0	0
4f.	BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG TIDAK BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN	21-100-09	0	0	0
5.	ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ATAU DEWAN PENGAWAS YANG TIDAK MERANGKAP SEBAGAI PEGAWAI TETAP	21-100-10	0	0	0
6.	MANTAN PEGAWAI YANG MENERIMA JASA PRODUKSI, TANTIEM, BONUS ATAU IMBALAN LAIN	21-100-11	0	0	0
7.	PEGAWAI YANG MELAKUKAN PENARIKAN DANA PENSUN	21-100-12	0	0	0
8.	PESERTA KEGIATAN	21-100-13	0	0	0
9.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 TIDAK FINAL LAINNYA	21-100-99	0	0	0
10.	PEGAWAI PEMBERI JASA PEGAWAI PENSUN BERKALA SEBAGAI WAJIB PAJAK LUAR NEGERI	21-100-98	0	0	0
11.	JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 10)		50	125.866.963	4.582.211

8. Pada tab SPT Induk pilih “D. Lampiran *Check List* yang akan dilampirkan” dan “E. Pernyataan dan TTd Pemotong” lalu isi kolom tempat sesuai daerah lalu klik simpan dan cetak.

Gambar 3. 215 Induk PT KAT

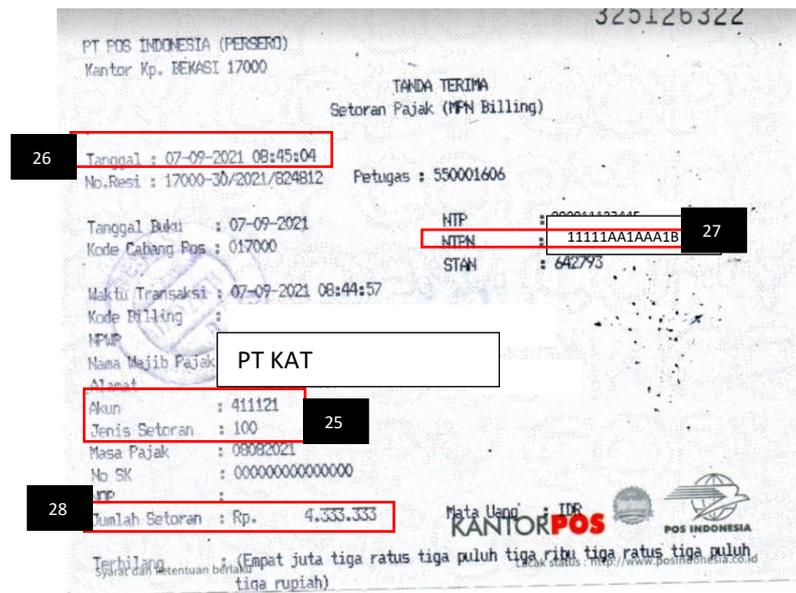


Pada Gambar 3.215 bagian SPT Induk yang harus dilakukan adalah mengisi bagian D. Lampiran nomor 20 dengan memberikan *checklist* seperti nomor 21 yang diberi warna biru diantaranya formulir 1721-1 sebanyak 1 lembar dan SSP yang diberikan pembimbing lapangan sebanyak 2 lembar. Mengisi bagian E. Pernyataan dan TTd Pemotong seperti nomor 22 pada bagian tempat diisi Jakarta sesuai dengan informasi yang diberikan pembimbing lapangan seperti nomor 23. Setelah selesai klik Simpan seperti nomor 24.

9. Selanjutnya pajak yang terutang harus dibayarkan terlebih dahulu untuk memperoleh nomor NTPN yang dapat dilihat dari Bukti Penerimaan Negara yang diperoleh dari pembimbing lapangan. Setelah mendapatkan nomor NTPN langkah berikutnya yaitu memasukan data tersebut ke dalam daftar SSP dengan pilih menu isi

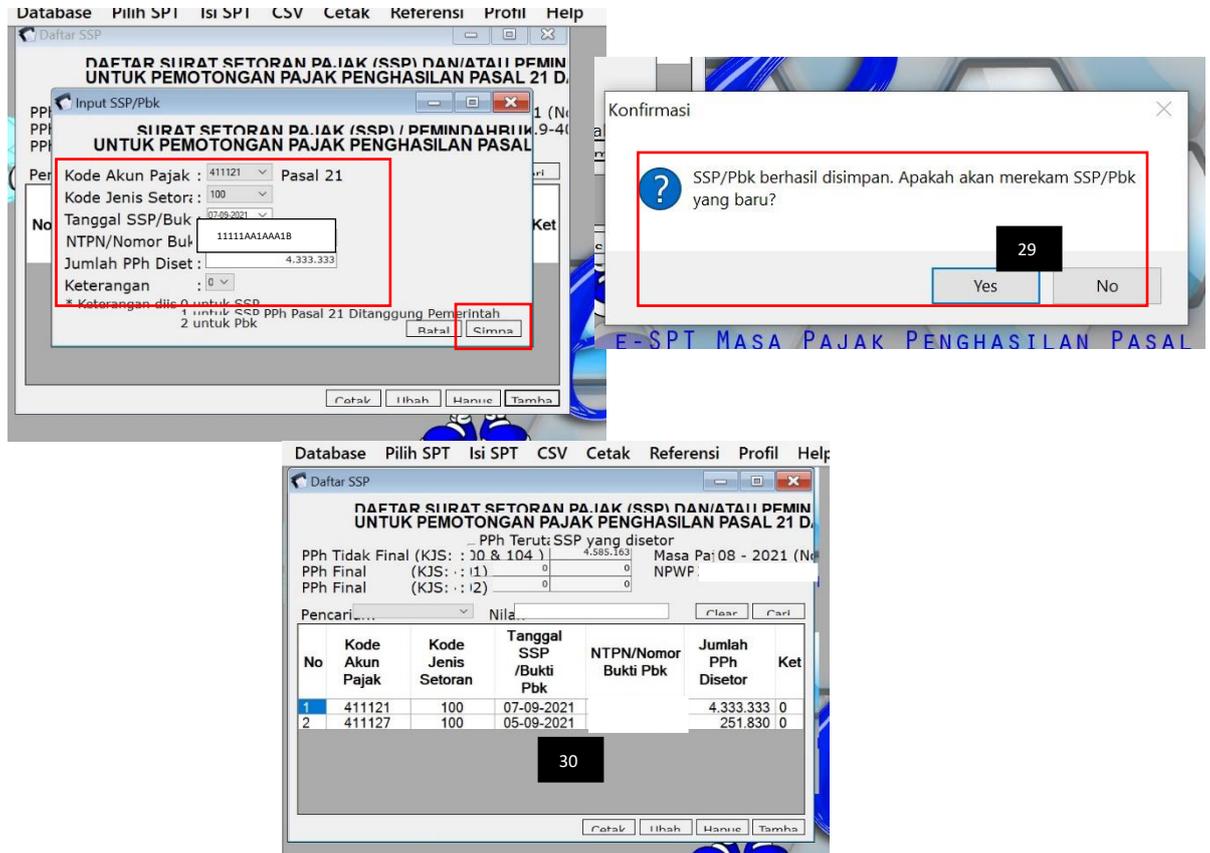
SPT lalu pilih daftar SSP setelah selesai pilih simpan dan kembali ke tampilan awal.

Gambar 3. 216 Bukti Penerimaan Negara PT KAT



Sumber: Dokumentasi Perusahaan

Gambar 3. 217 Mengisi Daftar SSP PT KAT



Pada Gambar 3.217 mengisi daftar SSP seperti Bukti Penerimaan Negara yang diperoleh dari pembimbing lapangan yaitu kode akun pajak 411121 yang menandakan PPh Pasal 21 dan kode jenis setoran 100 seperti nomor 25, Tanggal SSP yaitu 7 September 2021 seperti nomor 26, NTPN 11111AA1AAA1B seperti nomor 27, dan Jumlah PPh Disetor Rp 4.333.333 seperti nomor 28 jika sudah klik Simpan. Jika ingin melanjutkan menginput SSP maka klik Yes seperti nomor 29. Saat semua SSP yang dibutuhkan sudah terinput maka akan muncul tampilan seperti nomor 30.

- Pilih menu cetak lalu pilih formulir SPT dan klik formulir apa saja yang akan dicetak (1721-1, 1721, dan Daftar SSP).

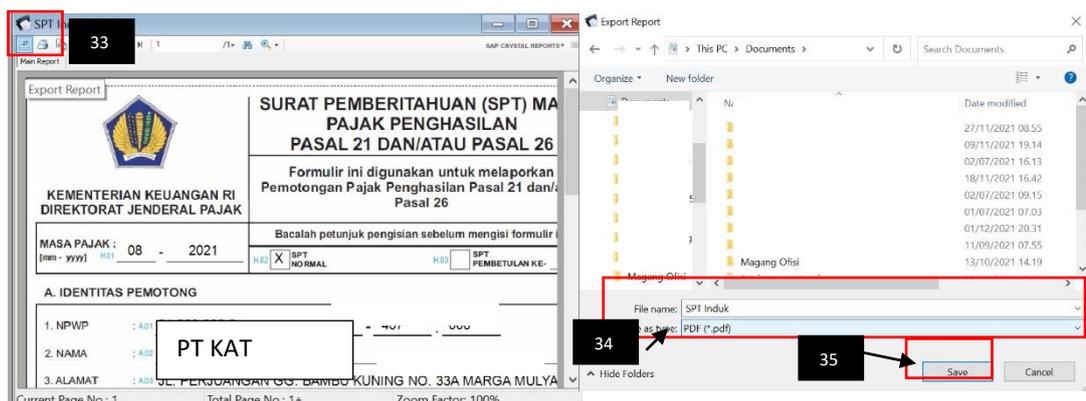
Gambar 3. 218 Mencetak SPT PPh Pasal 21



Pada Gambar 3.218 merupakan cara untuk mencetak formulir SPT PPh Masa Pasal 21 yang harus dilakukan yaitu memilih menu Cetak klik Formulir seperti gambar nomor 31 setelah itu akan muncul menu cetak SPT yang dibutuhkan pembimbing lapangan adalah formulir 1721, 1721-1, dan SSP lalu klik formulir yang akan dicetak.

- Setelah *file* terbuka lalu pilih menu *export report* untuk menyimpan formulir.

Gambar 3. 219 Export Formulir SPT



Pada Gambar 3.206 merupakan cara untuk menyimpan yang nantinya akan dicetak yaitu klik menu *Main Report* pada pojok kiri atas seperti nomor 33 yang nantinya akan diarahkan ke tempat penyimpanan laptop,

selanjutnya mengganti nama dan mengubah tipe *file* menjadi *pdf* seperti gambar nomor 34 setelah itu klik *Save* seperti gambar nomor 35.

3.3.1.17 PT GA

a) **Input e-SPT PPh Pasal 21**

Tugas melakukan *input* e-SPT PPh Pasal 21 dilakukan untuk beberapa perusahaan dengan periode yang sama yaitu Agustus 2021. Dokumen yang diperlukan saat melakukan *penginputan* e-SPT PPh Pasal 21 adalah *database* perusahaan terkait, Bukti Penerimaan Negara (BPN), dan dokumen terkait SPT Masa PPh Pasal 21 dari pembimbing lapangan. . Proses *input* e-SPT dilakukan untuk periode Agustus 2021 atas 4 pegawai tetap dan 46 pegawai tidak tetap. Berikut merupakan proses *penginputan* e-SPT PPh Pasal 21:

1. *Instal* aplikasi e-SPT PPh Pasal 21/26.

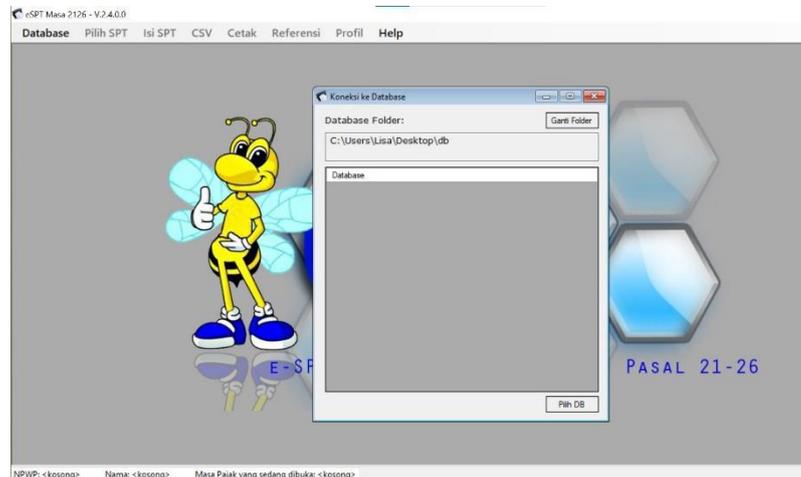
Gambar 3. 220 Aplikasi E-SPT PPh Pasal 21



Sumber: Dokumentasi Pribadi

2. Buka aplikasi e-SPT PPh Pasal 21/26.

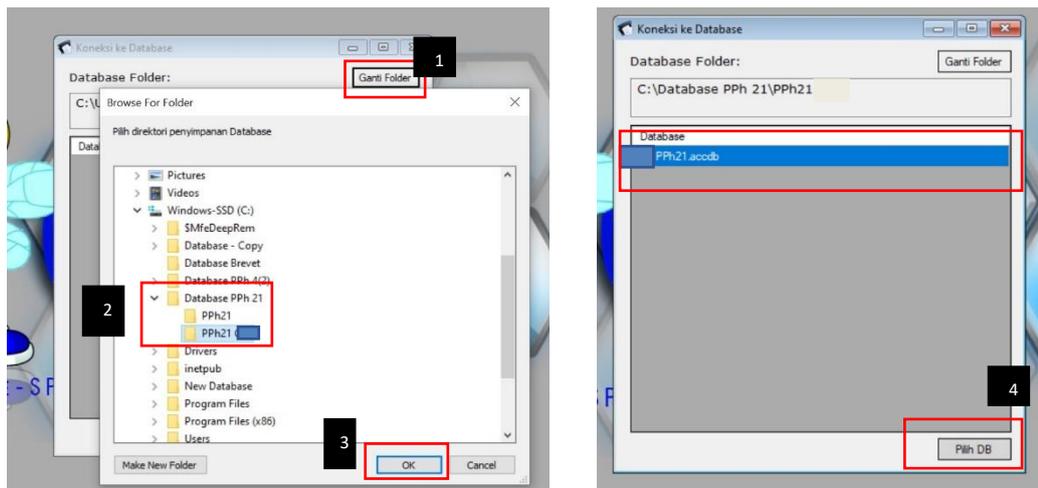
Gambar 3. 221 Halaman Awal Ketika Membuka E-SPT



Sumber: Dokumentasi Pribadi

3. Memilih *database* yang akan digunakan lalu klik *database* untuk membukanya dan melakukan *login database* dengan mengisi *username* dan *password*.

Gambar 3. 222 Membuka Database di E-SPT



Pada Gambar 3.222 merupakan cara untuk membuka *database* yang akan digunakan agar bisa melakukan *input* data pada e-SPT PPh Pasal

21. Jika *folder database* yang dipilih sudah sesuai format maka akan memiliki format *.accdb* maka langkah selanjutnya bisa klik Pilih DB. Jika *database* sudah berhasil terbuka maka langkah selanjutnya yaitu melakukan *login*.

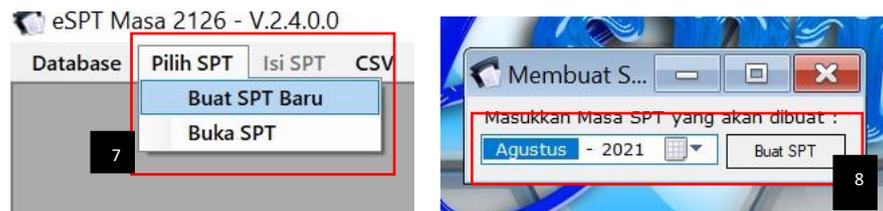
Gambar 3. 223 Login Pada E-SPT PPh Pasal 21



Pada Gambar 3.223 saat ingin melakukan *login* maka harus memasukan *username* yaitu *administrator* dan *password* yaitu *123* jika sudah lalu klik *Login*. Jika *login* berhasil maka akan keluar pemberitahuan jika *login* telah berhasil dan bisa klik OK.

4. Jika *database* sudah terbuka pilih SPT dan buat SPT baru dengan mengisi masa pajak yang diperlukan. Lalu klik Buat SPT.

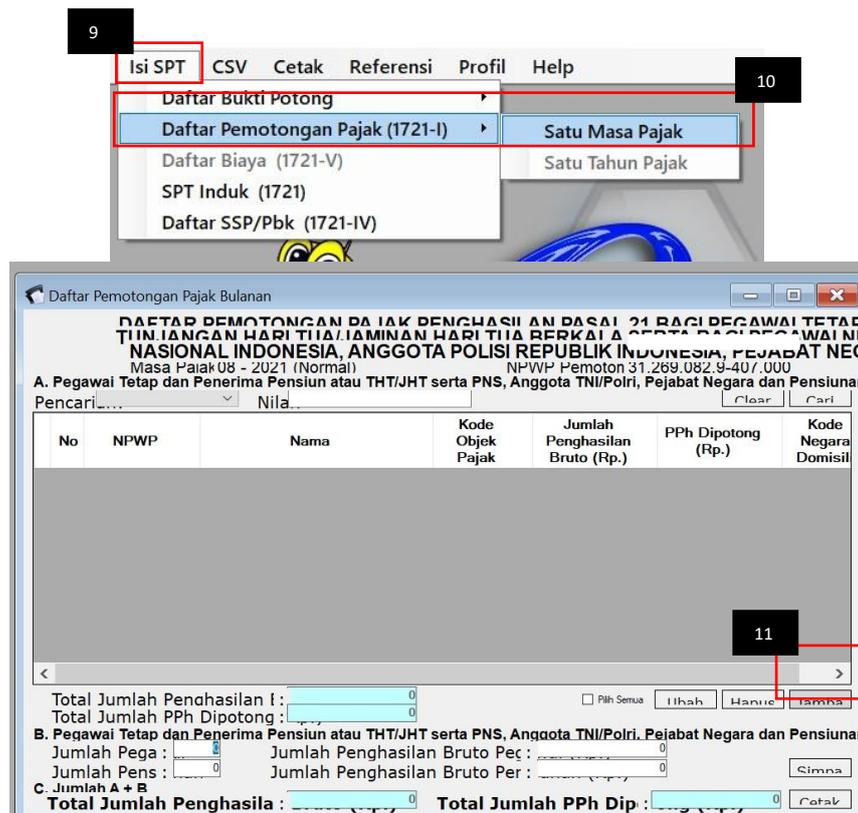
Gambar 3. 224 Membuat SPT Baru PT GA



Pada Gambar 3.224 merupakan langkah jika sebelumnya Wajib Pajak belum membuat SPT pada periode tertentu yaitu dapat dengan memilih Pilih SPT dan pilih Buat SPT Baru. Jika sudah memilih Buat SPT Baru langkah selanjutnya yaitu memilih Masa SPT yang akan dibuat untuk PT GA masa yang akan dibuat adalah masa Agustus 2021 jika sudah klik Buat SPT.

5. Pilih isi SPT lalu klik daftar pemotongan pajak (1721-1) kemudian pilih Satu Masa Pajak. Jika ingin melakukan *input* data transaksi klik Tambah untuk melakukan pengisian penghasilan bagi pegawai tetap.

Gambar 3. 225 Menginput Daftar Pemotongan PT GA

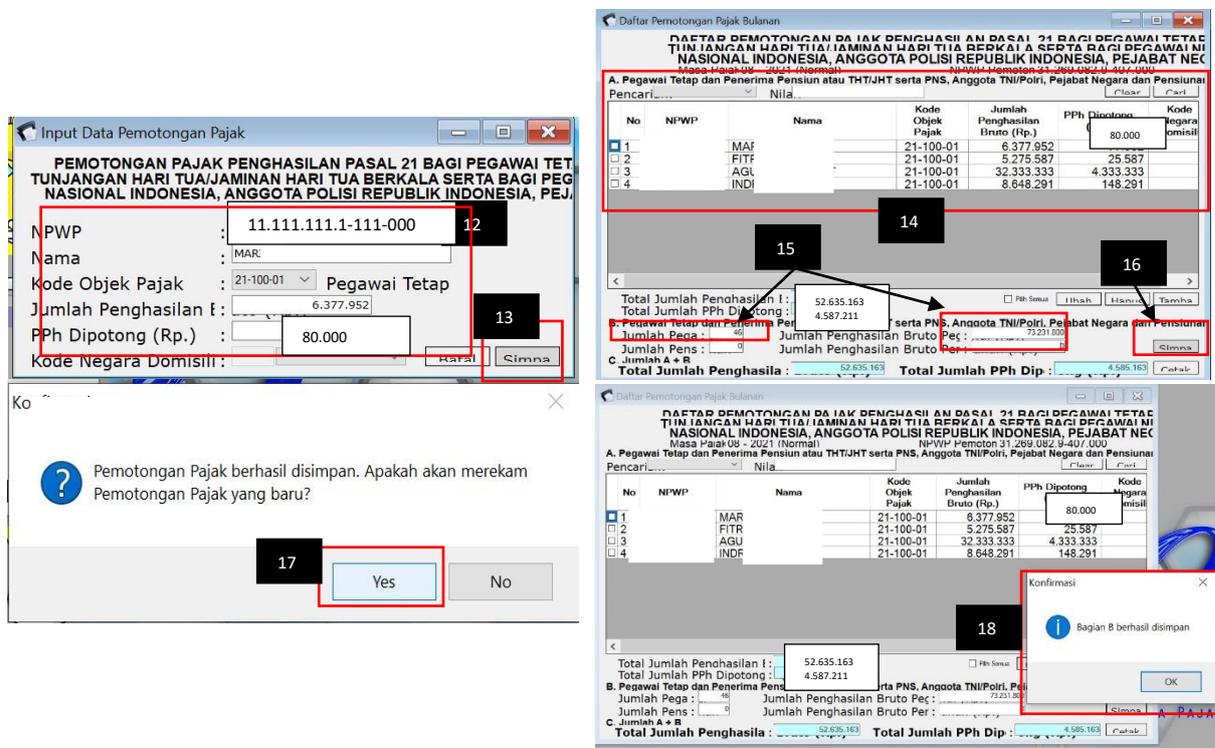


Pada Gambar 3.225 akan dilakukan penginputan Daftar Pemotongan selama Satu Masa Pajak maka yang harus dilakukan adalah pilih menu

Isi SPT seperti nomor 9, lalu pilih Daftar Pemotongan Pajak (1721-I) Satu Masa Pajak seperti nomor 10. Lalu akan muncul tampilan Daftar Pemotongan Pajak Bulanan untuk mengisi data pegawai tetap yang penghasilannya diatas PTKP maka pilih Tambah seperti nomor 11.

- Isikan data nomor NPWP, nama, kode objek pajak, jumlah penghasilan bruto, dan PPh dipotong lalu klik simpan. Pastikan semua data pegawai tetap sudah terisi sesuai dengan jumlah pegawai tetap. Isi juga daftar pegawai tetap yang penghasilannya tidak lebih PTKP dengani pada kolom jumlah pegawai dan jumlah penghasilan bruto lalu klik simpan.

Gambar 3. 226 Mengisi Data Daftar Pemotongan Pajak



Pada Gambar 3.226 merupakan cara untuk mengisi Daftar Pemotongan berdasarkan data yang sudah diberikan pembimbing

lapangan. Bagi pegawai tetap yang memiliki penghasilan diatas PTKP maka harus mengisi NPWP yaitu 77.777.777.7-777-000, nama yaitu Mar, kode pajak 21-100-01 yang menandakan pegawai tetap, jumlah penghasilan bruto yaitu Rp 6.377.952, dan PPh yang dipotong Rp 80.000. Setelah itu bisa terus mengisi daftar pemotongan bagi Wajib Pajak berpenghasilan diatas PTKP hingga 4 pegawai, jika sudah maka klik Simpan dan akan muncul semua pegawai tetap penghasilan diatas PTKP seperti nomor 14. Bagi pegawai tetap penghasilan di bawah PTKP maka bisa mengisi jumlah pegawai sebanyak 46 dan jumlah penghasilan bruto sebesar Rp 73.231.800 seperti nomor 15. Lalu klik Simpan untuk menyimpan perubahan karena telah mengisi bagian pegawai tetap di bawah PTKP. Jika muncul kotak notifikasi Bagian B Berhasil disimpan maka klik OK.

7. Setelah proses pengisian SPT selesai selanjutnya pilih menu isi SPT pilih SPT Induk (1721) maka akan menampilkan jumlah pajak terutang.

Gambar 3. 227 SPT Induk PT GA

NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp.)	JUMLAH PAJAK PENGHASILAN (Rp.)
1.	PEGAWAI TETAP	21-100-01	50	125.866.963	4.585.163
2.	PENERIMA PENSIIUN BERKALA	21-100-02	0	0	0
3.	PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU TENAGA KERJA LEPAS	21-100-03	0	0	0
4.	BUKAN PEGAWAI				
4a.	DISTRIBUTOR MULTILEVEL MARKETING (MLM)	21-100-04	0	0	0
4b.	PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI	21-100-05	0	0	0
4c.	PENAJAJA BARANG DAGANGAN	21-100-06	0	0	0
4d.	TENAGA AHLI	21-100-07	0	0	0
4e.	BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN	21-100-08	0	0	0
4f.	BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG TIDAK BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN	21-100-09	0	0	0
5.	ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ATAU DEWAN PENGAWAS YANG TIDAK MERANGKAP SEBAGAI PEGAWAI TETAP	21-100-10	0	0	0
6.	MANTAN PEGAWAI YANG MENERIMA JASA PRODUKSI, TANTIEM, BONUS ATAU IMBALAN LAIN	21-100-11	0	0	0
7.	PEGAWAI YANG MELAKUKAN PENARIKAN DANA PENSIIUN	21-100-12	0	0	0
8.	PESERTA KEGIATAN	21-100-13	0	0	0
9.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 TIDAK FINAL LAINNYA	21-100-99	0	0	0
10.	PEGAWAI/PEMBERI JASA/PESERTA KEGIATAN/PENERIMA PENSIIUN BERKALA SEBAGAI WAJIB PAJAK LUAR NEGERI	27-100-99	0	0	0
11.	JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 10)		50	125.866.963	4.587.211

8. Pada tab SPT Induk pilih “D. Lampiran *Check List* yang akan dilampirkan” dan “E. Pernyataan dan Ttd Pemotong” lalu isi kolom tempat sesuai daerah lalu klik simpan dan cetak.

Gambar 3. 228 Induk PT GA

Pada Gambar 3.228 bagian SPT Induk yang harus dilakukan adalah mengisi bagian D. Lampiran nomor 20 dengan memberikan *checklist* seperti nomor 21 yang diberi warna biru diantaranya formulir 1721-1 sebanyak 1 lembar dan SSP yang diberikan pembimbing lapangan

sebanyak 2 lembar. Mengisi bagian E. Pernyataan dan TTd Pemotong seperti nomor 22 pada bagian tempat diisi Jakarta sesuai dengan informasi yang diberikan pembimbing lapangan seperti nomor 23. Setelah selesai klik Simpan seperti nomor 24.

- Selanjutnya pajak yang terutang harus dibayarkan terlebih dahulu untuk memperoleh nomor NTPN yang dapat dilihat dari Bukti Penerimaan Negara yang diperoleh dari pembimbing lapangan. Setelah mendapatkan nomor NTPN langkah berikutnya yaitu memasukan data tersebut ke dalam daftar SSP dengan pilih menu isi SPT lalu pilih daftar SSP setelah selesai pilih simpan dan kembali ke tampilan awal.

Gambar 3. 229 Bukti Penerimaan Negara PT GA

PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Kp. BEKASI 17000

TANDA TERIMA
Setoran Pajak (NPN Billing)

325126322

26 Tanggal : 07-09-2021 08:45:04
No.Resi : 17000-30/2021/624812 Petugas : 550001606

Tanggal Bukti : 07-09-2021
Kode Cabang Pos : 017000
Maktu Transaksi : 07-09-2021 08:44:57
Kode Billing :
NPNR :
Nama Wajib Pajak : PT GA
Alamat :
25 Akun : 411121
Jenis Setoran : 100
Masa Pajak : 09082021
No SK : 0000000000000000
28 Jumlah Setoran : Rp. 4.333.333

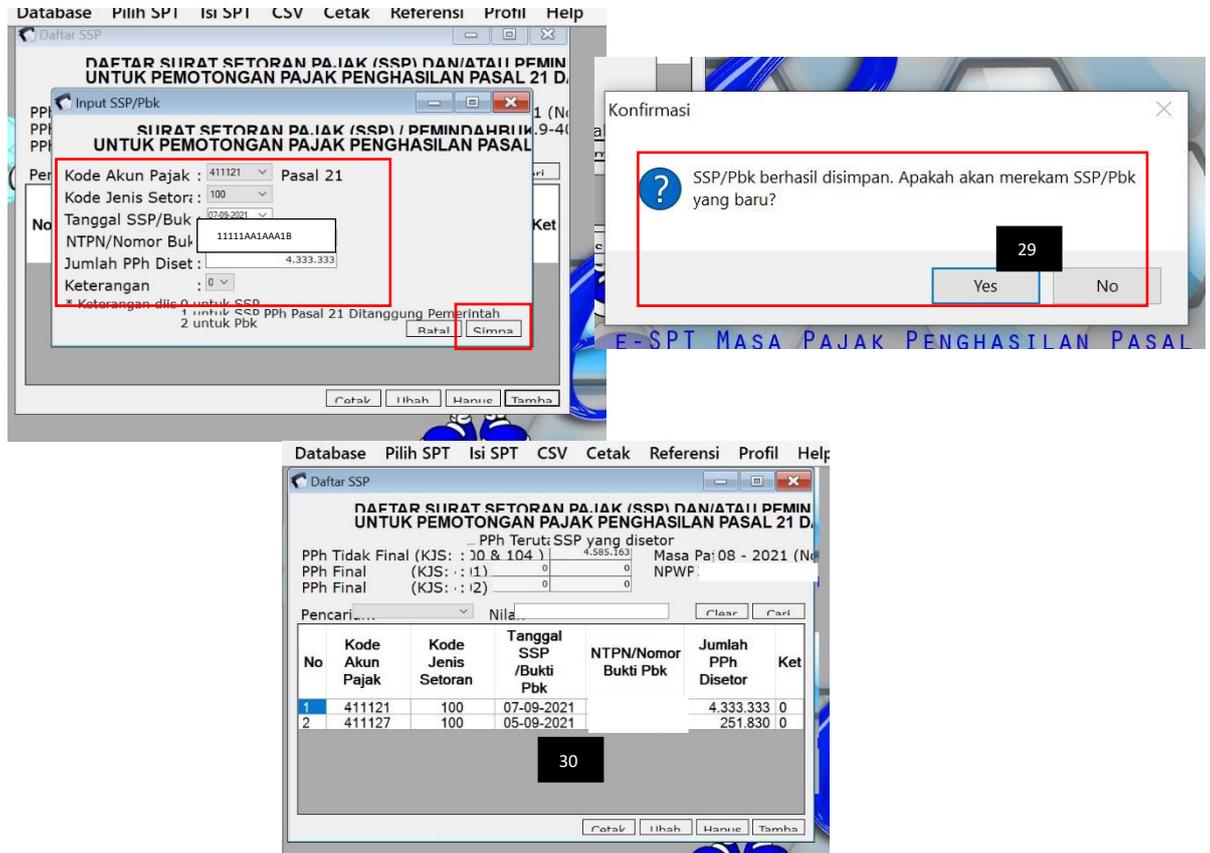
NTP : 000011223445
NTEN : 11111AAA1AAA1B 27
STAN : 642793

Mata Uang IDR
RANTORI POS POS INDONESIA

Terbilang : (Empat juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah)
Syarat dan ketentuan berlaku

Sumber: Dokumentasi Perusahaan

Gambar 3. 230 Mengisi Daftar SSP PT GA



Pada Gambar 3.230 mengisi daftar SSP seperti Bukti Penerimaan Negara yang diperoleh dari pembimbing lapangan yaitu kode akun pajak 411121 yang menandakan PPh Pasal 21 dan kode jenis setoran 100 seperti nomor 25, Tanggal SSP yaitu 7 September 2021 seperti nomor 26, NTPN 11111AA1AAA1B seperti nomor 27, dan Jumlah PPh Disetor Rp 4.333.333 seperti nomor 28 jika sudah klik Simpan. Jika ingin melanjutkan menginput SSP maka klik Yes seperti nomor 29. Saat semua SSP yang dibutuhkan sudah terinput maka akan muncul tampilan seperti nomor 30.

- Pilih menu cetak lalu pilih formulir SPT dan klik formulir apa saja yang akan dicetak (1721-1, 1721, dan Daftar SSP).

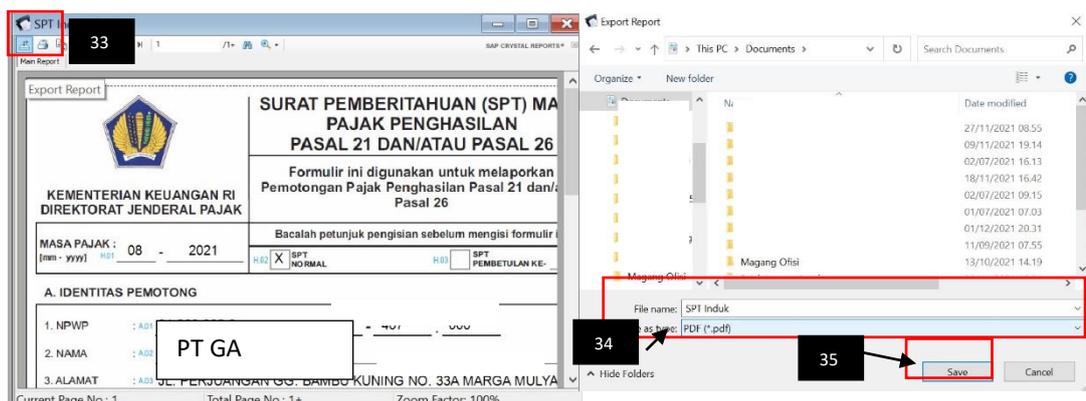
Gambar 3. 231 Mencetak SPT PPh Pasal 21



Pada Gambar 3.231 merupakan cara untuk mencetak formulir SPT PPh Masa Pasal 21 yang harus dilakukan yaitu memilih menu Cetak klik Formulir seperti gambar nomor 31 setelah itu akan muncul menu cetak SPT yang dibutuhkan pembimbing lapangan adalah formulir 1721, 1721-1, dan SSP lalu klik formulir yang akan dicetak.

- Setelah *file* terbuka lalu pilih menu *export report* untuk menyimpan formulir.

Gambar 3. 232 Export Formulir SPT



Pada Gambar 3.232 merupakan cara untuk menyimpan yang nantinya akan dicetak yaitu klik menu *Main Report* pada pojok kiri atas seperti nomor 33 yang nantinya akan diarahkan ke tempat penyimpanan laptop,

selanjutnya mengganti nama dan mengubah tipe *file* menjadi *pdf* seperti gambar nomor 34 setelah itu klik *Save* seperti gambar nomor 35.

3.3.1.18 PT ACM

a) *Input e-SPT PPh Pasal 21*

Tugas melakukan *input* e-SPT PPh Pasal 21 dilakukan untuk beberapa perusahaan dengan periode yang sama yaitu Agustus 2021. Dokumen yang diperlukan saat melakukan *penginputan* e-SPT PPh Pasal 21 adalah *database* perusahaan terkait, Bukti Penerimaan Negara (BPN), dan dokumen terkait SPT Masa PPh Pasal 21 dari pembimbing lapangan. . Proses *input* e-SPT dilakukan untuk periode Agustus 2021 atas 4 pegawai tetap dan 46 pegawai tidak tetap. Berikut merupakan proses *penginputan* e-SPT PPh Pasal 21:

1. *Instal* aplikasi e-SPT PPh Pasal 21/26.

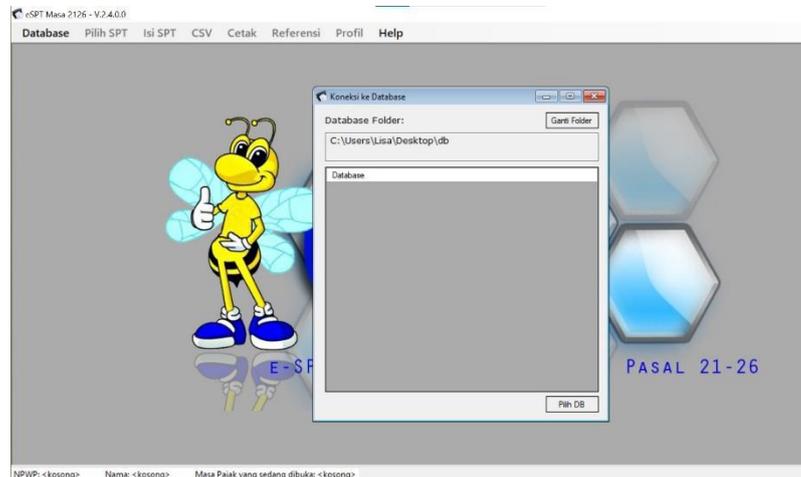
Gambar 3. 233 Aplikasi E-SPT PPh Pasal 21



Sumber: Dokumentasi Pribadi

2. Buka aplikasi e-SPT PPh Pasal 21/26.

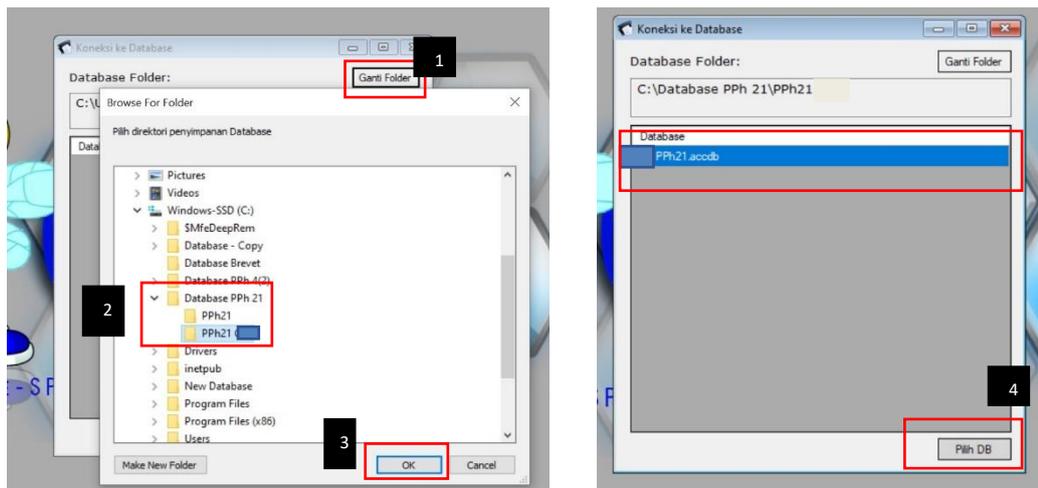
Gambar 3. 234 Halaman Awal Ketika Membuka E-SPT



Sumber: Dokumentasi Pribadi

3. Memilih *database* yang akan digunakan lalu klik *database* untuk membukanya dan melakukan *login database* dengan mengisi *username* dan *password*.

Gambar 3. 235 Membuka Database di E-SPT



Pada Gambar 3.235 merupakan cara untuk membuka *database* yang akan digunakan agar bisa melakukan *input* data pada e-SPT PPh Pasal

21. Jika *folder database* yang dipilih sudah sesuai format maka akan memiliki format *.accdb* maka langkah selanjutnya bisa klik Pilih DB. Jika *database* sudah berhasil terbuka maka langkah selanjutnya yaitu melakukan *login*.

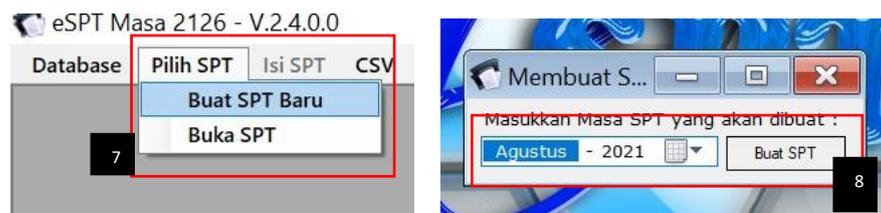
Gambar 3. 236 Login Pada E-SPT PPh Pasal 21



Pada Gambar 3.236 saat ingin melakukan *login* maka harus memasukan *username* yaitu *administrator* dan *password* yaitu *123* jika sudah lalu klik *Login*. Jika *login* berhasil maka akan keluar pemberitahuan jika *login* telah berhasil dan bisa klik OK.

4. Jika *database* sudah terbuka pilih SPT dan buat SPT baru dengan mengisi masa pajak yang diperlukan. Lalu klik Buat SPT.

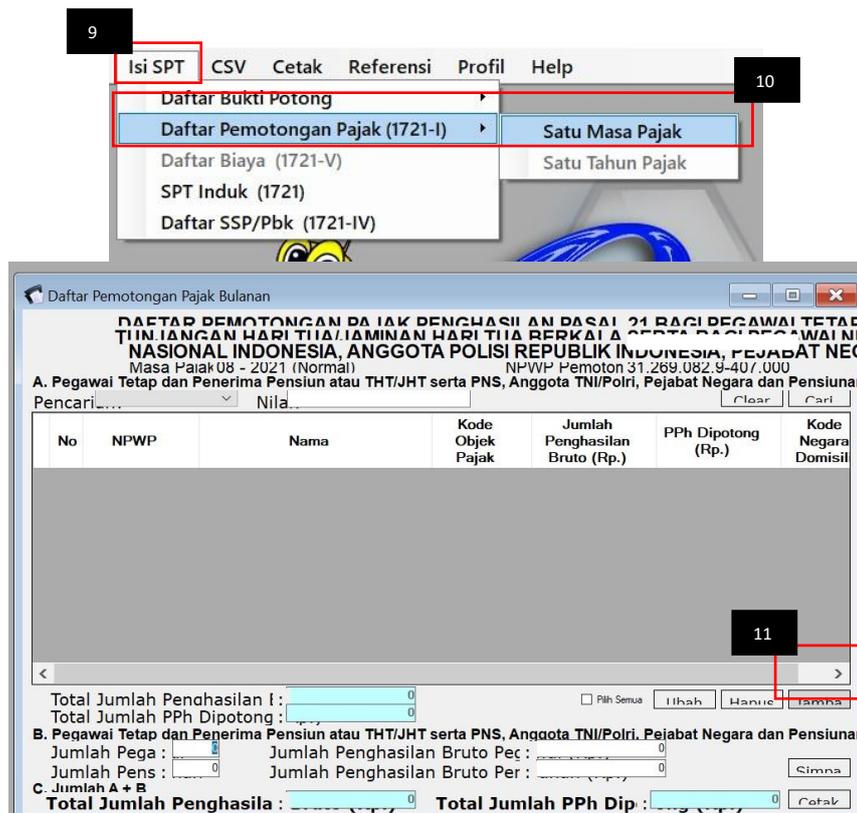
Gambar 3. 237 Membuat SPT Baru PT ACM



Pada Gambar 3.237 merupakan langkah jika sebelumnya Wajib Pajak belum membuat SPT pada periode tertentu yaitu dapat dengan memilih Pilih SPT dan pilih Buat SPT Baru. Jika sudah memilih Buat SPT Baru langkah selanjutnya yaitu memilih Masa SPT yang akan dibuat untuk PT ACM masa yang akan dibuat adalah masa Agustus 2021 jika sudah klik Buat SPT.

5. Pilih isi SPT lalu klik daftar pemotongan pajak (1721-1) kemudian pilih Satu Masa Pajak. Jika ingin melakukan *input* data transaksi klik Tambah untuk melakukan pengisian penghasilan bagi pegawai tetap.

Gambar 3. 238 Menginput Daftar Pemotongan PT ACM

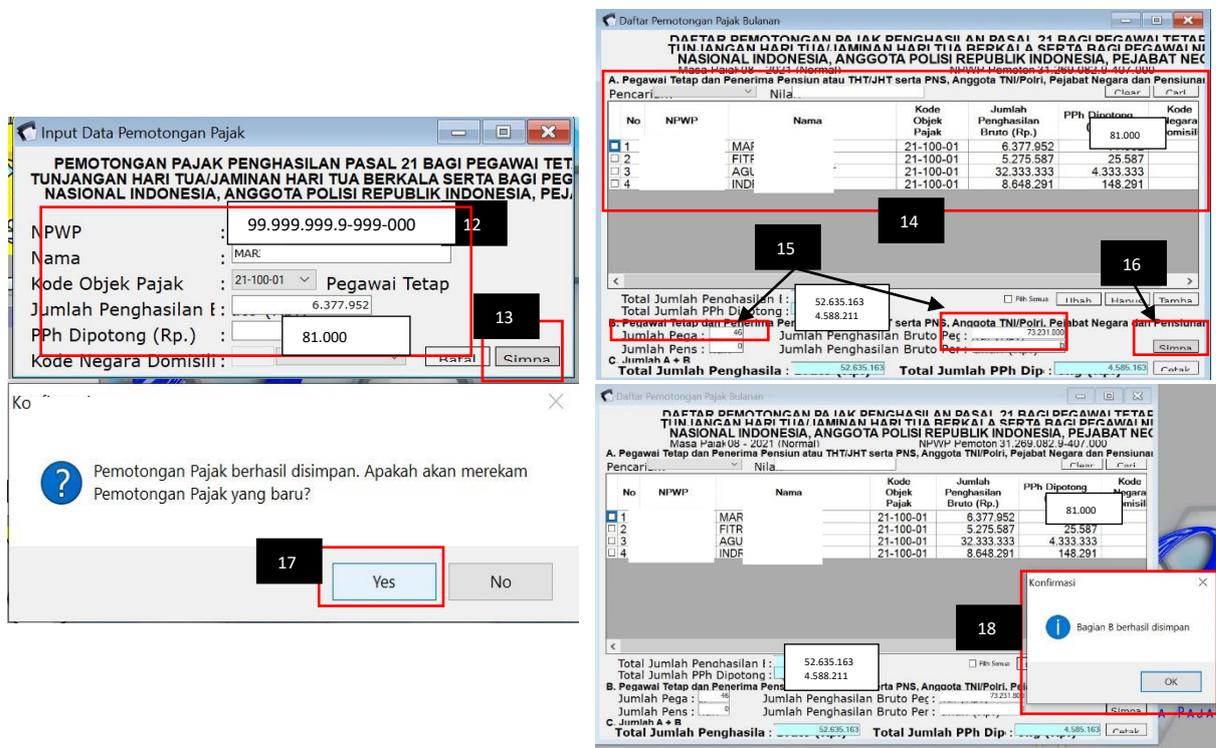


Pada Gambar 3.238 akan dilakukan *penginputan* Daftar Pemotongan selama Satu Masa Pajak maka yang harus dilakukan adalah pilih menu

Isi SPT seperti nomor 9, lalu pilih Daftar Pemotongan Pajak (1721-I) Satu Masa Pajak seperti nomor 10. Lalu akan muncul tampilan Daftar Pemotongan Pajak Bulanan untuk mengisi data pegawai tetap yang penghasilannya diatas PTKP maka pilih Tambah seperti nomor 11.

- Isikan data nomor NPWP, nama, kode objek pajak, jumlah penghasilan bruto, dan PPh dipotong lalu klik simpan. Pastikan semua data pegawai tetap sudah terisi sesuai dengan jumlah pegawai tetap. Isi juga daftar pegawai tetap yang penghasilannya tidak lebih PTKP dengan isi pada kolom jumlah pegawai dan jumlah penghasilan bruto lalu klik simpan.

Gambar 3. 239 Mengisi Data Daftar Pemotongan Pajak



Pada Gambar 3.239 merupakan cara untuk mengisi Daftar Pemotongan berdasarkan data yang sudah diberikan pembimbing

lapangan. Bagi pegawai tetap yang memiliki penghasilan diatas PTKP maka harus mengisi NPWP yaitu 99.999.999.9-999-000, nama yaitu Mar, kode pajak 21-100-01 yang menandakan pegawai tetap, jumlah penghasilan bruto yaitu Rp 6.377.952, dan PPh yang dipotong Rp 81.000. Setelah itu bisa terus mengisi daftar pemotongan bagi Wajib Pajak berpenghasilan diatas PTKP hingga 4 pegawai, jika sudah maka klik Simpan dan akan muncul semua pegawai tetap penghasilan diatas PTKP seperti nomor 14. Bagi pegawai tetap penghasilan di bawah PTKP maka bisa mengisi jumlah pegawai sebanyak 46 dan jumlah penghasilan bruto sebesar Rp 73.231.800 seperti nomor 15. Lalu klik Simpan untuk menyimpan perubahan karena telah mengisi bagian pegawai tetap di bawah PTKP. Jika muncul kotak notifikasi Bagian B Berhasil disimpan maka klik OK.

7. Setelah proses pengisian SPT selesai selanjutnya pilih menu isi SPT pilih SPT Induk (1721) maka akan menampilkan jumlah pajak terutang.

Gambar 3. 240 SPT Induk PT ACM

NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp.)	JUMLAH PAJAK PENGHASILAN (Rp.)
1.	PEGAWAI TETAP	21-100-01	50	125.866.963	4.585.163
2.	PENERIMA PENSUN BERKALA	21-100-02	0	0	0
3.	PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU TENAGA KERJA LEPAS	21-100-03	0	0	0
4.	BUKAN PEGAWAI				
4a.	DISTRIBUTOR MULTILEVEL MARKETING (MLM)	21-100-04	0	0	0
4b.	PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI	21-100-05	0	0	0
4c.	PENAJAJA BARANG DAGANGAN	21-100-06	0	0	0
4d.	TENAGA AHLI	21-100-07	0	0	0
4e.	BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN	21-100-08	0	0	0
4f.	BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG TIDAK BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN	21-100-09	0	0	0
5.	ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ATAU DEWAN PENGAWAS YANG TIDAK MERANGKAP SEBAGAI PEGAWAI TETAP	21-100-10	0	0	0
6.	MANTAN PEGAWAI YANG MENERIMA JASA PRODUKSI, TANTIEM, BONUS ATAU IMBALAN LAIN	21-100-11	0	0	0
7.	PEGAWAI YANG MELAKUKAN PENARIKAN DANA PENSUN	21-100-12	0	0	0
8.	PESERTA KEGIATAN	21-100-13	0	0	0
9.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 TIDAK FINAL LAINNYA	21-100-99	0	0	0
10.	PEGAWAI/PEMBERI JASA/PESERTA KEGIATAN/PENERIMA PENSUN BERKALA SEBAGAI WAJIB PAJAK LUAR NEGERI	27-100-99	0	0	0
11.	JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 10)		50	125.866.963	4.588.211

8. Pada tab SPT Induk pilih “D. Lampiran *Check List* yang akan dilampirkan” dan “E. Pernyataan dan TTd Pemotong” lalu isi kolom tempat sesuai daerah lalu klik simpan dan cetak.

Gambar 3. 241 Induk PT ACM

Pada Gambar 3.241 bagian SPT Induk yang harus dilakukan adalah mengisi bagian D. Lampiran nomor 20 dengan memberikan *checklist* seperti nomor 21 yang diberi warna biru diantaranya formulir 1721-1 sebanyak 1 lembar dan SPP yang diberikan pembimbing lapangan

sebanyak 2 lembar. Mengisi bagian E. Pernyataan dan TTd Pemotong seperti nomor 22 pada bagian tempat diisi Jakarta sesuai dengan informasi yang diberikan pembimbing lapangan seperti nomor 23. Setelah selesai klik Simpan seperti nomor 24.

- Selanjutnya pajak yang terutang harus dibayarkan terlebih dahulu untuk memperoleh nomor NTPN yang dapat dilihat dari Bukti Penerimaan Negara yang diperoleh dari pembimbing lapangan. Setelah mendapatkan nomor NTPN langkah berikutnya yaitu memasukan data tersebut ke dalam daftar SSP dengan pilih menu isi SPT lalu pilih daftar SSP setelah selesai pilih simpan dan kembali ke tampilan awal.

Gambar 3. 242 Bukti Penerimaan Negara PT ACM

PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Kp. BEKASI 17000

TANDA TERIMA
Setoran Pajak (NPN Billing)

26 Tanggal : 07-09-2021 08:45:04
No.Resi : 17000-30/2021/624812 Petugas : 550001606

Tanggal Bukti : 07-09-2021
Kode Cabang Pos : 017000
Maktu Transaksi : 07-09-2021 08:44:57
Kode Billing :
NPNB :
Nama Wajib Pajak : PT ACM
Alamat :
25 Akun : 411121
Jenis Setoran : 100
Masa Pajak : 09082021
No SK : 0000000000000000
28 Jumlah Setoran : Rp. 4.333.333

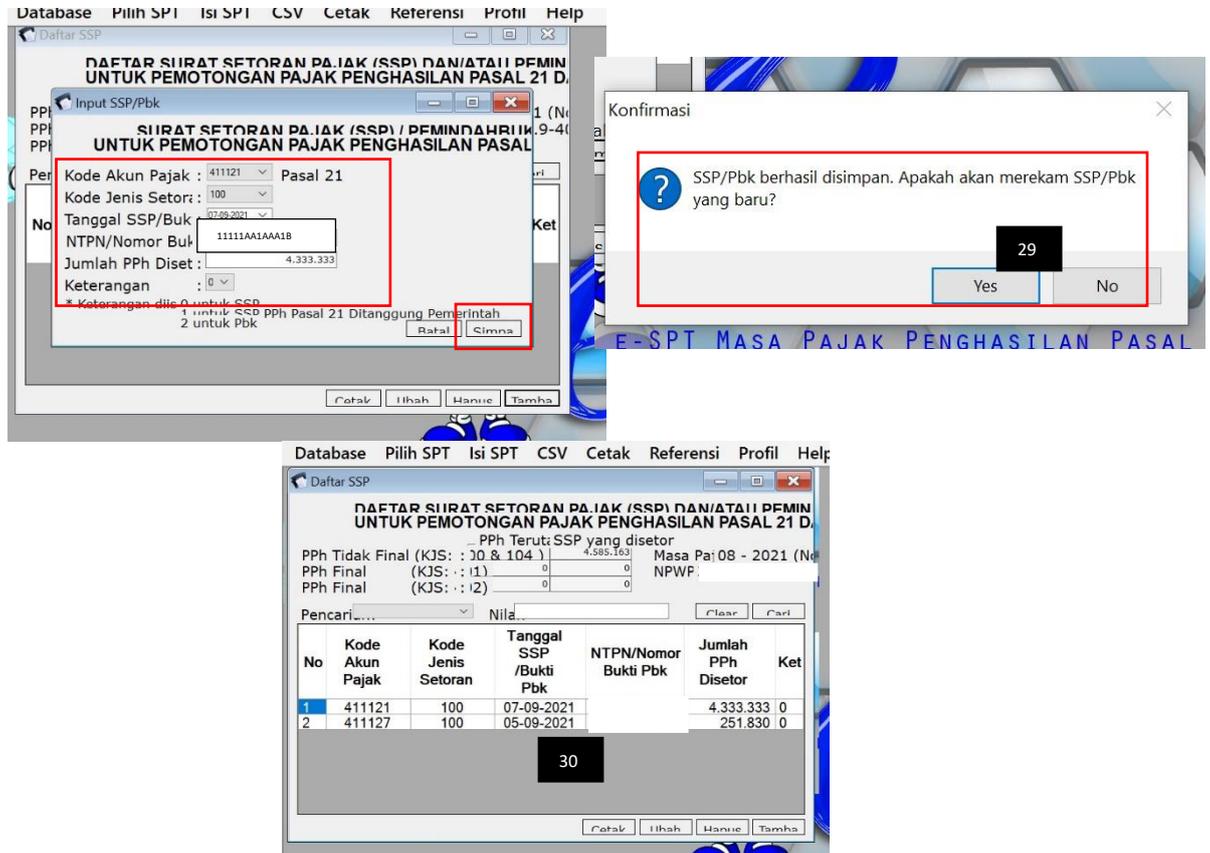
NTP :
NTEN : 11111AA1AAA1B 27
STAN : 642793

Mata Uang : IDR
RANTORI POS
POS INDONESIA

Terbilang : (Empat juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah)
Syarat dan ketentuan berlaku

Sumber: Dokumentasi Perusahaan

Gambar 3. 243 Mengisi Daftar SSP PT ACM



Pada Gambar 3.243 mengisi daftar SSP seperti Bukti Penerimaan Negara yang diperoleh dari pembimbing lapangan yaitu kode akun pajak 411121 yang menandakan PPh Pasal 21 dan kode jenis setoran 100 seperti nomor 25, Tanggal SSP yaitu 7 September 2021 seperti nomor 26, NTPN 11111AA1AAA1B seperti nomor 27, dan Jumlah PPh Disetor Rp 4.333.333 seperti nomor 28 jika sudah klik Simpan. Jika ingin melanjutkan menginput SSP maka klik Yes seperti nomor 29. Saat semua SSP yang dibutuhkan sudah terinput maka akan muncul tampilan seperti nomor 30.

- Pilih menu cetak lalu pilih formulir SPT dan klik formulir apa saja yang akan dicetak (1721-1, 1721, dan Daftar SSP).

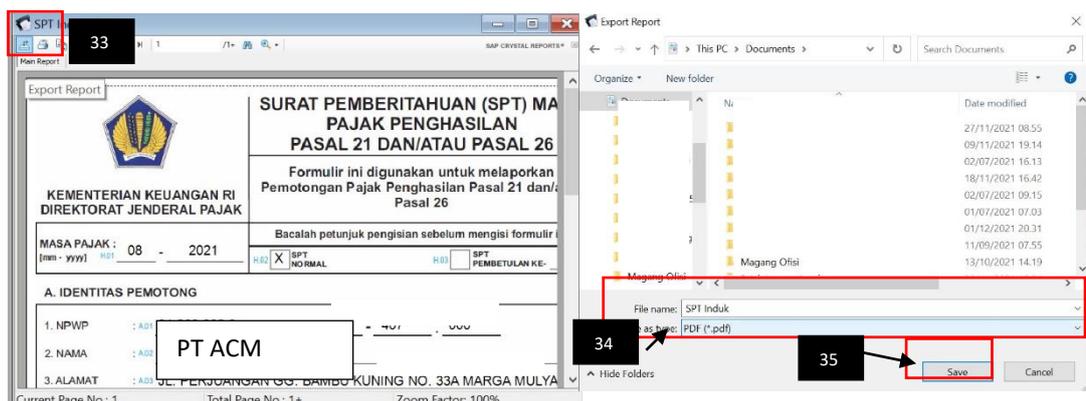
Gambar 3. 244 Mencetak SPT PPh Pasal 21



Pada Gambar 3.244 merupakan cara untuk mencetak formulir SPT PPh Masa Pasal 21 yang harus dilakukan yaitu memilih menu Cetak klik Formulir seperti gambar nomor 31 setelah itu akan muncul menu cetak SPT yang dibutuhkan pembimbing lapangan adalah formulir 1721, 1721-1, dan SSP lalu klik formulir yang akan dicetak.

- Setelah *file* terbuka lalu pilih menu *export report* untuk menyimpan formulir.

Gambar 3. 245 Export Formulir SPT



Pada Gambar 3.245 merupakan cara untuk menyimpan yang nantinya akan dicetak yaitu klik menu *Main Report* pada pojok kiri atas seperti nomor 33 yang nantinya akan diarahkan ke tempat penyimpanan laptop,

selanjutnya mengganti nama dan mengubah tipe *file* menjadi *pdf* seperti gambar nomor 34 setelah itu klik *Save* seperti gambar nomor 35.

3.3.1.19 PT KIK

a) *Input e-SPT PPh Pasal 21*

Tugas melakukan *input e-SPT PPh Pasal 21* dilakukan untuk beberapa perusahaan dengan periode yang sama yaitu Agustus 2021. Dokumen yang diperlukan saat melakukan *penginputan e-SPT PPh Pasal 21* adalah *database* perusahaan terkait, Bukti Penerimaan Negara (BPN), dan dokumen terkait SPT Masa PPh Pasal 21 dari pembimbing lapangan. . Proses *input e-SPT* dilakukan untuk periode Agustus 2021 atas 4 pegawai tetap dan 46 pegawai tidak tetap. Berikut merupakan proses *penginputan e-SPT PPh Pasal 21*:

1. *Instal* aplikasi e-SPT PPh Pasal 21/26.

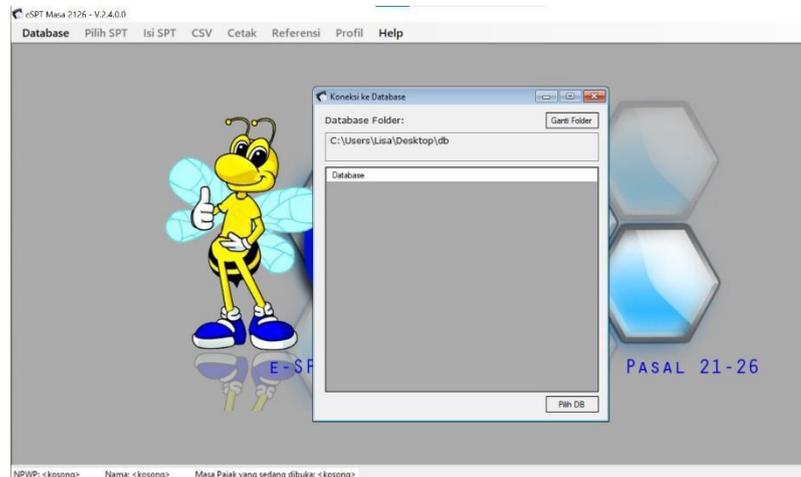
Gambar 3. 246 Aplikasi E-SPT PPh Pasal 21



Sumber: Dokumentasi Pribadi

2. Buka aplikasi e-SPT PPh Pasal 21/26.

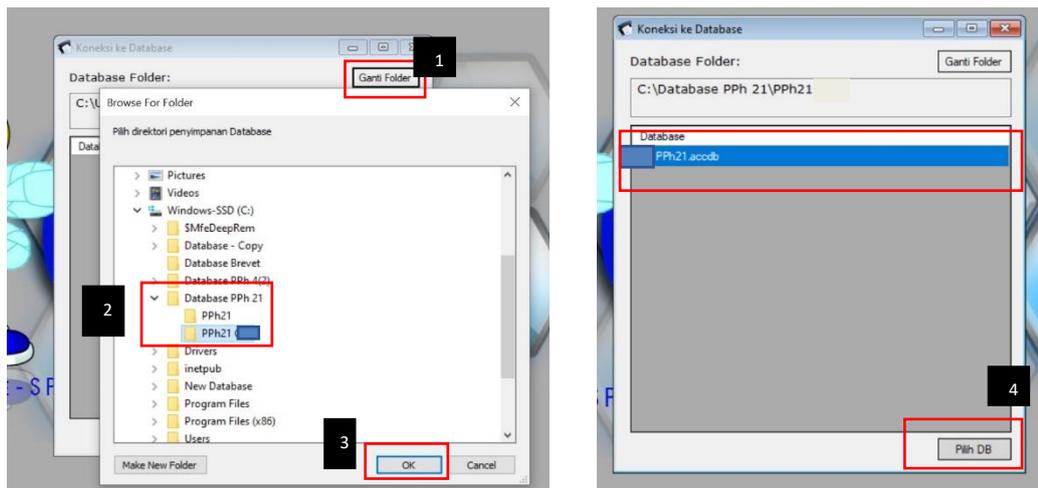
Gambar 3. 247 Halaman Awal Ketika Membuka E-SPT



Sumber: Dokumentasi Pribadi

3. Memilih *database* yang akan digunakan lalu klik *database* untuk membukanya dan melakukan *login database* dengan mengisi *username* dan *password*.

Gambar 3. 248 Membuka Database di E-SPT



Pada Gambar 3.248 merupakan cara untuk membuka *database* yang akan digunakan agar bisa melakukan *input* data pada e-SPT PPh Pasal

21. Jika *folder database* yang dipilih sudah sesuai format maka akan memiliki format *.accdb* maka langkah selanjutnya bisa klik Pilih DB. Jika *database* sudah berhasil terbuka maka langkah selanjutnya yaitu melakukan *login*.

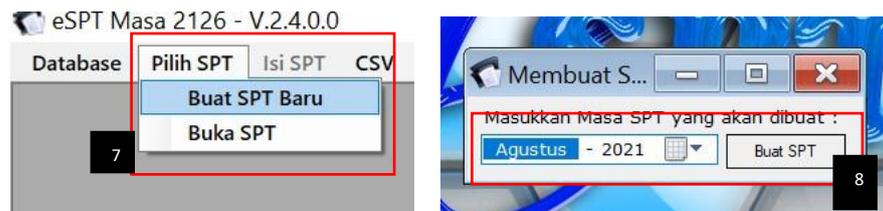
Gambar 3. 249 Login Pada E-SPT PPh Pasal 21



Pada Gambar 3.249 saat ingin melakukan *login* maka harus memasukan *username* yaitu administrator dan *password* yaitu 123 jika sudah lalu klik *Login*. Jika *login* berhasil maka akan keluar pemberitahuan jika *login* telah berhasil dan bisa klik OK.

4. Jika *database* sudah terbuka pilih SPT dan buat SPT baru dengan mengisi masa pajak yang diperlukan. Lalu klik Buat SPT.

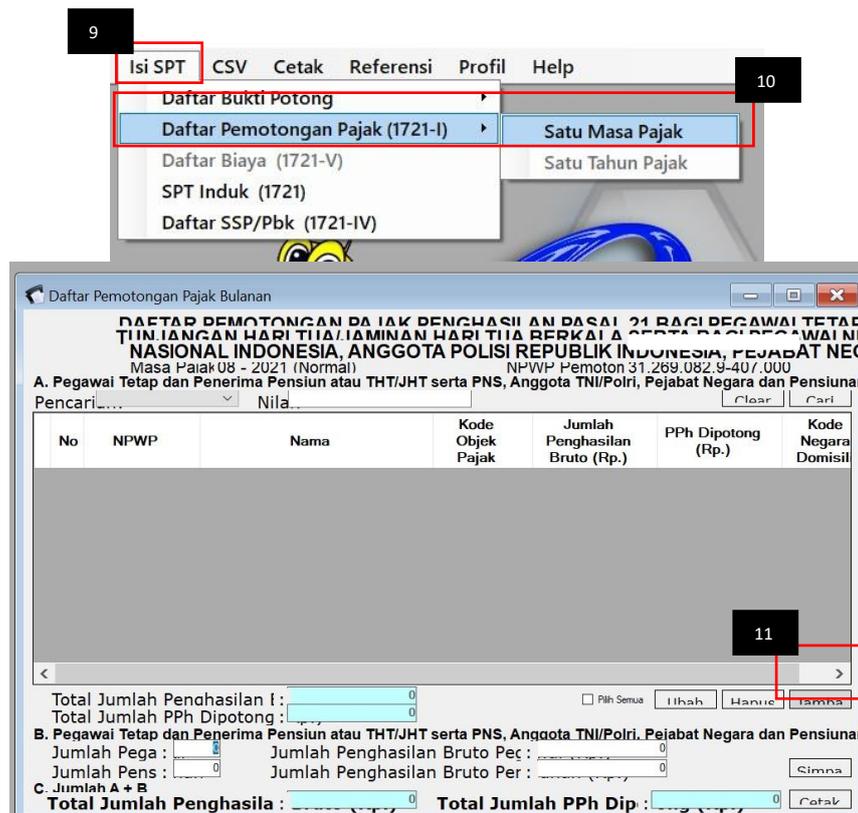
Gambar 3. 250 Membuat SPT Baru PT KIK



Pada Gambar 3.250 merupakan langkah jika sebelumnya Wajib Pajak belum membuat SPT pada periode tertentu yaitu dapat dengan memilih Pilih SPT dan pilih Buat SPT Baru. Jika sudah memilih Buat SPT Baru langkah selanjutnya yaitu memilih Masa SPT yang akan dibuat untuk PT KIK masa yang akan dibuat adalah masa Agustus 2021 jika sudah klik Buat SPT.

5. Pilih isi SPT lalu klik daftar pemotongan pajak (1721-1) kemudian pilih Satu Masa Pajak. Jika ingin melakukan *input* data transaksi klik Tambah untuk melakukan pengisian penghasilan bagi pegawai tetap.

Gambar 3. 251 Menginput Daftar Pemotongan PT KIK

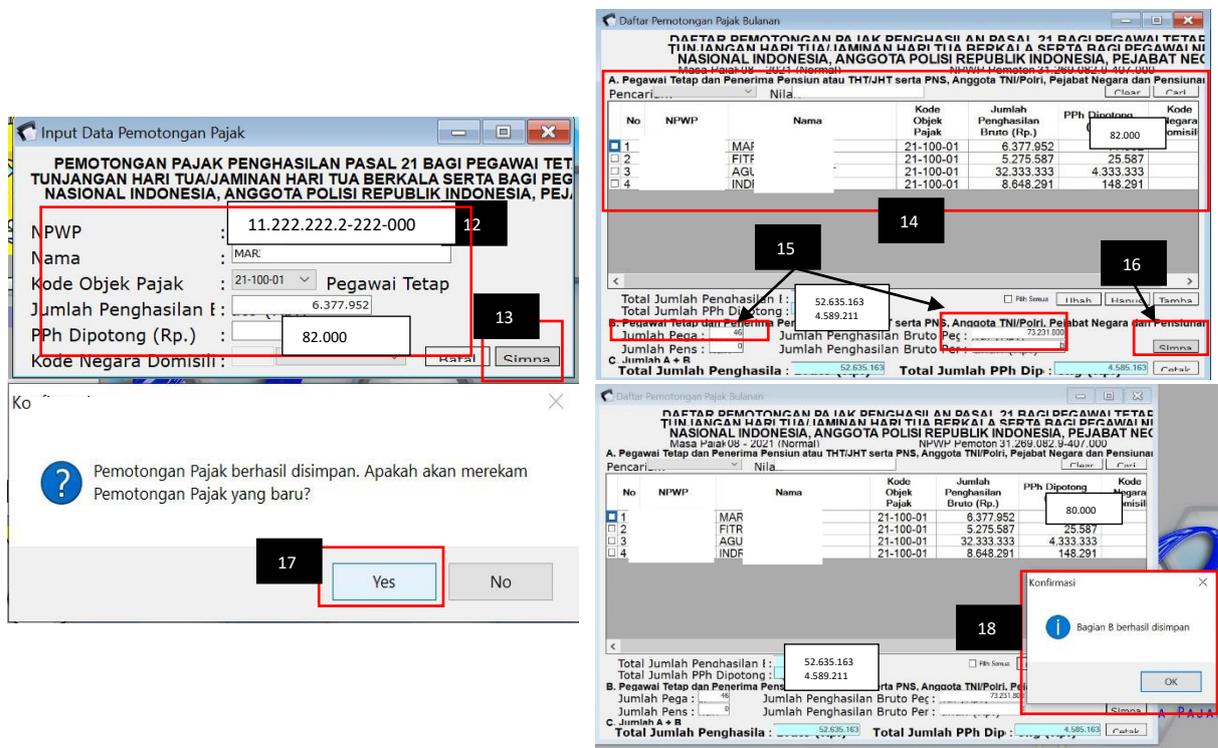


Pada Gambar 3.251 akan dilakukan *penginputan* Daftar Pemotongan selama Satu Masa Pajak maka yang harus dilakukan adalah pilih menu

Isi SPT seperti nomor 9, lalu pilih Daftar Pemotongan Pajak (1721-I) Satu Masa Pajak seperti nomor 10. Lalu akan muncul tampilan Daftar Pemotongan Pajak Bulanan untuk mengisi data pegawai tetap yang penghasilannya diatas PTKP maka pilih Tambah seperti nomor 11.

- Isikan data nomor NPWP, nama, kode objek pajak, jumlah penghasilan bruto, dan PPh dipotong lalu klik simpan. Pastikan semua data pegawai tetap sudah terisi sesuai dengan jumlah pegawai tetap. Isi juga daftar pegawai tetap yang penghasilannya tidak lebih PTKP dengan nilai pada kolom jumlah pegawai dan jumlah penghasilan bruto lalu klik simpan.

Gambar 3. 252 Mengisi Data Daftar Pemotongan Pajak



Pada Gambar 3.252 merupakan cara untuk mengisi Daftar Pemotongan berdasarkan data yang sudah diberikan pembimbing

lapangan. Bagi pegawai tetap yang memiliki penghasilan diatas PTKP maka harus mengisi NPWP yaitu 11.222.222.2-222-000, nama yaitu Mar, kode pajak 21-100-01 yang menandakan pegawai tetap, jumlah penghasilan bruto yaitu Rp 6.377.952, dan PPh yang dipotong Rp 82.000. Setelah itu bisa terus mengisi daftar pemotongan bagi Wajib Pajak berpenghasilan diatas PTKP hingga 4 pegawai, jika sudah maka klik Simpan dan akan muncul semua pegawai tetap penghasilan diatas PTKP seperti nomor 14. Bagi pegawai tetap penghasilan di bawah PTKP maka bisa mengisi jumlah pegawai sebanyak 46 dan jumlah penghasilan bruto sebesar Rp 73.231.800 seperti nomor 15. Lalu klik Simpan untuk menyimpan perubahan karena telah mengisi bagian pegawai tetap di bawah PTKP. Jika muncul kotak notifikasi Bagian B Berhasil disimpan maka klik OK.

7. Setelah proses pengisian SPT selesai selanjutnya pilih menu isi SPT pilih SPT Induk (1721) maka akan menampilkan jumlah pajak terutang.

Gambar 3. 253 SPT Induk PT KIK

NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp.)	JUMLAH PAJAK PENGHASILAN (Rp.)
1.	PEGAWAI TETAP	21-100-01	50	125.866.963	4.585.163
2.	PENERIMA PENSUN BERKALA	21-100-02	0	0	0
3.	PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU TENAGA KERJA LEPAS	21-100-03	0	0	0
4.	BUKAN PEGAWAI				
4a.	DISTRIBUTOR MULTILEVEL MARKETING (MLM)	21-100-04	0	0	0
4b.	PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI	21-100-05	0	0	0
4c.	PENJAJA BARANG DAGANGAN	21-100-06	0	0	0
4d.	TENAGA AHLI	21-100-07	0	0	0
4e.	BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN	21-100-08	0	0	0
4f.	BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG TIDAK BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN	21-100-09	0	0	0
5.	ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ATAU DEWAN PENGAWAS YANG TIDAK MERANGKAP SEBAGAI PEGAWAI TETAP	21-100-10	0	0	0
6.	MANTAN PEGAWAI YANG MENERIMA JASA PRODUKSI, TANTIEM, BONUS ATAU IMBALAN LAIN	21-100-11	0	0	0
7.	PEGAWAI YANG MELAKUKAN PENARIKAN DANA PENSUN	21-100-12	0	0	0
8.	PESERTA KEGIATAN	21-100-13	0	0	0
9.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 TIDAK FINAL LAINNYA	21-100-99	0	0	0
10.	PEGAWAI/PEMBERI JASA/PESERTA KEGIATAN/PENERIMA PENSUN BERKALA SEBAGAI WAJIB PAJAK LUAR NEGERI	27-100-99	0	0	0
11.	JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 10)		50	125.866.963	4.589.211

8. Pada tab SPT Induk pilih “D. Lampiran *Check List* yang akan dilampirkan” dan “E. Pernyataan dan TTD Pemotong” lalu isi kolom tempat sesuai daerah lalu klik simpan dan cetak.

Gambar 3. 254 Induk PT KIK

Pada Gambar 3.254 bagian SPT Induk yang harus dilakukan adalah mengisi bagian D. Lampiran nomor 20 dengan memberikan *checklist* seperti nomor 21 yang diberi warna biru diantaranya formulir 1721-1 sebanyak 1 lembar dan SSP yang diberikan pembimbing lapangan

sebanyak 2 lembar. Mengisi bagian E. Pernyataan dan TTd Pemotong seperti nomor 22 pada bagian tempat diisi Jakarta sesuai dengan informasi yang diberikan pembimbing lapangan seperti nomor 23. Setelah selesai klik Simpan seperti nomor 24.

- Selanjutnya pajak yang terutang harus dibayarkan terlebih dahulu untuk memperoleh nomor NTPN yang dapat dilihat dari Bukti Penerimaan Negara yang diperoleh dari pembimbing lapangan. Setelah mendapatkan nomor NTPN langkah berikutnya yaitu memasukan data tersebut ke dalam daftar SSP dengan pilih menu isi SPT lalu pilih daftar SSP setelah selesai pilih simpan dan kembali ke tampilan awal.

Gambar 3. 255 Bukti Penerimaan Negara PT KIK

325126322

PT POS INDONESIA (PERGERO)
Kantor Kp. BEKASI 17000

TANDA TERIMA
Setoran Pajak (NPN Billing)

26 Tanggal : 07-09-2021 08:45:04
No. Resi : 17000-30/2021/624812 Petugas : 550001606

Tanggal Bukti : 07-09-2021
Kode Cabang Pos : 017000
Waktu Transaksi : 07-09-2021 08:44:57
Kode Billing :
NPN :
Nama Wajib Pajak : PT KIK
Akun : 411121
Jenis Setoran : 100
Masa Pajak : 09/08/2021
No SK : 0000000000000000
Jumlah Setoran : Rp. 4.333.333

NTP :
NTPN : 11111AAA1AAA1B
STAN : 642793

27

25

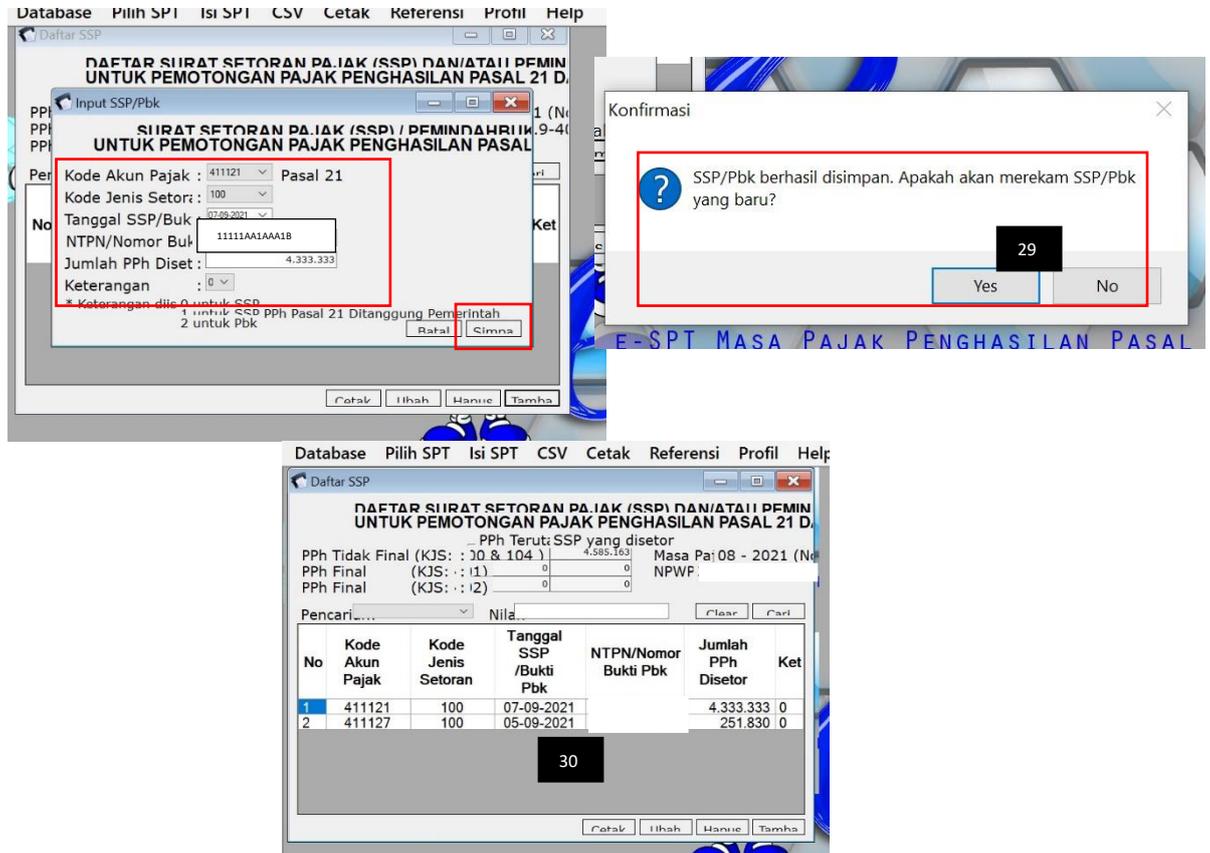
28

Mata Uang IDR
RANTORI POS POS INDONESIA

Terbilang : (Empat juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah)

Sumber: Dokumentasi Perusahaan

Gambar 3. 256 Mengisi Daftar SSP PT KIK



Pada Gambar 3.256 mengisi daftar SSP seperti Bukti Penerimaan Negara yang diperoleh dari pembimbing lapangan yaitu kode akun pajak 411121 yang menandakan PPh Pasal 21 dan kode jenis setoran 100 seperti nomor 25, Tanggal SSP yaitu 7 September 2021 seperti nomor 26, NTPN 11111AA1AAA1B seperti nomor 27, dan Jumlah PPh Disetor Rp 4.333.333 seperti nomor 28 jika sudah klik Simpan. Jika ingin melanjutkan menginput SSP maka klik Yes seperti nomor 29. Saat semua SSP yang dibutuhkan sudah terinput maka akan muncul tampilan seperti nomor 30.

- Pilih menu cetak lalu pilih formulir SPT dan klik formulir apa saja yang akan dicetak (1721-1, 1721, dan Daftar SSP).

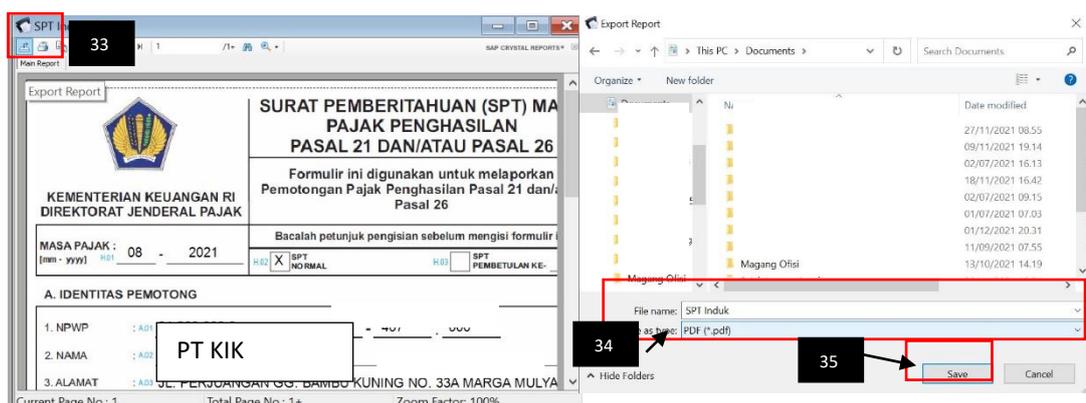
Gambar 3. 257 Mencetak SPT PPh Pasal 21



Pada Gambar 3.257 merupakan cara untuk mencetak formulir SPT PPh Masa Pasal 21 yang harus dilakukan yaitu memilih menu Cetak klik Formulir seperti gambar nomor 31 setelah itu akan muncul menu cetak SPT yang dibutuhkan pembimbing lapangan adalah formulir 1721, 1721-1, dan SSP lalu klik formulir yang akan dicetak.

- Setelah *file* terbuka lalu pilih menu *export report* untuk menyimpan formulir.

Gambar 3. 258 Export Formulir SPT



Pada Gambar 3.258 merupakan cara untuk menyimpan yang nantinya akan dicetak yaitu klik menu *Main Report* pada pojok kiri atas seperti nomor 33 yang nantinya akan diarahkan ke tempat penyimpanan laptop,

selanjutnya mengganti nama dan mengubah tipe *file* menjadi *pdf* seperti gambar nomor 34 setelah itu klik *Save* seperti gambar nomor 35.

3.3.1.20 PT ES

a) *Input e-SPT PPh Pasal 21*

Tugas melakukan *input* e-SPT PPh Pasal 21 dilakukan untuk beberapa perusahaan dengan periode yang sama yaitu Agustus 2021. Dokumen yang diperlukan saat melakukan *penginputan* e-SPT PPh Pasal 21 adalah *database* perusahaan terkait, Bukti Penerimaan Negara (BPN), dan dokumen terkait SPT Masa PPh Pasal 21 dari pembimbing lapangan. . Proses *input* e-SPT dilakukan untuk periode Agustus 2021 atas 4 pegawai tetap dan 46 pegawai tidak tetap. Berikut merupakan proses *penginputan* e-SPT PPh Pasal 21:

1. *Instal* aplikasi e-SPT PPh Pasal 21/26.

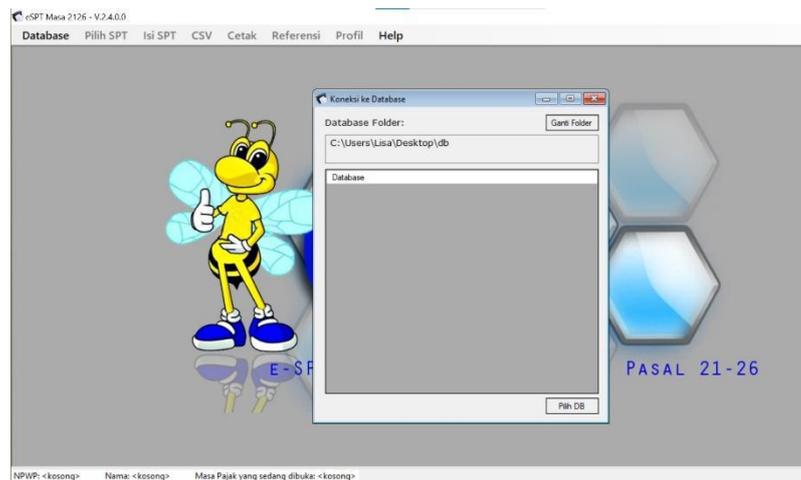
Gambar 3. 259 Aplikasi E-SPT PPh Pasal 21



Sumber: Dokumentasi Pribadi

2. Buka aplikasi e-SPT PPh Pasal 21/26.

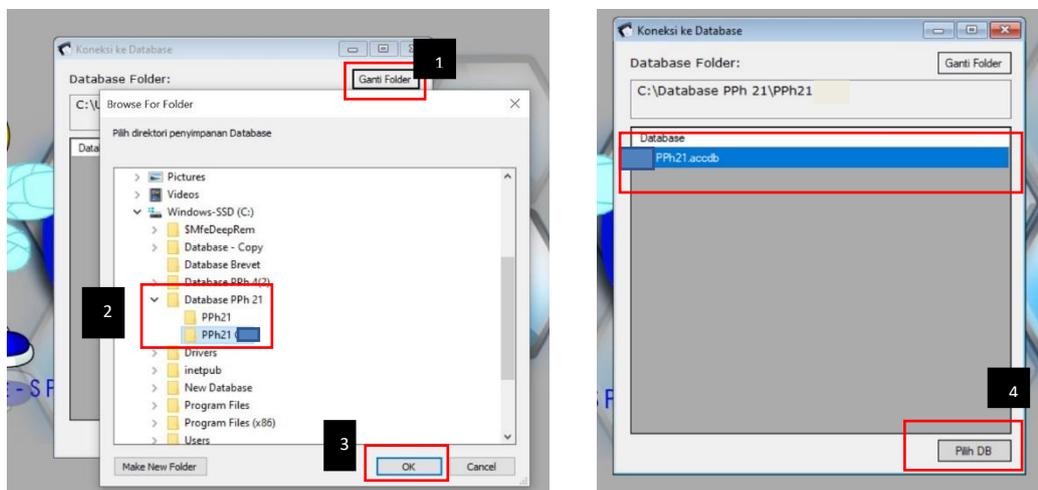
Gambar 3. 260 Halaman Awal Ketika Membuka E-SPT



Sumber: Dokumentasi Pribadi

3. Memilih *database* yang akan digunakan lalu klik *database* untuk membukanya dan melakukan *login database* dengan mengisi *username* dan *password*.

Gambar 3. 261 Membuka Database di E-SPT



Pada Gambar 3.261 merupakan cara untuk membuka *database* yang akan digunakan agar bisa melakukan *input* data pada e-SPT PPh Pasal 21. Jika *folder database* yang dipilih sudah sesuai format maka akan memiliki format *.accdb* maka langkah selanjutnya bisa klik Pilih DB. Jika *database* sudah berhasil terbuka maka langkah selanjutnya yaitu melakukan *login*.

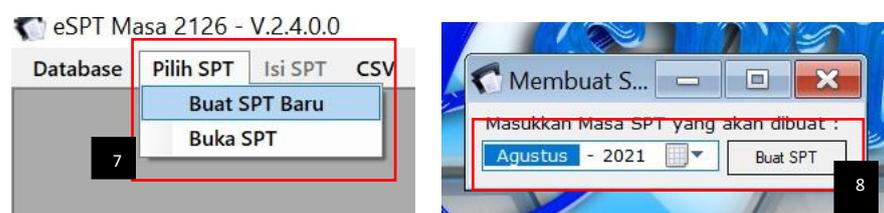
Gambar 3. 262 Login Pada E-SPT PPh Pasal 21



Pada Gambar 3.262 saat ingin melakukan *login* maka harus memasukan *username* yaitu administrator dan *password* yaitu 123 jika sudah lalu klik *Login*. Jika *login* berhasil maka akan keluar pemberitahuan jika *login* telah berhasil dan bisa klik OK.

4. Jika *database* sudah terbuka pilih SPT dan buat SPT baru dengan mengisi masa pajak yang diperlukan. Lalu klik Buat SPT.

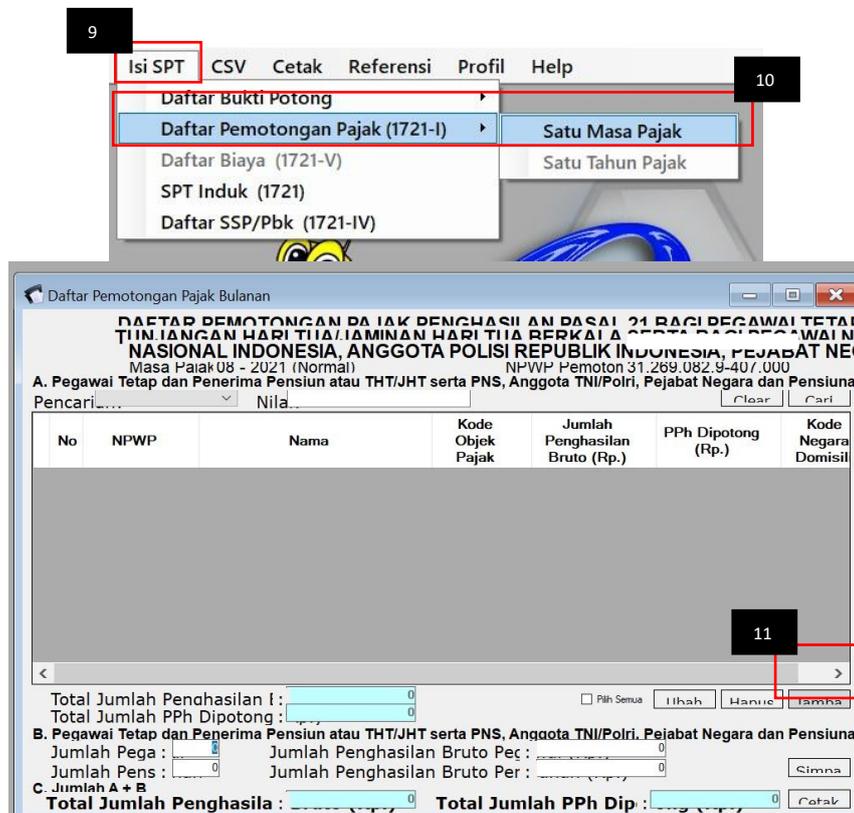
Gambar 3. 263 Membuat SPT Baru PT ES



Pada Gambar 3.224 merupakan langkah jika sebelumnya Wajib Pajak belum membuat SPT pada periode tertentu yaitu dapat dengan memilih Pilih SPT dan pilih Buat SPT Baru. Jika sudah memilih Buat SPT Baru langkah selanjutnya yaitu memilih Masa SPT yang akan dibuat untuk PT ES masa yang akan dibuat adalah masa Agustus 2021 jika sudah klik Buat SPT.

5. Pilih isi SPT lalu klik daftar pemotongan pajak (1721-1) kemudian pilih Satu Masa Pajak. Jika ingin melakukan *input* data transaksi klik Tambah untuk melakukan pengisian penghasilan bagi pegawai tetap.

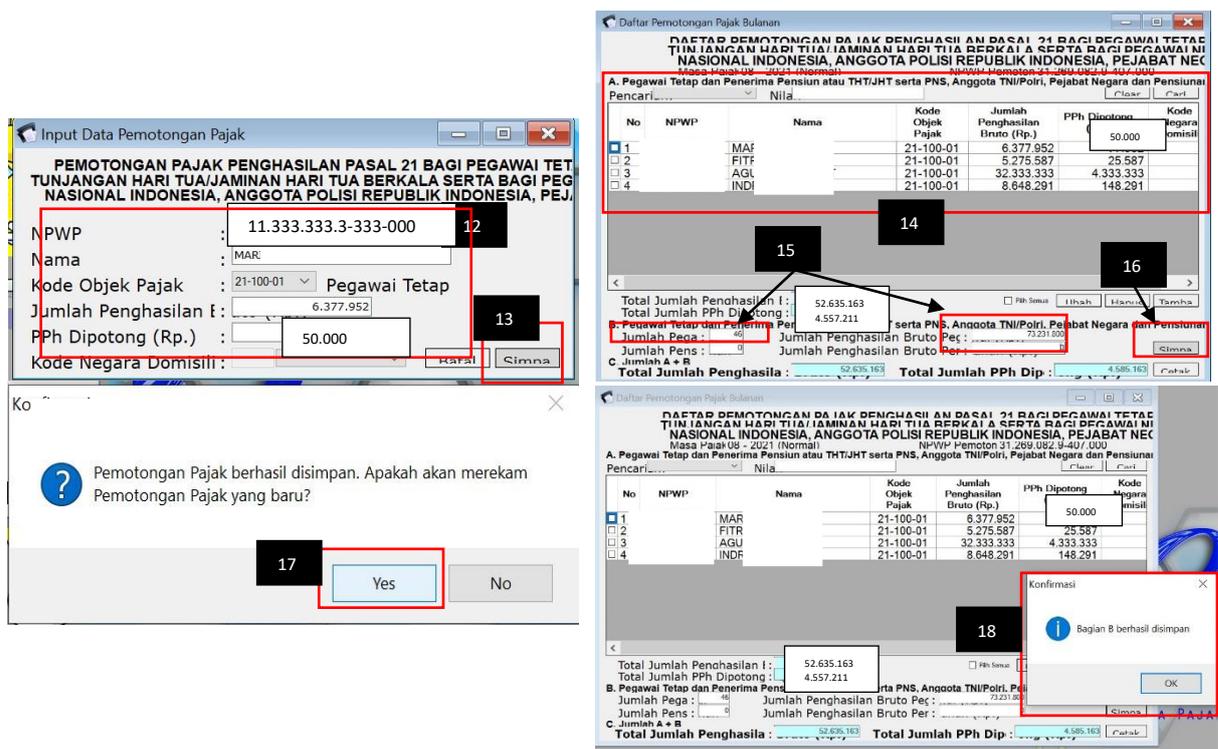
Gambar 3. 264 Menginput Daftar Pemotongan PT ES



Pada Gambar 3.264 akan dilakukan penginputan Daftar Pemotongan selama Satu Masa Pajak maka yang harus dilakukan adalah pilih menu Isi SPT seperti nomor 9, lalu pilih Daftar Pemotongan Pajak (1721-I) Satu Masa Pajak seperti nomor 10. Lalu akan muncul tampilan Daftar Pemotongan Pajak Bulanan untuk mengisi data pegawai tetap yang penghasilannya diatas PTKP maka pilih Tambah seperti nomor 11.

- Isikan data nomor NPWP, nama, kode objek pajak, jumlah penghasilan bruto, dan PPh dipotong lalu klik simpan. Pastikan semua data pegawai tetap sudah terisi sesuai dengan jumlah pegawai tetap. Isi juga daftar pegawai tetap yang penghasilannya tidak lebih PTKP dengan nilai pada kolom jumlah pegawai dan jumlah penghasilan bruto lalu klik simpan.

Gambar 3. 265 Mengisi Data Daftar Pemotongan Pajak



Pada Gambar 3.265 merupakan cara untuk mengisi Daftar Pemotongan berdasarkan data yang sudah diberikan pembimbing lapangan. Bagi pegawai tetap yang memiliki penghasilan diatas PTKP maka harus mengisi NPWP yaitu 11.333.333.3-333-000, nama yaitu Mar, kode pajak 21-100-01 yang menandakan pegawai tetap, jumlah penghasilan bruto yaitu Rp 6.377.952, dan PPh yang dipotong Rp 50.000. Setelah itu bisa terus mengisi daftar pemotongan bagi Wajib Pajak berpenghasilan diatas PTKP hingga 4 pegawai, jika sudah maka klik Simpan dan akan muncul semua pegawai tetap penghasilan diatas PTKP seperti nomor 14. Bagi pegawai tetap penghasilan di bawah PTKP maka bisa mengisi jumlah pegawai sebanyak 46 dan jumlah penghasilan bruto sebesar Rp 73.231.800 seperti nomor 15. Lalu klik Simpan untuk menyimpan perubahan karena telah mengisi bagian pegawai tetap di bawah PTKP. Jika muncul kotak notifikasi Bagian B Berhasil disimpan maka klik OK.

7. Setelah proses pengisian SPT selesai selanjutnya pilih menu isi SPT pilih SPT Induk (1721) maka akan menampilkan jumlah pajak terutang.

Gambar 3. 266 SPT Induk PT ES

NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp.)	JUMLAH PAJAK PENGHASILAN (Rp.)
1.	PEGAWAI TETAP	21-100-01	50	125.866.963	4.585.163
2.	PENERIMA PENSIIUN BERKALA	21-100-02	0	0	0
3.	PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU TENAGA KERJA LEPAS	21-100-03	0	0	0
4.	BUKAN PEGAWAI:				
4a.	DISTRIBUTOR MULTILEVEL MARKETING (MLM)	21-100-04	0	0	0
4b.	PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI	21-100-05	0	0	0
4c.	PENJAJA BARANG DAGANGAN	21-100-06	0	0	0
4d.	TENAGA AHLI	21-100-07	0	0	0
4e.	BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN	21-100-08	0	0	0
4f.	BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG TIDAK BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN	21-100-09	0	0	0
5.	ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ATAU DEWAN PENGAWAS YANG TIDAK MERANGKAP SEBAGAI PEGAWAI TETAP	21-100-10	0	0	0
6.	MANTAN PEGAWAI YANG MENERIMA JASA PRODUKSI, TANTIEM, BONUS ATAU IMBALAN LAIN	21-100-11	0	0	0
7.	PEGAWAI YANG MELAKUKAN PENARIKAN DANA PENSIIUN	21-100-12	0	0	0
8.	PESERTA KEGIATAN	21-100-13	0	0	0
9.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 TIDAK FINAL LAINNYA	21-100-99	0	0	0
10.	PEGAWAI PEMBERI JASA/PESERTA KEGIATAN/PENERIMA PENSIIUN BERKALA SEBAGAI WAJIB PAJAK LUAR NEGERI	27-100-99	0	0	0
11.	JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 10)		50	125.866.963	4.557.211

8. Pada tab SPT Induk pilih “D. Lampiran *Check List* yang akan dilampirkan” dan “E. Pernyataan dan TTd Pemotong” lalu isi kolom tempat sesuai daerah lalu klik simpan dan cetak.

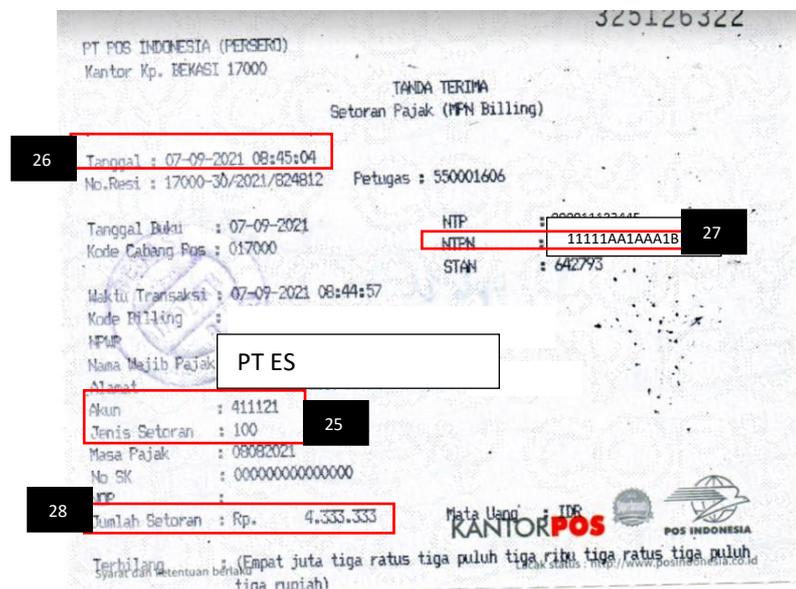
Gambar 3. 267 Induk PT ES

Pada Gambar 3.267 bagian SPT Induk yang harus dilakukan adalah mengisi bagian D. Lampiran nomor 20 dengan memberikan *checklist*

seperti nomor 21 yang diberi warna biru diantaranya formulir 1721-1 sebanyak 1 lembar dan SPP yang diberikan pembimbing lapangan sebanyak 2 lembar. Mengisi bagian E. Pernyataan dan TTd Pemotong seperti nomor 22 pada bagian tempat diisi Jakarta sesuai dengan informasi yang diberikan pembimbing lapangan seperti nomor 23. Setelah selesai klik Simpan seperti nomor 24.

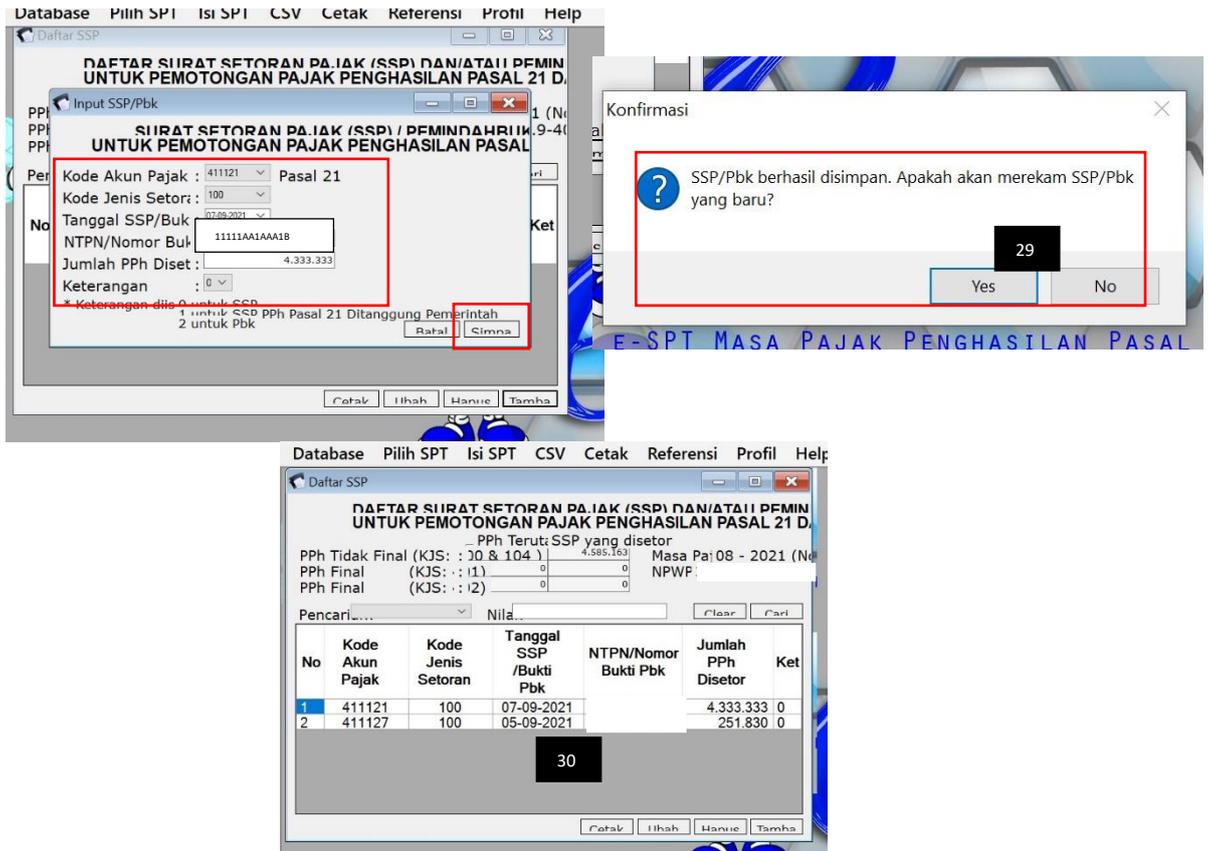
9. Selanjutnya pajak yang terutang harus dibayarkan terlebih dahulu untuk memperoleh nomor NTPN yang dapat dilihat dari Bukti Penerimaan Negara yang diperoleh dari pembimbing lapangan. Setelah mendapatkan nomor NTPN langkah berikutnya yaitu memasukan data tersebut ke dalam daftar SSP dengan pilih menu isi SPT lalu pilih daftar SSP setelah selesai pilih simpan dan kembali ke tampilan awal.

Gambar 3. 268 Bukti Penerimaan Negara PT ES



Sumber: Dokumentasi Perusahaan

Gambar 3. 269 Mengisi Daftar SSP PT ES



Pada Gambar 3.269 mengisi daftar SSP seperti Bukti Penerimaan Negara yang diperoleh dari pembimbing lapangan yaitu kode akun pajak 411121 yang menandakan PPh Pasal 21 dan kode jenis setoran 100 seperti nomor 25, Tanggal SSP yaitu 7 September 2021 seperti nomor 26, NTPN 11111AA1AAA1B seperti nomor 27, dan Jumlah PPh Disetor Rp 4.333.333 seperti nomor 28 jika sudah klik Simpan. Jika ingin melanjutkan menginput SSP maka klik Yes seperti nomor

29. Saat semua SSP yang dibutuhkan sudah *terinput* maka akan muncul tampilan seperti nomor 30.
10. Pilih menu cetak lalu pilih formulir SPT dan klik formulir apa saja yang akan dicetak (1721-1, 1721, dan Daftar SSP).

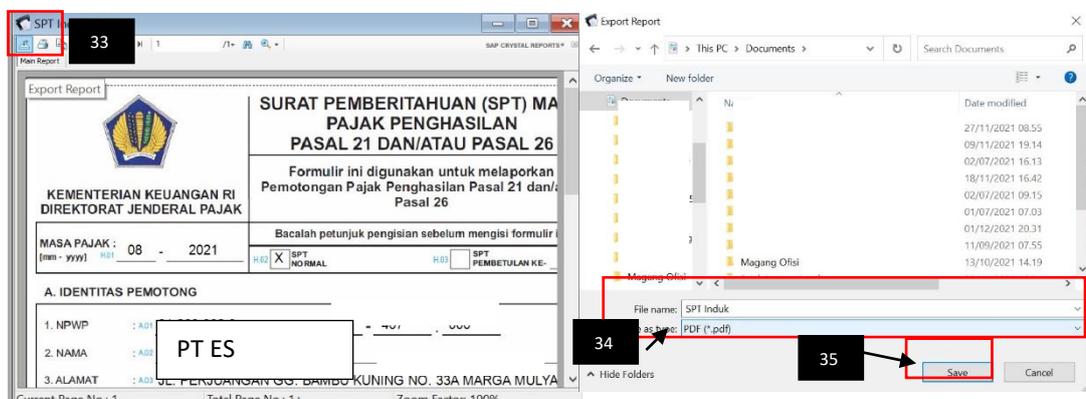
Gambar 3. 270 Mencetak SPT PPh Pasal 21



Pada Gambar 3.270 merupakan cara untuk mencetak formulir SPT PPh Masa Pasal 21 yang harus dilakukan yaitu memilih menu Cetak klik Formulir seperti gambar nomor 31 setelah itu akan muncul menu cetak SPT yang dibutuhkan pembimbing lapangan adalah formulir 1721, 1721-1, dan SSP lalu klik formulir yang akan dicetak.

11. Setelah *file* terbuka lalu pilih menu *export report* untuk menyimpan formulir.

Gambar 3. 271 Export Formulir SPT



Pada Gambar 3.271 merupakan cara untuk menyimpan yang nantinya akan dicetak yaitu klik menu *Main Report* pada pojok kiri atas seperti nomor 33 yang nantinya akan diarahkan ke tempat penyimpanan laptop, selanjutnya mengganti nama dan mengubah tipe *file* menjadi *pdf* seperti gambar nomor 34 setelah itu klik *Save* seperti gambar nomor 35.

3.3.2 Kendala dalam Pelaksanaan Kerja Magang

Pada saat proses cetak dari e-SPT *form* tidak dapat diunduh terutama pada *form* 1721-1 dan SSP. Ketidaklengkapan data dalam melakukan rekapitulasi data misalnya dalam melakukan rekapitulasi SPT Masa PPN tidak terdapat Bukti Penerimaan Negara yang dibutuhkan dalam melakukan rekapitulasi. Selain itu pada saat ingin melakukan rekapitulasi SPT Masa selama 1 tahun atau 6 bulan terdapat data pada satu masa yang tidak ada misalnya pada saat melakukan rekapitulasi SPT PPh Final tidak terdapat data sehubungan dokumen terkait Bukti Penerimaan Elektronik, Bukti Penerimaan Negara, dokumen yang terkait dengan SPT PPh dan Pasal 4 Ayat 2 pada periode Januari.

3.3.3 Solusi atas Kendala dalam Pelaksanaan Kerja Magang

Solusi yang dilakukan atas kendala tersebut yaitu melakukan *repair* atau *reinstall* pada aplikasi e-SPT PPh Pasal 21. Lalu atas kendala mengenai rekapitulasi yaitu meminta dokumen yang kurang kepada pembimbing lapangan.